

# Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani

## TESIS

Diajukan untuk Melengkapi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Magister pada Program Studi  
Hukum Islam/ Konsentrasi Fiqih



Oleh:

**SETYABUDI DARYONO, S.Pd.I**

NIM: 0907 S2 888

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1432 / 2011**



## ABSTRAK

Setyabudi Daryono, S.Pd.I, "*Konsep Struktur Khilafah Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani.*" Tesis Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2011.

Kata kunci : Struktur Khilafah

Agama Islam adalah sebuah agama sempurna yang telah memberikan informasi yang komprehensif kepada umat manusia sebagai pedoman dalam menapaki kehidupan manusia agar selamat dunia dan akhirat kelak. Wujud dari kesempurnaannya, Islam mengatur perkara mu'amalah diantaranya sistem pemerintahan, cakupannya adalah tentang bentuk negara dan sekaligus struktur pemerintahannya.

Yang mendorong penulis meneliti masalah stuktur Negara Islam adalah adanya kenyataan bahwa berbagai sistem pemerintahan yang ada didunia saat ini sangat jauh dari sistem pemerintahan Islam, baik dari segi bentuk maupun isinya. Dari segi isinya, hal itu sangat jelas bagi kaum Muslim, yakni bahwa semua sistem pemerintahan kontemporer saat ini tidak diambil dari al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Akan tetapi, yang menimbulkan kebingungan dalam diri kaum Muslim adalah dugaan mereka, bahwa sistem pemerintahan dalam Islam dilihat dari segi strukturnya tidak berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan kontemporer.

Urgennya penelitian ini dilakukan, agar umat Islam dapat mengetahui dan memahami bahwa Islam telah memiliki aturan yang berkenaan dengan struktur negara dalam Islam. Setelah memahami, diharapkan umat Islam tidak lagi mengambil dan menerapkan sistem dan struktur negara yang tidak berasal dari Islam. Pengambilan dan penerapan struktur negara Islam ini sangat menentukan terlaksananya hukum-hukum Islam secara keseluruhan.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis isi yaitu menggali isi dan aksioma yang terdapat dalam teks-teks kitab *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam karya Taqiyuddin Al-Nabhani*. Akhirnya penulis memperoleh hasil temuan dari penelitian, bahwa struktur yang ditetapkan oleh Taqiyuddin al-Nabhani yaitu Khalifah, Mu'awin Tafwidl, Mu'awin Tanfidz, Amir Jihad, Wali, Qadla', Jihazul al-Idari, dan Majelis Ummat, memiliki dalil argumentasi yang disandarkan kepada fi'il Rasulullah SAW.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	
NOTA DINAS .....	
HALAMAN PENGESAHAN .....	
MOTTO .....	
KATA PENGANTAR .....	
ABSTRAK .....	
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	
DAFTAR ISI .....	
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	20
C. Kajian Pustaka.....	21
D. Kerangka Teoritis .....	23
E. Metode Penelitian.....	29
F. Sistematika Pembahasan.....	31
<b>BAB II. IDENTIFIKASI BIOGRAFI TAQIYUDDIN AL-NABHANI .....</b>	<b>33</b>
A. Kehidupan Taqiyuddin Al-Nabhani dan Karya-Karyanya.....	33
1. Silsilah dan Pendidikan Taqiyuddin Al-Nabhani .....	33
2. Aktifitas Politik Taqiyuddin Al-Nabhani .....	37
3. Karya-Karya Taqiyuddin Al-Nabhani.....	43

B. Situasi Sosial Politik Pada Masa Taqiyuddin Al-Nabhani .....	45
C. Pemikiran-Pemikiran Taqiyuddin Al-Nabhani .....	55
<b>BAB III. LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS KEKHILAFAHAN DALAM SISTEM</b>	
<b>PEMERINTAHAN ISLAM.....</b>	<b>62</b>
A. Pengertian Khilafah .....	62
B. Dalil-Dalil Khilafah .....	67
C. Bentuk Pemerintahan Islam.....	69
D. Pilar-Pilar Pemerintahan Islam.....	78
<b>BAB IV. TESIS TENTANG STRUKTUR KEKHILAFAHAN TAQIYUDDIN AL-NABHANI</b>	
.....	<b>91</b>
A. Khalifah.....	91
B. Mu`awin Tafwidh.....	107
C. Mu`awin Tanfidz .....	122
D. Amir Jihad.....	127
E. Wali .....	142
F. Al-Qadla.....	150
G. Jihaz Al-Idari .....	154
H. Majelis Ummat .....	160
I. Analisis .....	179
<b>V. KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>185</b>
A. Kesimpulan .....	185
B. Saran-Saran .....	187
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	

**LAMPIRAN-LAMPIRAN.....**

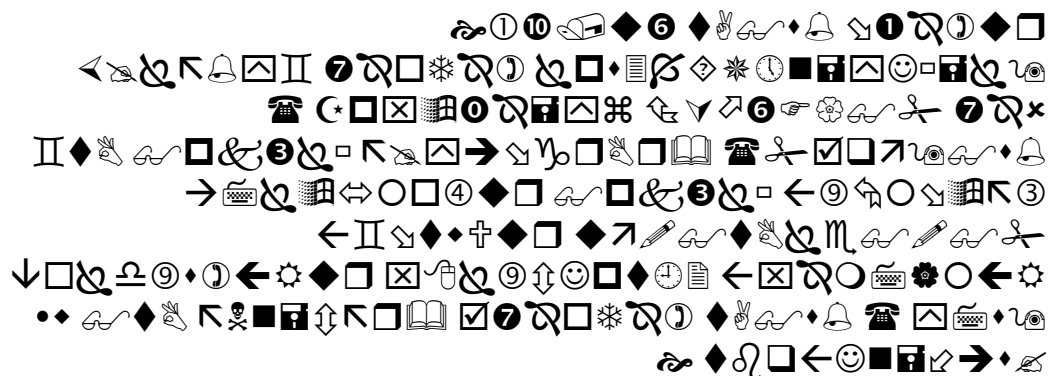
**RIWAYAT HIDUP PENULIS .....**

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah agama yang sempurna<sup>1</sup>. Allah telah menurunkan Islam sejak empat belas abad yang silam kepada Nabi Muhammad saw. untuk memberikan kepada manusia penyelesaian secara menyeluruh atas semua permasalahan yang sedang maupun akan dihadapi oleh manusia. Diantaranya adalah penjelasan Allah tentang masalah Khilafah. Allah telah berfirman:



*"Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."<sup>2</sup>*

<sup>1</sup>Arief B. Iskandar, *Materi Dasar Islam; Islam mulai akar hingga daun*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), hlm. 105. Sempurna dalam arti mengatur seluruh interaksi yang terjadi antara manusia dengan Allah berkenaan tentang ibadah, manusia dengan sesama manusia berkenaan tentang muamalah termasuk di dalamnya tentang masalah pemerintahan, manusia dengan dirinya sendiri, berkenaan akhlak, makanan, minuman.

<sup>2</sup>QS. Al-Baqarah (2): 30

Dalam ayat ini Allah menggunakan kata khalifah untuk menyebut manusia pertama yaitu Nabi Adam, untuk mengemban amanah, perintah, dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah di muka bumi. Ayat ini menjadi landasan wajibnya mengangkat imam dan khalifah yang didengar dan ditaati, untuk menyatukan kalimat, dan menerapkan hukum-hukum khalifah.<sup>3</sup>

Ibnu Katsir menjelaskan ayat ini : “Yakni suatu kaum yang sebagiannya menggantikan sebagian yang lain silih berganti, abad demi abad, generasi demi generasi sebagaimana pengertian yang terkandung dalam firman-Nya.<sup>4</sup>



“Dan Dia lah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebahagian kamu atas sebahagian (yang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu amat cepat siksaan-Nya dan Sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.<sup>5</sup>

Allah dalam ayat ini menjelaskan bahwa manusia dijadikan penguasa-penguasa di bumi dan meninggikan sebagian atas sebagian yang lain, untuk menguji tentang apa yang telah diberikan Allah atasnya. Dan Allah menggunakan kata khalaifa, yang berarti para penguasa yang tunduk pada apa yang Allah turunkan yaitu syari’at Islam.

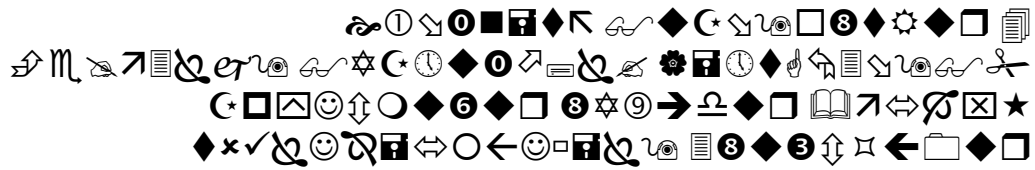
Allah menjelaskan kesempurnaan Islam yang termaktub didalam al-Qur’an al-Karim

<sup>3</sup> Al-Qurtubi, *Al-Jami’ lil Ahkam Al-Qur’an*, Vol. 1, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm.182

<sup>4</sup> Al-Imam Abu Al-Fida Isma’il Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Penerjemah. Bahrin Abu Bakar, L.C, (Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2000), hlm. 358-359

<sup>5</sup> QS. Al-An’ am (6): 165





*Dan kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.<sup>6</sup>*

Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk menjelaskan segala sesuatu (*li kulli syai'in*) tidak ada yang membatasi, sehingga setiap permasalahan yang terjadi di dunia ini semuanya ada penjelasannya. Allah menurunkan aturannya untuk menjadi petunjuk bagi manusia agar manusia tidak senantiasa memperturutkan hawa nafsunya, sekaligus sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang taat, patuh dan berserah diri.

Wujud dari kesempurnaannya, Islam tidak hanya mengatur masalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Islam juga mengatur dan menyelesaikan permasalahan diseputar hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan sesamanya<sup>7</sup>.

Hubungan manusia dengan penciptanya mencakup dalam perkara aqidah dan ibadah. Hubungann manusia dengan dirinya tercakup dalam akhlak, makanan, minuman dan pakaian. Sedangkan wujud dari aturan Islam yang mengatur interaksi sosial, tercakup dalam muamalah dan uqubat<sup>8</sup>.

<sup>6</sup>QS. Al-Nahl (16): 89

<sup>7</sup>Taqiuddin al-Nabhani, *Nizham al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), hlm. 69. Lihat juga Taqiuddin al-Nabhani, *Nizham al-Islam*, pentj: Abu Amin dkk, (Bogor: Pustaka Thariqul 'Izzah, 2003), Cet. 3, hlm. 99

<sup>8</sup>*Ibid*, hlm.69

Dalam perkara mu'amalah mencakup sistem pemerintahan, sistem ekonomi, sistem sosial, sistem pergaulan, sistem pendidikan dan yang lainnya.<sup>9</sup> Dalam sistem pemerintahan yang termasuk dalam cakupannya adalah tentang bentuk negara dan sekaligus struktur pemerintahannya.

Banyak nash syara', baik al-Qur'an maupun al-Sunah yang memerintahkan kaum muslimin untuk merealisasikan adanya Negara Islam dalam bentuk khilafah, antara lain<sup>10</sup> :



*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.*<sup>11</sup>

Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, dan Rasul serta pemimpin, hukum ketaatan tersebut adalah wajib. Baik Allah maupun Rasul, keberadaannya sama-sama pasti, karena itu hukum menaatinya adalah pasti; tidak berubah karena ketiadaan objek yang ditaati. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk menaati, hukum untuk mewujudkan objek yang ditaati menjadi pasti atau wajib. Sebab, tidak pernah ada hukum wajib diperintahkan atas sesuatu yang keberadaannya tidak ada<sup>12</sup>.

<sup>9</sup> Arief B. Iskandar, *op.cit.*, hlm. 105. Lihat, Abu al-A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Pentj.Drs. Asep Hikmat, (Bandung: Mizan, 1995), cet. 5. Hlm. 186-187. Lihat Nashir Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhal Al-Wasith, Lidarasati al Syari'ah al-Islamiyah wa al-Fiqh wa al-Tasyri'*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqah, t.t), hlm. 39

<sup>10</sup>Dr.Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, hlm. 625. Lihat juga MR Kumia, *Menjadi Pembela Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2005), cet. 5, hlm. 167

<sup>11</sup>QS. Al-Nisa' (4): 59

<sup>12</sup>Al-Khalidi, *Qawaid Nizham Al-Hukmi*, (Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983), hlm. 239

Perintah menaati penguasa menunjukkan perintah untuk memiliki pemerintahan. Sebab Allah swt. tidak memerintahkan taat pada sesuatu yang tidak ada. Jadi, adanya penguasa dalam suatu negara merupakan keharusan. Dan perintah Allah untuk menaati ulil ‘amri adalah juga perintah Allah untuk mengangkat mereka<sup>13</sup>.

Allah mewajibkan umat Islam untuk menghukumi setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan mereka dengan hukum-hukum yang diturunkan-Nya<sup>14</sup>. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengurus urusan kaum muslimin dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya. Allah berfirman<sup>15</sup>:



*“Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.”*

Allah mewajibkan seluruh umat Islam untuk senantiasa menghukumi setiap perkara dengan mengikuti hukum yang telah diturunkan-Nya, sekaligus Allah melarang manusia mengikuti hawa nafsunya dalam menyelesaikan perkara.

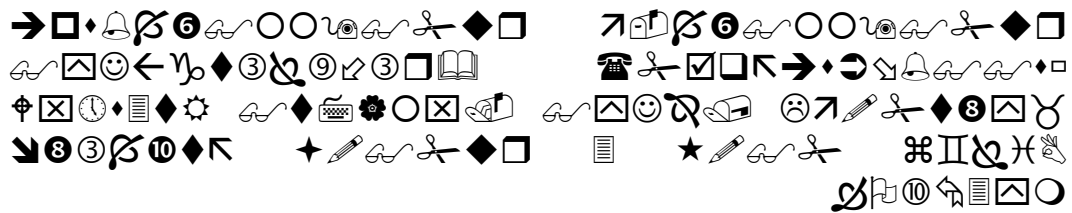
Disamping ayat di atas, juga ayat lain yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri<sup>16</sup>:

<sup>13</sup>MR Kurnia, *op.cit.*, hlm. 167

<sup>14</sup>*ibid.*, hlm. 165

<sup>15</sup>QS. Al-Maidah (5): 48

<sup>16</sup> QS. Al-Maidah (5): 38



*“ Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*

Allah menjelaskan bahwa orang yang mencuri harus dipotong tangannya, baik yang mencuri laki-laki maupun perempuan. Hukuman ini tidak dapat diterapkan kecuali oleh penguasa yang berhak untuk melaksanakannya, penguasa tersebut adalah khilafah.

Hukum cambuk atas orang yang berzina (*ghayr al-muhshan*)<sup>17</sup>, firman Allah:



*“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.”*

<sup>17</sup>QS. An-Nuur (24): 2

Hukum Islam yang dijelaskan dalam ayat ini adalah berkenaan sanksi untuk para pezina. Seratus kali dera atau cambukan adalah sanksi bagi pezina yang belum pernah menikah, sedangkan bagi pezina yang sudah pernah menikah sanksinya adalah dirajam. Yaitu dibenamkan kedalam tanah seluruh tubuhnya kecuali kepalanya, dilempari batu sampai meninggal dunia. Semua sanksi ini dilaksanakan ditempat keramaian dan disaksikan oleh banyak orang.

Selain itu masih banyak lagi hukum-hukum Islam yang tidak mungkin dilaksanakan kecuali dengan adanya Negara Islam yaitu Khilafah. Hukum adanya Negara Islam yaitu Khilafah adalah wajib, sebagai bagian dari hukum wajibnya melaksanakan *hudud* tersebut.

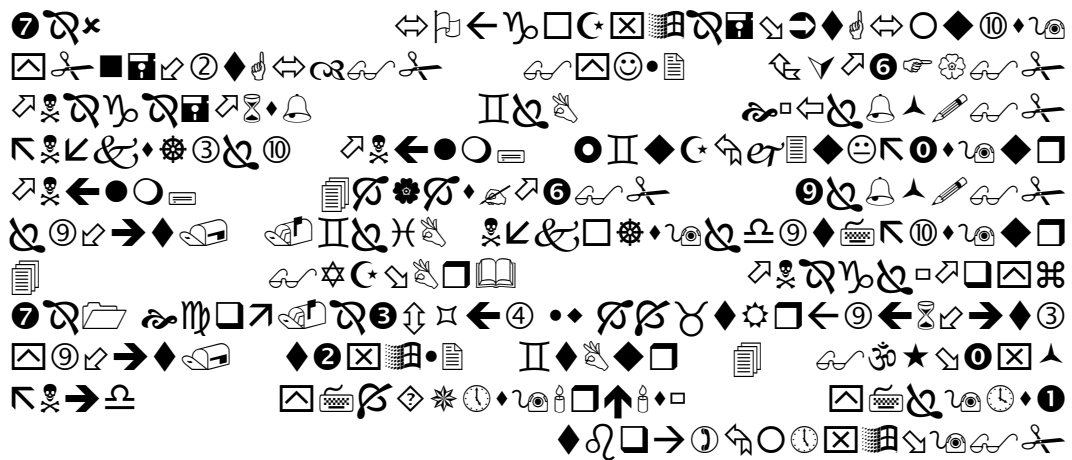
مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Suatu kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib pula.”<sup>18</sup>*

Suatu kewajiban tidak terlaksana dengan sempurna tanpa adanya sesuatu yang dapat terlaksananya kewajiban-kewajiban tersebut. Hukum sesuatu itu adalah wajib, karena tanpa ada sesuatu yang dimaksud, kewajiban tidak terlaksana dengan sempurna bahkan sama sekali. Allah menjelaskan dalam al-Qur'an, yang dengan tegas menjadi janji yang pasti dari Allah kepada kaum muslimin.



<sup>18</sup>Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), cet. 1, hlm. 229



“ Dan Allah Telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana dia Telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang Telah diridhai-Nya untuk mereka, dan dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.”<sup>19</sup>

Allah berjanji kepada umat Islam yang beriman dan beramal saleh, menjadikan mereka berkuasa di bumi. Allah menggunakan kata khalafa untuk menyebut berkuasa di bumi, seperti orang-orang sebelumnya.

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, nas hadits juga menjelaskan tentang wajib adanya Negara Islam yang menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya. Rasulullah saw.

حدثنا ابراهيم مسلم حدثني زهير بن حرب .

, عن ابي هريرة ,

عليه . م جنة يقاتل من وراءه ويتقى به.

<sup>19</sup>QS. An-Nuur (24): 55

*“Sesungguhnya imam adalah laksana perisai, dimana (orang-orang) akan berperang di belakangnya dan dia akan dijadikan pelindung.”<sup>20</sup>*

Hadits ini memberikan informasi tentang peranan imam sebagai pemimpin. Imam adalah pemimpin yang berada di garis terdepan membela, mengayomi, memelihara dan mengurus urusan rakyatnya. Terdapat pula informasi yang berisi pujian, yaitu “imam adalah laksana perisai”. Jika adanya pujian tersebut membawa akibat tegaknya hukum Islam dan sebaliknya apabila yang dipuji tersebut tidak ada, hukum Islam tidak akan tegak. Pujian tersebut merupakan indikasi yang tegas, bahwa “sesuatu yang dipuji tersebut” hukumnya adalah wajib<sup>21</sup>. Sesuatu yang dipuji itu tidak lain adalah adanya Negara Islam yaitu Khilafah, yang akan menjadi “perisai” bagi kaum muslimin.<sup>22</sup>

يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. :  
 أبا هريرة خمس سنين. فسمعتهم  
 عيل تسوسهم  
 الانبياء. كلما هلك نبي. وانه لا نبي بعدي.  
 فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الأول فالأول. وأعطوهم حقهم.  
 نلهم عما استرعا هم.

Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hazim yang mengatakan: “Aku menemui Abu Hurairah selama lima tahun dan mendengar dia berkata bahwa Nabi bersabda: “Adalah para nabi yang mengurus bani Israel. Bila wafat seorang nabi diutuslah nabi berikutnya, tetapi tidak ada lagi nabi setelahku. Akan ada para khalifah dan akan banyak. Mereka bertanya: ‘Apa yang engkau perintahkan?’ Nabi menjawab: Penuhilah bai’at yang pertama dan pertama. Penuhilah hak-hak mereka. Allah akan meminta pertanggungjawaban terhadap apa-apa yang menjadi kewajiban mereka.”<sup>23</sup>

<sup>20</sup>Muslim, *Shahih Muslim* juz 3, (Qahirah: Dar al-Hadits, 1991), hlm. 1471, Hadits no. 1841, Kitab Imarah, Bab al-Imamu Junnatun

<sup>21</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *Al-Sakhsyah Al-Islamiah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), cet. 5, hlm. 14-15

<sup>22</sup>Hafidz Abdurrahman, *Op.cit.*, hlm.229

<sup>23</sup>Muslim, *op.cit.*, hadits no. 1842, Kitab Imarah, Bab Wujub al-Wafa’ ..., hlm. 1471

Hadis ini menjelaskan bahwa setelah diutusnya nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, yang akan mengurus urusan umat Islam adalah para khalifah. Nabi menjelaskan bahwa khalifah yang ditaati adalah yang dibaiat yang pertama artinya umat Islam tidak diperbolehkan memiliki lebih dari satu.

Abdullah bin Abbas meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

حدثنا حسن بن الربيع. حدثنا حماد بن زيد عن الجعد,  
 , يرويه. : صلي الله عليه وسلم  
 اميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فانه من فارق الجماعة شبرا فما  
 مات ميتة جاهلية

*"Bila seseorang melihat sesuatu yang tidak disukai dari amirnya maka bersabarlah. Barangsiapa memisahkan diri dari penguasa sejenkalpun dan ia mati maka matinya seperti mati jahiliyah."*<sup>24</sup>

Hadits-hadits ini menunjukkan bahwa keberadaan imam dalam masyarakat sangat penting, karena dia yang mengurus urusan kaum muslimin dalam. Rasulullah saw. menjelaskan bahwa para imamlah yang memimpin kaum muslimin dalam berbagai dimensi kehidupan. Karena itu, bersatu dalam kehidupan masyarakat di bawah kepemimpinan imam adalah suatu yang diharuskan dalam melaksanakan syari'at Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Adapun dalil berupa Ijmak Sahabat, para Sahabat (semoga Allah meridhai mereka) telah bersepakat atas keharusan mengangkat seorang khalifah (pengganti) Rasulullah saw. setelah wafat. Mereka telah bersepakat untuk mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah. Sesungguhnya tampak jelas penegasan Ijmak Sahabat terhadap

<sup>24</sup>Muslim, *op.cit.*, hadits no. 1849, Kitab Imarah, Bab Wujub al-Wafa' ..., hlm. 1477



kewajiban pengangkatan khalifah dari sikap mereka yang menunda pemakaman jenazah Rasulullah saw.<sup>25</sup>

Kaum Muhajirin dan Anshar lebih mengutamakan musyawarah untuk mencari pengganti kepemimpinan Rasulullah, dan *Ahl al-bait* mengutamakan penyelenggaraan jenazah Nabi. Para Sahabat, yang berkewajiban mengurus jenazah Rasul saw. dan memakamkannya, ternyata sebagian dari mereka lebih mengutamakan mengangkat khalifah dan menunda pemakaman jenazah Nabi; sebagian yang lain membiarkan penundaan itu; mereka sama-sama ikut serta dalam penundaan pengebumian jenazah Rasul saw. Sampai dua malam. Padahal mereka mampu mengingkarinya dan mampu memakamkan jenazah Rasulullah saw. Wafat pada waktu dhuha hari Senin dan belum dimakamkan selama malam Selasa hingga Selasa siang saat Abu Bakar dibaiat. Kemudian jenazah Rasul dimakamkan pada tengah malam, malam Rabu. Jadi, pemakaman jenazah Rasul saw. itu ditunda selama dua malam, dan Abu Bakar dibaiat terlebih dulu sebelum penguburan jenazah Rasul saw.<sup>26</sup>

Dengan demikian, realitas tersebut merupakan Ijmak Sahabat yang menunjukkan keharusan untuk mengutamakan mengangkat khalifah. Hal itu tidak akan terjadi kecuali bahwa mengangkat khalifah lebih wajib daripada memakamkan jenazah. Para Sahabat seluruhnya juga telah berijmak sepanjang kehidupan mereka mengenai kewajiban mengangkat khalifah. Meski mereka berbeda pendapat mengenai seseorang yang dipilih sebagai khalifah, mereka tidak berbeda pendapat sama sekali atas kewajiban mengangkat

---

<sup>25</sup> Ibnu Khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun jilid 1*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyyah, t.th), hlm. 202

<sup>26</sup> MR Kumia, *op.cit.*, hlm. 107-108

khalifah, baik ketika Nabi wafat maupun saat Khulafaur Rasyidin wafat. Walhasil, Ijmak Sahabat ini merupakan dalil yang jelas dan kuat atas kewajiban mengangkat khalifah.<sup>27</sup>

Berbagai sumber hukum Islam telah menunjukkan bahwa menegakkan Negara Islam dalam sistem kekhalifahan merupakan kewajiban dari Allah swt. atas seluruh kaum muslimin.

Bahkan semua ulama sepakat mengenai kewajiban mengangkat dan menegakkan Negara Islam yaitu Khilafah, jika institusi tersebut tidak ada, baik dari kalangan Ahlu al-Sunah wa al-Jamaah, Syi'ah, Khawarij maupun Mu'tazilah. Semuanya berpendapat, bahwa umat ini harus mempunyai seorang imam dan hukum mengangkatnya adalah wajib<sup>28</sup>.

Akan tetapi, pada abad 18 paradigma pemikiran politik dari para pemikir Islam mengalami perubahan seiring dengan perkembangan politik dunia Islam yang mengalami kemunduran. Pada masa ini muncul keinginan untuk mengganti konsep politik Islam sistem negara kesatuan (khilafah) dengan konsep politik Barat sistem negara bangsa (*nation state*). Perubahan pemikiran politik terjadi karena upaya responsif para pemikir Islam dalam menjawab problema yang berkembang di dunia Islam. Ketika itu, kemunduran politik disebabkan oleh disintegrasi politik dengan melemahnya otoritas pemerintahan pusat dan munculnya penguasa semi otonomi di berbagai daerah, disertai dengan terjadinya dislokasi sosial, memburuknya situasi ekonomi akibat persaingan

---

<sup>27</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam*, (Beirut: Dar-Al-Ummah, 1990), hlm. 38-39

<sup>28</sup> Syeikh Al-Islam Taqiyuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdu Al-Halim bin Abdussalam bin Taimiyah, *al-Siyasah al-Syari'ah*, (Beirut: Dar Al-Fikr Al-Lubnani, 1992), hlm. 161-162. Lihat Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Hubaib al-Bashari Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 5. Lihat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Baari, Syarah Shahih Al-Bukhari*, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), jilid VIII, hlm. 24

dagang dengan negara-negara Eropa, serta merosotnya spritualitas dan moralitas masyarakat, terutama penguasa.<sup>29</sup>

Kemunduran dunia Islam tidak hanya berdampak di pusat, tetapi juga di wilayah-wilayah Islam. Dunia Islam sudah mulai merasakan ketertinggalan di bidang ekonomi dan militer dari negara-negara Barat. Secara perlahan dunia Islam bergeser posisi dari ofensif (ekspansi memperluas wilayah kekuasaan) menjadi defensif (bertahan membenahi diri). Pada akhir abad 19 M, penetrasi kekuasaan Barat ke dalam dunia Islam mencapai puncaknya, dari Maroko di ujung Barat sampai Indonesia di ujung Timur. Kehadiran militer dan ekonomi Barat di dunia Islam cenderung berbentuk dominasi politik seperti penjajahan, secara langsung atau tidak langsung. Khilafah Usmani terpaksa bersikap defensif menghadapi tekanan militer dan ekonomi negara-negara Barat.<sup>30</sup>

Realita tersebut melatar-belakangi munculnya pemikiran politik Islam kontemporer yang terpolarisasi tiga aliran pemikiran politik. Kelompok pertama, memahami bahwa Islam dianggap bukanlah semata-mata dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Sebaliknya, Islam adalah agama yang sempurna dan lengkap dengan peraturan untuk segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan negara. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Hasan al-Banna, Sayyid Qutub, Muhammad Rasyid Ridha, dan Taqiyuddin al-Nabhani; Kelompok kedua, memahami bahwa Islam dipandang sebagai agama dalam pengertian Barat yaitu agama hanya dijadikan sebagai moral dan ritual semata, yang tidak ada hubungannya dengan urusan

---

<sup>29</sup>Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 111-112.

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 111-112

dunia dan kenegaraan. Barat memahami bahwa agama hanya urusan privat dan bukan urusan publik. Oleh karena itu, keduanya terpisah dan tidak berhubungan sama sekali. Kelompok ini berpandangan bahwa Nabi Muhammad dipandang sebagai Rasul penyampai risalah Ilahi, seperti Rasul lainnya dan tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Ali Abdul Raziq dan Thaha Husein; Kemudian kelompok ketiga, memahami bahwa Islam bukanlah agama yang serba lengkap, termasuk di dalamnya memiliki sistem kenegaraan. Kelompok ini menolak anggapan bahwa Islam dalam pengertian Barat, yang hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. Menurut kelompok ini, tidak mengatur sistem kenegaraan, melainkan mengatur tata nilai etika dalam kehidupan negara. Kelompok ini berpandangan bahwa Islam hanya mengatur prinsip moral dan akhlak. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Muhammad Husein Haikal.<sup>31</sup>

Pada fase kemunduran umat Islam (abad 18 M) para pemikir Islam telah mengupayakan solusi kebangkitan dan kejayaan umat Islam. Ketika itu sudah ada upaya responsif dari Khilafah Ustmani untuk mengadopsi kemajuan yang dicapai Barat, terutama di bidang teknik dan kemiliteran.<sup>32</sup> Upaya ini tidak berhasil. Ketidak-mampuan kekhalifahan Turki Utsmani merespon perkembangan berimplikasi kejatuhan dan penghapusan Institusi khilafah terakhir yang pernah mempersatukan seluruh kaum muslimin.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup>Munawir Sjadzali, *op. cit.*, hlm. 1-2.

<sup>32</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 154.

<sup>33</sup>Pada awal November 1922, Kemal Attaturk telah menghapuskan kesultanan, namun ia masih mempertahankan kekhalifahan. Pada tanggal 18 Nopember 1922, Wahiduddin (Muhammad VI) diberhentikan dari jabatan kekhalifahan. Sebagai penggantinya, dibai'atlah Abdul Majid. Pada tanggal 2 Maret 1924, Khalifah resmi dibekukan. Sejak saat itulah, untuk pertama kalinya dalam sejarah kepemimpinan Islam, kaum muslimin hidup tanpa kekhalifahan hingga kini. Lihat Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib, *Visi dan*

Kendati, kekhalifahan Islam telah dihapuskan, masih saja muncul usaha untuk menghidupkan kembali kekhalifahan Islam. Usaha tersebut dilakukan oleh Raja Fuad I, Raja Mesir. Usaha Raja Fuad I ini telah menyebabkan terjadinya krisis antara pihak istana dengan partai *al-Ahrar ad-Dusturiyyan* pada tahun 1924. Raja Fuad I berupaya memperjuangkan kembalinya negara khilafah, sedangkan partai *al-Ahrar ad-Dusturiyyan* menentang kembalinya negara khilafah.<sup>34</sup>

Usaha Raja Fuad I tersebut ditentang oleh Ali Abdurraziq dengan menerbitkan sebuah buku *al-Islam wa Ushul al-Hukmi* (Islam dan Dasar-Dasar Pemerintahan) pada tahun 1925. Dalam buku tersebut, Ali Abdurraziq menafikan eksistensi kekhalifahan sebagai salah satu dasar (penetapan) hukum Islam.<sup>35</sup> Ali Abdurraziq telah memberikan pendapat yang cukup kontroversial. Dengan berani Ali Abdurraziq mengemukakan bahwa sebenarnya tidak ada satu ketentuan pun di dalam al-Qur'an dan al-Sunnah yang menjelaskan tentang kewajiban mendirikan negara.<sup>36</sup>

Runtuhnya khilafah merupakan malapetaka paling dahsyat yang telah mengguncangkan kaum muslim di seluruh dunia.<sup>37</sup> Keguncangan ini terasa hebat karena kaum muslimin tidak lagi memiliki kepemimpinan umum yang mempersatukan umat Islam

---

*Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Mohammad Magfur Wachid, (Bangil: al-Izzah, 1997), hlm. 24.

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm 24

<sup>35</sup> Ali Abdurraziq adalah salah seorang Ulama Al-Azhar dan Hakim Pengadilan Agama. Pemikiran Ali Abdurraziq banyak mengadopsi hasil studi-studi keislaman karya para orientalis. Hasil pemikiran para orientalis bukan hasil penelitian yang jujur, melainkan hasil pembahasan yang tendensius. Lihat *Ibid.*

<sup>36</sup> Pemikir tersebut adalah seorang cendekia Al-Azhar Mesir. Akibat tindakannya ini, maka kalangan ulama al-Azhar mengadakan sidang yang membahas tentang karya kontroversialnya tersebut. Para ulama Al-Azhar memutuskan mencabut gelar akademis dan mengeluarkannya dari barisan ulama Al-Azhar. Lihat Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, terj. Kathur Suhardi, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998), hlm. 21.

<sup>37</sup> Dhiya'uddin ar-Rais, *Islam dan Khilafah : Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam, Ali Abdurraziq*, terj. (Bandung: Pustaka, 1985), hlm. xxi. Runtuhnya Khilafah Usmani juga merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya Nahdatul Ulama, Lihat M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, (Yogyakarta: Al-Amin, 1996), hlm. 44-46.

di seluruh dunia, juga proses kejatuhan khilafah Islam merupakan konspirasi internasional (Inggris dan perancis), dengan menempatkan agennya Mustafa Kamal<sup>38</sup> sebagai orang dalam yang menghapuskan institusi pemersatu umat Islam tersebut.

Taqiuddin An-Nabhani, seorang ulama yang melakukan aktivitas politik sekitar tahun 1950-1970-an dan pendiri partai politik internasional Hizb at-Tahrir<sup>39</sup>, mencermati bahwa pada abad ke 20 M Islam mengalami kemunduran dan tidak mampu bangkit disebabkan tiga hal.

Pertama, kaum muslimin mempelajari Islam dengan cara yang bertentangan dengan metoda studi Islam. Metoda studi Islam menjelaskan bahwa Islam dipelajari sebagai persoalan yang bersifat praktis supaya dapat diamalkan oleh individu maupun diterapkan oleh negara. Kaum muslimin mempelajari Islam hanya sekedar sebagai ilmu belaka, seakan-akan Islam adalah filsafat yang bersifat *khayali* dan teoritis semata. Dengan begitu, hukum-hukum fiqh kemudian hanya menjadi sekumpulan teori murni, dan

---

<sup>38</sup>Semula Mustafa Kamal tidak dikenal. Dalam pertempuran Ana Forta, tanggal 15 April 1915, Kolonel Mustafa Kamal ditunjuk memimpin pasukan Turki Usmani melawan Inggris yang berakhir dengan gencata senjata. Keadaan status quo ini berlangsung hingga tanggal 15 Desember 1915. Suatu ketika, tiba-tiba pasukan Inggris mengundurkan diri secara rahasia dari wilayah yang didudukinya di Gallipoli. Pasca pertempuran Ana Forta, Mustafa menjadi seorang bintang. Ia tenar di kalangan Angkatan Bersenjata dan pertempuran tersebut diberitakan secara luas sebagai kemenangan yang sangat penting bagi Mustafa Kamal atas pasukan Inggris. Konspirasi Mustafa Kamal dan Inggris menghapuskan sistem kekhilafahan akhirnya berhasil pada tanggal 3 Maret 1924. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Kaifa Hudimat al-Khilafah*, terj. Abu Faiz, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 83-167.

<sup>39</sup>Suha Taji Farouki, "Hizb at-Tahrir al-Islami," *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, (New York: Oxford University Press, 1995), hal. 125 dan 380. Hizb at-Tahrir adalah sebuah partai politik yang berlandaskan Islam. Islam adalah mabpanya. Hizb at-Tahrir bergerak di tengah-tengah umat, dan bersama-sama mereka berjuang menjadikan Islam sebagai permasalahan utamanya, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah dalam kehidupan ini. Lihat Hizb at-Tahrir, *Mengenal Hizbut at-Tahrir : Partai Politik Islam Ideologis*, (Bogor: Hizb at-Tahrir, 2002.), hlm. 1.

syariat Islam dipelajari sebagai masalah-masalah ritual dan akhlak saja, bukan lagi sebagai hukum yang mampu mengatasi problematika kehidupan.<sup>40</sup>

Kedua, dunia Barat yang membenci Islam terus menerus menyerang agama Islam. Mereka mencela Islam dengan cara mengada-ada sesuatu yang tidak ada dalam Islam. Kemudian mereka menjelek-jelekkan sebagian hukum Islam, padahal semuanya adalah hukum yang tidak diragukan lagi kebenarannya dalam menyelesaikan masalah hidup;

menghadapi serangan ini, kaum muslimin terutama kalangan intelektualnya berada pada posisi yang sangat lemah.<sup>41</sup> Mereka rela menerima Islam sebagai pihak yang tertuduh, lalu mereka berusaha untuk membelanya. Dalam rangka menghindari tuduhan tersebut, kaum muslimin berusaha menginterpretasikan hukum-hukum Islam.<sup>42</sup>

Ketiga, pudarnya khilafah Islam karena banyaknya negeri-negeri Islam yang melepaskan diri, lalu tunduk kepada pemerintahan kufur disusul dengan runtuhnya khilafah Islam, terbentuklah dalam benak kaum muslimin suatu gambaran yang

---

<sup>40</sup>Taqiuddin An-Nabhani, *Mafahim Hizb at-Tahrir*, (tp: Hizb at-Tahrir, 1953), hlm. 7.

<sup>41</sup>Kalangan intelektual muslim dalam keadaan lemah bisa dilihat dari fakta yang ada. Mereka mengadopsi peradaban Barat karena kemajuan (progress) yang dicapai Barat. Mereka menganggap Islam tidak memuat ajaran yang dinamis. Mereka tidak mampu membedakan antara ilmu dan tsaqafah, atau hadharah dan madaniyah. Kemunduran dalam aspek intelektual ini mempengaruhi interaksinya dalam pertarungan pemikiran. Ketidak-mampuan mereka merespon perkembangan membawa implikasi posisi mereka menjadi tertuduh, sehingga jawaban yang muncul cenderung menyimpang dari Islam. Misalnya, mereka mengatakan Islam adalah agama damai, tidak ada perang dalam Islam, padahal secara gamblang Islam menjelaskan kewajiban jihad. Selain itu, metode berpikir mereka dipengaruhi oleh metode berpikir Barat dengan paradigma menyesuaikan dengan fakta, bukan dengan paradigma meluruskan fakta yang ada. Lihat Hizbut at-Tahrir, *Nuqthatul Inthilaq*, terj. Muhammad Maghfur, (Depok: Pustaka Tharuqul Izzah, tt), hlm. 29-36.

<sup>42</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Mafahim Hizb . . . . .* Op. Cit., hlm. 8.

memustahilkan terwujudnya kembali khilafah Islam dan terlaksananya kembali hukum-hukum Islam sebagai satu-satunya hukum yang harus diterapkan. Dalam pandangan an-Nabhani bahwa ketiga masalah tersebutlah yang menyebabkan kegagalan seluruh gerakan pembaharuan yang didirikan untuk mengembalikan umat Islam sekaligus mengembalikan kejayaan Islam.<sup>43</sup>

Taqiuddin Al-Nabhani tidak sepakat bahwa bentuk negara Islam adalah Republik dan sistem politiknya demokrasi. Alasannya, demokrasi adalah konsep yang lahir bukan dari aqidah Islam, tetapi dari aqidah sekularisme. Disamping itu konsep-konsep yang lahir dari demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam.<sup>44</sup> Demokrasi melahirkan hukum yang dibuat oleh manusia atas dasar musyawarah, semua hal dimusyawarahkan. Padahal dalam aqidah Islam, yang berhak untuk membuat hukum itu hanyalah Allah yang telah menciptakan manusia, mengutus rasul yang membawa hukum dan aturan. Taqiuddin Al-Nabhani juga menolak bentuk negara Republik dan bentuk-bentuk negara yang lain, seperti : Kekaisaran, Monarchi (Kerajaan) dan Federasi. Argumentasinya bahwa semua konsep kenegaraan tersebut tidak bersumber dari aqidah Islam, melainkan dari pikiran manusia.<sup>45</sup>

Taqiuddin Al-Nabhani memahami bahwa agama Islam mengandung ajaran universal. Oleh karenanya, eksistensi agama Islam itu menjadi sempurna melalui sebuah negara. Dalam pandangan Taqiuddin Al-Nabhani bahwa negara Islam yang harus didirikan adalah negara khilafah, karena negara khilafah mempersatukan kaum Muslimin di seluruh

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>44</sup> Taqiuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), hlm. 21-22.

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 22 dan 30-35.



dunia. Kemudian dalam rangka mewujudkan negara khilafah tersebut, kaum Muslim wajib mendirikan partai politik berasaskan Islam.<sup>46</sup>

Akan tetapi, generasi Islam sekarang belum pernah menyaksikan Negara Islam yang menerapkan Islam. Begitu pula generasi yang hidup pada akhir masa Negara Islam (Daulah Utsmaniyah) yang berhasil diruntuhkan Barat. Mereka hanya dapat menyaksikan sisa-sisa Negara tersebut dengan sedikit sisa-sisa pemerintahan Islam. Karena itu sulit sekali bagi seorang muslim untuk memperoleh gambaran tentang Pemerintahan Islam yang mendekati fakta sebenarnya sehingga dapat disimpan dalam benaknya. Umat Islam tidak akan mampu menggambarkan bentuk pemerintahan tersebut, kecuali dengan standar sistem demokrasi yang dipaksakan atas negeri-negeri Islam<sup>47</sup>.

Yang mendorong penulis meneliti masalah stuktur Negara Islam adalah adanya kenyataan bahwa berbagai sistem pemerintahan yang ada di dunia saat ini sangat jauh dari sistem pemerintahan Islam, baik dari segi bentuk maupun isinya. Dari segi isinya, hal itu sangat jelas bagi kaum Muslim, yakni bahwa semua sistem pemerintahan kontemporer saat ini tidak diambil dari al-Quran dan Sunnah Nabi-Nya serta apa yang ditunjukkan oleh keduanya. Sistem-sistem yang ada saat ini bertentangan dengan sistem Islam. Kenyataan ini dapat diindera dan diraba oleh kaum Muslim; mereka tidak berbeda pendapat dalam hal ini. Akan tetapi, yang mungkin menimbulkan kebingungan dalam diri kaum Muslim adalah dugaan mereka, bahwa sistem pemerintahan dalam Islam dilihat dari segi strukturnya tidak berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan kontemporer. Karena itu, mereka tidak melihat adanya keberatan jika di dalam sistem Islam itu terdapat kabinet, para menteri,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 30-35.

<sup>47</sup> Taqiuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), cet. 7, hlm. 7

dan semisalnya, dengan realita dan wewenang dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini.

Dalam penelitian ini penulis akan meneliti konsep struktur Negara Islam menurut pemikiran ulama fiqih abad 20 yaitu pasca runtuhnya Pemerintahan Islam, diantara ulama siyasah itu adalah Taqiyuddin al-Nabhani (1909-1977 M).

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

### **1. Batasan Masalah**

Penelitian ini dibatasi pembahasannya hanya menyangkut masalah, konsep Taqiyuddin Al-Nabhani tentang struktur Khilafah serta meneliti pemikirannya tentang system pemerintahan negara Islam

### **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan batasan masalah diatas muncul pertanyaan yang akan dijawab dalam penelitian ini:

- a. Bagaimana konsep struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani?
- b. Bagaimana pemikiran Taqiyuddin al-Nabhani tentang struktur negara Islam dalam sistem kekhalifahan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

- a. Mengetahui bagaimana konsep struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani,
- b. Untuk mengetahui, dasar-dasar hukum penetapan struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani

Adapun kegunaannya:

- 1. Sebagai pengetahuan hukum Islam dalam bidang politik yang lebih khusus tentang struktur Khilafah.
- 2. Sebagai panduan untuk umat Islam sehingga mempunyai pemahaman yang benar dan panduan yang pasti tentang struktur Khilafah.
- 3. Selain itu untuk menambah khazanah intelektual keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam masalah struktur Khilafah.
- 4. Sebagai persyaratan memperoleh gelar magister syari'ah pada program pasca sarjana UIN SUSKA Pekanbaru Riau.

#### **D. Kajian Pustaka**

Taqiyuddin Al-Nabhani merupakan sosok fenomenal yang cerdas dan berani melawan arus kekuasaan pemerintah Yordania. Ia mengkritisi Penguasa Yordania melalui partai politik yang didirikannya Hizb al-Tahrir. Karya pemikiran Taqiyuddin sangat mendalam dan cemerlang mendeskripsikan tentang konsep Islam kaffah dan universal. Ia menengahkan Islam secara totalitas dalam berbagai aspek kehidupan dan bukan parsial. Ia memberikan solusi terhadap kebangkitan dan kejayaan Islam dengan hanya satu solusi yakni kembali kepada Islam dan dengan jalan mendirikan negara khilafah.

Di Indonesia Taqiyuddin Al-Nabhani tidaklah sepopuler pemikir politik Islam kontemporer lainnya, semisal Hasan al-Banna, Muhammad Qutb, Abu A'la al-Maududi, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena dirinya tidak mau mempublikasikan dirinya. Ia lebih mengedepankan ide dan pemikirannya ketimbang publisitas. Pemikiran dan ketajaman berfikirnya telah mampu mewarnai dinamika pemikiran politik Islam melalui partai politik yang didirikannya Hizb al-Tahrir. Oleh karena itu, wajar bila belum begitu banyak yang meneliti konsep pemikiran Taqiyuddin Al-Nabhani.

Sebelum penelitian ini dilakukan, penulis tidak menemukan tulisan atau hasil penelitian yang membahas konsep struktur Khilafah menurut Taqiyuddin al-Nabhani. Penulis menemukan penelitian-penelitian yang membahas lebih spesifik pada partai yang telah dirikannya, yaitu Hizb al-Tahrir baik dari orang-orang yang menjadi anggotanya atau perspektifnya.

Fakhrudin dari Universitas Lampung (2008) meneliti tentang Motivasi bergabung dengan Hizb al-Tahrir Indonesia. Ada beberapa faktor yang memotivasi seseorang untuk bergabung dengan Hizb al-Tahrir yaitu motivasi pertemanan, motivasi media Hizb al-Tahrir Indonesia dan motivasi religiusitas. Jadi yang diteliti adalah motivasi orang-orang yang bergabung dengan Hizb al-Tahrir Indonesia.

Demokrasi dalam perspektif Hizb al-Tahrir Indonesia diteliti oleh Anshori (2008) dari Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan. Anshori hanya membahas bagaimana pandangan Hizb al-Tahrir terhadap demokrasi.

Zainudin Loosy dalam tesisnya di University Kebangsaan Malaysia (2010) meneliti tentang Khilafah: Suatu konsep Negara Islam Perspektif Hizb al-Tahrir yang membahas

dua masalah yaitu bagaimana konsep Khilafah perspektif Hizb al-Tahrir serta bagaimana konsep hubungan agama dan Negara perspektif Hizb al-Tahrir . Konsep Khilafah yang dipaparkannya masih secara umum belum sampai ke struktur negara khilafah itu sendiri, dan belum membahas tentang argumentasi-argumentasi Islam tentang struktur negara khilafah. Di sisi yang lain Loosy membahas tentang keterkaitan agama dengan negara. Loosy meng-*counter* pemikiran yang memandang bahwa agama biarkan berjalan sendiri tanpa dicampuri atau mencampuri urusan negara.

Ibnu Alwan yang meneliti tentang “Metodologis Tafsir Tekstualis (Studi Atas Metode Tafsir Taqiyuddin Al-Nabhani)”. Peneliti ini berasal dari IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiah Ibnu Alwan membahas tentang tafsirnya Taqiyuddin Al-Nabhani.

Ardiansyah meneliti tentang Pemikiran Politik Taqiyuddin Al-Nabhani tentang Sistem Pemerintahan Islam. Peneliti ini berasal dari UIN SUSKA RIAU, yang membahas tentang bagaimana konsepsi Taqiyuddin Al-Nabhani tentang hubungan antara politik dan Islam, bagaimana sistem pemerintahan Islam yang ideal dalam perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani

## E. Kerangka Teoritis

Struktur berasal dari bahasa Inggris yaitu *structure* yang berarti bangunan, struktur, susunan.<sup>48</sup> Istilah struktur di dalam bahasa Arab sepadan dengan kata **أجهزة**

---

<sup>48</sup>Peter Salim, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Modern English Press, 1987), Edisi 3, hlm. 1949

yang berasal dari kata **جهاز - يجهز - تجهيزاً** yang bermakna perlengkapan.<sup>49</sup>

Ibnu Mandhur mendefinisikan struktur:

**جهزو هو ما يحتاج له في وجهه**<sup>50</sup>

Struktur adalah persiapan atau perlengkapan. Menurut Webster, *structure* adalah *to put together systematically; to construct; to organize*. Struktur adalah memasang atau menyetel bagian-bagian secara sistematis, untuk membangun, untuk mengorganisasi.<sup>51</sup>

Dari berbagai definisi secara bahasa, dapat disimpulkan bahwa struktur adalah susunan-susunan atau perlengkapan-perengkapan yang diperlukan untuk membangun sebuah bangunan. Susunan atau perlengkapan satu dengan yang lain saling menopang, menguatkan dan terdapat keterkaitan yang sangat erat.

Istilah negara berasal dari kata Latin “*status*” atau “*statum*” yang kemudian diterjemahkan ke bahasa Inggris “*state*” yang lazim diartikan keadaan atau kedudukan.<sup>52</sup>

---

<sup>49</sup>Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (t.t: Pustaka Progresif, t.h), hlm. 219

<sup>50</sup>Ibnu Mandhur, *Lisan al-‘Arab Jilid 5*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Cet.1, hlm. 325

<sup>51</sup>Noah Webster, *Webster’s New Twentieth Century Dictionary*, (USA: William Collins Publisers, Inc, 1979), Edisi 2, hlm. 1806

<sup>52</sup> A.P. Cowie, *Oxford Advanced Learner’s Dictionary*, (New York: Oxford University Press, 1990), edisi ke-4, hlm. 1253; lihat juga John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2005), cet. ke-26, hlm. 553; Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 41.

Sedangkan penyebutan negara dalam Islam sering digunakan istilah *dawlah*<sup>53</sup> yang berarti bergiliran, berputar atau beredar.<sup>54</sup>

Pada masa Yunani kuno, pembicaraan mengenai negara dan masyarakat telah mendapatkan banyak perhatian. Aristoteles (384-322 SM.) misalnya,<sup>55</sup> yang memaknai negara sebagai “suatu persekutuan hidup yang berbentuk polis (negara kota)”, karena menurutnya manusia adalah *zoon politikon* (makhluk hidup yang hidup dalam polis).<sup>56</sup>

Kalangan Romawi melihat bahwa negara sebagai suatu bentuk masyarakat yang diciptakan oleh hukum, suatu bentuk perjanjian di mana hak masing-masing yang berjanji itu merupakan pokok masalah, bukan sebagai suatu kenyataan bentuk masyarakat.<sup>57</sup>

<sup>53</sup> Istilah ini baru populer digunakan pada periode Usmaniyyah dan konfrontasinya dengan Eropa. Sedangkan Ibn Khaldun lebih suka memakai istilah *mulk* dan *siyashah ‘aqliyyah* (politik dan pemerintahan yang berdasarkan hukum positif dan akal), istilah yang sebelumnya pernah dipakai juga oleh al-Kindi. Lihat John L. Esposito (ed.), *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, vol. 1, (New York: Oxford University Press, 1995), hlm. 353-354; lihat juga Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 1*, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), hlm. 262.

<sup>54</sup> Lihat *al-Munjid fi al-Lughah wa al-‘Alam*, (Beirut: Dar al-Masyruq, 2000), hlm. 230. Kata *dawlah* dalam al-Qur’an tidak diartikan sebagai negara, kata itu digunakan dalam pengertian sesuatu yang diberikan secara bergantian dari satu tangan ke tangan yang lain. Kata *dawlah* dan derefasinya ada dalam Q.S. al-Hasyr (59): 7, dan Ali Imran (3): 140;

﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
(الحشر: 7)

﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
﴿لَا يَخْرُجُ عَلَيْكُمْ دَوْلَٰتُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامِ﴾  
(آل عمران: 140)

Sebagian ada yang memaknai *dawlah* sebagai dinasti, lihat B. Lewis, *The Encyclopedia of Islam*, vol. II, (Leiden: E.J. Brill, 1965), hlm. 176.

<sup>55</sup> Bahkan satu abad sebelum Aristoteles, kaum Sofis telah menyebarluaskan ajaran tentang negara. Sofis artinya orang yang ahli tentang sesuatu, kemudian kata sofis ini dikenakan kepada golongan yang kerjanya memberikan pelajaran kepada orang-orang yang menghendakinya dengan jalan memungut bayaran. Lihat *Ibid*, hlm. 5

<sup>56</sup> Sebagaimana dikutip J.H. Rapar dari karya Aristoteles, *Politika* yang diterjemahkan ke bahasa Inggris *The Politics*, lihat J.H. Rapar, *Filsafat Politik Aristoteles*, (Jakarta: Rajawali, 1988), hlm. 33,43; lihat juga keterangan Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000), edisi ketiga, cet. ke-3, hlm. 23-29.

<sup>57</sup> Ini merupakan pendapat Cicero (106-43 SM), yang pemikirannya bisa dianggap mewakili pemikiran Romawi. Deliar Noer, *Pemikiran Politik...*, hlm. 47.

Pada abad pertengahan, yang dipelopori Augustinus (354-430 M.) dengan ajaran teokrasinya, menyatakan bahwa negara berada di bawah kekuasaan gereja yang dipimpin Paus. Negara hanyalah sebagai sarana gereja untuk membasmi musuh-musuh yang tidak sejalan dengan keputusan gereja.<sup>58</sup>

Berbeda dengan Niccolo Machiavelli (1469-1527 M.),<sup>59</sup> yang memperkenalkan konsep baru tentang negara, menurutnya asas-asas kenegaraan harus dipisahkan dengan asas-asas kesusilaan, artinya orang dalam lapangan ilmu kenegaraan tidak perlu menghiraukan atau memperhatikan asas-asas kesusilaan.<sup>60</sup>

Pandangan berbeda ditunjukkan Karl Marx (1818-1883M.), yang mewakili jaman berkembangnya teori kekuasaan, menyatakan bahwa negara itu merupakan penjelmaan dari pada pertentangan-pertentangan kekuatan ekonomi. Negara dipergunakan sebagai alat dari mereka yang kuat untuk menindas golongan yang lemah ekonominya.<sup>61</sup>

Selain pemikir Barat, beberapa cendekiawan muslim juga telah melakukan kajian kenegaraan. Pemikir Islam yang membahas Negara diantaranya adalah al-Farabi (870-950 M.)<sup>62</sup> yang memandang negara dari sudut sosiologi masyarakat, yang ia bedakan menjadi tiga macam masyarakat sempurna; besar, sedang dan kecil. Masyarakat sempurna besar adalah gabungan banyak bangsa (perserikatan bangsa-bangsa),

---

<sup>58</sup> Soehino, *Ilmu Negara...*, hlm. 51-52; lihat juga Abdul Bari Azed dan Makmur Amir, *Pemilu dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum UI, 2005), hlm. 3.

<sup>59</sup> Ia hidup pada masa *Renaissance*, masa yang menunjukkan pada pembaruan yang tidak mau lagi mengikat diri pada kegerejaan dan tradisi, serta ingin menyatakan kebebasan dan kemauan untuk maju. Pemikirannya lebih disandarkan pada kebebasan akal. Teori-teori tentang kenegaraan hilang sama sekali pada masa ini karena hasil perseoranganlah yang mendapatkan penghargaan tertinggi. Lihat Soehino, *Ilmu Negara...*, hlm. 68-69; Deliar Noer, *Pemikiran Politik...*, hlm. 87.

<sup>60</sup> Dia tidak mempunyai konsep khusus tentang negara, negara hanya dijadikan sarana untuk mencapai kemakmuran bersama. Sehingga siapa yang paling kuat, maka dia yang menjadi Raja atau penguasa, meskipun dengan cara yang licik. Untuk mengetahui tentang pemikiran Machiavelli lebih lanjut, bisa lihat karyanya *Il Principe* alih bahasa C. Woekirsari, *Sang Penguasa, Surat Seorang Negarawan kepada Pemimpin Republik*, (Jakarta: Gramedia, 1987). Lihat juga Soehino, *Ibid.*, hlm. 70-72.

<sup>61</sup> Soehino, *Ibid.*, hlm. 133.

<sup>62</sup> Nama lengkapnya adalah Abu Nasr bin Muhammad bin Muhammad bin Tarkhan bin 'Unzalag. Karyanya antara lain *Ara Ahl al-Madinah al-Fadilah* dan *al-Siyasah al-Madaniyyah*.



masyarakat sempurna sedang terdiri dari satu bangsa dan menghuni satu wilayah (negara nasional) dan masyarakat sempurna kecil adalah masyarakat penghuni satu kota (negara-kota).<sup>63</sup>

Sementara pemikir yang karyanya banyak dijadikan rujukan dalam bernegara adalah Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi atau sering kita kenal dengan al-Mawardi (975-1059 M.). Ia berpandangan bahwa negara merupakan kontrak sosial (perjanjian antara rakyat dengan penguasa) yang berlandaskan hukum-hukum Allah.<sup>64</sup>

Sementara pemikir muslim yang banyak berpengaruh terhadap pemikiran kenegaraan adalah Ibn Khaldun (1332-1406), yang telah membedakan antara negara dan masyarakat. Menurutnya, manusia memerlukan masyarakat untuk kerja sama antara sesamanya agar dapat hidup, tetapi manusia pun mempunyai pula sifat-sifat ke hewanan hingga diperlukan seorang *wazi* yang mempunyai kewibawaan dan kekuasaan (*mulk*). Negara atau sering disebut *dawlah*, merupakan bentuk masyarakat jika dihubungkan dengan pemegang kekuasaan. Dan masyarakat yang dimaksudkan di sini adalah yang telah menetap yang telah membentuk sivilisasi atau peradaban.<sup>65</sup>

Dilandasi dari beberapa pengertian di atas, secara umum, pada masa sekarang lazim dikenal dalam hukum internasional, paling tidak ada tiga unsur pokok yang harus dimiliki negara; *pertama*, adanya rakyat atau sejumlah orang yang membentuk

---

<sup>63</sup> Munawwir Sjadzali, *Islam dan Tata...*, hlm. 51-52. Dibanding dengan pemikir yang hidup pada masa ini, hanya al-Farabi yang mengemukakan idealisasi tentang segi-segi dan perangkat kehidupan bernegara, lihat Abdul Azis Thaba, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 109.

<sup>64</sup> Abu al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Milayat al-Diniyyah*, (Kuwait: Maktabah Dar Ibn Qutaybah, 1989), hlm. 6.

<sup>65</sup> Deliar Noer, *Pemikiran Politik...*, hlm. 72.

masyarakat, *kedua*, adanya wilayah teritorial, dan *ketiga*, pemerintahan yang berwibawa dan berdaulat.<sup>66</sup>

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menarik sebuah kesimpulan mengenai makna negara, bahwa yang dimaksud dengan negara secara umum adalah sekumpulan manusia (masyarakat) yang menempati suatu daerah teritorial yang diperintah oleh sejumlah pejabat yang berhak menuntut dari warganya untuk taat pada peraturan yang telah disepakati melalui penguasaan (kontrol) monopolitis dari kekuasaan yang sah.

Berdasarkan fakta historis, ada beberapa istilah yang berhubungan dengan pemerintahan Islam, yakni : *Imamah*, *Khalifah*, dan *Imarah*. Kata *Imamah* berasal dari ‘*Amama*’ (أَمَمَ) yang berarti meniatkan atau memaksudkan.<sup>67</sup> Sedang kata ‘*Amma*’ (أَمَّ) yang berarti mengimani atau maju menjadi imam bagi mereka.<sup>68</sup> Kata ini mengalami perubahan menjadi *imamah* yang berkonotasi kepada kepemimpinan atau maju ke depan. Kemudian kata *Al-Imam* (الامام) yang berarti semua orang yang diangkat sebagai imam oleh suatu kaum.<sup>69</sup>

Kata Imam memiliki banyak makna, seperti maju ke depan bermaksud kepada suatu arah tertentu, petunjuk dan bimbingan, kepemimpinan, kepantasan seseorang menjadi suri teladan. Oleh karena itu, bisa dicermati bahwa makna kepemimpinan berdekatan dengan ke-*imamahan*.

<sup>66</sup> Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-3, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 17.

<sup>67</sup> Dalam hadis disebutkan : كانوا ائمة مومنون شرار ثمار هم في الصدقة artinya : “Mereka meniatkan kelebihan buah-buahan mereka untuk diserahkan”. Kemudian dalam al-Qur’an disebutkan : فتيمة مومنون صعبا طيبا artinya : “Tayamumlah” atau maksudkanlah pada debu yang suci”. Lihat M. Dhiauddin Rais, *op. cit.*, hlm. 74-75.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 74.

<sup>69</sup> Menurut Al-Jauhari bahwa Imam adalah yang dipatuhi, atau yang diteladani, dan imam bagi segala sesuatu adalah yang meluruskan atau yang memperbaiki. Al-Qur’an adalah imam umat Islam, Nabi Muhammad Saw adalah imam bagi seluruh imam, dan Khalifah adalah imam bagi rakyat. Lihat *Ibid.*

Sementara itu, kata *khilafah* berasal dari kata *khalafa* (خلف)<sup>70</sup> yang berarti pengganti atau penerus, yakni seseorang yang dipilih dan diangkat oleh rakyat untuk menjadi pemimpin dalam sebuah negara (*daulah*). Imam Ibnu Khaldun memiliki pandangan yang sama seputar pengertian khalifah tersebut. Menurut Ibnu Khaldun bahwa penamaan khalifah bermakna menggantikan nabi dalam mengurus umatnya.<sup>71</sup>

Berikutnya istilah “*Imarah*”. Bila kata *Imarah* berwazn *fa'il*, kata tersebut menjadi “*amir*”<sup>72</sup> yang berarti pemimpin, dan *imarah* berarti kepemimpinan. Laqab “*Amir*” melekat pada diri Umar ibn al-Khattab disebabkan kedekatannya dengan masyarakat secara luas.<sup>73</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani kata khalifah dan imamah mempunyai makna yang sama. Al-Nabhani menjelaskan bahwa bentuk inilah yang dinyatakan hukum syara', agar dengan bentuk tersebut daulah Islam bisa berdiri di atasnya. Bahkan banyak hadis shahih yang menunjukkan bahwa dua kata ini memiliki konotasi yang sama. Dan tidak ada satu nash syara' pun yang menunjukkan adanya konotasi yang berbeda. Baik di dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Sebab, nash syara' hanya ada dua ini. Begitu pula tidak harus terikat dengan *lafadz*, baik khilafah maupun imamah, yang wajib hanyalah terikat dari segi maknanya saja.<sup>74</sup>

---

<sup>70</sup>Permulaan muncul istilah ini adalah *laqab* Abu Bakar sewaktu ia terpilih menjadi pengganti Rasul. Ia menolak dipanggil khalifah Allah tetapi khalifah Rasulullah (pengganti Rasul). Istilah ini timbul sebagai antitesis dari sistem kekisraan dan kekaisaran, yang di dalam sistem pemerintahannya berlandaskan otoriter dan kekerasan, monopoli dan eksploitasi, sebagaimana pemerintahan Kirsaisme, Herakliusme. Lihat *Ibid*, hlm. 78-79.

<sup>71</sup>*Ibid*, hlm. 78.

<sup>72</sup>Istilah ini pertama sekali dikemukakan khalifah kedua, Umar ibn al-Khattab r.a. Menurut pandangan Imam Ibnu Khaldun bahwa istilah *imarah* itu bagian dari ciri khas kekhalifahan, dan kata itu diberikan sejak masa para khalifah. Mereka telah menamakan para pemimpin delegasi dengan *amir* yakni *wazn* (bentuk kata) *fa'il* dari *imarah*. Lihat *Ibid*, hlm. 82.

<sup>73</sup>*Laqab* atau gelar Amir al-Mukminin berpengaruh pada penyebutan kepala negara bagi khalifah-khalifah sesudahnya. Lihat *Ibid*, hlm. 82.

<sup>74</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm...* op. cit., hlm. 36.

Istilah lain yang sering digunakan dalam pemerintahan adalah sultan. Sultan berasal dari kata Arab yaitu *sulthan* digunakan untuk memaknai kekuasaan, kekuatan, dan otoritas, atau pemilik kekuasaan semacam itu, seorang penguasa.<sup>75</sup> Istilah ini muncul pertama kali sebagai gelar resmi seorang penguasa dalam Dinasti Saljuk di Bagdad (1055-1157). Kekuasaan pemerintahan dan kekuatan pemaksa menjadi monopoli sultan wazirnya, sementara otoritas keagamaan tetap dipegang oleh Khalifah Abbasiyah sebagai imam komunitas muslim. Menurut Al-Juwaini seperti dikutip oleh John L. Esposito, menjelaskan bahwa kesultanan adalah sebagai penghubung antara agama dan Negara.<sup>76</sup>

Mencermati istilah-istilah tersebut, bisa dipahami bahwa kepemimpinan atau pemerintahan sama dengan imamah, bedanya imamah lebih dikonotasikan pada pemimpin di kalangan Syi'ah. Ini disebabkan Syi'ah yang pertama mengadakan studi tentang istilah-istilah tersebut, bahkan kemudian mereka telah mengkhususkan kata "imam" untuk pemimpin tertinggi mereka. Istilah ini bukan sekedar istilah biasa, tetapi lebih dikonotasikan kepada seseorang yang harus diikuti atau dicontoh. Seseorang yang dimaksud adalah Ali bin Abi Thalib dan keturunannya yang dianggap pewaris khalifah yang sah dibandingkan dengan selainnya.

## **F. Metode penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

---

<sup>75</sup>John L. Esposito, Ensiklopedi Oxford; Dunia Islam Modern, (Bandung: Mizan, 2002), cet. 2, Hlm. 254. Lihat Noah Webster, *op.cit.*, hlm. 1824

<sup>76</sup> John L. Esposito, *ibid.*, hlm. 254

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kepustakaan atau *library research*. Penelitian kepustakaan dengan menelaah berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian berdasarkan kerangka fikir yang jelas dan relevan.

## 2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi atas dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Data primer meliputi tulisan atau pemikiran langsung Taqiyuddin al-Nabhani tentang Struktur Khilafah yang terdapat dalam kitab: *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam*, *al-Daulah al-Islamiyah*, *Al-Syakhshiyah Al-Islamiyah*, *Muqaddimah al-Dustur*, , *Nizham al-Islam*. Sedangkan data sekunder adalah tulisan tentang struktur Khilafah dalam kitab-kitab yang dikarang oleh ulama yang lain.

## 3. Teknis Analisa Data

Adapun metode yang penulis gunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis isi. Untuk mendeskripsikan analisis isi ini yang positivistik kualitatif, penulis melakukan beberapa langkah penelitian. Pertama, penulis mengakumulasi karya Taqiyuddin al-Nabhani khususnya dalam kitab *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam* serta kitab-kitab yang ada hubungannya dengan masalah struktur Negara Islam. Kemudian penulis juga mengakumulasi kitab-kitab yang dikarang oleh Ulama lain yang masih ada kaitannya dengan pembahasan struktur Negara Islam, sebagai bahan perbandingan sehingga tampak perbedaan antara konsep struktur Negara Islam Taqiyuddin al-Nabhani dengan Ulama-Ulama yang lain.

Langkah kedua yang penulis lakukan adalah meneliti serta memproses secara sistematis teks-teks dengan menggunakan *Content Analysis*, yaitu menggali isi dan

aksioma yang terdapat dalam teks-teks kitab tersebut. Teks yang berbentuk data primer dan sekunder tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam kategorisasi, struktur khilafah, dasar-dasar hukumnya.

Ketiga, semua data yang telah diproses secara sistematis dan diklasifikasikan kedalam beberapa kategorisasi, dikaji dengan pendekatan historis dan pendekatan dalil-dalil syara'. Keempat, menganalisis yang dilakukan berdasarkan deskriptif yang dimanifestasikan. Dengan maksud menelaah secara sistematis semua data primer dan sekunder untuk meningkatkan pemahaman terhadap masalah struktur Negara Islam. penulis melanjutkan proses analisis dengan upaya mencari makna tentang struktur Negara Islam dan dalil-dalilnya. Dengan demikian penelitian ini dapat menguak konsep struktur Negara Islam dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan terpadu, sistematika pembahasannya adalah:

Pada bab pertama dijelaskan tentang latarbelakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Pada bab kedua menjelaskan tentang identifikasi biografi Taqiyuddin al-Nabhani. Kehidupan Taqiyuddin al-Nabhani dan karya-karyanya, situasi sosial politiknya, dan pemikiran-pemikirannya.

Pada bab ketiga membahas landasan pemikiran teoritis kekhilafahan dalam sistem pemerintahan Islam. Pengertian Khilafah, dalil-dalil khilafah, bentuk pemerintahan Islam, pilar-pilar pemerintahan Islam

Bab empat membahas tentang tesis tentang struktur kekhilafan menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, yang berisikan tentang khalifah, *mu'awin tafwidh*, *mu'awin tanfidz*, *amir jihad*, *wali*, *al-qadla*, *jihaz al-idari*, *majelis ummat*, analisis.

Bab lima berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran

## BAB II

### IDENTIFIKASI BIOGRAFI TAQIYUDDIN AL-NABHANI

#### A. Kehidupan Taqiyuddin Al-Nabhani dan Karya-karyanya

##### 1. Silsilah dan Pendidikan Taqiyuddin Al-Nabhani

Nama lengkap Taqiyuddin Al-Nabhani adalah Muhammad Taqiyuddin Al-Nabhani bin Ibrahim bin Mustafa bin Ismail bin Yusuf Al-Nabhani. Ia lebih dikenal dengan nama Taqiyuddin Al-Nabhani, keturunan kabilah Bani Nabhan.<sup>1</sup> Bani Nabhan adalah satu suku dari Arab al-Badiyah. Bani Nabhan ini bermukim di desa Ijzim,<sup>2</sup> yang terletak di sebelah utara kota Al-Quds, Palestina. Di desa inilah Taqiyuddin An-Nabhani lahir dan menghabiskan masa kecilnya.

Taqiyuddin Al-Nabhani lahir di desa Ijzim pada tahun 1909. Lingkungan keluarganya adalah penganut ahl as-sunnah. Ayahnya bernama Ibrahim bin Mustafa, seorang ulama ahli fiqh dan bekerja sebagai pengajar ilmu-ilmu syariat pada Kementerian Pendidikan Palestina (*wuzarat al-ma'rif al-filistiniyyah*).

---

<sup>1</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wachid, (Surabaya: Risalah Gusti, 1996), Cet. II, hlm. 359.

<sup>2</sup>Desa Ijzim terletak lebih kurang 28 km Selatan Haifa di pedalaman Palestina, di bagian Selatan Gunung Al-Karmala, berada pada ketinggian 100 m di atas permukaan laut. Sekarang desa Ijzim termasuk ke dalam *qada* (setingkat kecamatan) Haifa, *a'mal* (setingkat kabupaten) A'ka, wilayah (setingkat propinsi) Beirut. Lihat Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, *Syawahid al-Haqq fi al-Istighasah bi Sayyid al-Khalq*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), hlm. 3. Lihat juga Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, *'Alamat Qiyamat as-Sa'ah as-Sugra wa al-Kubra*, (Beirut: Dar ibn Hazm, 1992), hlm. 6.



Sedangkan ibunya adalah putri dari Yusuf bin Ismail bin Yusuf Al-Nabhani.<sup>3</sup> Dalam keluarga yang komitmen keagamaannya inilah Taqiyuddin Al-Nabhani tumbuh dan berkembang, sehingga berpengaruh besar dalam pembentukan kepribadiannya. Selain itu, Taqiyuddin Al-Nabhani juga menjadi seorang remaja yang cerdas. Salah satu bukti kecerdasannya adalah kemampuannya menghafal al-Qur'an di bawah usia 13 tahun.<sup>4</sup>

Pengaruh kakeknya, Yusuf bin Ismail, sangat kuat terhadap diri Taqiyuddin Al-Nabhani. Ketika kakeknya mengadakan diskusi-diskusi *fiqhiyyah*, ia sering ikut dan mendengarkan. Diskusi-diskusi yang diikutinya sangat mempengaruhi kecerdasannya dan fenomena ini menarik perhatian kakeknya. Mengamati perkembangan sosok Taqiyuddin Al-Nabhani tersebut, kakeknya menyarankan kepada ayahnya, Ibrahim bin Mustafa, mengirimnya belajar di Al-Azhar.

Dari kedekatan hubungan Taqiyuddin Al-Nabhani dengan kakeknya, ia banyak mendapat informasi tentang politik dan ia mengerti masalah-masalah politik yang terjadi diakhir masa khilafah Utsmani. Ketika itu, kakeknya sangat mengetahui masalah-masalah politik, karena kakeknya memiliki hubungan yang erat dengan penguasa Usmani saat itu.

Pendidikan pertama Taqiyuddin Al-Nabhani diperoleh di rumahnya di bawah bimbingan ayah dan kakeknya. Taqiyuddin Al-Nabhani telah diajari dasar-dasar ilmu agama di rumahnya. Taqiyuddin Al-Nabhani juga belajar di Sekolah Dasar di daerah Ijzim. Setelah tamat Sekolah Dasar, ia melanjutkan Sekolah Menengah di 'Aka. Belum selesai

---

<sup>3</sup>Ihsan Samarah, *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir*, terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi, (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), hlm. 11. Profil Yusuf bin Ismail Al-Nabhani adalah seorang ulama pada akhir abad ke-19. Ia lahir pada tahun 1265 H/1849 M. Ia hidup pada masa pemerintahan kekhalifahan Usmani yang sedang dalam masa kemundurannya. Yusuf bin Ismail An-Nabhani adalah seorang yang *alim*, *rasikh*, *wara'*, *mutqin*, *at-taqi* dan *al-'abid*. Ia juga seorang yang produktif menulis. Karyanya mencapai 70 buah lebih. Lihat Yusuf bin Ismail, *Jami' Karamat al-Auliya*, (Beirut: al-Maktabah as-Sa'afiyah, 1991), hlm. 3. Lihat juga Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, *Ar-Rahmah al-Muhdat fi Hadl as-Salat wa 'Uqubat Tarihiha*, (Beirut: Dar bin Hazm, 1992), hlm. 4.

<sup>4</sup>Ihsan Samarah, *loc. cit.* 11

Sekolah Menengah, ia pindah ke Kairo untuk sekolah di Al-Azhar. Perpindahan ini terjadi karena kakeknya telah menyakinkan ayahnya tentang perlunya mengirim Taqiyuddin Al-Nabhani ke Al-Azhar untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang ilmu syari'ah.<sup>5</sup>

Taqiyuddin Al-Nabhani masuk ke Al-Azhar tahun 1928.<sup>6</sup> Ia masuk mulai tingkat Tsanawiyah. Pada tahun yang sama, ia berhasil meraih ijazah Tsanawiyah dengan predikat sangat memuaskan. Selesai Tsanawiyah Al-Azhar, ia melanjutkan studinya di Universitas Dar al-Ulum.<sup>7</sup> Universitas Dar al-Ulum saat itu berstatus sebagai cabang dari Al-Azhar. Proses belajar di Universitas Dar al-Ulum sangat mempengaruhi pemikiran-pemikiran Taqiyuddin Al-Nabhani, terutama disiplin ilmu filsafat.<sup>8</sup>

Ketika kuliah di Dar al-Ulum, Taqiyuddin Al-Nabhani sering menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah di Al-Azhar yang diisi oleh Syaikh-Syaikh Al-Azhar, semisal Syaikh Muhammad al-Hidhir Husain. Selama di Al-Azhar, sosok pemuda yang cerdas ini memperlihatkan kesungguhan dan kemampuannya dalam belajar. Teman-teman dan para dosen mengenalnya sebagai sosok dengan pemikiran yang cerdas, pendapat yang kokoh,

---

<sup>5</sup>*Ibid.*, hlm. 13.

<sup>6</sup>Pada tahun ini sampai Oktober 1934 merupakan periode pertama Muhammad Mustafa al-Maragi menjadi Rektor Al-Azhar. Periode keduanya dari April 1935 hingga wafatnya pada 22 Agustus 1945. J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, terj. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), hlm. 126.

<sup>7</sup>Universitas Dar al-Ulum memiliki background sejarah yang cukup menarik. Lahinya lembaga ilmiah yang berorientasi *Salafiyah*, mempunyai pandangan tersendiri terhadap filsafat Yunani. Salah satu keistimewaan belajar di Perguruan Tinggi ini adalah mahasiswa dikenalkan pada referensi-referensi induk yang orisinal dari berbagai disiplin ilmu Islam. Di lembaga ini, ketika mempelajari sejarah ilmu-ilmu Islam, dijelaskan pula sejarah masuknya filsafat Yunani ke dunia Islam. Juga ditunjukkan mana buku-buku yang telah dicemari oleh penilaian filsafat itu. Lihat Daud Rasyid, *Pembaharuan: Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan*, (Jakarta: Usamah Press, 1993), hlm. 87.

<sup>8</sup>Pandangan dan kritikan Taqiyuddin An-Nabhani terhadap filsafat bisa dilihat dalam bukunya *Asy-Syakhshiyyah Al-Islamiyyah*, jilid I, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), hlm. 47-75. Kritikan Taqiyuddin An-Nabhani ini ditujukan lebih khusus terhadap ilmu kalam dan mutakalliminnya yang lahir setelah umat Islam bersentuhan dengan filsafat. Ia juga mengkritik filosof muslim. *Ibid.*, hlm. 121-126.

pemikiran dan pemahaman yang mendalam, serta berkemampuan tinggi untuk meyakinkan orang dalam diskusi-diskusi yang bersifat pemikiran (*fikriyyah*).<sup>9</sup>

Taqiyudin Al-Nabhani selesai kuliah di Universitas Dar al-Ulum tahun 1932. Pada tahun yang sama, ia menyelesaikan kuliahnya di Universitas Al-Azhar As-Syarif menurut sistem lama. Ketentuan sistem lama memungkinkan mahasiswanya untuk memilih beberapa Syaikh Al-Azhar dan menghadiri *halaqah-halaqah* mereka mengenai bahasa Arab, fiqh, ushul fiqh, hadis, tafsir, tauhid (ilmu kalam) dan ilmu-ilmu Islam lainnya.<sup>10</sup>

Setelah lulus Al-Azhar, Taqiyuddin Al-Nabhani kembali ke Palestina. Selama di Palestina, ia bekerja pada Departemen Pendidikan sebagai guru di Sekolah Menengah Atas Negeri (*Tsanawiyah Nizamiyah*) di Haifa. Di kota yang sama, ia mengajarkan ilmu-ilmu syariat di Madrasah Islamiyah.<sup>11</sup>

Dalam kurun waktu tahun 1932 sampai dengan 1938, Taqiyuddin Al-Nabhani sering pindah tempat tinggal dan pindah tempat mengajar.<sup>12</sup> Selama berkecimpung di dunia pendidikan, ia gelisah dan resah, melihat pengaruh Barat makin merasuk ke sekolah-sekolah. Ia menganggap pengaruh Barat dalam bidang peradaban relatif kecil, dibandingkan di dunia pendidikan. Ia lebih memilih berkecimpung di dunia hukum dari

---

<sup>9</sup>Ihsan Samarah, *op. cit.*, hlm. 15..

<sup>10</sup>Suha Taji Farouki, *op. cit.*, hlm. 125. Lihat juga Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun ... op.cit.*, hlm. 359.

<sup>11</sup>*Ibid.* 359

<sup>12</sup>Dalam pandangan Taqiyuddin Al-Nabhani, bahwa di seluruh sekolah setelah pendudukan, para penjajah Barat telah menetapkan sendiri kurikulum pendidikan dan ilmu pengetahuan berdasarkan filsafat, *hadharah* (peradaban) dan pemahaman kehidupan mereka yang khas. Pendidikan tersebut menempatkan tokoh-tokoh Barat menjadi sumber *tsaqafah* (kebudayaan), dan sejarah dan kebangkitan Barat dijadikan sumber asal yang telah mengacaukan cara berpikir kita. Oleh karena itu, Taqiyuddin An-Nabhani menjauhi bidang pendidikan dan mulai mencari pekerjaan lain dengan pengaruh peradaban Barat yang relatif lebih sedikit. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Ad-Daulah al-Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), hlm. 153-154.

pada pendidikan. Inilah alasan yang menyebabkan ia meninggalkan bidang pendidikan dan mencoba melamar kerja di Mahkamah Syariah.<sup>13</sup>

Akhirnya keinginan Taqiyuddin Al-Nabhani bekerja di peradilan terwujud. Ia diterima di Mahkamah Syar'iyah Besar sebagai sekretaris, dipindahkan ke Tabriya. Pindah lagi ke Haifa dengan tugas baru, sebagai kepala sekretaris (*basy khatib*) dan pada tahun 1940-1948 ia diangkat sebagai asisten qadhi (*musyawir*). Tahun 1945-1948, ia dipindah-tugaskan ke Ramallah. Ketika Yahudi menduduki Palestina, ia pun keluar dari Ramallah menuju Syam. Tidak lama kemudian ia kembali lagi ke Palestina, karena permintaan sahabatnya Anwar al-Khatib, dan ia diangkat sebagai qadhi di Mahkamah Syar'iyah Al-Quds pada tahun 1948. Taqiyuddin Al-Nabhani diangkat sebagai anggota Mahkamah Isti'naf oleh Kepala Mahkamah Syar'iyah dan Kepala Mahkamah Isti'naf, Abdul Hamid as-Sa'il, hingga tahun 1950. Karena ia mencalonkan diri menjadi Majelis Perwakilan (*Majelis Niyabi*), ia mengundurkan diri dari jabatannya tahun 1950.<sup>14</sup>

## 2. Aktivitas Politik Taqiyuddin Al-Nabhani

Sejak masih remaja Taqiyuddin Al-Nabhani sudah memulai aktivitas politik (*siyasa*)<sup>15</sup> karena pengaruh kakeknya, Yusuf An-Nabhani.<sup>16</sup> Ketika Taqiyuddin Al-Nabhani duduk di bangku kuliah, perhatiannya kepada masalah politik makin besar. Ia kerap kali

<sup>13</sup>Ihsan Samarah, *Ma'fhum*.... *op. cit.*, hlm. 18.

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 19-20.

<sup>15</sup>Politik dalam pengertian An-Nabhani bukanlah rebutan kekuasaan atau rebutan jabatan. Politik yang dalam bahasa Arab diterjemahkan *as-Siyasiyah*, menurut An-Nabhani ialah "*pengaturan urusan umat, baik dalam maupun luar negeri yang dilaksanakan oleh negara dan umat. Negara melaksanakan aktivitas pelayanan terhadap umat secara langsung, sedangkan umat yang mengawasi dan mengoreksinya*". Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Ma'fahim Siyasiyah* ... *op. cit.*, hal. 1. Taqiyuddin An-Nabhani, *Afkar Siyasiyah* ..... *op. cit.*, hlm. 7, 14.

<sup>16</sup>Kakeknya –Yusuf Al-Nabhani- pernah terlibat dalam diskusi-diskusi dengan orang-orang yang terpengaruh peradaban Barat, seperti Muhammad Abduh, para pengikut ide pembaharuan, tokoh-tokoh free masonry, dan pihak-pihak lain yang merongrong dan membangkang terhadap daulah Usmaniyah. Lihat Ihsan Samarah, *op.cit.*, hlm. 21.

berdebat masalah politik dengan rekan-rekannya, bahkan dengan para Syaikh Al-Azhar mengenai tindakan yang harus dilakukan untuk membangkitkan umat Islam. Beberapa sahabatnya menceritakan sikap-sikapnya yang menggaungkan seruan-seruan yang bersifat menantang, yang mampu memimpin situasi Al-Azhar saat itu.<sup>17</sup>

Ketika Taqiyuddin Al-Nabhani kembali dari Kairo ke Palestina dan menjalankan tugasnya di Kementerian Pendidikan Palestina, ia sudah melakukan penyadaran mengenai situasi yang ada saat itu kepada para murid yang diajarnya dan orang-orang yang ditemuinya. Taqiyuddin Al-Nabhani menyadari bahwa pengaruh penjajah Barat di negeri kaum muslimin semakin kuat. Alasan ini pula yang menyemangati Taqiyuddin Al-Nabhani untuk berupaya membangkitkan pemikiran dan perasaan kaum muslimin dengan Islam dan menggelorakan semangat murid-muridnya untuk berpegang teguh terhadap Islam. Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, bahwa Barat tidak hanya menjajah kaum muslimin, tetapi juga meracuni pemikiran kaum muslimin. Semua itu disampaikan oleh Taqiyuddin Al-Nabhani melalui kutbah-kutbah, dialog-dialog dan perdebatan-perdebatan.<sup>18</sup>

Ketika Taqiyuddin Al-Nabhani pindah pekerjaan dari pengajar ke bidang peradilan, ia juga selalu mengadakan kontak dengan para ulama dan para pemikir yang dikenal dan ditemuinya di Mesir. Kepada mereka diajukan ide untuk membentuk sebuah partai politik yang berasaskan Islam untuk membangkitkan kaum muslimin, mengembalikan kemuliaan dan kejayaan kaum muslimin. Untuk tujuan ini, Taqiyuddin Al-Nabhani rela berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain di Palestina.<sup>19</sup>

Kedudukan Taqiyuddin Al-Nabhani di Mahkamah Isti'naf di Al-Quds sangat membantu aktivitasnya. Ia dapat menyelenggarakan berbagai seminar dan mengumpulkan

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, 21

<sup>18</sup>*Ibid.*, 21

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 22.

para ulama dari berbagai kota di Palestina. Dalam kesempatan itu, ia mengadakan dialog dengan mereka mengenai metode kebangkitan yang benar. Ia banyak berdebat dengan para pendiri organisasi-organisasi sosial Islam (*Jam'iyah Islamiyah*) dan partai-partai politik yang bercorak nasionalis dan patriotis. Ia menjelaskan kekeliruan langkah, kesalahan pemikiran dan rusaknya kegiatan mereka.<sup>20</sup>

Taqiuddin Al-Nabhani sering melontarkan berbagai masalah politik dalam kutbah yang ia sampaikan pada acara-acara keagamaan di berbagai masjid, seperti Masjid al-Aqsha, Masjid Ibrahim al-Khalil (Hebron), dan Masjid-masjid lainnya. Taqiuddin Al-Nabhani mengkritik sistem pemerintahan negara-negara Arab yang berbentuk monarki. Menurut Taqiuddin Al-Nabhani bahwa sistem pemerintahan Islam bukanlah monarki melainkan khilafah. Taqiuddin Al-Nabhani mengemukakan bahwa perubahan paradigma sistem pemerintahan di negara-negara Arab tersebut merupakan rekayasa penjajah Barat dan hal ini merupakan strategi Barat untuk mencengkeram negeri-negeri Islam.

Taqiuddin Al-Nabhani juga sering membongkar strategi politik negara-negara Barat, kemudian membeberkan rencana mereka untuk menghancurkan Islam dan umatnya. Ia berpandangan bahwa kaum muslimin wajib mendirikan partai politik berasaskan Islam.<sup>21</sup>

Taqiuddin Al-Nabhani kemudian mencalonkan dirinya untuk menduduki Majelis Perwakilan. Karena sikap-sikapnya yang kritis terhadap pemerintah yang berkuasa,

---

<sup>20</sup>*Ibid.* Lihat juga Taqiuddin Al-Nabhani, *at-Takattul al-Hizbiy*, terj. Zakaria dkk, (Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 3-5.

<sup>21</sup>Hizb at-Tahrir adalah sebuah partai politik yang berasaskan aqidah Islam. Politik merupakan aktivitasnya dan Islam adalah ideologinya. Hizb at-Tahrir bergerak di tengah-tengah umat dan bersama-sama mereka berjuang untuk menjadikan Islam sebagai perkara yang paling utama, serta membimbing mereka untuk mendirikan kembali sistem khilafah dan menegakkan hukum yang berdasarkan apa yang telah diturunkan Allah dalam realita kehidupan ini. Hizb at-Tahrir bukan kelompok yang berdasarkan kerohanian semata, bukan lembaga ilmiah, bukan lembaga pendidikan (akademis) dan bukan lembaga sosial. Akan tetapi Hizb at-Tahrir merupakan kelompok politik. Ide-ide Islam menjadi jiwa, inti, sekaligus rahsia kelangsungan kelompoknya. Lihat Hizb at-Tahrir, *Mengenai Hizb at-Tahrir .... qd. cit.*, hlm. 1.

aktivitas politik dan upayanya yang sungguh-sungguh untuk membentuk sebuah partai politik, serta keteguhannya berpegang kepada agama (Islam), ia tidak berhasil untuk duduk dalam Majelis Perwakilan.

Kecaman Taqiyuddin Al-Nabhani terhadap sistem pemerintahan negeri-negeri Arab tersebut membuat marah raja Yordania, Abdullah bin al-Husain. Sikap Taqiyuddin Al-Nabhani yang keras dan tegas, hampir saja mengantarkannya ke penjara. Sekalipun demikian, kejadian tersebut tidaklah membuat surut aktivitas politiknya. Tekad dan semangat Taqiyuddin Al-Nabhani tidak pernah luntur. Ia terus mengadakan kontak-kontak dan diskusi-diskusi, sehingga akhirnya ia berhasil meyakinkan para ulama, tokoh politik dan pemikir untuk membentuk partai politik yang berasaskan Islam.

Taqiyuddin Al-Nabhani lalu menyodorkan kepada mereka kerangka organisasi partai dan pemikiran yang dapat digunakan sebagai bekal *tsaqafah*<sup>22</sup> bagi partai yang akan dibentuk. Ternyata pemikiran-pemikiran Taqiyuddin Al-Nabhani ini dapat diterima dan disetujui oleh para ulama, pemikir dan politikus. Dengan terbentuknya partai politik Hizb at-Tahrir, aktivitas tokoh harakah Islam ini semakin padat.

Sikap kritis Taqiyuddin Al-Nabhani terhadap Pemerintah Yordania tersebut, membawa implikasi berupa larangan Partai politik Hizb at-Tahrir untuk melakukan seluruh

---

<sup>22</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani mengemukakan bahwa *tsaqafah* adalah ilmu yang titik tolak pembahasannya aqidah. *Tsaqafah* atau ilmu agama adalah ilmu yang berakar dari *way of life tertentu* yang mengajarkan pandangan hidup dan hukum-hukum kehidupan. *Tsaqafah* Islam merupakan kebudayaan Islam yang menginvestasikan peradaban (hadharah: himpunan ide kehidupan) Islami. Hadharah atau peradaban Islami adalah ide-ide Islam tentang kenegaraan (*daulah*), kemasyarakatan (*ijtima'*), kekeluargaan (*'usrah*) dan personalitas (*af'rad*). Ide-ide diderivasikan *tsaqafah* sebagai juklak dan teknis meliputi masalah hukum, adab, pandangan hidup dan sejarah. Produk-produk teknologi yang dihasilkan peradaban dan kebudayaan Islam merupakan kekayaan khazanah ke-Islaman yang dimiliki kaum muslimin, semisal kaligrafi atau arsitektur masjid. Baghdad dan Cordova merupakan dua kota monumental Islam. Sedangkan *tsaqafah gharbiyah* atau kebudayaan Barat ialah keilmuan yang berakar pada *way of life* Barat, yakni materialisme. Teori asal-usul manusia dan kehidupan dikemukakan Aristoteles, Harold Urey, Darwin dan semacamnya adalah contoh khazanah Barat. Lukisan Monalisa karya Leonardo da Vinci dan lukisan yang mengekspose keindahan tubuh Barat dilandasi pandangan hedonistik Barat terhadap wanita. Lihat Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhshiyah Islamiyah*, jilid III, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), hal. 43.

aktivitasnya. Taqiyuddin Al-Nabhani sama sekali tidak peduli dengan larangan pemerintahan Yordania tersebut. Ia tetap teguh untuk melanjutkan misinya menyebarkan risalah yang telah ditetapkan sebagai asas bagi Hizb at-Tahrir. Ia sangat berharap untuk membangkitkan umat Islam melalui Hizb at-Tahrir, gerakan dakwah yang telah ia dirikan dan ia tetapkan falsafahnya dengan karakter-karakter tertentu yang ia gali dari nash-nash syara' dan sirah Nabi Saw<sup>23</sup>.

Menyadari eksistensi Hizb at-Tahrir sebagai partai politik terlarang di Yordania, Taqiyuddin Al-Nabhani menjalankan aktivitas pembinaan kader-kadernya secara rahasia. Langkah ini ditempuh untuk menjaga kelangsungan dakwah Hizb at-Tahrir. Meskipun dalam tataran praktis, aktivitas politik Taqiyuddin Al-Nabhani tidak terlihat. Dalam tataran ide, Taqiyuddin An-Nabhani tetap melakukan kritik kepada penguasa secara terbuka. Ia

---

<sup>23</sup>Taqiyuddin An-Nabhani menggali nash-nash syara' dalam menetapkan gerakan dakwahnya dengan menggali nash-nash syara' sebagai berikut : (1). Al-Qur'an. Allah berfirman : ولتكن منكم امة

*و لتكن منكم امة* Dan hendaklah ada di antara kalian, segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, menyeru kepada kema'rufan dan mencegah dari kemunkaran, merekalah orang-orang yang beruntung. (QS. Ali Imran : 104).

Menurut Taqiyuddin An-Nabhani, bahwa ayat tersebut mewajibkan kaum muslimin untuk membentuk kelompok (partai politik) yang terpadu, yang memiliki dua tugas sebagai berikut : pertama, mengajak kepada kebaikan, yaitu mengajak kepada Islam dan kedua, menyeru kepada ma'ruf dan mencegah kemunkaran. (2). Sabda Rasulullah :

و الذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف و لتنهون عن المنكر أوليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده، ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم .

"Demi Dzat yang diriku berada di tangan-Nya, sungguh kalian (mempunyai dua pilihan, yaitu) melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar, ataulah Allah akan mendatangkan siksa dari sisi-Nya yang akan menimpa kalian. Kemudian setelah itu kalian berdoa, maka (doa itu) tidak akan dikabulkan. (HR. Imam Tirmizi).

Sirah dakwah Rasulullah dilakukan tiga tahap : 1. Pembinaan aqidah. 2. Interaksi dengan mengajak kepada Islam, (3). Meminta perlindungan kepada tokoh-tokoh masyarakat supaya menyerahkan kekuasaan kepada Rasulullah untuk mendirikan negara. Dari Sirah Nabi Saw tersebut, Taqiyuddin Al-Nabhani menetapkan operasional dakwahnya sebagai berikut : 1. Pembinaan dan perkaderan untuk melahirkan orang-orang yang meyakini *fikrah* Hizb at-Tahrir dan untuk membentuk kerangka sebuah partai. 2. Interaksi dengan umat supaya mampu mengemban dakwah Islam sehingga umat akan menjadikannya sebagai masalah utama dalam kehidupannya dan berusaha menerapkannya dalam realitas kehidupan. 3. Pengambil-alihan kekuasaan dengan menerapkan Islam secara praktis dan totalitas, sekaligus untuk menyebar-luaskan risalah Islam ke seluruh dunia. Lihat Hizb at-Tahrir, *Mengenai Hizb At-Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis*, terj. Abu Afif dan Nur Khalish (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hal. 3-4 dan 32.



segera membentuk Dewan Pimpinan (*Qiyadah*) yang baru bagi Hizb at-Tahrir. Ia sendiri yang menjadi pucuk pimpinannya. Dewan pimpinan ini dikenal dengan sebutan *Lajnah Qiyadah*. Tokoh pendiri partai politik Internasional ini terus memegang kepemimpinan Dewan Pimpinan Hizb at-Tahrir ini sampai wafatnya pada tanggal 25 Rajab 1398 H bertepatan dengan tanggal 20 Juni 1977 M.<sup>24</sup> Ia dikebumikan di pemakaman Al-Auza'i di Beirut.<sup>25</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani kembali menghadap Allah dengan meninggalkan puluhan karya, hasil pemikiran, dan ijtihadnya.

Sepanjang masa kepemimpinan Taqiyuddin Al-Nabhani, ia telah melakukan berbagai aktivitas politik yang gemilang.<sup>26</sup> Hasil yang paling nampak ialah ia mewariskan kepada kader-kadernya dan secara umum kepada umat Islam, sebuah partai politik yang cukup berpengaruh.

Semua upaya Taqiyuddin Al-Nabhani ini telah menjadi Hizb at-Tahrir sebagai partai politik dengan kekuatan Islam yang luar biasa dengan memiliki pola tahapan dakwah yang terencana, sistematis dan terukur, sehingga Hizb at-Tahrir cukup diperhitungkan oleh seluruh pemikir dan politikus, baik yang bertaraf regional maupun internasional, meskipun Hizb at-Tahrir tetap tergolong partai terlarang di dunia Islam.

---

<sup>24</sup>Ihsan Samarah, *op. cit.*, hlm. 32. Lihat juga Taqiyuddin Al-Nabhani, *Membangun ....* hlm. 360.

<sup>25</sup>Ihsan Samarah, *op.cit.*, hlm. 35.

<sup>26</sup>Hizb at-Tahrir di bawah pimpinan Taqiyuddin An-Nabhani telah berhasil melewati tahapan dakwahnya yang paling rawan dan fase awalnya yang paling sulit dengan gemilang. Hizb at-Tahrir tengah meniti jalannya sebagai sebuah partai yang berkomitmen untuk terjun sebagai subjek di tengah masyarakat, sekaligus sebagai pembangkit revolusi pemikiran dan perasaan secara menyeluruh. Hizb at-Tahrir juga tengah berjalan menuju titik tolak perjalanan dakwahnya. Dengan demikian, Hizb at-Tahrir harus menyeru umat dan melakukan aktivitas di tengah-tengah masyarakat. Meskipun titik tolak tersebut akan dijumpai Hizb at-Tahrir secara alami sesuai perjalanan dakwahnya, akan tetapi titik tolak tersebut sangatlah rawan dan sulit serta memerlukan usaha keras supaya secara pasti dapat menghantarkan tercapainya bertolaknya dakwah. Usaha ini sangat memerlukan kecermatan, sebab usaha ini harus dilaksanakan dalam berbagai kondisi yang ada di tengah masyarakat. Keberhasilan Hizb at-Tahrir melakukan usaha ini dengan gemilang merupakan faktor yang akan membawa Hizb at-Tahrir menuju tahapan titik tolak dakwah. Lihat Hizb at-Tahrir, *Nuqthatul Inthilaq*, terj. Muhammad Maghfur, (Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000), hlm. 1-2.

Aktivitas politik merupakan aspek paling menonjol dalam kehidupan Taqiyuddin Al-Nabhani hingga akhir hidupnya. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Taqiyuddin Al-Nabhani adalah Hizb at-Tahrir itu sendiri. Kemampuannya yang tinggi dalam melakukan analisis politik nampak dalam kecermatan selebaran analisa politik yang dikeluarkan oleh Hizb at-Tahrir. Taqiyuddin Al-Nabhani juga banyak menelaah peristiwa-peristiwa politik, lalu mendalaminya dengan amat teliti, disertai pemahaman yang tajam terhadap situasi-situasi politik dan ide-ide politik yang berkembang dan aktual.<sup>27</sup>

### 3. Karya-karya Taqiyuddin An-Nabhani.

Karya-karya Taqiyuddin Al-Nabhani mencakup berbagai bidang, mulai bidang politik, ekonomi, sosial, hingga masalah-masalah individu. Karya-karya Taqiyuddin Al-Nabhani mencapai 30 kitab lebih. Selain itu, ia juga menulis sangat banyak *nasyrah-nasyrah*, yaitu artikel-artikel yang berisi tanggapan terhadap situasi yang terjadi, kritik konstruktif berdasarkan persepsi Islam, yang ia tulis dan disebarakan sebagai solusi problematika yang muncul.

Adapun karya-karya yang telah dikeluarkan Taqiyuddin Al-Nabhani adalah sebagai berikut : 1. *Al-Nizham al-Islam*, 2. *Al-Takatul al-Hizby*, 3. *Mafahim Hizb al-Tahrir*, 4. *Al-Nizham al-Iqtishad fi al-Islam*, 5. *Al-Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, 6. *Al-Nizham al-Hukm fi al-Islam*, 7. *Al-Dustur*, 8. *Muqaddimah al-Dustur*, 9. *Al-daulah al-Islamiyah*, 10. *Al-Syakhsyah al-Islamiyah* (3 jilid); 11. *Mafahim Siyasiyah li Hizb al-Tahrir*, 12. *Al-Nazarat Siyasiyah li Hizb al-Tahrir*, 13. *Al-Nida'un Har*, 14. *Al-Khilafah*, 15. *Al-Tafkir*, 16. *Al-Dusiyah*, 17. *Sur'at al-Badihah*, 18. *Nuqtah al-Intilaq*, 19. *Dukhul al-Mujtama'*, 20. *Inqazu Filistin*; 21. *Risalah al-Arab*, 22. *Tasalluh Misr*, 23. *Al-Ittifaqiyah al-Sana'iyah al-Misriyah al-*

---

<sup>27</sup>*Ibid.* hlm.35

*Suriyah wa al-yamaniyah*, 24. *Hall Qadiyah Falistin 'ala al-Thariqah al-Amrikiyah wa al-Inkiliziyah*, 25. *Al-Nazariyat al-Firagh al-Siyasi Haula Masyra' Aizanhawar*.<sup>28</sup>

Buku-buku tersebut diterbitkan atas nama Taqiyuddin Al-Nabhani. Pengaruh Taqiyuddin Al-Nabhani dan Hizb al-Tahrir melalui buku-buku dan *nasyrah-nasyrah* yang dikeluarkannya semakin besar dan mendapat dukungan serta simpati masyarakat.<sup>29</sup> Bukti dukungan dan respon masyarakat adalah dengan bergabung mereka dengan Hizb at-Tahrir dan mendukung perjuangan partai politik internasional ini. Pemerintah Yordania khawatir melihat pengaruh tersebut dan risau terhadap dampak yang akan muncul, yakni akan menggoyang rezim saat itu. Selanjutnya Pemerintah Yordania mengeluarkan undang-undang yang melarang buku-buku Taqiyuddin Al-Nabhani.

Untuk menghindari sanksi pelanggaran undang-undang yang telah ditetapkan Pemerintah Yordania tersebut, selanjutnya karya-karya Taqiyuddin Al-Nabhani mempergunakan nama-nama anggota Hizb at-Tahrir yang notabene adalah murid-muridnya dengan maksud supaya kitab-kitab karya Taqiyuddin Al-Nabhani mudah disebarluaskan. Ternyata cara ini cukup efektif untuk menyebar-luaskan pemikiran-pemikirannya. Informasi tentang pergantian nama Taqiyuddin Al-Nabhani dengan nama orang lain diperoleh dari murid-muridnya sendiri.<sup>30</sup>

Adapun kitab-kitab Taqiyuddin Al-Nabhani yang menggunakan nama murid-muridnya sebagai berikut : 26. *As-Siyasah al-Iqtishad al-Musla* dan 27. *An-Nizham al-Uqubat*, ditulis Taqiyuddin Al-Nabhani dengan menggunakan nama muridnya, Abdurrahman Al-Maliki; 28. *An-Naqd al-Isytirakiyah al-Markisiyah*, 29. *Kaifa Hudimat al-*

<sup>28</sup>*Ibid.* hal. 15-16. Lihat juga Anonim, *Hizb at-Tahrir*, (tp : Hizb at-Tahrir, 1985), hlm. 29-30.

<sup>29</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Dukhul al-Mujtama'*, (Al-Quds: Hizb at-Tahrir, 1958), hlm. 1.

<sup>30</sup>Informasi ini diperoleh dalam wawancara langsung dengan beberapa senior Hizb at-Tahrir, seperti Ahmad Da'war dan Ghanim Abduh Ismail. Ihsan Samarah, *op. cit.*, hlm. 40.

Khilafah, dan 30. *Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah*, ditulis Taqiyuddin Al-Nabhani dengan menggunakan nama muridnya, Abdul Qadim Zallum; 31. *Ahkam al-Bayyinah*, ditulis Taqiyuddin Al-Nabhani dengan menggunakan nama muridnya, Ahmad Ad-Daur; 32. *Ahkam as-Shalat dan Al-Fikr al-Islami*, ditulis Taqiyuddin Al-Nabhani dengan menggunakan nama muridnya, Muhammad Muhammad Ismail.<sup>31</sup>

Ciri khas karya-karya Taqiyuddin Al-Nabhani ialah menampilkan Islam sebagai sebuah ideologi (istilah Taqiyuddin Al-Nabhani adalah *mabda*) yang sempurna. Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa Islam adalah ideologi yang mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi manusia dewasa ini. Dalam karya-karyanya Taqiyuddin Al-Nabhani menempatkan Islam sebagai sebuah sistem kehidupan, karena karya-karyanya ini dimaksudkan untuk bekal bagi anggota-anggota Hizb at-Tahrir secara khusus dan umat Islam secara umum dalam melanjutkan kehidupan Islam dengan jalan menegakkan kembali Khilafah Islamiyah. Kitab-kitab Taqiyuddin Al-Nabhani juga menjadi landasan ideologis dan politis bagi Hizb at-Tahrir.<sup>32</sup>

## **B. Situasi Sosial Politik Pada Masa Taqiyuddin Al-Nabhani**

### **1. Imperialisme Fisik.**

Paruh pertama abad 20 ditandai dengan kokohnya imperialisme Barat di dunia Islam. Watak dari sebuah ideologi kapitalisme adalah imperialisme (menguasai). Secara ideologis, mereka terdorong menguasai seluruh negara, termasuk dunia Islam. Dorongan ideologi mendesak pengikutnya untuk menerapkan ideologi tersebut. Jadi motifnya tidak lain adalah perang ideologi. Sementara itu, kekuasaan kaum muslim sudah lenyap, dan

---

<sup>31</sup>Anonim, *loc. cit.* Lihat Ihsan Samarah, *loc. cit.*

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 15.

umat Islam berada dalam kemunduran yang sangat parah pasca runtuhnya khilafah Islam di Turki tahun 1924, sehingga dengan mudah mereka menguasai umat Islam.<sup>33</sup>

Ketika itu, imperialisme dijalankan dengan bentuk fisik dan pemikiran. Imperialisme fisik ditandai dengan dikuasainya dunia Islam oleh negara-negara Eropa. Hingga menjelang perang dunia I, orang-orang Eropa telah menduduki hampir semua wilayah Islam. Perancis di Afrika Utara, Barat dan wilayah Katulistiwa serta di Levant (kini Lebanon dan Syria), Inggris di Palestina, Transyordan, Irak, teluk Arab, Anak benua India, semenanjung Malaya, Belanda di kepulauan Indonesia.<sup>34</sup> Sedangkan di Turki dan Iran, umat Islam tetap berkuasa. Memasuki perang dunia I (1914-1918 M), khilafah Usmani bergabung dengan Jerman dan Austria melawan sekutu (Inggris, Perancis dan Italia). Aliansi Jerman, Usmani dan Austria kalah, sehingga berakibat fatal bagi Khilafah Usmani. Akibat kekalahan tersebut wilayah Khilafah Usmani dibagi-bagi oleh negara-negara Eropa, hingga tidak tersisa kecuali wilayah Turki sekarang ini.

Sebelumnya melalui perjanjian Sykes-Picot tahun 1916,<sup>35</sup> Negara Perancis, Inggris, Rusia, dan Italia telah sepakat membagi-bagi wilayah Khilafah Usmani, jika menang perang. Pada tahun 1918, ketika sekutu mengalahkan aliansi militer Jerman, khilafah Usmani, dan Austria, selanjutnya Inggris dan Perancis sepakat membagi Timur tengah menjadi beberapa negara. Lebanon dan Syria di bawah kekuasaan Perancis.

---

<sup>33</sup>Taqiuddin An-Nabhani, *Ma'fahim Siyasiyyah* . . . . . *op. cit.*, hal. 14.

<sup>34</sup>Azyumardi Azra, *Pergulatan Politik Islam*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hal. 6.

<sup>35</sup>Pada bulan Nopember 1915, Francois George Picot, Konsul Jendral Beirut tiba di London untuk membahas pembagian tanah kaum muslimin dengan Kolonel Sir Mark Sykes. Pada bulan Mei 1916, tercapai perjanjian bahwa akan dibuat dua negara Arab, yang pertama ada di bawah proteksi Perancis dan berpusat di Damaskus, sedangkan yang kedua ada di bawah perlindungan Inggris mulai dari Baghdad sampai Aqobah. Perancis akan mengatur Lebanon mulai dari utara Beirut sampai ke selatan Tyre; Inggris akan mengontrol Acre dan Haifa; sedangkan Palestina akan menjadi tanggung jawab Perancis, Inggris dan Rusia secara bersama-sama. Isi perjanjian ini secara lebih rinci baru terungkap ketika ditulis oleh orang-orang Bolshevik setelah revolusi Bolshevik pada bulan Nopember 1917. Lihat Shabir Ahmed dan Abid Karim, *The Roots of Nationalism in the Muslim World*, terj. Zettira Nadia Rahma, (Bangil : Al-Izzah, 1997), hal. 54.

Palestina, Yordania, Syria, dan Irak di bawah kekuasaan Inggris. Italia menguasai Anatolia Barat Daya, Yunani menguasai Thrace, Izmir dan kepulauan Aegea. Armenia menjadi negara merdeka dan Kurdistan menjadi Propinsi yang merdeka.<sup>36</sup> Sedangkan kekuatan gabungan mengambil alih kontrol kota Istanbul dari imperialisme fisik yang dilakukan negara-negara Eropa adalah upaya memukul Khilafah Usmani.

Cita-cita Eropa, utamanya Inggris, akhirnya tercapai yaitu hancurnya system khilafah Usmani, setelah puluhan tahun berusaha diruntuhkan oleh negara-negara Eropa tidak berhasil. Khilafah Usmani diruntuhkan dengan menggunakan orang dalam, Mustafa Kemal Attaturk.<sup>37</sup>

Mustafa Kemal menghapus institusi kekhalifahan pada tanggal 3 Maret 1924 M.<sup>38</sup> Praktis sejak itu kaum muslimin kehilangan pemersatu yang terwujud secara real. Umat Islam yang dulunya dalam kesatuan kepemimpinan menjadi terpecah-pecah dalam puluhan negara.

Runtuhnya Khilafah Usmani adalah salah satu dari dua peristiwa besar yang memotivasi Taqiyuddin Al-Nabhani merumuskan pemikiran-pemikirannya sekaligus keputusannya untuk mendirikan sebuah partai politik yang diberi nama Hizb at-Tahrir. Hizb at-Tahrir memiliki tiga tujuan. Pertama, berupaya melangsungkan kembali kehidupan Islam. Kedua, mengemban dakwah Islamiyah ke seluruh dunia. Ketiga, menjaga

<sup>36</sup>Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, (Jakarta: Logos, 1997), hlm. 118-119.

<sup>37</sup>Konspirasi Mustafa Kemal dengan Inggris telah terjalin sejak bulan Maret 1917. Sebelum runtuhnya khilafah Usmani, Mustafa Kemal telah berupaya menarik mundur negara dari perang dunia dan menandatangani perjanjian damai dengan Inggris. Berbagai peperangan pimpinan Mustafa Kemal berakhir dengan kemenangannya. Semua itu hanyalah sandiwara rancangan Inggris. Realita ini membuat jabatan kemiliteran Mustafa Kemal naik menjadi menjadi Pimpinan Tinggi Angkatan Perang. Pada tanggal 16 Maret 1920, Inggris menduduki Istanbul. Konspirasi Inggris dengan Mustafa Kemal mendekati hasil dengan tegaknya pemerintahan di Ankara, dan menjadikannya pemegang kendali kekuasaan dan penguasa efektif di Turki. Klimaksnya, Mustafa Kemal menghapus institusi khilafah pada tanggal 3 Maret 1924. Lihat Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah: Telaah Politik Menjelang Runtuhnya Negara Islam*, terj. Abu Faiz, (Bangil: Al-Izzah, 2001), hlm. 83-177.

<sup>38</sup>Harun Nasution, *Pembaharuan .... op. cit.*, hlm. 151. Lihat juga Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib, *op. cit.*, hlm. 24.

pemikiran, perasaan dan masyarakat agar tetap Islami. Untuk merealisasikan tujuan itu, menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, hanya ada satu jalan, yaitu kembali tegaknya Khilafah Islamiyyah.<sup>39</sup>

Runtuhnya Khilafah dapat dikatakan sebagai malapetaka paling dahsyat yang telah mengguncangkan dan menimbulkan kehebohan bagi kaum muslimin di seluruh dunia.<sup>40</sup> Alasannya, pertama : runtuhnya khilafah berarti kaum muslimin tercerai dalam berbagai negara bangsa dan kehilangan negara pemersatu kaum muslimin di seluruh dunia. Kedua, runtuhnya khilafah membuat kaum muslimin tidak lagi bisa menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Berkenaan dengan runtuhnya khilafah Usmani, Taqiyuddin Al-Nabhani menulis buku *Daulah Islam* yang menjelaskan khilafah Usmani dihancurkan oleh negara-negara Eropa. Dalam buku ini menjelaskan metode menegakkan negara yang dilakukan Rasulullah Saw ketika di Mekkah dan menjelaskan metode yang seharusnya ditempuh kaum muslimin sekarang dalam upaya menegakkan Daulah Islam kembali.<sup>41</sup>

Peristiwa kedua yang ikut mempengaruhi pemikiran Taqiyuddin Al-Nabhani adalah dirampasnya tanah suci Palestina, lalu berdirinya negara Yahudi Israel, pada tahun 1948 M. Ketika Israel menguasai Palestina, ia keluar dari Ramallah, salah satu kota di Palestina, menuju Syam. Alasannya, pertama karena tekanan Israel terhadap aktivis Islam, sehingga aktivitas dakwah di Palestina sudah tidak kondusif. Kedua, karena ia melihat dakwah memperjuangkan kembali khilafah lebih efektif dilakukan di luar Palestina.

---

<sup>39</sup>Anonim, *op. cit.*, hlm 21-22

<sup>40</sup>Dhiya'uddin ar-Rais, *Islam dan Khilafah : Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Islam Ali Abdurraziq*, terj. Afif Muhammad, (Bandung: Pustaka, 1985), hal. Xxi. Runtuhnya Khilafah Usmani merupakan salah satu faktor pendorong lahirnya Nahdatul Ulama. Lihat M. Masyhur Amin, *op. cit.*, hlm. 44-46.

<sup>41</sup>Taqiyuddin An-Nabhani, *Ad-Daulah Islamiyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994).

## 2. Imperialisme Pemikiran.

Seiring terjadinya imperialisme fisik, terjadi pula imperialisme pemikiran. Penjajah Barat berupaya menyebarkan dan mengkontaminasi ide dan pandangan hidupnya ke dunia Islam. Imperialisme jenis kedua ini menimpa umat Islam yang tak kalah dahsyatnya dengan imperialisme fisik, yakni sejak imperialisme Eropa abad ke 18.<sup>42</sup> Akibat yang ditimbulkan dari imperialisme jenis ini masih dirasakan umat Islam sampai sekarang.

Imperialisme pemikiran yang dimaksud adalah berupa masuknya ide atau konsep yang lahir dari Sekularisme. Kemudian pada tahun 1950-an atau 1960-an menyebar pemikiran yang berasal dari Sosialisme<sup>43</sup>. Konsep tersebut bukanlah konsep yang berkenaan tentang sains dan teknologi, melainkan konsep tentang tata aturan mengenai interaksi antar sesama manusia dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya.

Muhammad al-Naqib al-Attas mengemukakan bahwa Sekularisme adalah paham yang menjauhkan aturan-aturan agama mengenai kehidupan dunia.<sup>44</sup> Sementara itu, Taqiyuddin An-Nabhani mengemukakan bahwa Sekulerisme adalah paham yang memisahkan agama dengan kehidupan. Pada hakekatnya paham ini mengakui adanya agama. Mereka mengakui adanya Pencipta alam semesta, manusia, dan hidup, serta mengakui adanya hari kebangkitan. Sebab, semua itu adalah dasar pokok agama, ditinjau dari eksistensi agama. Dengan pengakuan ini berarti terdapat ide tentang alam semesta, manusia dan hidup, serta apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Mereka tidak menolak eksistensi agama. Ketika ditetapkan bahwa agama harus dipisahkan dari

---

<sup>42</sup>Esposito, *op. cit.*, hal. 26.

<sup>43</sup>Mas'ud an-Nadwi mengemukakan bahwa Sosialisme adalah paham yang bukan hanya sekedar pandangan-pandangan sempit tentang politik dan ekonomi tetapi paham tersebut merupakan filsafat atau cara berpikir menyeluruh dan terpadu dengan ciri-ciri khas tertentu. Lihat Mas'ud An-Nadwi, *Islam dan Sosialisme*, terj. Bahrin Abu Bakar, (Bandung: Risalah, 1983), hal. 24.

<sup>44</sup>Muhammad al-Naqib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, terj. Karsidjo Djojokusumo, (Bandung: Pustaka, 1981), hal. 20-21.



kehidupan, pengakuan itu akhirnya hanya sekedar formalitas belaka, karena meskipun mereka mengakui eksistensi agama, tetapi pada dasarnya mereka menganggap bahwa kehidupan dunia ini tidak ada hubungan dengan apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan.<sup>45</sup> Jadi dalam hal ini, yang dimaksud dengan konsep yang lahir dari Sekularisme atau Sosialisme ialah *konsep yang berisi tata aturan interaksi antar sesama manusia yang diatur menurut selera atau akal manusia itu sendiri, dan tidak perlu menggunakan aturan yang berasal dari Tuhan (Agama).*

Ide-ide atau konsep-konsep yang berasal dari Sekularisme mengalir deras ke dalam benak umat Islam, terutama para pelajar atau cendekiawan dan kaum elitnya (penguasa) dalam kurun waktu yang cukup lama. Akibatnya, sebagian umat Islam meminjam istilah Amien Rais –mengalami *westoxication* (racun barat) yang pada akhirnya melahirkan penyakit yang oleh Abul Hasan Sadr disebut *westomania*, sejenis penyakit kejiwaan yang menganggap Barat adalah segala-galanya.<sup>46</sup>

Konsep-konsep itu dibawa masuk oleh para pelajar muslim yang belajar ke Eropa, serta orang-orang Eropa yang datang ke negeri-negeri Islam.<sup>47</sup> Melalui dua jalur itulah konsep-konsep Barat dikenalkan dan diterapkan kepada umat Islam.

Pasca perang dunia II (1932-1945 M), lahirlah dua adidaya, Amerika Serikat dan Uni Sovyet. Amerika Serikat mewakili sekaligus simbol dari kemenangan Kapitalisme yang lahir dari Sekularisme, sementara Uni Sovyet refresentasi keunggulan dari ideologi Sosialisme-Komunisme. Mereka menggantikan sekaligus melanjutkan peran negara-

---

<sup>45</sup>Taqiuddin An-Nabhani, *Nidzam al-Isl...*, *op. cit.*, hlm. 41.

<sup>46</sup>Tulisan *westoxi ( fi ? ) cation* di buku Amien Rais berbeda dengan yang tertulis di buku Esposito. Dalam buku Amien Rais tertulis *westoxication*, sedang dalam buku Esposito tertulis *westofication*. Lihat Amien Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 36. Lihat juga Esposito, *op. cit.*, hlm. 6.

<sup>47</sup>Harun Nasution, *op. cit.*, hlm. 15-16.

negara Eropa sebagai imperialis di dunia Islam. Tidak lagi berupa fisik, tetapi berupa tekanan politik dan pemberian hutang dengan dalih bantuan untuk memajukan ekonomi negara-negara miskin yang notabene mayoritas adalah negeri-negeri muslim.

Dua negara adi daya tersebut berupaya menguasai dunia, termasuk dunia Islam. Umat Islam hanya berperan sebagai penonton, tanpa bisa berbuat apapun, bahkan kerap kali menjadi korban atau rekayasa kedua negara tersebut. Posisi umat Islam ibarat pelanduk yang berada di antara dua gajah sedang bertarung, diinjak oleh dua negara adi daya yang sedang bertarung. Negara-negara di dunia Islam yang baru merdeka menyaksikan pertentangan antara Kapitalisme versus Sosialisme itu dengan perasaan *inferior*. Seolah-olah tidak ada alternatif lain kecuali dua ideologi itu. Akibatnya, negara-negara di dunia Islam terbagi menjadi dua, berpihak ke Amerika berarti menganut ideologi Kapitalis dan berpihak Uni Sovyet berarti menganut ideologi Sosialis.<sup>48</sup>

Paruh pertama abad ke 20, dunia Islam didominasi oleh ideologi Kapitalisme. Setelah sekian puluh tahun mereka menerapkan ideologi itu, umat Islam sadar bahwa mereka telah gagal untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan seperti negara-negara Barat. Dengan kesadaran itu, umat Islam (baca: para penguasanya), seharusnya kaum muslimin kembali kepada Islam, tetapi malah mengambil ideologi Sosialime hanya karena ideologi menganut prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan hidup. Pada dekade 1950/1960-an banyak negara di dunia Islam berpaling kepada ideologi Sosialisme. Negara-negara semacam itu antara lain, Syria, Irak, Aljazair dan Libya adalah contoh dari kenyataan tersebut.

Implikasi dari penjajahan Barat ke dunia Islam, maka banyak konsep Barat yang masuk ke berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim, misalnya dalam bidang

---

<sup>48</sup>*ibid.*, hlm. 29-32.

politik dan sistem pemerintahan, masuk konsep republik, demokrasi, tanah air (patria yang kemudian menjadi patriotisme) dan nasionalisme (kebangsaan),<sup>49</sup> dalam bidang ekonomi masuk ekonomi Kapitalisme dan sistem ekonomi Sosialis, dalam bidang hukum, masuk hukum Barat menggeser syariat Islam, baik hukum konstitusi (Undang-undang Dasar), hukum perdata maupun hukum pidana.<sup>50</sup> Sedangkan yang tersisa hanyalah hukum keluarga, perkawinan atau perceraian, pembagian warisan dan perwakafan. Itu pun dengan berbagai modifikasi.

Adanya dua macam hukum itu pada gilirannya memunculkan dua macam Pengadilan, Pengadilan Sipil (Negeri) dan Pengadilan Agama. Ruang lingkup Pengadilan Sipil (Negeri) mengurus masalah-masalah muamalat, sedangkan Pengadilan Agama untuk mengurus hukum-hukum keluarga.<sup>51</sup> Padahal sebelumnya umat Islam tidak mengenal adanya dikotomi semacam itu. Umat Islam hanya mengenal satu macam pengadilan, yaitu pengadilan berdasarkan hukum-hukum Islam untuk penyelesaian persengketaan yang terjadi.<sup>52</sup>

Munculnya dualisme pengadilan ini berpangkal dari ide sekulerisme yang memisahkan agama dengan sektor publik. Adanya departemen agama hanyalah eksekusi dari paham sekulerisme. Adanya peradilan agama akibat cara pandang yang salah, yakni sekularisme. Akar masalahnya adalah sudut pandang yang digunakan oleh pemerintah adalah paham sekulerisme, sehingga wajar saja ada dualisme, peradilan agama dengan peradilan sipil. Bila syari'at Islam dijadikan sebagai undang-undang dasar negara (dustur)

---

<sup>49</sup>*Ibid.* Azyumardi Azra, *op. cit.*, hlm. 35 dan 233. Lihat juga Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 17.

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 3.

<sup>52</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Nidzam al-Isl ....op. cit.*, hlm. 40-41.

dan perundang-perundangan negara (qanun), tentu tidak ada dikotomi sipil dan agama dan semuanya berjalan di atas dasar hukum Islam.

Di bidang pendidikan muncul kurikulum buatan penjajah untuk sekolah-sekolah di negeri-negeri Islam yang berisi *tsaqafah* (ilmu pengetahuan yang bersumber dari wahyu) dan pandangan hidup Barat (ilmu pengetahuan yang bersumber dari proses berpikir manusia). Pendidikan yang seharusnya Asasnya adalah aqidah Islam dan syari'at Islam bertujuan membentuk kepribadian Islam (syakhshiyah Islamiyyah). Kurikulum dan metodologi pendidikannya bersandarkan 'aqidah dan hukum Islam.<sup>53</sup>

Awal mula masuknya konsep-konsep tersebut ke dunia Islam ialah pada abad ke 18. Orang-orang Barat terus menerus mempropagandakan ide dan konsepsinya, sehingga pada paruh pertama abad ke 20 telah menjadi opini umum, terutama perkotaan.<sup>54</sup> Secara intelektual kaum muslimin saat itu merasa inferior sehingga tidak bisa melakukan dialog yang seimbang dengan Barat. Para intelektual muslim lebih memilih upaya perubahan dengan mengadopsi dan menerapkan pemikiran dari Barat ketimbang menggali khazanah Islam. Kelemahan ini erat kaitannya dengan imperialisme dan kolonialisme fisik yang dilakukan Barat puluhan tahun lamanya, sehingga umat Islam lebih banyak berposisi sebagai konsumen produk-produk ideologi Kapitalisme maupun Sosialisme.

Slogan-slogan semacam Nasionalisme dan Patriotisme, misalnya, pada akhirnya menggeser ikatan kaum muslimin, dari yang semula berdasarkan kesamaan aqidah (Islam) menjadi ikatan berdasarkan kesamaan bangsa dan negara. Kaum muslimin "dipaksa" untuk lebih merasa "bersaudara" dengan orang sebangsanya dari pada dengan orang seiman meskipun beda negara dan kebangsaannya. Fakta bahwa umat Islam

---

<sup>53</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Syakhshiyah Isl* ..... *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>54</sup>Saad Eddin Ibrahim, *Krisis Elit dan Demokratisasi Dunia Arab, Islamika*, (Bandung: Mizan, April-Juni, 1997), No. 4, hlm. 4 & 15.

sebelumnya hanya diikat dengan ikatan aqidah Islam bisa dilihat dalam tulisan Bernard Lewis sebagai berikut :

*“Ciri identitas agama sebagai batas pembeda memang diterapkan secara universal. Para pendatang Eropa ke dunia muslim memandang dirinya sebagai orang Prancis, Inggris, Italia, Jerman dan sebagainya. Sebaliknya kaum Muslim yang datang ke Eropa, dari manapun , seperti Maroko, Iran Turki dan lain-lain, tidak pernah mengaitkan dirinya maupun tuan rumahnya dalam kebangsaan atau istilah etnis lainnya. Hampir semuanya seragam menyebut negerinya sebagai “negeri Islam” dan mengatakan pemerintahannya sebagai “Penguasa Muslim” atau istilah sejenisnya”.*<sup>55</sup>

Dengan slogan nasionalisme –tentunya tidak melupakan faktor-faktor lain– tumbanglah pemersatu umat Islam, yaitu Khilafah. Sejak runtuhnya khilafah Usmani, tidak ada lagi institusi pemersatu kaum muslimin. Memang ada organisasi yang berupaya mempersatukan kaum muslimin, misalnya, Organisation Islamic Conference (OKI) , tetapi sejak kemunculannya belum mampu mempersatukan kaum muslimin. Sebab, masing-masing negara anggotanya masih disibukkan dengan kepentingan dalam negerinya, ketimbang kepentingan bersama. Semangat nasionalisme itu dimanfaatkan dengan baik oleh Eropa untuk merongrong khilafah Usmani, misalnya Syarif Husain di Makkah berhasil dibujuk Inggris untuk melepaskan diri dari kekuasaan Usmani dan mengklaim sebagai wakil dan juru bicara resmi Arab.<sup>56</sup>

Mulusnya proses penghancuran khilafah itu terjadi karena orang Turki lebih mengutamakan ke-Turki-annya dari pada ke-Islam-annya. Sikap orang Turki ini dibalas

---

<sup>55</sup>Bernard Lewis, *Muslim Menemukan Eropa*, terj. Ahmad Niamullah Muis, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1988), hal. 164-165.

<sup>56</sup>Azyumardi Azra, *op. cit.*, hal. 16.

oleh orang-orang Arab dengan mengumandangkan nasionalisme Arabnya, begitu juga di Mesir dan negeri-negeri muslim lainnya.

Di atas landasan Nasionalisme dan Patriotisme inilah, kemudian dibangun negara-negara yang sebagian berbentuk republik dengan sistem demokrasi, sedangkan sebagian lainnya berbentuk monarki.<sup>57</sup>

Negara-negara di Timur Tengah tersebut bisa berdiri lebih disebabkan adanya dukungan negara-negara Eropa, dari pada dukungan rakyatnya. Hingga tidak aneh jika dikemudian hari, mereka –para penguasa di Timur Tengah- lebih memperhatikan dan menuruti kehendak “*tuannya*” ketimbang keinginan “*rakyatnya*”<sup>58</sup>.

### C. Pemikiran-Pemikiran Taqiyuddin An-Nabhani

#### 1. Pemikiran Taqiyuddin Al-Nabhani Secara Global.

---

<sup>57</sup>Negara yang berbentuk Republik adalah sistem pemerintahan berbentuk republik berdiri atas pilar demokrasi, yang kedaulatannya ada ditangan rakyat. Rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk memecatnya. Rakyat juga berhak untuk membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta merubahnya. Sedangkan negara yang berbentuk monarkhi adalah sistem pemerintahannya menerapkan sistem waris atau putra mahkota. Singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya, seperti bila mereka mewariskan harta warisan. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidham al-Hukm....* qd. cit., hlm. 32-33.

<sup>58</sup>Maghfur Wahid menulis artikel “*Melawan Penyesatan Barat*” dalam majalah bulanan Al-Waie. Ia mengungkapkan bagaimana strategi Barat meraih tujuan dan target politiknya. Menurutny, ada beberapa bentuk dan pendekatan yang biasanya ditempuh Barat dalam upaya penyesatan terhadap umat Islam. Pertama, *intelektual approach*, yang terlihat pada penyesatan aqidah dan sistem pemerintahan. Misalnya, *slogan Islam yes, politik Islam no*, yang pernah dikembangkan oleh tokoh Muslim di negeri ini (Nurcholis Majid, pen) adalah contoh bentuk penyesatan *intelektual approach*. Kedua, *cultural approach*, yang terlihat melalui *tsaqafah* yang merusak jiwa dan menjungkir-balikkan akal sehat sehingga menjadi *idiot* tanpa menyisakan sedikitpun manfaat bagi orang lain. Ketiga, *political approach*, yang terlihat melalui agen dan partai-partai politik yang bekerja sebagai agen imperialis. Misalnya, melalui apa yang UNDP (*United Nation Development Program*) sebut dengan the *Governance Reform Agenda* (Agenda Reformasi Pemerintah) yang berhasil mengadakan pemilu tahun 1999, membentuk legislatif baru, serta melahirkan tokoh dan partai politik karbitan yang –sama diketahui umum- lebih loyal kepada kepentingan asing ketimbang bangsanya sendiri. Dalam hal ini UNDP –yang merupakan alat Amerika- menurut G. Ravi Rajan, penanggung jawab UNDP untuk wilayah Indonesia, telah menyediakan dana sebesar Rp. 2,7 trilyun untuk pragrom tersebut. Semua ini dilakukan agar upaya penyesatan melalui apa yang mereka sebut sebagai reformasi menuju transisi demokrasi atau Indonesia Baru berhasil. Padahal, Amerika bermaksud mencengkramkan hegemoninya dengan mengganti rezim yang tidak disukainya. Lihat Maghfur Wahid, *Majalah Al-Waie : Media Politik dan Dakwah*, Edisi No. 30, (Bogor: Hizbut Tahrir Indoensia, 2003), hlm. 18.

Dalam perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani, realitas masa kini memperlihatkan umat Islam mundur dan tidak mampu bangkit –setelah pernah menguasai dunia berabad-abad lamanya- terjadi karena dominasi pemikiran ideologi Kapitalis terhadap pemikiran kaum muslimin. Alasannya, sejak runtuhnya khilafah Usmani, negeri-negeri kaum muslimin dikuasai oleh Barat. Kaum muslimin masih mengadopsi berbagai pemikiran dan pandangan hidup yang berasal dari Barat. Padahal kebangkitan kaum muslimin hanya bisa dicapai dengan menerapkan Islam dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa pemikiran –bagi umat mana pun- adalah kekayaan yang tak ternilai harganya yang mereka miliki dalam kehidupan mereka, bila mereka adalah sebuah umat yang baru lahir. Bahkan, pemikiran merupakan peninggalan sangat berharga yang akan diwarisi oleh generasi penerusnya, menjadi umat yang memiliki identitas dalam bentuk pemikirannya yang maju. Sedangkan kekayaan yang bersifat materi, penemuan ilmiah, rekayasa industri, dan yang lainnya, masih jauh kedudukannya dibanding dengan pemikiran. Bahkan, semua bisa diraih melalui pemikiran, dan semata-mata bisa dilestarikan hanya oleh pemikiran.

Taqiyuddin Al-Nabhani menyatakan bahwa generasi Islam mengadopsi pemikiran Kapitalis, karena melihat keberhasilannya, bukan karena memahami betul realitas pemikirannya. Generasi ini juga telah mengadopsi sistem dan hukum Kapitalis, bukan karena menyadari bahwa peraturan-peraturan itu sebenarnya muncul dari pandangan hidup Kapitalis. Oleh karena itu, mereka sendiri tetap jauh dari pemikiran-pemikiran Kapitalis dilihat dari segi konsepsi pemikirannya, sekalipun mereka menatap kehidupan mereka dengan gaya hidup Kapitalis. Begitu pula, mereka jauh dari pemikiran-pemikiran

Islam dilihat dari segi praktiknya, sekalipun mereka beragama Islam dan mengkaji pemikiran-pemikirannya.<sup>59</sup>

Dalam perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani, kecenderungan generasi Islam terhadap pemikiran-pemikiran tersebut telah melampaui batas, tidak lagi pada usaha untuk mengkompromikan antara Islam dengan hukum dan solusi Kapitalis, bahkan sampai pada perasaan *inferior* (rendah diri) terhadap kemampuan Islam untuk melahirkan solusi bagi problema kehidupan yang senantiasa silih berganti. Selanjutnya melahirkan ketergantungan pada hukum dan solusi Kapitalis. Bahkan, tanpa membutuhkan upaya kompromi lagi, sehingga tidak merasa riskan untuk meninggalkan hukum Islam dan mengadopsi hukum non Islam. Tujuannya adalah agar bisa meraih kemajuan hidup dalam percaturan kehidupan, sejajar dengan dunia yang berperadaban tinggi. Juga agar bisa menyusul bangsa Kapitalis dan Sosialis dengan menganggap bangsa Kapitalis dan Sosialis sebagai bangsa yang maju. Sedangkan golongan yang amat sedikit dari generasi Islam yang masih memegang Islam, mereka juga memiliki kecenderungan terhadap pemikiran Kapitalis. Namun, mereka masih mempunyai obsesi tentang kemungkinan untuk mengkompromikan antara Islam dengan Kapitalis dan Sosialis. Hanya sayang sekali, bahwa mereka yang berupaya untuk mengkompromikan antara Islam dengan Ideologi non Islam itu tidak memiliki pengaruh (peranan) sama sekali dalam kehidupan masyarakat, dilihat dari segi interaksinya di tengah-tengah kehidupan manusia.<sup>60</sup>

Dalam kerangka berpikir Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa memberikan pemikiran Islam dan hukum syara' sebagai solusi kehidupan jelas akan mengalami benturan dengan manusia yang *kosong* dari pemikiran dan metode berpikir. Juga akan berbenturan dengan

---

<sup>59</sup>*Loc.cit.*, hlm. 3.

<sup>60</sup>*Ibid.*, hlm. 3



kecenderungan terhadap pemikiran Kapitalis dan Sosialis, termasuk dengan realitas kehidupan sehari-hari yang dikendalikan oleh sistem Kapitalis.

Oleh karena itu, selama pemikiran itu tidak kokoh hingga betul-betul menancap kuat dalam benak dan akal mereka, tidak mungkin pemikiran itu akan menggoncang orang-orang tersebut, bahkan rasanya sulit memalingkan perhatian mereka. Sebab dengan pemikiran ini, ia akan mampu membawa logika-logika yang lemah plus dangkal itu ke dalam proses berpikir yang mendalam. Ia juga mampu menggugah kecenderungan yang menyimpang serta perasaan yang kacau hingga lahir kecenderungan yang benar, yaitu kepada pemikiran dan hukum Islam. Jadi, sejatinya, generasi Islam senantiasa memaparkan asas-asas yang menjadi dasar pijakan hukum dan solusi Kapitalis dan Sosialis. Sejatinya, ia menjelaskan kerusakan pemikiran Kapitalis dan Sosialis, kemudian menghancurkannya. Sejatinya, ia juga senantiasa mendalami realitas kehidupan yang silih berganti, kemudian menjelaskan solusi Islam terhadap realitas itu. Ia harus mendalami bahwa hukum syara' yang wajib diambil dan diterapkan, karena hukum syara' yang digali berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah atau dalil yang ditunjukkan oleh keduanya. Bukan dari sesuai atau tidak sesuainya untuk masa sekarang. Dengan kata lain, ia harus menjelaskan bahwa hukum syara' wajib diterapkan, dilihat dari segi aqidah, bukan karena maslahat. Untuk menyampaikannya harus dilandasi dengan penjelasan dalil syara'-nya yang menjadi pijakan *istinbathnya*, atau penjelasan *illatnya dengan illat syar'iyah*, yang telah dinyatakan, maupun yang telah ditunjukkan oleh nash syara' yang serupa.<sup>61</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa masalah yang berat yang telah memalingkan kaum muslimin, dan penyakit yang paling parah yang telah mereka derita dalam kehidupan mereka ini adalah masalah pemikiran yang diadopsi dari non Islam, baik

---

<sup>61</sup> *Loc.cit.*, hlm. 3

yang menyangkut persoalan pemerintahan maupun ekonomi. Sebab, pemikiran non Islam inilah yang paling banyak diterima dan disambut dengan penuh kebanggaan oleh kaum muslimin. Pemikiran inilah yang paling banyak direkayasa oleh Barat untuk diterapkan secara praktis, bahkan mereka senantiasa mengawasi upaya penerapannya dengan gigih dan terus menerus. Umat Islam dipimpin dengan mempergunakan sistem demokrasi secara *de jure*—dan ini merupakan usaha negara imperialis Barat untuk mempertahankan sistem mereka- umat Islam secara *de facto* dipimpin dengan mempergunakan sistem ekonomi Kapitalis pada semua sektor perekonomiannya.<sup>62</sup>

Dalam bidang politik dan pemerintahan, pandangan kritis Taqiyuddin Al-Nabhani cenderung puristis dan analitis. Taqiyuddin Al-Nabhani tidak sepakat bahwa bentuk negara Islam adalah republik dan sistem politiknya demokrasi, karena konsep-konsep yang lahir dari demokrasi bertentangan dengan aqidah Islam.<sup>63</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani pun menolak bentuk negara republik, kekaisaran, monarki, dan federasi. Menurutnya, semua konsep itu tidak bersumber dari aqidah Islam, tetapi dari akal manusia.<sup>64</sup> Sedangkan Islam memiliki bentuk negara sendiri yang khas dan unik, yaitu khilafah.<sup>65</sup>

Mencermati konsepsi ekonomi, Taqiyuddin Al-Nabhani melontarkan kritikan tajam terhadap sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis. Taqiyuddin Al-Nabhani membeberkan kesalahan-kesalahan pandangan dan konsep-konsep ekonomi Kapitalis maupun Sosialis. Analisa perbandingan sistem ekonomi Islam dengan sistem ekonomi Kapitalis dan Sosialis

---

<sup>62</sup>*Ibid.*, hal. 5.

<sup>63</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukmi* .... *op. cit.*, hlm. 21-22.

<sup>64</sup>*Ibid.*, hlm. 22, dan 30-35.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 35-41. Dalam buku ini, Taqiyuddin menjelaskan sistem pemerintahan secara rinci, mulai dari asas, struktur, dan pilar-pilarnya. Semua itu berbeda dengan sistem-sistem pemerintahan yang lain. Taqiyuddin Al-Nabhani tidak menerima penyamaan sistem pemerintahan Islam dengan sistem-sistem yang lain, sekalipun tidak dipungkiri akan adanya titik singgung antara satu sistem dengan sistem yang lainnya. Namun tetap lebih banyak perbedaannya dari pada titik persamaannya. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Sistem Khilafah: Konsep Kenegaraan Dan Kepemimpinan Umat Islam Seluruh Dunia*, terj. M. Al-Khatthath dkk, (Jakarta: Khazanah Islam, 1995).

dituangkannya dengan membuat sebuah buku berjudul *Nizham al-Iqtishadi fi al-Islam*. Kritikan-kritikannya kepada ekonomi kapitalisme dan sosialisme dalam buku itu ada di bab pendahuluan.<sup>66</sup>

Bidang pendidikan pun tidak luput dari kajian Taqiyuddin Al-Nabhani. Ia merasa prihatin melihat kurikulum pendidikan yang berkembang saat itu. Pendidikan Islam telah dipengaruhi kurikulum pendidikan Barat. Ia gelisah melihat pengaruh Barat dalam bidang pendidikan. Sikap keprihatinannya ini dituangkannya dalam bukunya *Ad-Daulah Islamiyyah* dengan mengemukakan sebagai berikut :

*“Adapun di bidang ilmu pengetahuan, para penjajah telah membuat kurikulum pendidikan dan kurikulum ilmu pengetahuan berdasarkan filsafat, kebudayaan dan konsep kehidupan mereka yang khas di sekolah-sekolah misionaris mereka sebelum adanya pendudukan, dan seluruh sekolah setelah pendudukan. Kemudian penjajah menjadikan kepribadian Barat sebagai asas ilmu pengetahuan yang mewarnai ilmu pengetahuan kita, sebagaimana dijadikannya sejarah, kebangkitan dan lingkungan Barat sebagai sumber utama untuk mengacaukan akal kita”.*<sup>67</sup>

Adapun terhadap teknologi, Al-Nabhani menganggapnya sebagai sesuatu yang netral, sepanjang tidak nampak pengaruh pandangan hidup (*hadharah*)<sup>68</sup> dalam teknologi yang dihasilkan. Oleh karena itu, umat Islam boleh mempelajari dan mengambilnya. Teknologi semacam ini diistilahkan oleh Al-Nabhani sebagai *madaniyah ‘amm*. *Madaniyah ‘amm* didefinisikan oleh Al-Nabhani sebagai *“bentuk-bentuk fisik bagi benda-benda yang*

<sup>66</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizam al-Iqtishadi* ... *op. cit.*, hlm. 15-56.

<sup>67</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *op. cit.*, hlm. 200.

<sup>68</sup>Hadharah adalah “sekumpulan mafahim (ide yang dianut dan mempunyai fakta) tentang kehidupan”. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizam al-Isl* ... *op. cit.*, hlm. 59.

*terindera yang digunakan dalam berbagai urusan kehidupan dan tidak dipengaruhi oleh hadharah*".<sup>69</sup>

Untuk memperjelas pendapatnya, Taqiuddin An-Nabhani membedakan antara ilmu (sains) dan *tsaqafah*. Ilmu adalah "*pengetahuan yang diperoleh melalui metode eksperimen dan percobaan-percobaan*" (*secara fisik*). Sedangkan *tsaqafah* diartikan sebagai "*pengetahuan yang diperoleh melalui metode pemberitaan (ikhbar), pertemuan (talaqqi) dan istinbat*". Misalnya, *tsaqafah* adalah sejarah, bahasa, dan semua pengetahuan yang tidak diperoleh melalui metode eksperimen. Perbedaannya menurut Al-Nabhani, ilmu bersifat alami atau netral. Artinya, ilmu bersifat universal dan berlaku bagi seluruh umat manusia (bangsa) dan tidak khusus untuk umat tertentu saja. Sedangkan *tsaqafah*, ada yang khusus dan ada yang umum. Yang khusus disandarkan kepada umat tertentu yang menghasilkan atau sesuatu yang menjadi kekhasan dan perbedaan *tsaqafah*nya dengan *tsaqafah* umat-umat yang lain, sehingga berlakunya pun khusus untuk umat manusia yang melahirkannya. Misalnya, pergaulan pria dan wanita, etika, sejarah kepahlawanan, dan falsafah hidup. Sedangkan *tsaqafah* yang umum, berlaku umum, sekalipun yang menghasilkannya orang atau umat tertentu. Misalnya, perdagangan, pelayaran dan lain-lain.<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Contoh *madaniyah 'amm* tersebut teknologi pesawat terbang, teknologi informasi, teknologi nuklir, dan lain-lain. Kebalikan dari *madaniyah 'amm* adalah *madaniyah khas*. Madaniyah khas didefinisikan oleh An-Nabhani sebagai madaniyah yang telah dipengaruhi hadharah. Misalnya, patung, lukisan makhluk hidup, salib, dan sebagainya. Lihat *Ibid.* hlm. 59.

<sup>70</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Asy-Syakhsiyah qp. cit.* hlm. 262-263.



### BAB III

## LANDASAN PEMIKIRAN TEORITIS KEKHOLIFAHAN DALAM SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM

### A. Pengertian Khilafah

Khilafah (khilâfah) merupakan mashdar dari fi'il mâdhi *khalafa*, berarti menggantikan atau menempati tempatnya<sup>1</sup>. Khilafah adalah orang yang datang setelah orang lain lalu menggantikan tempatnya (*jâ'a ba'dahu fa shâra makânah*)<sup>2</sup>. Dalam kitab *Mu'jam Maqâyis al-Lughah* (II/210) dinyatakan, khilafah dikaitkan dengan penggantian karena orang yang kedua datang setelah orang yang pertama dan menggantikan kedudukannya. Menurut Imam Al-Thabari, makna bahasa inilah yang menjadi alasan mengapa *al-sulthân al-a'zham* (penguasa besar umat Islam) disebut sebagai khalifah, karena dia menggantikan penguasa sebelumnya, lalu menggantikan posisinya.<sup>3</sup>

Dalam pengertian syariat, khilafah digunakan untuk menyebut orang yang menggantikan Nabi saw. dalam kepemimpinan Negara Islam (*al-Dawlah al-Islâmiyyah*).<sup>4</sup> Inilah pengertiannya pada masa awal Islam. Kemudian, dalam perkembangan selanjutnya, istilah khilafah digunakan untuk menyebut Negara Islam itu sendiri.<sup>5</sup> Pemahaman ini telah

---

<sup>1</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984), Cet. Ke-1, hlm. 390

<sup>2</sup> Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wâsih*, (Kairo: Darul Ma'arif, 1972). Juz I, hlm. 251

<sup>3</sup> Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992), Juz I, hlm. 199

<sup>4</sup> Al-Baghdadi, Abdurrahman, "*Ma'fûm al-Khâlifah wa al-Khilâfah fi al-Hadhârah al-Islâmiyyah*". Majalah Al-Khilâfah al-Islâmiyah. No 1 Th I. Sya'ban 1415 H/Januari 1995 M, (Jakarta: Al-Markaz Al-Istitratiji li al-Buhuts al-Islamiyah, 1995), hlm. 20

<sup>5</sup> Al-Khalidi, Mahmud Abdul Majid, *Qawâ'id Nizhâm al-Hukm fi al-Islâm*, (Kuwait: Darul Buhuts al-'Ilmiyyah, 1980), hlm. 226

menjadi dasar pembahasan seluruh ulama fikih siyâsah ketika mereka berbicara tentang khilâfah.<sup>6</sup> At-Taftazani mendefinisikan khilafah, sebagaimana dikutip oleh Dr.Wahbah Al-Zuhaili:

الخلافة : رأسه عامة في أمر الدين والدنيا, خلافة عن النبي رسول الله  
صلي الله عليه وسلم<sup>7</sup>

*Khilafah adalah kepemimpinan umum dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Nabi. saw. Imam Al-Mawardi mendefinisikan imamah:*

الإمامة موضوعه لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا<sup>8</sup>

*Imamah ditetapkan bagi pengganti kenabian dalam penjagaan agama dan pengaturan urusan dunia. Ibn Khaldun mendefinisikan khilafah:*

والخلافة هي حمل الكافة علي مقتضي النظر الشرعي في مصالحهم  
الأخروية والدنيوية الراجعة إليها<sup>9</sup>

*Khilafah adalah pengembanan seluruh urusan umat sesuai dengan kehendak pandangan syariat dalam berbagai kemaslahatan mereka, baik ukhrawi maupun duniawi, yang kembali pada kemaslahatan ukhrawi.*

<sup>6</sup> Dr.Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 661.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 661

<sup>8</sup> Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1960), cet. 1, hlm. 5

<sup>9</sup> Ibnu khaldun, *Tarikh Ibnu Khaldun; Al-Muqaddimah Jilid 1*, (Beirut: Dar al-Kitab al-'Ilmiyah, tt), hlm.201

Berbagai definisi di atas dapat bagi menjadi tiga kategori definisi, yaitu:

- (1) Definisi yang lebih menekankan pada penampakan agama (al-mazhhar ad-dīnī).
- (2) Definisi yang lebih menekankan pada penampakan politik (al-mazhhar as-siyâsī).
- (3) Definisi yang berusaha menggabungkan penampakan agama (al-mazhhar ad-dīnī) dan penampakan politik (al-mazhhar as-siyâsī).

Semua definisi di atas sebenarnya lebih mendeskripsikan realitas empirik Khilafah —misalnya adanya dikotomi wilayah “urusan dunia” dan “urusan agama”— daripada sebuah definisi yang bersifat syar’ī, yang diturunkan dari nash-nash syariat. Nash-nash syariat khususnya hadis-hadis Nabi saw., telah menggunakan istilah khalifah dan imam yang masih satu akar kata dengan kata khilafah/imamah. Imam al-Bukhari dalam Shahīh-nya telah mengumpulkan hadis-hadis tentang Khilafah dalam Kitab Al-Ahkâm. Sementara itu, Imam Muslim dalam Shahīh-nya telah mengumpulkannya dalam Kitab Al-Imârah <sup>10</sup>. Dengan demikian istilah Khilafah merupakan istilah syar’i yang definisinya harus digali dari nash.

Dengan menelaah nash-nash al-Quran dan hadis tersebut, akan dijumpai bahwa definisi Khilafah dapat dicari rujukannya pada 2 (dua) kelompok nash, yaitu: Kelompok Pertama, nash-nash yang menerangkan hakikat Khilafah sebagai sebuah kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslimin di dunia misalnya hadis berikut:

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليث. وحدثنا محمد بن رُحِمَج. حدثنا الليث عن نافع, عن ابن عمر, عن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم, أنه قال,

---

<sup>10</sup>Ali Belhaj, *op.cit.*, hlm. 15



ألا كلكم راع. وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي علي الناس راع,  
وهو مسؤول عن رعيته<sup>11</sup>

*Bukankah setiap kalian adalah pemimpin, Amir yang (memimpin) atas manusia adalah bagaikan seorang penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya).*

Ini menunjukkan bahwa Khilafah adalah sebuah kepemimpinan (ri'âsah/qiyâdah/imârah). Adapun yang menunjukkan bahwa Khilafah bersifat umum untuk seluruh kaum Muslim di dunia, misalnya adalah hadis berikut:

وحدثني وهب بن بقية الواسطي. حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري,  
عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله صلى الله  
عليه وسلم إذا بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخَرَ مِنْهُمَا<sup>12</sup>

*Jika dibaiat dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*

<sup>11</sup> Muslim, *Shahih Muslim* jilid 3, (Qahirah: Dar al-Hadits, 1991), hlm. 1459, Hadits no. 1829, Kitab Imarah, Bab Fadlilat al-Imam...

<sup>12</sup> Muslim, *op.cit.*, hlm. 1480, Hadits no. 1853, Kitab Imarah, Bab Idza Buyi' a li Khalifataini

Ini berarti, seluruh kaum Muslim di dunia hanya boleh dipimpin seorang khalifah saja, tak boleh lebih. Ini telah disepakati oleh empat imam mazhab: Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad, rahimahumullâh <sup>13</sup>.

Kelompok kedua, nash-nash yang menjelaskan tugas-tugas khalifah, antara lain: *Pertama*, tugas khalifah menerapkan seluruh hukum syariah Islam atas seluruh rakyat. Hal ini tampak dalam berbagai nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mengatur muamalat dan urusan harta benda antara individu Muslim (QS al-Baqarah [2]: 188, QS an-Nisa' [4]: 58), mengumpulkan dan membagikan zakat (QS at-Taubah [9]: 103), menegakkan hudud (QS al-Baqarah [2]: 179), menjaga akhlak (QS al-Isra' [17]: 32

*Kedua*, tugas khalifah mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia dengan jihad fi sabilillah. Hal ini tampak dalam banyak nash yang menjelaskan tugas khalifah untuk mempersiapkan pasukan perang untuk berjihad (QS al-Baqarah [2]: 216), menjaga perbatasan negara (QS al-Anfal [8]: 60), memantapkan hubungan dengan berbagai negara menurut asas yang dituntut oleh politik luar negeri, misalnya: mengadakan berbagai perjanjian perdagangan, perjanjian gencatan senjata, perjanjian bertetangga baik, dan semisalnya (QS al-Anfal [8]: 61; QS Muhammad [47]: 35).

Berdasarkan dua kelompok nash inilah, dapat dirumuskan definisi Khilafah secara lebih mendalam dan lebih tepat. Intinya, Khilafah adalah kepemimpinan umum bagi umat Islam sedunia untuk menegakkan syariat Islam dan mengemban dakwah Islam. Definisi inilah yang telah dirumuskan oleh Syaikh Taqiuddin al-Nabhani dalam kitab-kitabnya,

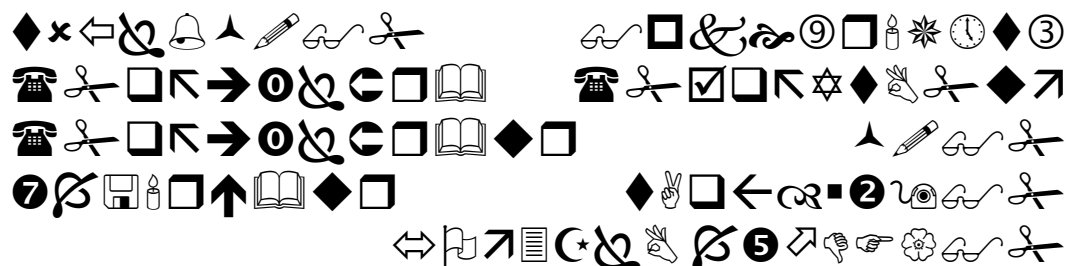
---

<sup>13</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, (Beirut: Darul Fikr, 1999), Cetakan I Juz V, hlm. 308; Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fî Ikhtilâf al-A'imma*, (Beirut: Darul Fikr, 1996), Cetakan I, hlm. 208

misalnya kitab Al-Khilâfah (hlm. 1), Muqaddimah ad-Dustûr <sup>14</sup>, dan Asy-Syakshiyah al-Islâmiyah <sup>15</sup>. Menurut Taqiyuddin juga, istilah khilafah dan imamah dalam hadis-hadis sahih maknanya sama saja menurut pengertian syariat (madlûl syar'î). Definisi inilah yang selayaknya diambil dan diperjuangkan agar terealisasi di muka bumi.

## B. Dalil-dalil Khilafah

Banyak nash syara', baik al-Qur'an maupun al-Sunah yang memerintahkan kaum muslimin untuk merealisasikan adanya Negara Islam dalam bentuk khilafah, antara lain<sup>16</sup> :



*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu.*<sup>17</sup>

Ayat ini memerintahkan ketaatan kepada Allah, dan Rasul serta pemimpin, dimana hukum ketaatan tersebut adalah wajib. Allah dan Rasul, keberadaannya sama-sama pasti, karena itu hukum menaatinya adalah pasti; tidak berubah karena ketiadaan objek yang ditaati. Sebaliknya, jika diperintahkan untuk menaati, hukum untuk mewujudkan objek yang ditaati menjadi pasti atau wajib. Sebab, tidak pernah ada hukum wajib diperintahkan atas sesuatu yang keberadaannya tidak ada<sup>18</sup>.

<sup>14</sup> Al-Nabhani, Taqiyuddin. *Muqaddimah ad-Dustûr*. (t.tp.: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir, 1963), bab Khilafah hlm. 128

<sup>15</sup> Al-Nabhani, Taqiyuddin.. *Asy-Syakshiyah al-Islâmiyyah*, Juz II, (Al-Quds: Min Mansyurat Hizb Al-Tahrir, 1953), hlm. 9.

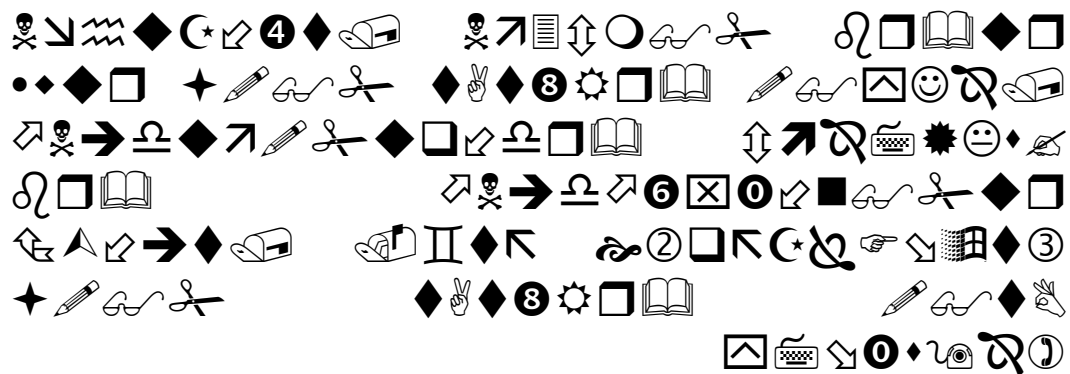
<sup>16</sup> Dr. Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985), cet. 2, hlm. 625. Al-Mawardi, *op.cit.*, hlm. 5. Lihat juga MIR Kurnia, *Menjadi Pembela Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2005), cet. 5, hlm. 167

<sup>17</sup> QS. Al-Nisa' (4): 59

<sup>18</sup> Al-Khalidi, *Qawaid Nizham Al-Hukmi*, (Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983), hlm. 239

Perintah menaati penguasa sebenarnya juga menunjukkan perintah memiliki pemerintahan. Sebab Allah swt. tidak memerintahkan taat pada sesuatu yang tidak ada. Jadi, adanya penguasa dalam suatu negara merupakan keharusan. Dan perintah Allah untuk mentaati mereka adalah juga perintah Allah untuk mewujudkannya.<sup>19</sup>

Allah mewajibkan umat Islam untuk menghukumi setiap permasalahan yang terjadi ditengah-tengah kehidupan mereka dengan hukum-hukum yang diturunkan-Nya<sup>20</sup>. Allah memerintahkan Rasulullah untuk mengurus urusan kaum muslimin dengan apa yang diturunkan Allah kepadanya.



*"Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang Telah diturunkan Allah kepadamu."*

Perintah Allah swt. kepada Rasulullah juga merupakan perintah kepada umatnya selama tidak ada dalil yang menunjukkan kekhususan kepadanya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan kepada Rasulullah. Oleh karena itu, ayat-ayat tersebut memerintahkan kaum muslimin untuk menerapkan hukum-hukum Allah dalam segala bidang. Aqidah dan syari'ah, persoalan pribadi, keluarga, masyarakat; baik sistem sosial,

<sup>19</sup>MR Kurnia, *op.cit.*, hlm. 167

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 165

politik, ekonomi, dan budaya semuanya diperintahkan Allah untuk diatur dengan aturan Islam.

Disamping ayat di atas, juga ayat lain yang berkaitan dengan kewajiban untuk melaksanakan hukum potong tangan terhadap pencuri dan hukum cambuk bagi pezina, tidak mungkin terlaksana kecuali dengan adanya Negara Islam yaitu Khilafah. Hukum adanya Negara Islam yaitu Khilafah adalah wajib, sebagai bagian dari hukum wajibnya melaksanakan *hudud* tersebut. Sebagaimana yang dinyatakan oleh kaidah ushul:

مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

*“Suatu kewajiban tidak akan bisa dilaksanakan dengan sempurna, kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu itu menjadi wajib pula.”<sup>21</sup>*

Dengan kaidah ini, dapat difahami bahwa, tidak mungkin dapat menyempurnakan kewajiban-kewajiban, misalkan membela agama, menjaga keamanan, melaksanakan hukum-hukum hudud dan yang lainnya, selain dengan adanya Negara Islam yaitu Khilafah.

Selain dari ayat-ayat al-Qur'an, nas hadits tentang bai'at menjelaskan tentang wajib adanya seorang imam yang diba'at untuk menerapkan Islam dalam seluruh aspek kehidupannya.

### C. Bentuk Pemerintahan Islam

Taqiuddin al-Nabhani berpandangan bahwa sistem pemerintahan Islam adalah sebuah sistem yang lain sama sekali dengan sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia, baik ditinjau dari aspek asas yang menjadi landasan berdiri, pemikiran, konsep,

<sup>21</sup>Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2004), cet. 1, hlm. 229

standar serta hukum-hukum yang dipergunakan untuk kepentingan umat Islam, maupun ditinjau dari aspek undang-undang dasar serta undang-undang yang diberlakukannya, atau ditinjau dari aspek bentuk yang menggambarkan wujud negara, maupun hal-hal yang menjadikannya beda sama sekali dari seluruh bentuk pemerintahan yang ada di dunia.<sup>22</sup>

#### a. Sistem pemerintahan Monarkhi

Taqiuddin Al-Nabhani berpandangan bahwa sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk monarki. Bahkan Islam tidak mengakui sistem monarki, maupun yang sejenis dengan sistem monarki. Ia menambahkan bahwa jika sistem monarki, pemerintahannya menerapkan sistem w

aris atau putra mahkota, singgasana kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra mahkota, dari orang tuanya, seperti bila mereka mewariskan harta warisan. Sedangkan sistem pemerintahan Islam tidak mengenal sistem waris. Pemerintahan Islam akan dipegang oleh orang yang dilai'at oleh umat Islam dengan penuh ridla dan kebebasan memilih pemimpinnya.<sup>23</sup>

Al-Mawardi dan Ibnu Khaldun –sebagaimana dikutip oleh Muhammad Dhiauddin Rais- yang cenderung membolehkan dengan jalan penunjukkan putra mahkota. Al-Mawardi membolehkan dengan alasan bahwa Abu Bakar pernah menunjuk Umar,

---

<sup>22</sup>Taqiuddin Al-Nabhani berpandangan, bahwa sistem monarki telah memberikan hak-hak tertentu serta hak-hak istimewa secara khusus untuk raja, yang tidak aka bisa dimiliki oleh orang lain. Sistem ini juga telah menjadikan raja di atas undang-undang, dimana secara pribadi memiliki kekebalan hukum. Raja, kadang kala hanya merupakan simbol bagi umat, dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa, seperti raja-raja di Eropa. Kemudian, kadang kala menjadi raja dan sekaligus berkuasa penuh, bahkan menjadi sumber hukum, dimana raja bebas mengendalikan negeri dan rakyatnya dengan sesuka hatinya, seperti raja di Saudi Arabia, Maroko, dan Yordania. Lihat Taqiuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm*..... *op. cit.*, hal. 31-32.

<sup>23</sup>*Ibid.* Lihat juga Taqiuddin Al-Nabhani, *Sistem Khilafah*..... *op. cit.*, hal. 47.

sedangkan Ibnu Khaldun membolehkan dengan alasan pengangkatan putra mahkota telah dikenal dalam tradisi agama dengan konsensus umat.<sup>24</sup>

Berbeda dengan keduanya, Taqiyuddin Al-Nabhani cenderung menolak dengan memberikan alasan, bahwa dalam pemerintahan Islam tidak mengenal *wilayatul abdi* (putra mahkota). Justru Islam menolak adanya putra mahkota, bahkan Islam juga menolak memperoleh pemerintahan atau kekuasaan dengan cara waris. Islam telah menentukan cara memperoleh pemerintahan atau kekuasaan dengan bai'at dari umat kepada Khalifah atau Imam dengan penuh ridla dan kebebasan memilih.<sup>25</sup>

Muhammad Dhiauddin Rais berpandangan, bahwa para mujtahid aliran-aliran Islam secara keseluruhan –kecuali kelompok Syi'ah- bersepakat bahwa jalan untuk mencapai kursi keimamahan adalah melalui pemilihan dan kemufakatan, artinya bukan melalui naskah wasiat atau penunjukan. Jika salah satu dari dua cara itu tidak berhasil dilaksanakan, yang tersisa tinggalah satu cara lainnya.<sup>26</sup> Para ulama fiqh telah merumuskan secara legal formal dalam satu rumusan yang berbunyi, “*sesungguhnya keimamahan itu identik dengan kontrak*”. Kontrak dalam pengertian ulama fiqh memiliki pengertian khusus, ada esensi kebersamaan, lalu untuk setiap kontrak memiliki objek, rukun, hukum-hukum, dan syarat-syaratnya.<sup>27</sup>

Menurut Al-Nabhani sistem pemerintahan monarki ini berbeda secara diametrikal dengan sistem pemerintahan Islam. Sistem pemerintahan Islam tidak pernah memberikan kekhususan kepada khalifah atau imam dalam bentuk hak-hak istimewa atau hak-hak

---

<sup>24</sup>Muhammad Dhiauddin Rais, *op. cit.*, hlm. 183-184.

<sup>25</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm* . . . . . *op. cit.*, hlm. 30.

<sup>26</sup>M. Dhiauddin Rais mengutip pendapat Imam Haramain dalam kitab *Al-Irsyad* yang menyatakan, kemudian jika nash tidak dapat difungsikan lagi, maka tidak ada alternatif lain kecuali pemilihan (dari umat). M. Dhiauddin Rais, *op. cit.*, hlm. 166.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 166

khusus. Khalifah tidak memiliki hak, selain hak yang sama dengan hak rakyat biasa. Khalifah juga bukan hanya sebuah simbol bagi umat. Di samping itu Khalifah juga bukan sebuah simbol yang berkuasa dan bisa memerintah serta mengendalikan negara beserta rakyatnya dengan sesuka hatinya. Khalifah adalah wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan, yang mereka pilih dan mereka bai'at dengan penuh ridla agar menerapkan syariat Allah atas diri mereka. Oleh karena itu, Khalifah juga tetap harus terikat dengan hukum-hukum Islam dalam semua tindakan, hukum serta pelayanannya terhadap kepentingan umat.<sup>28</sup>

Mencermati dua pandangan yang berbeda tentang sistem penunjukkan atau putra mahkota, penulis melihat sejatinya dalam masalah pengangkatan kepala negara (khalifah) diserahkan kepada mekanisme sistem pengangkatan dengan musyawarah. Menurut penulis, sistem penunjukkan atau putra mahkota tidak menggunakan proses musyawarah, karena menutup peluang calon pemimpin lainnya untuk maju menjadi kepala negara. Proses pemilihan kepemimpinan harus terbuka bagi siapa saja yang memiliki kapasitas dan untuk selanjutnya terserah kepada umat siapa dari calon yang dipilihnya.

#### b. Sistem Pemerintahan Republik

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, bahwa sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk republik. Alasannya, sistem pemerintahan berbentuk republik berdiri atas pilar demokrasi, yang kedaulatannya ada ditangan rakyat. Rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk memerintah serta membuat aturan, termasuk rakyatlah yang kemudian memiliki hak untuk menentukan seseorang untuk menjadi penguasa, dan sekaligus hak untuk

---

<sup>28</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm* . . . . . *op. cit.*, hlm. 31.



memecatnya. Rakyat juga berhak untuk membuat aturan berupa undang-undang dasar serta perundang-undangan, termasuk berhak menghapus, mengganti serta merubahnya.<sup>29</sup>

Menurut Al-Nabhani bahwa sistem pemerintahan republik berbeda secara diametrikal dengan sistem pemerintahan Islam. Bila dalam sistem pemerintahan republik yang berdaulat adalah rakyat, sedangkan dalam sistem pemerintahan Islam berdiri atas pilar aqidah Islam dan hukum-hukum syara', kedaulatan ditangan syara', bukan ditangan rakyat atau umat. Dalam hal ini, baik umat maupun Khalifah tidak berhak membuat aturan sendiri, karena yang berhak membuat aturan adalah Allah SWT semata. Sedangkan Khalifah hanya memiliki hak untuk mengadopsi hukum-hukum untuk dijadikan sebagai undang-undang dasar serta perundang-undangan dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Begitu pula umat tidak berhak untuk memecat Khalifah, karena yang berhak memecat Khalifah adalah syara' semata. Akan tetapi, umat tetap berhak untuk mengangkatnya. Islam telah menjadikan kekuasaan di tangan umat. Oleh karena itu, umat berhak mengangkat siapa saja yang mereka pilih dan mereka bai'at untuk menjadi wakil mereka.<sup>30</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa dalam sistem republik dengan bentuk presidensilnya, seorang presiden memiliki wewenang sebagai seorang kepala negara serta wewenang sebagai seorang perdana menteri sekaligus. Karena tidak ada perdana menteri, sementara yang ada hanya para menteri. Misalnya presiden Amerika. Sedangkan dalam sistem republik dengan bentuk parlementer, terdapat seorang presiden sekaligus dengan perdana menterinya, dimana wewenang pemerintahan dipegang oleh perdana menteri, bukan presiden. Sistem republik Prancis dan Jerman.

### C. Sistem Pemerintahan Kekaisaran

---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 32

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 33

Taqiuddin Al-Nabhani berpandangan bahwa sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk kekaisaran. Alasannya, wilayah yang diperintah dengan sistem Islam –sekali pun ras dan sukunya berbeda serta dalam masalah pemerintahan, menganut sistem sentralisasi pada pemerintahan pusat- tidak sama dengan wilayah yang diperintah dengan sistem kekaisaran. Bahkan, berbeda jauh dengan sistem kekaisaran tersebut. Sebab, sistem ini tidak menganggap sama antara ras satu dengan yang lain dalam hal pemberlakuan hukum di dalam wilayah kekaisaran. Dalam sistem kekaisaran telah memberikan keistimewaan dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan ekonomi di wilayah pusat.<sup>31</sup>

Sedangkan tuntunan Islam dalam bidang pemerintahan adalah menganggap sama antara rakyat yang satu dengan rakyat yang lain dalam wilayah-wilayah negara. Islam juga telah menolak ikatan-ikatan kesukuan (ras). Bahkan, Islam memberikan semua hak-hak rakyat dan kewajiban mereka kepada orang non Islam yang memiliki kewarganegaraan, mereka memperoleh hak dan kewajiban yang menjadi hak dan kewajiban umat Islam. Lebih dari itu, Islam senantiasa memberikan hak-hak tersebut kepada masing-masing rakyat –apapun mazhabnya- yang tidak diberikan kepada rakyat negara lain, meskipun muslim.<sup>32</sup>

Taqiuddin Al-Nabhani mempertajam pendapatnya bahwa dengan adanya pemerataan ini, jelas bahwa sistem Islam berbeda jauh dengan sistem kekaisaran. Dalam sistem Islam, tidak ada wilayah-wilayah yang menjadi daerah kolonial, maupun lahan eksploitasi serta lahan subur yang senantiasa dikeruk untuk wilayah pusat. Karena wilayah-wilayah tersebut tetap dianggap menjadi satu kesatuan, sekalipun sedemikian

---

<sup>31</sup> Taqiuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm* . . . . . *op. cit.*, hlm. 33-34

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 34

jauh jaraknya antara wilayah yang satu dengan ibu kota daulah Islam. Begitu pula masalah keragaman ras warganya. Sebab, setiap wilayah dianggap memiliki hak sama dengan wilayah pusat, atau wilayah-wilayah lainnya, otoritas pejabat pemerintahannya, sistem serta perundang-undangnya sama semua dengan wilayah-wilayah yang lain.<sup>33</sup>

#### d. Sistem Pemerintahan Federasi

Taqiuddin Al-Nabhani berpandangan bahwa sistem pemerintahan Islam tidak berbentuk federasi yang membagi wilayah-wilayahnya dalam otonominya sendiri-sendiri, dan bersatu dalam pemerintahan secara umum. Alasannya, Sistem pemerintahan Islam adalah sistem kesatuan, yang mencakup seluruh negeri, seperti Maroko di bagian Barat dan Khurasan di bagian Timur. Harta kekayaan seluruh wilayah negara Islam dianggap satu. Begitu pula anggaran belanjanya akan diberikan secara sama untuk kepentingan seluruh rakyat, tanpa melihat daerahnya. Jika seandainya ada wilayah telah mengumpulkan pajak, sementara kebutuhannya kecil, wilayah tersebut akan diberi sesuai dengan tingkat kebutuhannya, bukan berdasarkan hasil pengumpulan hartanya. Jika seandainya ada wilayah, yang pendapatan daerahnya tidak bisa mencukupi kebutuhannya, daulah Islam tidak akan mempertimbangkannya. Tetapi wilayah tersebut tetap akan diberi anggaran belanja secara umum, sesuai dengan tingkat kebutuhannya, baik pajaknya cukup untuk memenuhi kebutuhannya, ataupun tidak.<sup>34</sup>

Taqiuddin Al-Nabhani mengemukakan bahwa sistem pemerintahan Islam juga tidak berbentuk federasi, melainkan berbentuk kesatuan. Oleh karena itu, sistem pemerintahan Islam adalah sistem yang berbeda sama sekali dengan sistem-sistem yang telah populer lainnya saat ini, baik ditinjau dari aspek landasannya maupun substansi-

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 34

<sup>34</sup>*Ibid.* hal. 35

substansinya yang lain. Sekalipun dalam beberapa prakteknya ada yang hampir menyerupai dengan praktek dalam sistem yang lain.

Sistem pemerintahan Islam dalam persepsi Taqiyuddin Al-Nabhani adalah sistem pemerintahan sentralisasi, penguasa tertinggi cukup di pusat. Pemerintahan pusat mempunyai otoritas yang penuh terhadap seluruh wilayah negara, baik dalam masalah-masalah yang kecil maupun besar. Daulah Islam juga tidak akan sekali-kali mentolerir terjadinya pemisahan salah satu wilayahnya, sehingga wilayah-wilayah tersebut tidak akan lepas begitu saja. Negaralah yang akan mengangkat para panglima, wali dan amil, para pejabat dan penanggung jawab dalam urusan harta dan ekonomi. Negara juga yang akan mengangkat para qadli di setiap wilayah. Negara juga yang mengangkat orang yang bertugas menjadi pejabat pemerintah. Di samping negara yang akan mengurus secara langsung seluruh urusan yang berhubungan dengan pemerintahan di seluruh negeri.<sup>35</sup>

#### e. Sistem Pemerintahan Khilafah

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa sistem pemerintahan Islam adalah khilafah.<sup>36</sup> Menurut Al-Nabhani bahwa di dalam sistem pemerintahan Islam tidak ada menteri, maupun kementerian bersama seorang kepala negara seperti dalam konsep demokrasi, yang memiliki spesialisasi serta departemen-departemen tertentu. Ia menjelaskan bahwa dalam sistem pemerintahan Islam yang ada hanyalah para *mu'awin* (pembantu kepala negara) yang senantiasa dimintai bantuan oleh kepala negara. Tugas mereka adalah membantu kepala negara dalam tugas-tugas pemerintahan. Mereka adalah para pembantu dan sekaligus pelaksana. Ketika kepala negara memimpin mereka, kepala

---

<sup>35</sup>*ibid.* hlm. 35

<sup>36</sup>Menurut M. Dhiyauddin Rais bahwa *Laqab* (gelar) khalifah awal penyebutannya adalah kepada Abu Bakar r.a. ketika terpilih setelah bai'at di Saqifah bani Sa'idah, untuk menggantikan Rasulullah Saw dalam memimpin umat Islam dan memelihara kemaslahatan mereka.

negara memimpin mereka bukan dalam kapasitasnya sebagai perdana menteri atau kepala lembaga eksekutif, melainkan hanya sebagai penguasa negara. Sebab dalam Islam tidak ada kabinet menteri yang bertugas membantu Khalifah dengan memiliki wewenang tertentu. Oleh karena itu, *mu'awin* tetap hanyalah pembantu Khalifah untuk melaksanakan wewenang-wewenangnya.<sup>37</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, negara khilafah bukanlah negara teokrasi. Sebab, khilafah merupakan jabatan yang memiliki semua wewenang pemerintahan dan kekuasaan, serta wewenang membuat peraturan tanpa terkecuali. Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, khilafah merupakan jabatan duniawi dan bukan jabatan ukhrawi. Peranan khalifah adalah menerapkan agama Islam kepada seluruh umat manusia. Khilafah bukan merupakan (*nubuwwat*) jabatan kenabian, sebab jabatan kenabian merupakan jabatan di mana para nabi memperoleh syariat dari Allah melalui wahyu agar disampaikan kepada manusia, dengan tanpa memandang syariat tersebut diterapkan. Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, hal ini tentu berbeda dengan khilafah. Sebab, khilafah justru untuk menerapkan syariat Allah kepada seluruh manusia.<sup>38</sup>

Identik dengan pandangan tersebut, Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa Daulah Islam bukan teokrasi. Daulah teokrasi hanya dikenal di Barat dalam sejarahnya. Ketika itu, daulah di tangani para pemimpin gereja yang menganggap segala perilaku mereka terjaga dari kesalahan dan suci. Sikap gerejawan ini mendapat pertentangan, yang berakhir dengan pecahnya revolusi terhadap dominasi gereja. Menurut Yusuf Qardhawi, salah

---

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 32.

<sup>38</sup>Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, jabatan kenabian berbeda dengan jabatan khilafah. Sebab, kenabian adalah jabatan Ilahiyah yang diberikan Allah kepada siapa saja yang Dia dikehendaki. Sedangkan jabatan khilafah merupakan jabatan basyariah (jabatan yang diberikan oleh manusia), dimana kaum muslimin bisa memba'at siapa saja yang mereka kehendaki. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm* .... *op. cit.*, hlm. 33

besar jika daulah Islam disebut daulah teokrasi. Alasannya, Daulah Islam adalah daulah sipil yang ditegakkan atas pemilihan, bai'at dan syura. Tanggung jawab pemimpin ada di hadapan umat, dan hak setiap rakyat adalah mengingatkan pemimpinnya. Pemimpin dalam daulah Islam terikat dengan syariat yang memberikan ketentuan hukum kepadanya.<sup>39</sup>

Dalam pandangan Al-Nabhani, realita ini berbeda dengan sistem kekhalifahan. Dalam sistem khilafah, seorang Amirul Mukminin (Khalifah), meskipun bertanggung-jawab dihadapan umat dan wakil-wakilnya, umat termasuk wakilnya tidak berhak untuk memberhentikannya. Khalifah juga tidak akan diberhentikan kecuali apabila menyimpang dari hukum syara' dengan penyimpangan yang menyebabkannya harus diberhentikan. Adapun yang menentukan pemberhentiannya adalah hanya mahkamah *mazhalim*.<sup>40</sup>

Dalam perspektif Al-Nabhani bahwa jabatan pemerintahan (presiden atau perdana menteri) dalam sistem republik, baik yang menganut presidensil maupun parlementer, selalu dibatasi dengan masa jabatan tertentu, yang tidak mungkin bisa melebihi dari masa jabatan tersebut. Sedangkan di dalam sistem khilafah, tidak terdapat masa jabatan tertentu. Namun, batasannya hanya apakah masih menerapkan hukum syara' ataukah tidak. Oleh karena itu, selama Khalifah masih melaksanakan hukum syara', dengan cara menerapkan hukum-hukum tersebut kepada seluruh manusia di dalam pemerintahannya, yang diambil dari Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya, ia tetap menjadi Khalifah, meskipun masa jabatannya amat panjang dan lama. Kemudian bila ia telah meninggalkan hukum

---

<sup>39</sup>Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh Daulah* ..... *op. cit.*, hal. 80-82.

<sup>40</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm* ..... *op. cit.*, hlm. 32-33

syara' serta menjauhkan penerapan hukum-hukum tersebut, berakhirilah masa jabatannya, meskipun masa jabatannya baru sehari semalam. Jadi tetap wajib diberhentikan.<sup>41</sup>

Dari penjelasan tersebut, Taqiyuddin Al-Nabhani menyimpulkan uraiannya bahwa sistem pemerintahan di dalam Islam adalah sistem khilafah.<sup>42</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani beralasan bahwa Ijma' Sahabat telah sepakat terhadap kesatuan khilafah, kesatuan negara serta ketidak-bolehan berbai'at selain kepada satu Khalifah.<sup>43</sup>

#### **D. Pilar-Pilar Pemerintahan Islam**

Dalam pandangan Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa sistem pemerintahan Islam tidak bisa dicari padanannya di bandingkan dengan sistem pemerintahan di luar Islam. Untuk mendukung pemikirannya tentang sistem pemerintahan Islam, terutama letak perbedaan yang mendasar sistem pemerintahan Islam dengan sistem pemerintahan modern, tokoh politik Islam ini, telah merumuskan bahwa sistem pemerintahan Islam dapat tegak di atas empat pilar : 1). Kedaulatan di tangan syara', 2). Kekuasaan milik umat, 3). Mengangkat satu Khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin, dan 4). Hanya Khalifah yang berhak melakukan tabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Khalifah yang berhak membuat undang-undang dasar dan semua undang-undang yang lain.<sup>44</sup>

##### **1. Kedaulatan di tangan syara'.**

Dalam sistem pemerintahan demokrasi, rakyat adalah pemegang kedaulatan. Artinya, rakyatlah yang memiliki suatu kemauan atau kehendak..<sup>45</sup> Karena itu, kedaulatan rakyat bermakna kehendak ada di tangan rakyat. Aktualisasi dari kebebasan berkehendak

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, hal. 33

<sup>42</sup>Sistem kenegaraan Islam (Daulah Khilafah) adalah suatu kenyataan hukum dan sejarah kaum muslimin. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Sistem .... op. cit.*, hlm. 74.

<sup>43</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm..... op. cit.*, hlm. 35

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 36.

<sup>45</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm. 173. Oleh J.J. Rosseau, peletak teori kedaulatan rakyat, disebut *Volonte Generale* atau *General Will*

tersebut adalah wewenang untuk membuat hukum dalam rangka merealisasikan kehendaknya.

Karenanya, kedaulatan rakyat, segala perkara terserah rakyat, boleh atau tidak terserah rakyat, halal-haram tergantung pada rakyat; sesuatu boleh atau tidak berkembang di tengah masyarakat terserah rakyat. Aturan yang akan diberlakukan terserah rakyat. Rakyat dapat mengubah sistem ekonomi, politik, budaya, sosial, dan apa pun sesuai dengan kehendaknya. Rakyatlah yang berhak membuat Undang-undang dan Undang-undang Dasar sebagai wujud keinginannya. Rosseau menilai bahwa keinginan umum tersebut harus berlaku sebagai suatu wewenang memaksa, tertinggi, karena ia menyamai kebaikan umum.<sup>46</sup> Konsekuensi logisnya, dalam negara demokrasi, rakyat dijadikan 'Tuhan'. Karenanya, para penganutnya meyakini suara rakyat adalah suara Tuhan (*Vox Populi, Vox Dei*).

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa kedaulatan tersebut adalah di tangan syara' dan bukan di tangan umat.<sup>47</sup> Ia mengemukakan bahwa kata *as-siyadah*, yang bermakna kedaulatan itu sebenarnya adalah istilah Barat. Sedangkan yang dimaksud dengan kata *as-siyadah* tersebut adalah yang menangani (*mumaris*) dan menjalankan (*musayyir*) suatu kehendak atau aspirasi (*iradah*) tertentu.

Dalam pandangan Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa bila ada seseorang yang menangani dan mengendalikan aspirasinya, sesungguhnya kedaulatannya ada di tangannya sendiri. Bila aspirasi orang tersebut di tangan dan dikendalikan oleh orang lain, orang tersebut esensinya telah menjadi *abdun* (budak) bagi orang lain. Bila aspirasi umat

---

<sup>46</sup>J. Shklar, *Men and Citizens: Rosseau's Social Theory*, (London: Cambridge University Press, 1969), hlm. 3-8.

<sup>47</sup>Pendapat ini senada dengan Abdul Qadim zalum yang memandang bahwa kedaulatan hanya di tangan Allah (*as-Siyadah li asy-Syari'*), bukan milik rakyat. Hal ini berarti yang memiliki kehendak tertinggi adalah hanya Allah Rabb al-'alami. Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur . . . . .* Terj. hlm, 46-48.



atau sekelompok umat di tangani dan dikendalikan oleh umat itu sendiri, dengan perantara individu-individunya, umat memberikan hak penanganan dan pengendalian tersebut kepada mereka dengan suka rela, mereka (individu-individu umat tersebut) adalah *sayyid* (tuan) bagi umat. Bila aspirasi umat di tangani dan dikendalikan oleh umat lain dengan cara paksa, umat tersebut telah menjadi budak (koloni) mereka.

Mencermati realita ini, menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, bahwa sistem demokrasi dengan kedaulatan di tangan rakyat sendiri berarti rakyatlah yang menangani dan mengendalikan aspirasinya. Rakyat akan mengangkat siapa saja yang mereka kehendaki dan akan memberikan hak penanganan dan pengendalian aspirasinya kepada siapa saja yang mereka kehendaki. Inilah fakta kedaulatan yang menurut Al-Nabhani justru malah menghilangkan kekuasaan di atas pundak rakyat.<sup>48</sup>

Taqiyuddin Al-Nabhani berpendapat bahwa yang tepat adalah kedaulatan itu adalah di tangan syara', bukan di tangan umat. Ia beralasan bahwa yang menangani dan mengendalikan aspirasi individu adalah syara', bukan individu itu sendiri dengan sesukanya, melainkan aspirasi individu itu ditangani dan dikendalikan berdasarkan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah. Dalil yang berkaitan dengan kedaulatan ini adalah firman Allah :

فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في  
انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما .

*Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan kemudian mereka merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa' : 65).*

---

<sup>48</sup>*Ibid*, hlm. 50.

Allah menjelaskan bahwa yang berkuasa di tengah-tengah umat dan individu serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah. Umat Islam harus tunduk dan patuh kepadanya.

ياايهاالذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الامر منكم فان تنا  
زعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله و اليوم  
الآخر ذلك خير واحسن تأويلا .

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan Pemimpin di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (Al-Kitab) dan Rasul (Sunnah), jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. (QS. An-Nisa' : 59).*

Allah tidak pernah memerintahkan taat kepada orang yang tidak ada. Hal ini menunjukkan bahwa mewujudkannya adalah wajib. Sehingga ketika Allah memerintahkan taat pada *ulil amri*, merupakan perintah untuk mewujudkannya. Adanya *ulil amri* memiliki konsekuensi tegaknya hukum Islam, tidak mewujudkan membawa konsekuensi tidak tegaknya hukum Islam, hokum mewujudkan *ulil amri* adalah wajib.

Pengertian “Kembalikan ia kepada Allah dan Rasul” adalah “Kembalikan kepada hukum syara”. Dari dalil-dalil tersebut, Taqiyuddin Al-Nabhani berpendapat bahwa yang berkuasa di tengah-tengah umat dan individu serta yang menangani dan mengendalikan aspirasi umat dan individu itu adalah apa yang dibawa oleh Rasulullah, umat dan individu harus tunduk kepada syara’.<sup>49</sup>

Dalam perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa seorang Khalifah tidak akan dibai’at oleh umat sebagai *ajir* (pekerja, buruh, atau pegawai) umat agar melaksanakan yang dikehendaki oleh umat, yang terjadi dalam praktek sistem demokrasi. Khalifah dibai’at oleh umat berdasarkan Kitabullah dan Sunnah rasul-Nya agar ia melaksanakan hukum syara’, bukan untuk melaksanakan apa yang dikehendaki oleh umat, hingga bila

---

<sup>49</sup>*ibid.*, hlm. 43

seandainya orang yang telah membai'at Khalifah tersebut keluar dari ketentuan syara' (memberontak, atau membangkang terhadap aturan syara'), Khalifah akan memerangi mereka sampai kembali lagi.<sup>50</sup>

## 2. Kekuasaan di tangan umat.

Di dalam sistem demokrasi, rakyat adalah sumber kekuasaan. Dengan alasan dapat saling mengontrol, dalam negara demokrasi terdapat pembagian kekuasaan legislatif (parlemen) sebagai pembuat undang-undang, eksekutif (kabinet) sebagai pelaksanaannya, dan yudikatif (kehakiman) sebagai pengadilan atas pelanggaran undang-undang. Ide ini lahir ide di Eropa, saat kekuasaan gereja dan kerajaannya sangat dominan, tirani, dan sangat menyengsarakan rakyat yang mencapai puncaknya terjadi pada revolusi Perancis. Konteks teori itu dalam kenyataan tidaklah demikian. Sebagai contoh, presiden diberi wewenang untuk memveto rancangan undang-undang yang telah diterima oleh Kongres, tetapi di pihak lain, veto ini dapat dibatalkan oleh Kongres dengan suara 2/3 dari anggota majelis.<sup>51</sup> Faktanya tidak jarang mereka yang menempati ketiga lembaga tersebut berasal dari partai yang sama. Karenanya, pembagian kekuasaan tidak menuju pada arah yang diharapkan.

Menurut analisa M. Dhiauddin Rais, bahwa kekuasaan umat (rakyat) dalam demokrasi Barat bersifat mutlak. Rakyatlah yang menetapkan undang-undang atau menghapuskannya dalam pelaksanaannya dilakukan oleh badan legislatif, Keputusan-keputusan yang dikeluarkan menjadi hukum yang harus dilaksanakan dan ditaati, sekalipun hal itu melanggar moral atau bertentangan dengan kepentingan universal manusia. Dengan demokrasi misalnya, dapat mengumumkan perang demi mendapatkan

---

<sup>50</sup>*ibid.*, hlm. 43

<sup>51</sup>Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 153.

kekuasaan atas bangsa lain, untuk menguasai pasar, menganeksasi suatu wilayah, untuk memonopoli ladang-ladang minyak. Demi tujuan itu, darah manusia ditumpahkan tanpa henti dan nyawa manusia dalam jumlah yang tak terhitung telah tercabut. Akhirnya, seluruh manusia merasakan nestapa demi tujuan itu.

Dalam perspektif M. Dhiauddin Rais, bahwa dalam sistem Islam kekuasaan umat (rakyat) tidak semutlak itu, tetapi terikat oleh syariat, yaitu agama Allah yang wajib dilaksanakan oleh setiap individu, sehingga seseorang tidak dapat berbuat sewenang-wenang melampaui batas hukum yang ada. Hukum tersebut meliputi aturan yang terdapat dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Jika Islam telah mengakui adanya kedaulatan rakyat secara keseluruhan, yang merupakan salah satu dari sumber hukum, kedaulatan yang dimilikinya itu harus berlandaskan apa yang dibawa oleh al-Qur'an dan as-Sunnah, karena kedaulatan yang dimilikinya itu datang dari al-Qur'an dan as-Sunnah itu sendiri. Telah ditegaskan bahwa salah satu karakteristik aspirasi umat (rakyat) ini adalah tidak menyimpang dari kebenaran, atau tidak melenceng dari manhaj yang telah digariskan al-Qur'an dan as-Sunnah itu. Umat Islam harus berpegang pada aturan akhlak dan terikat dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>52</sup>

Hampir identik dengan demokrasi, Islam juga memandang kekuasaan di tangan rakyat atau umat. Umatlah yang berhak memilih penguasa, bisa melalui sistem perwakilan (*ahlul halli wal aqdi*) atau pun pemilihan langsung. Tidak seorang pun dapat menjadi penguasa, kecuali telah dikehendaki umat, yang ditunjukkan dengan bai'at. Hanya saja, kekuasaan yang diberikan itu hanyalah untuk menjalankan syariat Islam (kedaulatan Allah) semata; bukan untuk menjalankan kedaulatan rakyat dalam paham demokrasi. Pemilu diadakan untuk memilih wakil rakyat dalam majelis syura untuk menyampaikan pendapat

---

<sup>52</sup>*Ibid.*, hlm. 153

umat, tapi bukan untuk menetapkan hukum, atau untuk memilih khalifah bila sistem yang digunakan adalah pemilihan langsung.<sup>53</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa syara' telah menjadi pengangkat Khalifah oleh umat, dimana seorang Khalifah hanya memiliki kekuasaan melalui bai'at. Dalil bahwa syara' telah menjadikan pengangkatan Khalifah oleh umat adalah tegas sekali di dalam hadis tentang bai'at. Dari Ubadah bin Shamit yang berkata :

حد ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن مسلم. حد ثنا عَمِي, عبدالله بن وهب. حد ثنا عمرو بن الحارث. حدثني بكير عن بسر بن سعيد, عن جُنَادَةَ بن أَبِي أُمَيَّة قال: دخلنا علي عبادَةَ ابن الصامت وهو مريضٌ فَقُلْنَا: حد ثنا, أصلحك الله, بحديثٍ ينفع الله به, سمعته من رسولِ الله صلي الله عليه وسلم فبايعناه. فكان فيما أخذ علينا, أن بايعنا علي السمع والطاعة, في منشطنا ومكرهنا...<sup>54</sup>

*Kami telah membai'at Rasulullah untuk setia mendengarkan dan mentaati perintahnya, baik dalam keadaan susah maupun mudah, baik dalam keadaan yang kami senang ataupun tidak kami senang.*

Dalam pandangan Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa bai'at tersebut diberikan oleh kaum muslimin kepada Khalifah, bukan oleh Khalifah kepada kaum muslimin, karena merekalah yang membai'at Khalifah, merekalah yang sebenarnya mengangkat Khalifah sebagai penguasa mereka. Pada masa Khulafa al-Rasyidin telah terjadi pengangkatan Khalifah dengan cara mengambil bai'at dari tangan umat. Mereka juga tidak ada yang menjadi Khalifah, bila bukan dengan bai'at dari umat yang diberikan kepada mereka.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Ismail Yusanto, *Islam Ideologi: Refleksi Cendekiawan Muda*, (Bangil: Al-Izzah, 1998), hlm. 83-84.

<sup>54</sup>Muslim, *op.cit.*, Hadits no. 1709, Kitab Ijarah, Bab Wujub Tha'atu al-Umara.., hlm. 1470

<sup>55</sup>Ismail Yusanto, *op.cit.*, hlm. 51.

Sedangkan tentang Khalifah memiliki kekuasaan karena dibai'at adalah jelas dan tegas berdasarkan hadis-hadis *at-tha'at* (keharusan taat kepada imam) dan hadis-hadis kesatuan khilafah. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash yang berkata :

حد ثنا زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم (قال إسحق: أخبرنا. وقال زهير: حد ثنا جرير) عن الأعمش, عن زيد بن وهب, عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة. قال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر و بن العاص... ومن بايع إماماً, فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه, فليطعه إن استطاع. فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه الآخر.<sup>56</sup>

*Siapa saja yang telah membai'at seorang imam, lalu ia telah memberikan uluran tangan dan buah hatinya, hendaklah mentaatinya jika ia mampu. Apabila ada orang lain yang hendak merebutnya maka penggallah leher orang itu.*

Hadis ini memberikan penjelasan bahwa seorang imam mendapatkan kekuasaannya hanya dengan membai'atnya. Dari Nafi' yang berkata : "Abdullah bin Umar berkata kepadaku, aku mendengar Rasul bersabda :

حد ثنا عبيد الله بن معاذ العنبري. حد ثنا أبي. حد ثنا عاصم (وهو ابن محمد بن زيد) عن زيد بن محمد, عن نافع. قال: جاء عبدالله بن عمر الي عبدالله بن مطيع, حين كان من أمر الحرية ما كان, زمن يزيد بن معاوية. فقال : اطرحوا لأبي عبدالرحمن وسادة. فقال: اني لم أتك لأجلس. أتيتك لأحدثك حديثاً سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلع يداً من طاعة, لقي الله يوم القيامة, لأحجة له. ومن مات وليس في عنقه بيعة, مات ميتة جاهلية.<sup>57</sup>

<sup>56</sup> Muslim, *op.cit.*, , Hadits no. 1844, Kitab Imarah, Bab Wujub Tha'atu al-Umara... hlm. 1472

<sup>57</sup> *ibid.*, , Hadits no. 1851, Kitab Imarah, Bab Wujub Malazimah... hlm. 1478

*Siapa saja yang melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah, ia akan bertemu dengan Allah di hari kiamat tanpa mempunyai hujjah, dan siapa saja yang mati sedangkan di atas pundaknya tidak ada bai'at, maka ia mati dalam keadaan mati jahiliyah.*

Hadis ini menjelaskan wajibnya kita untuk membai'at seorang imam. Hal ini diindikasikan dengan adanya celaan mati jahiliyah jika tidak ada bai'at. Dari Abu Hurairah, dari Rasulullah bersabda :

حدثنا محمد بن بشار. حدثنا محمد بن جعفر. حدثنا شعبة عن فرات القزاز, عن أبي حازم. قال: قال عذتُ أبا هريرة خمس سنين. فسمعتَه يحدث عن النبي صلي الله عليه وسلم. قال كنت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء. كلما هلك نبي. وانه لا نبي بعدي. وستكون خلفاء فتكثر, قالوا: فما تأمرنا؟ قال فوا ببيعة الاول فالاول. وأعطوهم حقهم. فآمن الله سا ئلهم عما استرعا هم.<sup>58</sup>

*Dahulu, Bani Israil selalu dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para Nabi, setiap kali seorang Nabi meninggal, digantikan oleh Nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. Tetapi nanti akan banyak Khalifah. Para sahabat bertanya : “apakah yang Engkau perintahkan kepada kami?” Rasulullah menjawab : “Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggung-jawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka.*

Hadis-hadis ini, menurut Taqiyuddin Al-Nabhani menunjukkan bahwa Khalifah mendapatkan kekuasaan semata-mata melalui bai'at. Allah telah mewajibkan agar mentaati Khalifah dengan adanya bai'at. Sebab, Khalifah baru mendapatkan kekhalifahannya dengan melalui bai'at dan umat wajib mentaatinya karena ia adalah Khalifah yang benar-benar telah dibai'at. Oleh karena itu, Khalifah benar-benar telah

<sup>58</sup>Muslim, *op.cit.*, hadits no. 1842, Kitab Imarah, Bab Wujub al-Wafa' ..., hlm. 1471

mendapatkan kekuasaan dari tangan umat dengan adanya bai'at umat kepadanya. Kemudian ketaatan umat wajib diberikan kepada orang yang mereka bai'at.<sup>59</sup>

### 3. Mengangkat satu Khalifah hukumnya fardlu

Berbicara mengenai kepemimpinan kaum muslimin, tampaknya Al-Mawardi dan Taqiyudin Al-Nabhani memiliki pendapat yang sama. Al-Mawardi berpandangan bahwa mengangkat satu Khalifah hukumnya fardlu bagi seluruh kaum muslimin. Pandangan tersebut sejalan dengan persepsi Taqiyuddin Al-Nabhani yang juga berpandangan berpandangan bahwa jika dua kepala negara diangkat di dua wilayah dari negara Islam, kepemimpinan keduanya tidak sah karena umat islam tidak boleh mempunyai dua kepala negara dalam satu waktu meskipun ada pendapat menyimpang dan membolehkannya.<sup>60</sup>

Dalam mendukung argumentasinya, Imam al-Mawardi mengemukakan bahwa jabatan itu jatuh kepada orang yang lebih dahulu dibai'at dan diberikan jabatan; seperti halnya dua orang wali dalam menikahkan seorang wanita; jika keduanya menikahkan wanita itu dengan dua orang yang berbeda., nikah itu hanya sah bagi orang yang pertama melaksanakan akad nikah. Jika orang yang lebih dahulu dibai'at telah diketahui, jabatan itu diberikan kepadanya dan orang yang didahului harus menyerahkan wewenang itu kepadanya serta turut melakukan bai'at kepadanya. Akan tetapi, jika akad itu terjadi pada keduanya secara bersamaan, tidak ada yang lebih dahulu dari yang lain, kedua akad itu batal dan akad baru kembali dilakukan bagi salah satu dari keduanya atau orang selain

---

<sup>59</sup>Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, kenyataan ini menunjukkan bahwa kekuasaan di tangan umat. Sama halnya dengan dengan Rasulullah, meskipun Muhammad Saw adalah Rasulullah, namun ia tetap saja mengambil bai'at dari tangan umat. Maksudnya adalah bai'at untuk mendapatkan kekuasaan dan pemerintahan, bukan bai'at terhadap kerasulan. Nabi Muhammad telah mengambil bai'at tersebut, baik dari pria maupun wanita dan Rasul tidak mengambil bai'at dari anak-anak kecil yang belum baligh. Sebab, kaum muslimin yang mengangkat seorang Khalifah dan membai'at mereka dengan Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya, di samping Khalifah mendapatkan kekuasaan hanya dengan adanya bai'at tersebut, maka semuanya itu telah menjadi dalil yang tegas bahwa kekuasaan adalah milik umat, dimana umat bisa memberikan kepada siapa saja yang dikehendakinya. Lihat *Ibid.*, hlm. 53.

<sup>60</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam* . . . . . *op. cit.*, hlm. 23.



keduanya. Jika salah satu bai'at dari keduanya lebih dahulu, namun tidak diketahui siapa yang lebih dahulu dari keduanya, masalah ini menunggu penelitian selanjutnya.<sup>61</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa hukum fardlu tersebut sebenarnya telah ditetapkan di dalam hadis-hadis tentang bai'at. Dari Nafi dan dari Abdullah Ibnu Umar, Rasulullah menjelaskan siapa yang mati tanpa ada bai'at terhadap imam, matinya adalah jahiliyah.<sup>62</sup>

*Wajhul Istidlal* (bentuk makna yang dapat diambil sebagai dalil) melalui hadis ini adalah bahwa Rasulullah telah mewajibkan kepada setiap muslim agar di atas pundaknya ada bai'at kepada seorang Khalifah, bukan mewajibkan setiap muslim untuk membai'at Khalifah. Oleh karena itu, yang diwajibkan adalah adanya bai'at di atas pundak setiap muslim, yaitu adanya Khalifah yang dengan begitu di atas pundak masing-masing orang Islam ada bai'at. Karena adanya Khalifah itulah yang menyebabkan di atas pundak masing-masing orang Islam ada bai'at, baik karena secara langsung dia ikut berbai'at ataupun tidak.

Sedangkan Khalifah itu harus satu orang, disandarkan kepada hadis yang diriwayatkan dari Abi Said al-Khudri dari Nabi Saw menjelaskan jika diangkat dua orang khalifah, bunuhlah yang terakhir.

وحدثنا وهبُ بن بَقِيَّة الواطي. حدثنا خالد بن عبدالله عن الجريري, عن أبي نضرة, عن أبي سعيد الخدري. قال . قال رسول الله صلى الله عليه

وسلم إذا بويع لخليفتين, فاقتلوا الآخر منهما

<sup>61</sup>*ibid.*, hlm. 24.

<sup>62</sup>Muslim, *op.cit.*, , Hadits no. 1851, Kitab Imarah, Bab Wujub Malazimah... hlm. 1478

*Apabila dibi'at dua orang Khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya.*<sup>63</sup>

Hadis ini menegaskan bahwa kaum muslimin diharamkan untuk memiliki Khalifah lebih dari satu orang.

### 3. Khalifah berhak mengadopsi hukum

Khalifah selaku kepala negara adalah pemimpin umat Islam yang dipilih dan dibi'at umat. Ia adalah wakil umat dalam melaksanakan syariat Allah. Ia berhak mentabanni (melegalisasi) hasil ijtihad seorang mujtahid untuk menjadi hukum syara' bagi kaum muslimin. Ia berhak pula menetapkan aturan dalam persoalan muamalat yang mubah (sistem administrasi, peraturan lalu lintas, dan sebagainya) demi kemaslahatan kaum muslimin. Selain itu, ia mengawasi pelaksanaan syariat Islam dan menghukum orang yang melanggarnya.<sup>64</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa hanya Khalifah yang berhak melakukan mentabanni (adopsi) terhadap hukum-hukum syara'. Pernyataan ini ditetapkan berdasarkan dalil ijma sahabat. Ijma sahabat telah menetapkan bahwa hanya Khalifah yang berhak untuk mengadopsi hukum-hukum syara'.<sup>65</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, jika salah satu pilar-pilar tersebut tidak ada, maka pemerintahannya tidak bisa disebut pemerintahan Islam, kecuali setelah menyempurnakan empat pilar ini seluruhnya.<sup>66</sup>

Menurut penulis, pilar-pilar yang menjadi argumentasi yang diajukan Taqiyuddin Al-Nabhani tersebut cukup proporsional, karena memang suatu negara yang notabene pemerintahan Islam harus memiliki pilar-pilar tersebut.

<sup>63</sup>Muslim, *op.cit.*, , Hadits no. 1853, Kitab Imarah, Bab idza Buyi' a li Khalifataini, hlm. 1480

<sup>64</sup>Ismail Yusanto, *op. cit.*, hlm. 84.

<sup>65</sup>*Ibid.*, hlm. 84

<sup>66</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nizham al-Hukm*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1994), hlm. 46.



## BAB IV

### TESIS TENTANG STRUKTUR KEKHLAFAHAN TAQIYUDDIN AL-NABHANI

Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu: Khalifah (kepala negara), *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan), *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi), *Amirul Jihad* (Panglima Perang), *Wali* (Pimpinan Daerah), *Qadli* (Hakim), *Mashalih Daulah* (Departemen), *Majelis Umat* (Lembaga Wakil Rakyat).<sup>1</sup>

Dalil struktur di atas adalah *af'al* (perbuatan) Rasulullah saw. Karena beliau telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw. adalah kepala negara dan ia memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika ia memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam.<sup>2</sup>

#### A. KHALIFAH

Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum-hukum syara'.<sup>3</sup> Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan menjadi milik umat, umat mewakilkan kepada seseorang untuk melaksanakan urusan tersebut sebagai wakilnya. Bahkan Allah juga telah mewajibkan kepada umat untuk menerapkan hukum syara' secara keseluruhan.

Dengan demikian, khalifah hanyalah orang yang diangkat oleh kaum muslimin. Karena itu, faktanya adalah bahwa khalifah merupakan wakil umat dalam masalah pemerintahan dan kekuasaan serta dalam menerapkan hukum syara'. Oleh karena itu, tidak ada seorang khalifah pun kecuali setelah ia dibai'at oleh umat. Bai'at umat kepada

---

<sup>1</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 1996), hlm. 47

<sup>2</sup>*Ibid.*, hlm. 47

<sup>3</sup>Anonim, *Muqaddimah Dustur*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2009), cet.2, hlm. 124

khalifah dengan kekhilafahannya itu telah menjadikan khalifah sebagai wakilnya, dan pengangkatan jabatan khilafah untuk seorang khalifah dengan bai'at itu berarti telah memberikan kekuasaan kepada khalifah, sehingga umat wajib untuk mentaatinya.

Orang yang memimpin urusan kaum muslimin tidak bisa disebut khalifah, kecuali setelah ia dibai'at oleh umat dengan *bai'at in'iqad* (bai'at pengangkatan) secara syar'i, dengan ridla dan bebas memilih, khalifah memiliki syarat-syarat *in'iqadul khilafah* (pengangkatan untuk menduduki kekhilafahan). Setelah pengangkatan khilafah dinyatakan sah bagi seorang khalifah, ia harus segera menerapkan hukum-hukum syara'.<sup>4</sup>

Sedangkan sebutan yang biasa dipergunakan adalah sebutan khalifah, imam atau *amirul mukminin*. Sebutan-sebutan ini banyak dinyatakan dalam hadits-hadits shahih. Sebagaimana sebutan tersebut telah diberikan kepada para khulafaur rasyidin. Abu Said Al khudri meriwayatkan dari Rasulullah saw. bahwa ia bersabda:

وحدثني وهب بن بقية الواسطي. حدثنا خالد بن عبد الله عن الجريري.

أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري :

عليه وسلم بُويعَ لِخَلِيفَتَيْنِ مِنْهُمَا<sup>5</sup>

"Jika dibai'at dua orang khalifah, maka bunuhlah yang terakhir dari keduanya."

Dari Abdullah Bin Amru Bin Ash yang mendengarkan Rasulullah saw. bersabda:

زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم ) :

<sup>4</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 51

<sup>5</sup>Muslim, *Shohih Muslim Jilid III*, (Qahirah: Dar al-Ummah, 1991), Hadits no. 1853, Kitab Imarah, Bab Idza Buyi'a li Kholifataini, hlm. 1470

وقال زهير: حد ثنا جرير عن الاعمش عن زيد بن وهب عن عبد  
 ال: دخلت المسجد فإذا عبد الله بن عمر و...  
 ... ومن بايع إماماً فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه، فليطعه إ  
 جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر.<sup>6</sup>

"Siapa saja yang telah membai'at seorang Imam lalu memberikan uluran tangan dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya."

Terikat dengan tiga sebutan di atas memang hukumnya tidak wajib. Bahkan diperbolehkan untuk menyebut orang yang memimpin urusan-urusan kaum muslimin tersebut dengan sebutan-sebutan lain yang maknanya sama. Seperti *hakimul mukminin* (penguasa orang-orang mukmin), *raisul muslimin* (pimpinan kaum muslim), *sulthanul muslimin* (penguasa kaum muslimin) atau sebutan lain yang dilihat dari segi makna tidak bertentangan dengan tiga sebutan di atas. Adapun sebutan-sebutan yang memiliki konotasi yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan masalah pemerintahan, seperti raja, presiden dan kaisar, semuanya tidak boleh dipergunakan untuk menyebut orang yang memimpin kaum muslimin. Karena makna yang ditunjukkan oleh sebutan tersebut bertentangan dengan hukum-hukum Islam.<sup>7</sup>

### 1. Syarat-syarat Khalifah

Seorang khalifah harus memenuhi tujuh syarat agar dia bisa memegang tampuk kekhilafahan, juga agar bai'at terhadap pengangkatan jabatan kekhilafahannya dapat diberikan. Tujuh syarat tersebut adalah syarat sahnya pengangkatan seorang khalifah (*syurutul in'iqad*). Apabila salah satu dari ketujuh syarat ini kurang, jabatan kekhilafahan ini

<sup>6</sup> Muslim, *op.cit.*, , Hadits no. 1844, Kitab Imarah, Bab Wujub Tha'atu al-Umara... hlm. 1472

<sup>7</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 52

tidak dapat diberikan.<sup>8</sup>

*Pertama*, muslim. Karena itu, khilafah secara mutlak tidak boleh diberikan kepada orang kafir. Dan hukum mentaati orang kafir itu tidak wajib. Karena Allah SWT. berfirman:



"Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang mukmin."<sup>9</sup>

Pemerintahan (kekuasaan) adalah jalan yang paling kuat bagi seorang *hakim* (penguasa) untuk memaksa rakyatnya. Ditambah pernyataan Allah dengan menggunakan "*Lan*" yang biasa dipergunakan untuk menyatakan penafian selama-lamanya (*nafyut ta'bid*) itu bisa menjadi indikasi (*qarinah*) tentang adanya larangan terhadap orang kafir untuk memimpin pemerintahan kaum muslimin, baik untuk menjadi khalifah maupun yang lain, semuanya tadi merupakan larangan yang tegas dan pasti (*nahyan jaziman*). Selama Allah mengharamkan orang-orang kafir untuk memiliki jalan agar bisa menguasai kaum muslimin, hukumnya haram bagi kaum muslimin untuk menjadikan orang kafir menjadi penguasa mereka.<sup>10</sup>

Disamping itu, khalifah esensinya merupakan seorang *waliyul amri*, sedangkan Allah mensyaratkan agar *waliyul amri* kaum muslimin itu adalah seorang muslim. Allah berfirman:



<sup>8</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2003), cet. 5, hlm. 31

<sup>9</sup> (T.Q.S. An Nisa': 141)

<sup>10</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, *op.cit.*, hlm. 31



"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri dari kamu sekalian."<sup>11</sup>

Kata *ulil amri* tidak pernah disebut di dalam Al Qur'an, kecuali selalu disertai indikasi agar mereka adalah kaum muslimin. Hal ini menunjukkan bahwa *waliul amri* disyaratkan harus orang Islam. Kalau khalifah merupakan waliul amri, ia juga bisa mengangkat waliul amri yang lain, seperti para *mu'awin*, *wali* dan para *amil*, orang yang diangkat oleh khalifah itu disyaratkan harus orang Islam.

*Kedua*, laki-laki. wanita tidak bisa menjadi khalifah. Dengan kata lain, khalifah harus laki-laki. Dia tidak boleh seorang wanita. Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Abi Bakrah yang mengatakan:

حدثنا عثمان بن الحيثم،  
 نفني الله بكلمة سمعتها من  
 عليه وسلم أيام الجمل  
 بعد ما كذت أن ألحق بأصحاب الجمل فأقاتل معهم،  
 عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسري،  
 لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة<sup>12</sup>

"Sungguh Allah SWT. telah memberiku manfaat --dari kata-kata yang pernah kudengar dari Rasulullah saw.-- pada saat perang Jamal, setelah semula hampir saja aku mengikuti tentara Jamal (yang dipimpin oleh Aisyah yang mengendarai unta) dan berperang di pihak mereka". Lalu ia melanjutkan: "Ketika sampai berita kepada Rasulullah saw. bahwa bangsa Persia telah mengangkat putri Kisra sebagai ratu, maka beliau bersabda: "Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang wanita."

<sup>11</sup> (T. Q.S. An Nisa': 59)

<sup>12</sup> Bukhari, *Shahih Bukhari*, jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), hlm. 89, Hadist no. 4424, Kitab al-Maghozi, Bab Kitabi al-Nabi ila Kisra.



*Ikhar* (pemberitahuan) Rasulullah dengan menafikan keberuntungan pada orang yang menyerahkan kekuasaan mereka kepada seorang wanita adalah larangan terhadap kepemimpinan wanita. Sebab pernyataan tersebut merupakan *shiyagut thalab* (bentuk-bentuk perintah). Ditambah pemberitahuan tersebut merupakan pemberitahuan yang berisi celaan (*adz-dzam*) kepada mereka yang menyerahkan kekuasaannya kepada seorang wanita, dengan cara menafikan keberuntungan pada mereka, hal itu dapat dijadikan indikasi (*qarinah*) bahwa celaan tersebut merupakan larangan yang pasti dan tegas. Sehingga larangan mengangkat seorang wanita untuk jabatan kekuasaan di sini disertai dengan indikasi yang menunjukkan tuntutan meninggalkan perbuatan tersebut secara pasti. Jadi, mengangkat seorang wanita sebagai penguasa adalah haram. Yang dimaksud dengan larangan mengangkat seorang wanita menjadi penguasa di sini adalah menduduki jabatan khilafah dan jabatan-jabatan kekuasaan di bawahnya. Sebab, yang dibicarakan di sini adalah pengangkatan putri Kisra sebagai ratu yang berkuasa. Jadi persoalannya adalah khusus persoalan pemerintahan, bukan khusus mengenai kejadian diangkatnya putri Kisra saja, tetapi bukan berarti umum mencakup segala hal. Oleh karena itu, larangan ini tidak mencakup hal-hal lain selain pemerintahan.

*Ketiga*, baligh. Tidak boleh anak-anak diangkat menjadi khalifah. Sebab ada riwayat dari Ali Bin Abi Thalib ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا محمد بن يحيى اقطاعي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن  
عليه وسلم :  
حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يشبَّ وعن المعت  
حتى يعقل<sup>13</sup>

"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas

<sup>13</sup> At-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih* Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 24, Hadis no. 1423, Kitab al-Hudud, Bab Ma Ja a fi man...

*seorang anak kecil hingga baligh, dan orang gila sampai akal nya kembali."*

Siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, dengan sendirinya tidak sah untuk mengurusinya. Karena menurut syara', dia tidak dibebani hukum (*ghairu mukallaf*). Jadi, dia tidak sah menjadi khalifah, ataupun menjadi pejabat yang memiliki wewenang kekuasaan, karena dia tidak mampu mengatur kekuasaan. Dalil lainnya adalah bahwa Rasulullah saw. pernah menolak seorang anak yang hendak membai'atnya.

حدثنا عبدالله بن يزيد, سعيد هو ابن أبي  
: حدثني أبو عقيل زهرة بن , عبدالله بن هشام,  
عليه وسلم وذهبت به أمه زينب ابنة حميد  
عليه وسلم : يا بايعه  
عليه وسلم : هو صغير فمسح رأسه ودعاه<sup>14</sup>

Rasulullah saw. menolak bai'at Abdullah Bin Hisyam dan ia memberikan alasan karena ia masih kecil. Sabda Nabi kepada ibunya:

*"Dia masih kecil."*

kemudian ia mengelus-elus kepalanya dan mendo'akannya. Jika bai'at tidak boleh diberikan oleh anak kecil dan anak kecil itu tidak boleh membai'at orang lain sebagai khalifah, lebih tidak boleh lagi kalau dia dibai'at menjadi khalifah.

*Keempat*, berakal. Tidak sah orang gila menjadi khalifah berdasarkan sabda Nabi saw.:

*"Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas orang yang tidur hingga bangun, atas seorang anak kecil hingga baligh, dan orang gila sampai akal nya kembali."*

Siapa saja yang diangkat pena dari dirinya, dia tidak termasuk seorang *mukallaf*.

<sup>14</sup>Bukhari, *op.cit.*, hlm. 287, Hadis no. 7210, Kitab al-Ahkam, Bab Bai'ati al-Shogir



apalagi menjadi penguasa atas manusia.<sup>18</sup>

*Ketujuh*, mampu melaksanakan amanat khilafah. Sebab hal ini termasuk syarat yang dituntut oleh bai'at. Jadi, tidak sah bai'at kepada seseorang yang tidak sanggup untuk mengemban urusan umat (amanat khilafah) berdasarkan kitab dan sunah. Karena berdasarkan kitab dan sunah inilah dia dibai'at.<sup>19</sup>

## 2. Baiat

Secara bahasa, kata baiat merupakan kata yang memiliki banyak arti (*lafzhun musytarak*). Dalam bahasa Arab baiat dipakai dengan beberapa arti. Diantaranya digunakan dengan arti *ash-shafqah 'ala ijab al-bay'* (transaksi atas penawaran (ijab) jual beli)<sup>20</sup>. *Tha'ah* (pemberian kekuasaan dan ketaatan), *wa qad tabaya'u 'ala al-'amr* (sungguh mereka telah saling bersepakat atas suatu perkara)<sup>21</sup>, dengan makna 'ahada (membuat kesepakatan dengan) seperti kata-kata anda *ashfaqu 'alayhi, wa baya'ahu 'alayhi mubaya'atan, yakni 'ahadahu* (membuat kesepakatan perjanjian dengannya)<sup>22</sup>, karena baiat serupa dengan menerima dan memberi harta benda.<sup>23</sup> Az-Zujaj<sup>24</sup> berkata *ma al-'ahdu*<sup>25</sup> (aku tidak tahu, apa *al-'ahdu* itu), sedang yang lain berkata *al-'ahdu* adalah setiap yang dijanjikan Allah atasnya, dan setiap perjanjian diantara hamba adalah *al-*

<sup>18</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Asy-Syakhshiyah al-Islamiyyah Juz II*, *op.cit.*, hlm. 33

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 33

<sup>20</sup>Ibn Mandhur, *Lisan al-'Arab* jilid I, (Beirut: Dar al-Fikr, 1990), Cet.1, hlm. 299

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 299

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 299

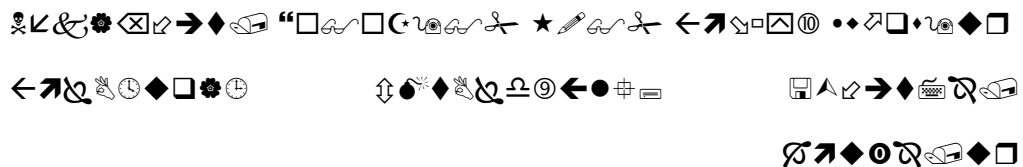
<sup>23</sup>Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Baari, Syarah Shahih Al-Bukhari* jilid I, (Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997), hlm. 71

<sup>24</sup>Az-Zujaj (241-311H/755-923), Dia adalah Ibrahim ibn as-Siry ibn sahal, Abu Ishaq az-Zujaj, seorang pakar ilmu Nahwu dan bahasa, lahir dan wafat di Baghdad, dan banyak melakukan diskusi dengan Tsalab dan lainnya, diantara kitab karyanya *Ma'any al-Qur'an, al-isytiaq, khalq al-Insan, al-Umaliy* juz I hlm 33 cet 2. Dalam DR. Mahmud 'Abd al-Majid al-Khalidi, *Qowa'id Nizham al-Hukmi fi al-Islam*, (Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983) hlm. 125

<sup>25</sup>Ibn Mandhur, *ibid.*, hlm. 914

"ahdu<sup>26</sup>. dalam *Lisan al-'arab*, *al-'ahdu* adalah *al-wasiyah* (pesan/wasiat), *al-'ahdu* adalah mendatangi seseorang dengan sesuatu, *al-ahdu* adalah ketentuan bagi para wali, *al-'ahdu* adalah *al-mawtsiq* (perjanjian) dan *al-yamin* (sumpah). Yang dengannya seseorang bersumpah, *al-'ahdu* adalah *al-wafa'* (penetapan/pemenuhan janji), *al-'ahdu* adalah *al-aman* (perlindungan/perdamaian)<sup>27</sup>

Kata baiat juga digunakan dalam pengertian *al-mu'aqidah* (orang yang mengadakan perjanjian) dan dalam hadits '*ala tubayi'uni 'ala al-Islam* (ingatlah kalian mengadakan perjanjian denganku atas Islam) merupakan ungkapan mengenai *al-Mu'aqidah* (orang yang mengadakan perjanjian)<sup>28</sup> seakan akan masing-masing dari kedua belah pihak saling menjual apa yang dimilikinya yakni ikut bersamanya, secara ikhlas memberikan dirinya, mentaatinya dan menyerahkan urusannya. Kata baiat di dalam al-Quran diantaranya datang dengan arti rumah ibadah, Allah berfirman:



"Dan sekiranya Allah tiada menolak (keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah Telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,"<sup>29</sup>

Kata بَيْعَة adalah jama' (plural) dari kata بَيْعَة (rumah ibadah/gereja)<sup>30</sup> bagi orang Nasrani. Dikatakan juga bahwa bentuk jamak (plural) dari *bai'ah* adalah bai'atun yaitu masdar (gerund) dari

<sup>26</sup>*ibid.*, hlm. 914

<sup>27</sup>*ibid.*, hlm. 914

<sup>28</sup>*ibid.*, hlm. 914

<sup>29</sup>(TSQ. Al-Hajj: 40)

بائع فلان الخليفة، يبيعه مبايعة

*Fulan membaiat khalifah, ia membaiatnya sebagai pembaiatan*

Dan baiat disini identik dengan transaksi penjualan yang sebenarnya. Dikatakan:

يعه وأعطاه صفقة يده

*Dia membai'atnya dan memberikan uluran tangannya.*

Hal tersebut berasal dari kebiasaan orang-orang Arab, yaitu apabila dua orang melakukan transaksi jual beli, maka salah seorang dari keduanya mengulurkan tangan atas (menggenggam) tangan yang lain.<sup>31</sup>

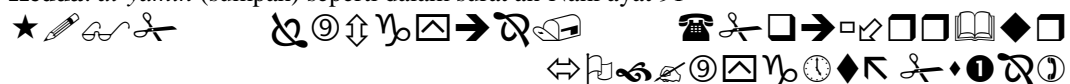
<sup>30</sup> Al-Sajastani, *Nazhatu al-Qulub fi Tafsir Gharib al-Quran*, dalam syarahnya untuk ayat diatas. Dalam al Khalidi, *op.cit.*, hlm 125

<sup>31</sup> Al-Qasqasandiy, , *Shubh al-a'sya* juz 9 hlm 73; Ibn Khaldun, Muqimah Ibnu Khaldun juz 2 hlm 549, Al-Qasqasandiy menyebut dalam *Shubh al-a'sya* juz 9 hlm 348 mengenai makna *al-ahdu* adalah lafaz musytarak, dalam bahasa memiliki enam makna:

**Pertama:** *al-aman* (perjanjian/perlindungan) seperti dalam surat at-taubah ayat 4



**Kedua:** *al-yamin* (sumpah) seperti dalam surat an-Nahl ayat 91



*Dan tepatilah sumpah atas nama Allah apabila kamu bersumpah ketiga*

**ketiga:** *al-Hifadh* (pemeliharaan) missal sabda Rasul

“pemelihara (diri) adalah sebagian dari iman “

**Keempat:** adz-Dzimmah (perlindungan) missal sabda rasul

“Orang Islam tidak dibunuh karena membunuh orang kafir (bukan warga Negara daulah (islam), dan tidak pula orang yang memiliki perlindungannya

Menurut istilah lafadz baiat adalah *musytarak* (memiliki banyak arti). Al-Quran datang dan menggunakan sebagian arti tersebut. Begitu juga dengan al-Sunnah. Akan tetapi para ulama politik Islam ('Ulama al-Siyasah al-Syar'iiyah) tidak memberikan kepada kita definisi tertentu untuk lafadz bait, padahal mereka mengerti dengan sangat dalam dan cermat realitas baiat secara politik. Mereka membicarakan masalah baiat dan mereka menjelaskan bahwa baiat adalah metode pengangkatan kepala Negara. Seseorang tidak akan menduduki jabatan khilafah kecuali telah sempurna baginya *baiat al-in'iqad* (baiat pengakadan/pengangkatan) yang dilakukan oleh umat berdasarkan kerelaan dan pilihan mereka sendiri. Dengan demikian baiat adalah metode syar'iy (Islam) satu-satunya dalam memilih dan mengangkat seorang penguasa menjalankan pemerintahan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah. Definisi yang dekat dengan pengertian ini adalah yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun dalam mendefinisikan baiat yaitu:

إن البيعة هي العهد علي الطاعة كأن المبايع يعهد أميره علي أن  
يسلم له النظر في أمر نفسه وأمر المسلمين لا ينازعه في  
ذلك ويطيعه فيما يكافه به من الأمر علي

*Sesungguhnya baiat adalah perjanjian atas ketaatan. Seakan-akan orang yang membaiat membuat perjanjian dengan pemimpinnya untuk menyerahkan kepada pemimpinnya (menentukan) pandangan (kebijakan) dalam urusan kaum muslim, berjanji tidak akan menentanginya mengenai sesuatu diantara urusan-urusan tersebut, dan berjanji akan*

---

**Kelima:** az-Zaman(masa) missal perkataan orang  
"hal itu ada pada maasa si Fulan"

**Keenam:** al-Washiyah (perintah/wasiat) misal firman allah dalam surat Thaha ayat 115  
"Dan sesungguhnya telah kami wasiyatkan kepada Adam, lalu ia lupa (akan wasiat itu)"

*mentaatinya terkait dengan perintah yang dibebankan olehnya, baik perintah itu disenangi ataupun dibenci.*<sup>32</sup>

Dari perkataan itu jelas bahwa baiat adalah perjanjian antara umat dengan penguasa, yaitu agar penguasa menjalankan pemerintahan sesuai dengan hukum-hukum syara', agar umat mentaati penguasa. Tampak pemahaman Ibnu khaldun itu benar, sebab dia menyebut baiat dalam konteks kekuasaan milik umat, karena umat yang mengangkat Khalifah. Begitu juga umat yang memecat dan menoreksi Khalifah jika Khalifah menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian dan akad. Istilah yang paling tepat dalam menjelaskan realitas baiat adalah:

البيعة هي حق الأمة في إمضاء عقد الخلافة

*Baiat adalah hak umat dalam melaksanakan akad penyerahan kekhilafahan.*<sup>33</sup>

Definisi inilah yang menjadi pilihan kami (kami adopsi), sebab pendapat ini mensifati baiat dari aspek bahwa baiat merupakan salah satu aspek aktifitas politik yang dilakukan umat yang menggunakan haknya dalam kekuasaan<sup>34</sup> yang sejak semula hak itu dimiliki oleh umat. Karena kepala Negara tidak akan menjalankan kekuasaan kecuali melalui baiat. Baiat merupakan pilar yang paling mendasar bagi kekuasaan umat. Artinya jika umat tidak menjalankan haknya dalam baiat, maka kekuasaan benar-benaaar tercabut

<sup>32</sup>Ibnu Khaldun, *op.cit.*, jili d.2, hlm. 549

<sup>33</sup>DR. Mahmud 'Abd al-Majid al-Khalidi, *op.cit.*, hlm. 136

<sup>34</sup>Lihat Abi Ya'la Muhammad, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 24. Beliau berkata: 'apabila ahlul halli wal -aqdi telah berkumpul untu memilih, dan mereka telah berfikir tentang hal-hal terkait dengan yang berhak terhadap imamah (kekhilafahan)... apabila mereka telah menentukan seseorang diantara jama'ah, yang berdasarkan ijthihad bahwa orang tersebut layak dipilih dan disertai imamah, dan orang tersebut menerimanya, lalu mereka membaiaitnya, sehingga imamah terakadkan kepadanya dengan baiat mereka itu, selanjutnya seluruh umat wajib turut membaiaitnya, dan wajib terikat untuk mentaatinya.' Lihat juga *al-ahkam as-Sulthaniyah*, karya al-mawardi, di hlm 15 beliau berkata : yang berhak memilih adalah mereka yang dapat dijadikan hujjah, dan dengan bait mereka sah dan selesailah aqad penyerahan kekhilafahan.' Lihat juga *Nihayah al-Muhtaj ila Syarh al-Minhaj*, 7/29, penyusun kitab ini menyebutkan " akad penyerahan imamah itu sah (hanya) dengan baiat." Ini adalah perkataan Imam nawawi.



dari umat, akibatnya system pemerintahan islam menjadi rusak, sebab sebagian gambarnya keluar dari ketentuan syara.

Terkait dengan sifat pengambilan baiat, maka syara' tidak menentukan sifat-sifat dan sarana-sarana tertentu dalam melangsungkan pengambilan dan pemberian baiat.

Dengan demikian, baiat secara syari'ah dilaksanakan dengan sarana apapun diantara sarana-sarana yang mampu menghantarkan pada terlaksananya akad baiat. Setelah pengamatan dengan seksama kejadian-kejadian pengambilan baiat dalam kehidupan politik, baik pada masa Nabi saw maupun pada masa Khulafa' al-Rasyidin , didapati baiat diambil dengan berjabat tangan, tulisan (surat) dan dengan lisan.

Baiat dengan berjabat tangan diantaranya: baiat al-Ridwan. Allah SWT berfirman dalam surat al-Fath [48];10

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِقَاتِ الْكُنُوزِ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَسُّلِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ مُخْلِئِينَ وَرَافِقِينَ ۚ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِقَاتِ الْكُنُوزِ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَسُّلِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ مُخْلِئِينَ وَرَافِقِينَ ۚ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِقَاتِ الْكُنُوزِ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَسُّلِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ مُخْلِئِينَ وَرَافِقِينَ ۚ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِقَاتِ الْكُنُوزِ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَسُّلِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ مُخْلِئِينَ وَرَافِقِينَ ۚ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِقَاتِ الْكُنُوزِ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَسُّلِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ مُخْلِئِينَ وَرَافِقِينَ ۚ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِقَاتِ الْكُنُوزِ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَسُّلِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ مُخْلِئِينَ وَرَافِقِينَ ۚ﴾  
 ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَالِقَاتِ الْكُنُوزِ أَنْ تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِمَّا قَدَرْتُمْ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّوَسُّلِ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ عِندَ اللَّهِ مُخْلِئِينَ وَرَافِقِينَ ۚ﴾

*“Bahwasanya orang-orang yang berjanji setia kepada kamu Sesungguhnya mereka berjanji setia kepada Allah, tangan Allah di atas tangan mereka”*

Baiat itu terjadi ketika Rasulullah menyuruh melakukan *Baiat al-Ridwan*. Utsman bin Affan menjadi utusan Rasulullah kepada penduduk Mekah. Orang-orang berbaiat, lalu

mereka berkata: Rasulullah bersabda: “*Ya Allah! Sesungguhnya Utsman butuh kepada Allah dan Rasul-Nya.*” Lalu Beliau memukulkan kedua tangannya ke tangan yang lain. Dengan demikian, tangan Rasulullah bagi Utsman lebih baik dari tangan mereka terhadap diri mereka sendiri.<sup>35</sup>

Baiat dengan tulisan contohnya yang dikirim al-Najasyi al-Asham bin Abhar kepada Rasulullah saw:

*“ Bismillahi al-Rahman al-Rahim, kepada Muhammad saw dari al-Najasyi al-Asham bin Abhar, keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah yang tiada Tuhan selain Dia yang telah menunjuki aku kepada Islam, semoga tercurah kepada Anda wahai Nabiullah. Kemudian setelah itu, surat yang anda kirim telah sampai kepadaku, Wahai Rasulullah. Isinya antara lain anda menyebutkan tentang perkara Isa. Maka demi tuhan yang mengatur langit dan bumi bahwa Isa tidak lebih dari apa yang anda sebutkan. Sesungguhnya Isa itu sebagaimana yang anda sebutkan. Sungguh kami telah mengerti sesuatu yang dengannya Anda diutus kepada kami. Sungguh kami telah dekat dengan anak pamanmu dan teman-temannya, dan kami bersaksi bahwa Anda adalah Rasulullah yang jujur yang dapat dipercaya. Aku membaiat Anda, dan membaiat anak paman Anda beserta teman-temannya. Aku telah masuk Islam ditangannya semata karena Allah Tuhan semesta alam.”<sup>36</sup>*

Diperbolehkan baiat dilakukan dengan menggunakan berbagai sarana yang memungkinkan.<sup>37</sup> Sarana yang sangat memungkinkan dan memudahkan dalam melakukan baiat pada saat sekarang adalah dengan menggunakan telepon, faksimili, telegram, dan fasilitas-fasilitas yang ada pada jaringan internet.

### 3. Terwujudnya Akad Khilafah

Khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, kerana merupakan bai'at untuk taat kepada seseorang yang mempunyai hak ditaati dalam kekuasaan. Jadi, dalam hal ini harus ada kerelaan dari pihak yang dibai'at untuk

<sup>35</sup>Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim* Vol. 4, (Riyadh: Dar 'Alam al-Kutub, 1997), hlm. 186

<sup>36</sup>Taqiyuddin al-Nabhani, *al-Sakhshiyah al-Islamiyah Jilid 2*, *op.cit.*, hlm. 23

<sup>37</sup> Taqiyuddin al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 68

memegang tampuk kekuasaan dan kerelaan pihak yang membai'atnya. Oleh karena itu, apabila seseorang tidak bersedia menjadi khalifah dan menolak jabatan khilafah, ia tidak boleh dipaksa atau ditekan untuk menerimanya, tapi harus dicarikan orang lain untuk menduduki jabatan tersebut. Demikian pula tidak boleh mengambil bai'at dari kaum muslimin dengan kekerasan dan pemaksaan, karena dalam keadaan demikian akad yang dilakukan tidak dianggap sah. Sebab, khilafah adalah akad yang dibangun atas dasar kerelaan dan pilihan, tidak boleh ada unsur paksaan atau tekanan.<sup>38</sup>

Hanya saja, ketika pelaksanaan akad bai'at telah sempurna dilaksanakan oleh orang-orang yang memenuhi syarat untuk membai'at, akad bai'at tersebut telah sah. Dalam hal ini orang yang dibai'at telah menjadi *Walīyul Amri*, pemegang tampuk kekuasaan, yang harus ditaati. Status bai'at yang diberikan kepadanya setelah itu menjadi bai'at taat, bukan lagi bai'at untuk akad khilafah. Pada saat itu, dia boleh memaksa orang-orang yang belum berbai'at untuk berbai'at kepadanya, karena pemaksaan tersebut dalam rangka mentaatinya dan secara syar'i hal ini hukumnya wajib. Pemaksaan bai'at tersebut bukan untuk akad bai'at mewujudkan khilafah sehingga bisa dinyatakan tidak sah apabila di dalamnya ada unsur paksaan. Atas dasar itu, baiat pada tahap awal merupakan akad yang hanya bisa dikatakan sah manakala terdapat kerelaan dan pilihan dari kedua pihak. Adapun setelah dilaksanakan akad bai'at pengangkatan khalifah, berubah menjadi ketaatan, yaitu kesiapan melaksanakan perintah khalifah, dan untuk itu diperbolehkan ada pemaksaan dalam rangka melaksanakan perintah Allah SWT.

Oleh karena khalifah merupakan akad<sup>39</sup>, tidak akan sempurna tanpa adanya *akid*, yaitu pihak pertama yang menginginkan akad. Seperti halnya dalam masalah pengadilan

---

<sup>38</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 58

<sup>39</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhomu al-Islam*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2001), cet. 6, hlm. 94-95

(*qadla*), seseorang tidak sah menjadi *qadli* kecuali setelah pihak yang berwenang menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Demikian pula dalam masalah pemerintahan, seorang amir tidak sah kecuali setelah jabatan tersebut diserahkan kepadanya oleh pihak yang memiliki wewenang dalam hal ini. Dalam hal kekhalifahan, seseorang tidak akan menjadi khalifah kalau kaum muslimin, sebagai pihak yang memiliki kekuasaan, tidak menyerahkan jabatan tersebut kepadanya. Dia akan memiliki wewenang pemerintahan hanya jika pelaksanaan akad khilafah kepadanya berjalan secara sempurna. Akad ini tidak akan terlaksana kecuali adanya dua pihak yang berakad. Pihak pertama adalah orang yang mencalonkan diri atau dicalonkan untuk menduduki jabatan khalifah. Pihak kedua adalah kaum muslimin yang sepenuhnya rela kepada pihak pertama untuk menjadi khalifah mereka. Oleh karena itu, dalam hal pengangkatan khalifah harus ada bai'at dari kaum muslimin.

## **MU'AWIN**

Mu'awin adalah para pembantu yang telah diangkat oleh khalifah agar mereka membantunya dalam rangka mengemban tugas-tugas khilafah, serta melaksanakan tanggungjawab khilafah tersebut. Sedemikian besar tugas khilafah –khususnya ketika wilayah negara khilafah menjadi besar dan luas, dan khalifah sulit untuk mengemban tugasnya sendirian– sehingga dia membutuhkan orang-orang yang membantunya dalam mengemban dan melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawabnya.

Mu'awin yang telah diangkat oleh khalifah untuk membantu melaksanakan tugas-tugas khilafah tersebut ada dua yaitu: *Wuzaraut Tafwidh* (pembantu khalifah bidang

pemerintahan) dan *Muzaraut Tanfidz* (pembantu khalifah bidang administrasi).<sup>40</sup>

## B. MU'AWIN TAFWIDH (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan)

*Mu'awin tafwidh* adalah pembantu yang diangkat oleh khalifah agar dia bersama-sama khalifah memikul tanggungjawab pemerintahan dan kekuasaan. Khalifah akan menyerahkan kepada mu'awin agar dia mewakilinya dalam mengurus urusan-urusan negara dengan pendapatnya serta memutuskan urusan-urusan tersebut dengan ijtihadnya berdasarkan hukum-hukum syara'.<sup>41</sup>

Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abi Sa'id al-Khudri, bahwa Rasulullah saw. bersabda:

حدثنا أبو سعيد ال الا شج. حدثنا تليد بن سليمان عن  
عطية عن أبي سعيد الخدري قال:  
ما من نبي الا له وزيران من أهل السماء ووزيران من أهل الارض,  
فأما وزيران من أهل السماء فجبريل و ميكائيل, وزيراي في  
42

"Dua wazir-ku dari (penduduk) bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar."

Hadits ini telah dipergunakan oleh para *fuqaha'* (ahli fiqih) secara umum serta diterima oleh kebanyakan mereka (sebagai dalil). Status hadits ini adalah *hasan*, sehingga tetap bisa dipergunakan sebagai dalil syara', bahwa seorang khalifah berhak untuk mengangkat dua pembantunya.

Hadits di atas mempergunakan kata *wazir* dengan makna bahasa, yaitu *mu'in* (pembantu). Makna tersebut juga dipergunakan oleh Al Qur'an, Allah SWT. berfirman:

<sup>40</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 129

<sup>41</sup>*Ibid.*, hlm. 142

<sup>42</sup>At-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), hlm. 576, Hadis no. 3680, Kitab al-Munaqib, Bab 17



*"Dan jadikanlah untukku seorang pembantu (wazir) dari keluargaku."*

Makna *wazir* di dalam ayat tersebut adalah pembantu. *Wuzarat* (para pembantu kepala negara) ada semenjak masa Rasulullah saw. Dalil tentang hal itu adalah nash hadits Tirmidzi di atas.

Hanya saja, Rasulullah lah yang melakukan tugas-tugas pemerintahan dan tidak ada satu nash pun yang menunjukkan bahwa urusan pemerintahan itu diserahkan kepada Abu Bakar dan Umar (yang menjadi pembantu ia ketika itu), sehingga keduanya nampak melakukan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Hanya saja, dengan dijadikannya mereka berdua sebagai wazir itu telah menunjukkan bahwa ia telah memberikan wewenang (*shalahiyat*) untuk membantu ia, yaitu masing-masing memiliki wewenang untuk melakukan tugas dalam bidang pemerintahan.

Sepeninggal Rasul, Umar diangkat sebagai wazir Abu Bakar, melakukan tugas dalam pemerintahan. Umar nampak begitu menonjol, sehingga sebagian orang ada yang berkata kepada Abu Bakar: *"Kami tidak tahu, bahwa yang menjadi khalifah ini Umar atau engkau?"*. Sepeninggal Abu Bakar, Utsman dan Ali Bin Abi Thalib menjadi wazirnya Umar, mereka berdua melakukan tugas pemerintahan. Karena ketangguhan pribadi Umar, mereka tidak begitu menonjol, selain hanya nampak sebagai dua orang pembantunya (*wazir* atau *mu'awin*). Tidak semenonjol Umar pada masa Abu Bakar. Hanya saja Ali, karena ketangguhan pribadinya, ia begitu menonjol dalam melaksanakan tugas-tugasnya di masa Umar. Setelah masa Umar, Ali dan Marwan Bin Al Hakam menjadi wazirnya

---

<sup>43</sup> (Q.S. Thaha: 29)

Utsman. Karena Ali tidak suka terhadap beberapa kebijakan (yang dijalankan oleh khalifah) dia tidak begitu menonjol dalam melaksanakan tugas-tugasnya pada masa Utsman, karena dia banyak menjauhkan diri. Tetapi, Marwan lebih menonjol dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai wazir, yakni tugas-tugas pemerintahan.<sup>44</sup>

Sementara itu, seorang khalifah bisa menyerahkan kepada wazirnya agar mewakilinya dalam mengurus berbagai urusan secara umum, hal seperti itu telah dialami oleh setiap khalifah pada masa-masa khulafaur rasyidin.

Kata *wazir* itu bisa difahami dari makna bahasa yaitu *mu'inul khalifah* (pembantu khalifah), yang membantu tugas-tugas kekhilafahan. Pemakaian kata *wazir* dalam bentuk mutlak, yang tidak dibatasi dengan konotasi tertentu sehingga maknanya adalah bahwa dia merupakan pembantu khalifah dalam semua tugas-tugas khilafah, tanpa dibatasi dengan tugas-tugas tertentu. Kata wazir itu kemudian lebih sering bermakna syar'i ketika kata tersebut disandarkan kepada kata *Rasul*, lalu disandarkan kepada kata *khalifah*. Karena itu, makna kata *wazirayya* --di dalam hadits di atas-- adalah dua orang pembantuku, dalam kapasitasku sebagai *hakim* (penguasa) dalam pemerintahan. Sehingga kata tersebut memiliki makna syara', yaitu *mu'awinul khalifah* (pembantu khalifah) dalam kekhilafahan. Dan itu berarti, dia menjadi pembantu khalifah dalam setiap tugas-tugas khilafah.

Inilah yang bisa difahami dari hadits di atas. Pemahaman ini kemudian diperkuat oleh praktek yang dilakukan Umar Bin Khattab semasa kekhilafahan Abu Bakar. Makna kata wazir tersebut merupakan makna syara', yaitu orang yang membantu khalifah dalam melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. Sehingga wewenangnya seperti wewenang

---

<sup>44</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 131

seorang khalifah, hanya bedanya dia memperoleh wewenang tersebut tidak secara otomatis seperti khalifah, melainkan karena adanya akad menjadi wazir yang diberikan kepadanya oleh seorang khalifah. Jikalau seorang khalifah berkata: "Aku mengangkat si Fulan untuk menjadi wazir yang menggantikan aku.", "... atau menjadi mu'awin yang menggantikan aku.", "... atau menggantikanku dalam hal yang menjadi tugas-tugasku." dan sebagainya, praktis dia telah memiliki semua wewenang khalifah, karena dia telah menjadi wakilnya.

Imam Al Mawardi dalam buku *Al Ahkam As Sulthaniyah* menyebut pembantu khalifah tersebut dengan sebutan *wuzaratut tafwidh*, lalu ia mendefinisikan: "*wuzaratut tafwidh* adalah orang yang diminta menjadi pembantu imam untuk mengurus berbagai urusan dengan pendapatnya, serta memutuskannya berdasarkan ijtihadnya."<sup>45</sup> Ini adalah fakta mu'awin secara syar'i, bahwa dia adalah pembantu khalifah (*mu'awinul khalifah*) dalam semua tugas-tugas kekhilafahan, yang memiliki wewenang untuk melaksanakan setiap tugas kekhilafahan. Baik tugas tersebut merupakan tugas yang didelegasikan oleh khalifah atau tidak. Sebab, dia telah mendapat penyerahan secara umum.

Hanya saja, ia tetap harus melaporkan setiap tindakan yang sedang ia lakukan kepada khalifah. Sebab dia merupakan pembantu khalifah dan bukan khalifah, sehingga tidak mandiri penuh. Tetapi tetap senantiasa melaporkan setiap tindakannya, baik yang kecil maupun yang besar, kepada khalifah.

Inilah fakta tentang mu'awin atau wazir secara syar'i, fakta tersebut amat berbeda dengan *wuzarat* (menteri kabinet) dalam sistem Demokrasi. Karena menteri kabinet dalam sistem Demokrasi merupakan pemerintah, dimana menteri kabinet tersebut adalah

---

<sup>45</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar Al-Fikr, tt), hlm. 23



kumpulan individu yang menjalankan pemerintahan sebagai sebuah team tertentu. Sehingga bagi mereka sendiri, pemerintahan itu merupakan kekuasaan kolektif, bukan tunggal (personal). Artinya, yang memimpin adalah team (kolektif), bukan personal (tunggal).<sup>46</sup>

Oleh karena itu, semua kabinet menteri itulah yang menjadi penguasa (*hakim*), dimana mereka semuanya memiliki wewenang untuk memerintah. Mereka itu merupakan kumpulan semua menteri, bukan satu menteri saja. Karena masing-masing menteri tersebut tidak ada yang memiliki kekuasaan (*pemerintahan*) secara mutlak. Semua wewenang pemerintahan tersebut hanya dimiliki oleh menteri kabinet secara kolektif, sedangkan seorang menteri faktanya hanya dikhususkan untuk mengurus satu bidang pemerintahan, dalam hal ini dia hanya memiliki wewenang semata-mata yang telah ditentukan untuk menteri kabinet secara team (kolektif). Karena itu, selagi wewenang tersebut belum ditetapkan untuk ia, wewenang tadi tetap menjadi milik menteri kabinet, bukan dia –secara pribadi sebagai menteri. Dari sinilah, kemudian ada istilah menteri kesejahteraan, misalnya, yang memiliki wewenang dalam departemennya sendiri, kemudian ada hal-hal yang ada dalam departemennya, padahal dia tidak berkewenangan menanganinya namun telah ditetapkan secara team (kolektif) oleh menteri kabinet tersebut.

Begitulah fakta menteri kabinet dalam sistem Demokrasi. Dari sini, nampak berbeda sekali antara menteri kabinet dengan *wuzarat* (pembantu khalifah) dalam sistem Islam. Tampak adanya perbedaan yang sedemikian jauh antara kata *wazir* atau *mu'awin* (pembantu khalifah) dalam sistem Islam dengan kata *wazir* tersebut dalam sistem

---

<sup>46</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 132

Demokrasi.<sup>47</sup>

Wazir dalam sistem Islam maknanya adalah pembantu khalifah dalam melaksanakan semua tugasnya dengan tanpa terkecuali, ia melakukan tugas-tugas tersebut lalu ia melaporkan semua yang dia lakukan kepada khalifah. Tugas-tugas tersebut merupakan tugas pribadi yang dimiliki oleh individu, sekalipun tugas-tugas tersebut diberikan lebih kepada satu orang, yang masing-masing memiliki wewenang seperti yang dimiliki oleh khalifah.

Sedangkan wazir dalam sistem Demokrasi berbentuk team (kelompok), bukan personal. Ia hanya menangani bidang pemerintahan tertentu, dia tidak memiliki secara keseluruhan selain hanya sebagian. Oleh karena itu, ada perbedaan yang amat tegas dan jelas antara konsep dan pemahaman kata *wazir* dalam Islam dengan konsep dan pemahaman kata tersebut dalam sistem Demokrasi.

Karena makna kata *wazir* yang dijelaskan oleh konsep dan pemahaman Demokrasi itulah yang difahami oleh banyak orang, kalau kata tersebut dipergunakan pasti akan mengarah pada konsep dan pemahaman Demokrasi. Oleh karena itu, dalam rangka menolak terjadinya kontaminasi, serta untuk menentukan hanya makna syara' saja --yang seharusnya difahami dan dipergunakan-- tidak diperbolehkan menyebut pembantu khalifah dengan mempergunakan kata *wazir* secara mutlak, tanpa disertai keterangan. Diperbolehkan untuk menyebut dengan menggunakan kata *mu'awin*, karena kata itulah yang memiliki makna yang hakiki --sebagaimana kata asalnya, yaitu wazir-- atau diperbolehkan memakai kata *wazir* dengan disertai keterangan (ketentuan) yang bisa mengeliminir makna yang dinyatakan oleh konsep Demokrasi. Sehingga hanya makna

---

<sup>47</sup>*Loc.cit.*, hlm. 132

Islam sajalah yang harus dipergunakan.<sup>48</sup>

Dari sini, nampak dengan jelas bahwa mu'awin adalah orang yang menjadi wakil dalam semua tugas negara di seluruh belahan negara, yang telah tunduk di bawah negara Islam. Karena itu, ada yang menyatakan bahwa khalifah seharusnya menyerahkan kepada mu'awin untuk menjadi wakilnya –dalam berbagai tugas– secara umum. Jadi, tugas mu'awin adalah sebagai wakil khalifah dan dia mewakilinya dalam tugas-tugas negara secara umum, yaitu sebagai pemerintah (penguasa) yang statusnya sebagai mu'awin.

#### a. Syarat-syarat Muawin Tafwidh

Syarat-syarat yang disyaratkan untuk menjadi mu'awin adalah sama dengan syarat-syarat untuk menjadi khalifah. Yaitu harus laki-laki, merdeka, Islam, baligh, berakal dan adil, disamping itu dia harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas yang diwakilkan kepadanya.

Dalil-dalil tentang syarat-syarat tersebut adalah dalil-dalil yang dipergunakan untuk syarat khalifah. Dalil tentang mu'awin harus laki-laki adalah sabda Rasulullah saw yang menjelaskantentang ketidak-bolehan wanita untuk memegang urusan kekuasaan.<sup>49</sup>

Dan harus merdeka, karena seorang budak tidak memiliki otoritas terhadap dirinya sendiri, apalagi memiliki otoritas untuk mengatur terhadap urusan orang lain. Sedangkan tentang keharusan seorang mu'awin harus baligh adalah sabda Rasulullah saw.:

يحي افطعي البصري حدثنا بشر بن عمر حدثنا همام عن

: عليه وسلم

: عليه وسلم

حتي يعقل<sup>50</sup>

<sup>48</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 133

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 133

<sup>50</sup> At-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih Juz 4*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 24, Hadis no. 1423, Kitab al-Hudud, Bab Ma Ja a fi man...



merupakan wakil khalifah. Karena seorang wakil hanya melaksanakan kegiatannya berkaitan dengan statusnya sebagai wakil orang yang diwakili. Sehingga dia tidak bisa terlepas sama sekali dari khalifah, melainkan harus senantiasa melaporkan secara penuh setiap tindakan yang dia lakukan kepada khalifah<sup>53</sup>, yang telah dilakukan oleh Umar ketika menjadi wazir Abu Bakar. Dimana Umar senantiasa melaporkan apa yang menjadi kebijakannya kepada Abu Bakar. Kemudian dia selalu melaksanakan sesuai dengan apa yang menjadi keputusan Abu Bakar.

Makna penyampaian laporan mu'awin kepada khalifah itu tidak berarti, mu'awin senantiasa meminta izin kepada khalifah dalam setiap persoalan secara detail, karena hal ini justru bertentangan dengan realitas mu'awin itu sendiri. Tetapi, makna penyampaian laporan tersebut adalah mu'awin harus selalu menyampaikan setiap hal –baik yang masih menjadi planning maupun yang telah dilakukan– kepada khalifah. Semisal, ada satu wilayah yang membutuhkan seorang wali yang betul-betul mampu atau menyelesaikan masalah yang dikeluhkan oleh masyarakat, mungkin karena minimnya persediaan bahan makanan di pasar ataupun masalah-masalah negara yang lain. Atau hanya sekedar menyampaikan masalah-masalah tersebut kepada khalifah, agar dia bisa meneliti masalah-masalahnya, lalu mu'awin itu mengikuti apa yang diputuskan oleh khalifah.

Jadi, adanya laporan itu saja sudah cukup agar dia bisa melaksanakan tiap-tiap kegiatan yang telah dinyatakan di dalam laporan tersebut, secara rinci. Karena untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, mu'awin tidak perlu mendapat izin dahulu. Tetapi, kalau ada hal-hal yang tidak boleh dilaksanakan dalam laporan tadi, dia tidak boleh melaksanakannya. Jadi, laporan tersebut hanya sekedar menyampaikan beberapa hal

---

<sup>53</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2002), cet. 6, hlm. 258

atau semata-mata agar mengetahui hal-hal tersebut, bukan untuk meminta izin supaya bisa melaksanakannya. Sehingga, selama tidak dihentikan atau distop oleh khalifah, mu'awin boleh melaksanakan terus apa yang telah dia laporkan.

Seorang khalifah wajib mengontrol tugas-tugas serta kebijakan-kebijakan dalam mengatur berbagai hal, yang telah dilakukan oleh mu'awin tafwidhnya, sehingga tidak dibiarkan begitu saja. Kalau ada yang benar, khalifah harus menerimanya serta kalau ada yang salah dia pun bisa mengetahuinya. Karena masalah mengatur urusan-urusan umat itu telah diwakilkan dan diberikan kepada khalifah dengan mengikuti ijtihadnya.<sup>54</sup>

Hal itu didasarkan pada hadits tentang tanggungjawab mengurus urusan umat, yaitu sabda Rasulullah saw.:

حدثنا قتيبة بن سعيد. حدثنا ليثٌ. . حدثنا الليث عن

عليه وسلم, أنه قال,

. وكلكم مسؤولٌ عن رعيته. فالأمير الذي علي الناس راع,

وهو مسؤولٌ عن رعيته<sup>55</sup>

*Bukankah setiap kalian adalah pemimpin, Amir yang (memimpin) atas manusia adalah bagaikan seorang penggembala dan dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya (rakyatnya)*

Khalifahlah yang diserahi untuk mengatur berbagai urusan umat, dialah yang paling bertanggungjawab terhadap masalah rakyatnya. Sedangkan seorang mu'awin

<sup>54</sup> *Loc.cit.*, hlm. 258-259

<sup>55</sup> Muslim, *Shahih Muslim* jilid 3, (Qahirah: Dar al-Hadits, 1991), hlm. 1459, Hadits no. 1829, Kitab Imerah, Bab Fadlilatu al-Imam. . . Lihat Bukhari, *qp.cit.*, hlm. 272, Hadis no. 7138, Kitab al-Ahkam, Bab wa qauli Allah Ta'ala (dari Ibnu Umar).

tafwidh bukanlah penanggungjawab urusan rakyat, tetapi hanya bertanggungjawab terhadap tugas-tugas yang dia lakukan. Tanggungjawab untuk mengurus urusan rakyat itu hanya menjadi otoritas seorang khalifah. Oleh karena itu, dia wajib mengontrol tugas-tugas dan kebijakan-kebijakan mu'awin. Sehingga dia tetap dianggap melaksanakan tanggungjawab untuk mengurus rakyatnya. Boleh jadi, mu'awin tafwidh melakukan suatu kesalahan sehingga kesalahan yang telah dilakukannya itu harus diketahui oleh seorang khalifah. Karena itu, khalifah harus senantiasa mengontrol semua tugas mu'awinnya.<sup>56</sup>

Karena dua hal itulah, yaitu melaksanakan tanggungjawab untuk mengurus urusan rakyat, serta mengetahui kesalahan mu'awin tafwidh, khalifah wajib untuk mengontrol semua tindakan mu'awin tafwidh. Kalau seorang mu'awin tafwidh telah mengatur suatu urusan, lalu disepakati oleh khalifah, mu'awin boleh melaksanakannya tanpa menambah dan mengurangnya. Sedangkan kalau khalifah menolak dan mu'awin tidak menerima karena apa yang telah dilakukannya itu ditolak, maka harus diteliti dulu. Kalau yang dilakukan mu'awin adalah masalah hukum, ia menerapkan masalah itu dengan pendapatnya atau urusan harta yang dia tetapkan sendiri, dalam hal ini pendapat mu'awinlah yang harus dilaksanakan. Karena esensinya, pendapat mu'awin adalah pendapat khalifah --sebab dia telah mewakilkan urusan tersebut kepada mu'awin--seorang khalifah tidak boleh menarik kembali hukum-hukum yang telah dia lakukan, serta menarik harta-harta yang telah dia distribusikan. Kalau apa yang telah ditetapkan oleh mu'awin selain itu, semisal penyerahan jabatan wali atau penataan pasukan, khalifah boleh menolak tindakan mu'awin tafwidh kemudian pendapat yang dilaksanakan adalah pendapat khalifah, sedangkan kegiatan-kegiatan mu'awin tersebut tidak dipakai, sebab

---

<sup>56</sup> Taqiuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm.137

khalifah berhak untuk menarik kegiatan itu sendiri, sehingga dia juga berhak untuk menarik kegiatan mu'awinnya.<sup>57</sup>

Inilah gambaran mu'awin tafwidh melaksanakan tugas-tugasnya serta bagaimana seorang khalifah mengontrol kegiatan-kegiatan mu'awin tersebut. Kesemuanya ini diambil dari hal-hal yang menjadi hak khalifah ia bisa mencabutnya, serta kegiatan-kegiatan mana yang tidak boleh dia cabut, sebab kegiatan mu'awin tafwidh itu bisa dianggap sebagai kegiatan khalifah. Dengan penjelasan tadi, seorang mu'awin tafwidh boleh untuk menetapkan hukum sendiri, juga boleh menunjuk para *hakim* (semisal, wali dan amil) hal itu boleh dilakukan oleh khalifah. Karena syarat-syarat pemerintahan dalam hal ini sudah jelas. Ia boleh memberi pendapat dalam masalah *madzalim* (kedzaliman-kedzaliman) serta menunjuk wakil dalam masalah ini, karena syarat-syarat *madzalim* dalam hal ini juga jelas. Ia boleh memimpin perang secara langsung, juga boleh menunjuk orang lain untuk memimpinnya, karena syarat-syarat perang di sini juga jelas. Ia boleh mengurus pelaksanaan urusan-urusan yang telah ditetapkan, juga boleh menunjuk wakil untuk melaksanakannya sebab syarat-syarat untuk mengurusinya juga jelas. Hanya saja, selama mu'awin melaporkan apa saja yang telah dia lakukan bukan berarti tidak bisa dihapus oleh khalifah. Tetapi, yang dimaksud adalah mu'awin memiliki wewenang seperti yang dimiliki oleh khalifah, tetap saja statusnya sebagai wakil khalifah dan bukan berdiri sendiri serta terlepas sama sekali dari khalifah.<sup>58</sup>

Karena itu, khalifah boleh tidak setuju terhadap apa saja yang telah dilakukan oleh mu'awin, bahkan meniadakan apa saja yang telah dilakukan oleh mu'awin. Namun, sebatas kegiatan-kegiatan yang boleh ditarik oleh khalifah itu saja. Sehingga ketika

---

<sup>57</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, op.cit., hlm. 259

<sup>58</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm.138



mu'awin menerapkan hukum, dimana dia menerapkan dengan pendapatnya, atau urusan harta yang dia tetapkan sendiri. Kemudian setelah hal itu dilaksanakan, khalifah tidak setuju maka ketidak-setujuan khalifah tersebut tidak ada artinya, dan pendapat mu'awinlah yang dipakai. Bahkan, pendapat khalifah tersebut harus ditolak. Karena, esensinya apa yang telah dilakukan oleh mu'awin adalah pendapat khalifah. Dalam hal seperti ini, khalifah tidak boleh menarik pendapatnya sendiri, atau meniadakan apa yang telah dilaksanakan secara tuntas. Sehingga dalam hal ini, dia juga tidak boleh meniadakan kegiatan mu'awinnya.

Apabila mu'awin telah mengangkat seorang wali atau pegawai atau komandan pasukan atau pengangkatan-pengangkatan yang lain, atau membuat strategi ekonomi, kebijakan militer atau maket industri atau yang lain, seorang khalifah diperbolehkan untuk tidak memakainya. Karena, sekalipun masalah tersebut esensinya merupakan pendapat khalifah, dalam hal ini khalifah boleh untuk mencabutnya, seandainya dia yang melaksanakan sendiri. Sehingga dia juga boleh meniadakan kegiatan-kegiatan wakilnya, dalam hal ini dia juga boleh meniadakan kegiatan-kegiatan mu'awin tersebut. Kaidah yang berkaitan dengan hal ini adalah: "Kegiatan khalifah yang boleh dicabut oleh khalifah sendiri, ia boleh mencabut kegiatan-kegiatan mu'awinnya. Setiap kegiatan khalifah sendiri yang tidak boleh dicabut oleh khalifah sendiri, ia juga tidak boleh mencabut kegiatan mu'awinnya."

Mu'awin tafwidh tidak dikhususkan untuk menangani salah satu departemen atau bidang-bidang tertentu. Karena wewenangnya memang umum, disamping itu dia tidak menangani masalah-masalah teknis (administrasi). Mu'awin tafwidh justru bertugas

menangani perangkat administrasi negara (departemen-departemen) secara umum.<sup>59</sup>

Itulah yang dijelaskan oleh kata *waziraya* (dua pembantuku) di dalam hadits yang telah dikeluarkan oleh Imam At Tirmidzi di atas, bahwa mu'awin tersebut adalah pembantu khalifah dalam kekhilafahan. Kegiatan mu'awin itu mencakup semua wewenang yang dimiliki oleh khalifah. Oleh karena itu, tidak boleh mengangkat seorang mu'awin khalifah untuk menduduki satu departemen tertentu, semisal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Karena dengan begitu, maknanya bertentangan dengan makna syara' dari kata tersebut.

Apabila, pengangkatan mu'awin tersebut wewenangnya dibatasi akad terhadap mu'awin itu tidak sah. Ia belum bisa dianggap sebagai mu'awin khalifah, karena akadnya tidak sah. Sedangkan pengangkatan ketua qadli, tidak bisa dianggap sebagai pengangkatan wewenang tertentu bagi mu'awin khalifah dalam bidang peradilan. Karena hal itu hanya merupakan pengangkatan wewenang bagi seorang wali dengan wewenang tertentu, seperti mengurus pasukan, mengurus *shadaqah* (harta benda), dan sebagainya. Ia bisa diangkat dengan wewenang-wewenang yang diberikan kepadanya, yang berbeda dengan penyerahan jabatan sebagai mu'awin tafwidh. Dan ketua qadli (*qadli qudlat*) merupakan seorang pemimpin, yang telah diberi wewenang untuk mengangkat para qadli, dan menentukan kebijakan dalam peradilan serta kebijakan untuk memutuskan perkara di tengah seluruh manusia, dan dia bukanlah seorang mu'awin.

Karena itu, tidak boleh membatasi wewenang mu'awin tafwidh dalam satu departemen, sehingga apabila terjadi pembatasan dalam satu departemen tertentu batal-lah akad pengangkatannya. Karena syarat sah atau tidaknya penyerahan mu'awin tafwidh

---

<sup>59</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 139

tersebut adalah agar akad tersebut mempergunakan lafadz yang jelas, yang mencakup dua syarat. *Yang pertama* adalah keumuman wewenang, dan *kedua* adalah menjadi wakil. Pembatasan mu'awin dalam satu departemen jelas telah menggugurkan salah satu syarat tersebut, sehingga batal akad pengangkatannya.

Adapun ketidak-bolehan seorang mu'awin melaksanakan urusan-urusan administrasi, adalah karena orang-orang yang melaksanakan urusan-urusan administrasi tersebut adalah para pekerja dan bukan *hakim*. Padahal, mu'awin adalah hakim bukan seorang pekerja. Kegiatannya adalah melayani urusan-urusan umat, bukan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang untuk melaksanakannya dengan menyewa para pekerja.<sup>60</sup>

Karena itu, ia tidak melaksanakan urusan-urusan administrasi, tidak berarti dilarang sama sekali untuk melaksanakan kegiatan administrasi. Maksudnya adalah, ia tidak dibatasi untuk menangani kegiatan-kegiatan administrasi, tetapi kegiatan-kegiatan secara umum.

### C. MU'AWIN TANFIDZ (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi)

Mu'awin tanfidz adalah *wazir* (pembantu) yang diangkat oleh seorang khalifah untuk membantunya dalam masalah operasional dan senantiasa menyertai khalifah dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Ia adalah seorang protokoler (perantara) yang menjadi penghubung antara khalifah dengan aparat negara yang lain, serta menjadi penghubung antara khalifah dengan rakyat, dan antara khalifah dengan negara-negara lain, di luar. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan dari khalifah kepada mereka, serta menyampaikan informasi-informasi yang berasal dari mereka kepada khalifah.<sup>61</sup>

---

<sup>60</sup>*Loc.cit.*, hlm. 139

<sup>61</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah, op.cit.*, hlm.307

Ia merupakan pembantu khalifah dalam melaksanakan berbagai hal, ia bukan yang mengendalikan dan menjalankannya. Ia juga bukan yang diserahi untuk mengurus berbagai persoalan tersebut. Sehingga, tugasnya adalah tugas-tugas teknis (administrasi), bukan tugas memimpin ataupun memerintah. Departemennya merupakan instansi yang berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh khalifah untuk instansi ke dalam dan ke luar negeri. Ia ini juga berfungsi untuk menyampaikan persoalan-persoalan yang ada di masing-masing instansi tersebut kepada khalifah. Karena itu, ia merupakan perantara yang menghubungkan antara khalifah dengan aparat lain. Baik untuk menyampaikan informasi ataupun kebijakan dari dan untuk khalifah.

Khalifah adalah seorang *hakim* (penguasa) yang memerintah dan melaksanakan serta melakukan pelayanan terhadap urusan-urusan umat. Untuk memimpin dan melaksanakan serta melayani urusan-urusan umat itu dibutuhkan kegiatan-kegiatan yang bersifat *idari* (teknis dan administrasi). Dibutuhkan adanya aparat khusus, yang senantiasa bersama-sama khalifah untuk menjalankan urusan-urusan yang dibutuhkan dalam rangka melaksanakan tanggungjawab kekhilafahan tersebut. Sehingga adanya mu'awin tanfidz merupakan keharusan yang ditentukan oleh jabatan seorang khalifah. Aparat itu berfungsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan administrasi dan teknis, bukannya kegiatan memimpin.<sup>62</sup>

Tugasnya adalah untuk membantu khalifah dalam menjalankan (secara operasional) dan bukan memimpin pemerintahan. Bahkan, ia tidak berhak sama sekali untuk melaksanakan kegiatan pemerintahan apapun sebagaimana tugas mu'awin tafwidh. Oleh karena itu, dia tidak bisa mengangkat seorang wali, maupun amil. ia juga tidak bisa

---

<sup>62</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm.140

mengurusi urusan-urusan umat, karena tugasnya hanya tugas teknis dan administrasi dalam rangka melaksanakan kebijakan-kebijakan pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan teknis operasional dari khalifah atau mu'awin tafwidh.

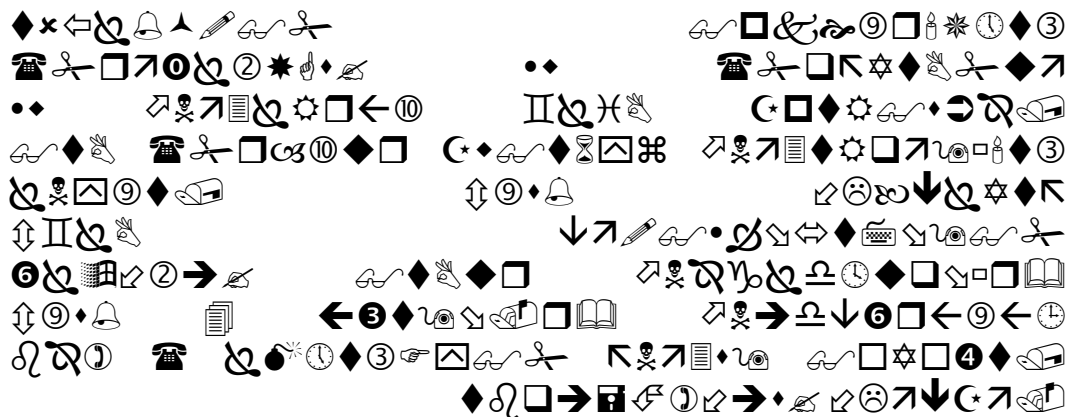
Karena itu, dia disebut mu'awin tanfidz (pembantu teknis dan administrasi). Para *fuqaha'* (ahli fikih) menyebutnya dengan istilah *wazir tanfidz*, yang dimaksud adalah mu'awin tanfidz. Dengan alasan, bahwa kata *wazir* dari segi bahasa bisa dipergunakan untuk menunjukkan makna *mu'in* (pembantu). Mereka mengatakan: Wazir ini merupakan perantara antara khalifah dengan rakyat dan para pejabat-pejabat pemerintahannya. Ia bertugas menyampaikan perintah dari khalifah, melaksanakan apa yang telah dinyatakan dan diputuskan serta menyampaikan penyerahan jabatan wali, amil atau penyiapan pasukan dan keputusan-keputusan khalifah yang lain. Ia juga bertugas menyampaikan hal-hal yang muncul dari mereka kepada khalifah. Ia senantiasa mengikuti perkembangan dengan baik, agar bisa melaksanakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan kepadanya. Jadi, dia merupakan pembantu yang melaksanakan berbagai urusan, bukan sebagai wali yang mengendalikan dan memimpin urusan-urusan tersebut.<sup>63</sup>

Karena mu'awin tanfidz itu senantiasa bertemu langsung dengan khalifah, ia merupakan teman khalifah dan tugasnya juga senantiasa bersentuhan dengan tugas pemerintahan –sekalipun kegiatannya hanya kegiatan praktis dan administrasi– maka mu'awin tanfidz tidak boleh dijabat oleh seorang wanita.

Begitu pula mu'awin tanfidz tidak boleh dijabat oleh orang kafir, melainkan harus seorang muslim, karena dia merupakan teman (*bithanah*) khalifah. Ini didasarkan kepada firman Allah SWT.:

---

<sup>63</sup> *Loc.cit.*, hlm.140



"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ambil menjadi teman kepercayaanmu (bithanah) orang-orang yang di luar kalanganmu, (karena) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudharatan bagimu. Mereka menyukai apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa yang disembunyikan oleh hati mereka lebih besar lagi."<sup>64</sup>

Larangan mengambil *bithanah* (teman) non muslim, bagi khalifah adalah tegas sekali di dalam ayat ini. karena itu, tidak diperbolehkan orang kafir menjadi mu'awin tanfidz, selain orang hanya muslim. Sebab, dia senantiasa bertemu dan melakukan kontak langsung dengan khalifah. Ia tidak dapat dipisahkan dari khalifah, sebagaimana mu'awin tafwidh.

Sedangkan mu'awin tanfidz jumlahnya boleh lebih dari satu orang, sesuai dengan kebutuhan. Karena, mu'awin tanfidz bukanlah seorang *hakim* (yang memimpin pemerintahan). Sementara kalau hakim harus satu orang. Karena itu, khalifah hanya satu, begitu pula mu'awin tafwidh hanya satu.

Adapun urusan-urusan yang melibatkan mu'awin tanfidz untuk menjadi perantara di antara urusan-urusan itu dengan khalifah maupun yang lain ada empat macam: 1- Perangkat negara (*ajhizatut daulah*), 2- Tentara (*jaisy*), 3- Rakyat (*ummat*), 4- Urusan-urusan kenegaraan (*syu'un dauliyah*).<sup>65</sup>

<sup>64</sup> T.Q.S. Ali Imran:

<sup>65</sup> Anonim, *Muqaddimah dustur*, (Beirut: Dar al-Ummah, 2009), cet.2, hlm.184

Itulah fakta tugas-tugas yang dilakukan oleh mu'awin tanfidz. Karena itu, selama dia menjadi perantara antara khalifah dengan yang lainnya, ia merupakan aparat yang berfungsi menghubungkan dari dan kepada khalifah. Karena fungsi perangkat tersebut yang menjadi penghubung, ia juga harus senantiasa mengikuti kegiatan-kegiatan aparat negara yang lain.

Khalifah adalah pemimpin langsung (bukan simbol), yang memimpin sendiri dan pelaksanaan pemerintahan. Khalifah yang juga harus mengurus urusan-urusan rakyatnya. Oleh karena itu, ia harus terus-menerus melakukan kontak dengan perangkat pemerintahan, hubungan-hubungan kenegaraan serta rakyat. Dia juga yang mengeluarkan berbagai hukum dan keputusan serta melaksanakan tugas-tugas mengurus umat. Ia juga senantiasa mengontrol jalannya tugas aparat pemerintahan yang ada, serta apa saja yang dia sampaikan dan apa saja yang menjadi kebutuhannya kepada mereka. Tuntutan-tuntutan dan keluhan-keluhan umat itu disampaikan langsung kepadanya. Karena itu, khalifah harus mengikuti terus menerus kegiatan-kegiatan yang berlangsung di dalam negara.<sup>66</sup>

Karena realitas kegiatan-kegiatan mu'awin tanfidz inilah, ia merupakan perantara yang menyampaikan dari dan kepada khalifah. Dengan kata lain, apa saja yang dikeluarkan oleh khalifah kepada aparat-aparat pemerintahannya, serta apa saja yang disampaikan dari aparat-aparat tersebut kepada khalifah, harus diikuti secara intens (*mutaba'ah*) sehingga bisa dilaksanakan. Oleh karena itu, mu'awin tanfidz harus melakukan *mutaba'ah* sehingga tugas secara operasional bisa berjalan dengan sempurna. Karena itu, ia harus mengikuti khalifah secara intens, serta intens mengikuti para aparat

---

<sup>66</sup> Taqiyyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 142

negara yang lain. Dia tidak akan menghentikan *mutab'ah*-nya, kecuali kalau khalifah memintanya. Dengan begitu, dia harus melaksanakan perintah khalifah dan menghentikan *mutab'ah*-nya, sebab khalifah adalah seorang pemimpin, dimana perintahnya harus dilaksanakan.<sup>67</sup>

Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan tentara, serta hubungan-hubungan kenegaraan yang biasanya membutuhkan delegasi, hal-hal itu merupakan wewenang khusus khalifah. Mu'awin tanfidz tidak boleh mengikutinya, serta ikut menanganinya. Kecuali, kalau ia diminta oleh khalifah untuk memantaunya, maka dia pun harus melakukannya sesuai dengan yang diminta oleh khalifah saja, sedangkan yang lain tidak.<sup>68</sup>

Adapun untuk mengurus masalah pelayanan terhadap urusan umat serta melaksanakan tuntutan-tuntutannya dan mencabut tindak kedzaliman terhadap umat hanyalah urusan khalifah, serta orang-orang yang mewakilinya dalam urusan tersebut dan bukan urusan mu'awin tanfidz. Sehingga dia tidak perlu memantaunya, kecuali bila diminta oleh khalifah agar memantaunya. Jadi, kegiatan mu'awin yang berkaitan dengan umat sebenarnya adalah kegiatan praktis yang bersifat operasional, bukan pemantauan. Semuanya ini, kembali kepada realitas kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh khalifah.

#### **D. AMIR JIHAD** (Panglima Perang)

Amir jihad adalah orang yang diangkat oleh khalifah untuk menjadi pimpinan dalam bidang luar negeri, peperangan, pertahanan dan keamanan (hankam) dalam negeri, serta bidang perindustrian. Ia bertugas untuk memimpin dan mengarahkannya.<sup>69</sup>

Hanya saja, dia disebut dengan sebutan amir jihad –padahal dia bertugas untuk

---

<sup>67</sup> *Loc.cit.*, hlm. 142

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 142

<sup>69</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 144



mengarahkan dan memimpin empat bidang di atas-- adalah karena keempat bidang tersebut merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan jihad. Bidang luar negeri, misalnya, baik dalam penentuan perang maupun damai, semuanya ditentukan berdasarkan kepentingan jihad. Bidang peperangan senantiasa berhubungan langsung dengan pasukan yang dipersiapkan untuk berjihad, begitu pula masalah pembentukannya, persiapan dan mempersenjatainya. Sedangkan bidang pertahanan dan keamanan dalam negeri, berfungsi untuk menjaga dan melindungi negara; menjaga stabilitas dalam negeri; melindungi terjadinya pembangkangan *bughat* (para pembangkang) dan kejahatan pembegal jalanan, melalui kesatuan polisi yang merupakan bagian dari pasukan yang dipersiapkan untuk berjihad. Sedangkan bidang perindustrian, berfungsi untuk meningkatkan produksi persenjataan serta perbekalan-perbekalan pasukan dalam rangka berjihad. Semua bidang tadi merupakan bidang yang berhubungan langsung dengan jihad. Karena itu ia disebut *amir jihad*.<sup>70</sup>

Penyebutan dengan menggunakan kata *amiir* padahal amir jihad bukan seorang *hakim* --semisal khalifah, mu'awin tafwidh atau para wali-- adalah karena dia banyak mengeluarkan instruksi, sebab wilayah kerjanya memang luas, dan membutuhkan banyak instruksi. Juga karena kata *amir* adalah lafadz yang mengikuti wazan *fa'il* dan merupakan bentuk *mubalaghah* dari isim fa'il *aamir*. Ia disebut *amiir* karena banyaknya instruksi yang dikeluarkannya, baik pada saat siang maupun malam. Seperti kata *rahiim* yang merupakan bentuk *mubalaghah* dari isim fa'il kata *raahim*. Disebut demikian, karena banyaknya sifat kasih sayang tanpa batas, yang diberikan-Nya.<sup>71</sup>

Departemen (wilayah kerja) yang ditangani amir jihad terdiri dari empat

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>71</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 144

departemen: 1- Departemen Luar Negeri, 2- Departemen Peperangan, 3- Departemen Pertahanan dan Keamanan (Hankam) Dalam Negeri , 4- Departemen Perindustrian. Kesemuanya ini ditangani dan dipimpin oleh amir jihad.<sup>72</sup>

Jihad adalah metode operasional (*thariqah*) yang ditetapkan oleh Islam untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri. Mengemban dakwah merupakan kegiatan pokok negara Islam, setelah negara itu berhasil menerapkan hukum-hukum Islam ke dalam negeri. Oleh karena itu, hukum-hukum jihad mencakup hukum-hukum perang dan damai, gencatan senjata dan perdamaian. Juga meliputi hukum-hukum hubungan luar negeri dengan negara-negara serta kekuatan-kekuatan lain. Hukum-hukum jihad ini mencakup hukum-hukum tentang tentara, persiapan dan pelatihannya, kepemimpinan dan panji-panjinya serta bendera-benderanya. Juga mencakup hukum-hukum tentang persenjataan tentara, peningkatan kuantitas dan kualitas persenjataan melalui industri peperangan. Dengan semuanya itu memungkinkan adanya kesiapan --negara dalam melaksanakan jihad-- dengan persiapan yang prima. Sehingga bisa menjadikan musuh yang nampak maupun yang tidak --termasuk musuh dalam selimut-- menjadi ketakutan (gentar). Termasuk mencakup hukum-hukum tentang pengakuan terhadap sistem di dalam negeri, hukum tentang mencegah masing-masing rakyat yang memisahkan diri dari negara, mencegah pembegal jalanan atau pengacau keamanan di dalam negeri, serta mencegah terhadap meningkatnya kejahatan (tindak kriminal) yang mengganggu rakyat.<sup>73</sup>

Rasulullah saw. biasa mengurus dan memimpin sendiri semua urusan jihad, begitu pula para khalifah sepeninggalnya. Rasulullah saw. dan para khalifah, ia biasa mengangkat orang-orang tertentu untuk melaksanakan sebagian kegiatan jihad, atau

---

<sup>72</sup> *Ibid.*, hlm. 144

<sup>73</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 145

bahkan secara keseluruhan. Baik ketika menyiapkan tentara, melaksanakan perang, melakukan perjanjian damai dan gencatan senjata, kontak-kontak ke luar negeri, ataupun memerangi orang-orang yang ingin memisahkan diri dari negara Islam serta orang-orang murtad.

Apa yang biasa dilaksanakan sendiri oleh khalifah, boleh diserahkan kepada orang lain agar orang itu mewakilinya dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Karena itulah, hukumnya mubah untuk mengangkat amir jihad, serta membentuk departemen -- yang menjadi wilayah kerjanya.

Dengan demikian, departemen amir jihad itu berhubungan dengan jihad dan hukum-hukumnya. Realitas masalah tersebut mencakup hubungan-hubungan luar negeri, karena semua masalah hubungan luar negeri tersebut dibangun dengan landasan mengemban dakwah Islam. Begitu juga mencakup aspek-aspek peperangan, karena jihad adalah perang di jalan Allah untuk mengangkat kalimah Allah. Sementara perang membutuhkan pasukan, persiapan, mengangkat pimpinan, membentuk pleton, komandan berikut tentaranya. Seperti halnya, dibutuhkan adanya pelatihan tentara, perbekalan serta membantunya.

Tentara harus memiliki senjata, sedangkan senjata mengharuskan adanya industri, karena itu maka industri merupakan salah satu perlengkapan tentara dan perlengkapan perang. Inilah yang mengharuskan agar industri-industri negara dibangun dengan landasan industri perang. Jadi, departemen perindustrian ini mengikuti kebijakan-kebijakan jihad dan amirnya.

Ketika tentara itu melakukan perang untuk mengemban dakwah Islam ke luar negeri, maka sebenarnya tentara itu menjaga dan melindungi negara. Karena itu,

memerangi para pembangkang serta orang-orang yang memisahkan diri dari negara Islam dan memerangi pembegal jalanan adalah termasuk kewajiban-kewajiban tentara. Oleh karena itu, pertahanan dan keamanan di dalam negeri mengikuti urusan jihad dan kebijakan amir jihad beserta departemennya. Karena itulah departemen amir jihad meliputi empat bidang, yaitu luar negeri, peperangan, ketahanan dan keamanan dalam negeri serta perindustrian.<sup>74</sup>

#### A. Departemen Luar Negeri

Departemen luar negeri bertugas mengurus semua masalah luar negeri yang berhubungan dengan negara khilafah dengan negara-negara lain, apapun masalahnya dan apapun bentuk hubungannya. Baik masalah yang berhubungan dengan masalah politik, serta masalah-masalah yang menyertainya seperti kesepakatan-kesepakatan, perjanjian damai, gencatan senjata, perundingan, pengiriman duta, utusan dan delegasi serta membuka kedutaan-kedutaan dan konsul-konsul, maupun hubungan-hubungan yang menyangkut bidang-bidang perekonomian, agraris, perdagangan, pos dan telekomunikasi ataupun SLJJ dan sebagainya. Semua masalah ini diurus oleh departemen luar negeri, karena masalah-masalah tersebut berkaitan dengan hubungan negara Islam dengan negara-negara lain.

Rasulullah saw. selalu melakukan hubungan luar negeri dengan negara-negara dan kekuatan-kekuatan lain. Rasulullah saw. pernah mengirim Utsman Bin Affan untuk melakukan perundingan dengan orang-orang Quraisy, begitu pula ia melakukan perundingan sendiri dengan utusan-utusan Quraisy. Rasulullah juga mengirim utusan kepada para raja, ia menerima utusan-utusan para raja dan pimpinan itu, serta melakukan

---

<sup>74</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 146

perjanjian dan perdamaian dengan mereka. Demikian pula para khalifah sepeninggal beliau, mereka juga melakukan hubungan-hubungan yang bersifat politis dengan negara-negara dan kekuatan-kekuatan lain. Mereka mengangkat orang yang mengurus masalah-masalah tersebut. Dengan pertimbangan, bahwa apa yang boleh dilakukan sendiri oleh seseorang, orang itu juga boleh mewakilkan kepada orang lain dan diwakili oleh orang yang dia beri wewenang tersebut.<sup>75</sup>

#### B. Departemen Peperangan

Departemen peperangan mengurus semua masalah yang berhubungan dengan angkatan bersenjata, semisal pasukan, polisi, perbekalan, persenjataan, bahan-bahan, perlengkapan dan sebagainya. Termasuk akademi-akademi militer, duta-duta militer, pengetahuan Islam yang dibutuhkan, pengetahuan umum bagi tentara serta hal-hal yang berhubungan dengan perang dan persiapannya.<sup>76</sup>

Semuanya ini diurus dan dipimpin oleh departemen peperangan. Sedangkan nama departemennya, dihubungkan dengan perang (*harb wal qital*). Perang membutuhkan pasukan, sedangkan pasukan membutuhkan persiapan serta membutuhkan pembentukan pimpinan, pleton, komandan hingga tentara-tentaranya.

Pasukan tersebut membutuhkan bendera dan panji, sedangkan pembentukan pasukan tersebut membutuhkan persiapan serta pelatihan fisik dan ketrampilan, yang berhubungan dengan ketrampilan perang dengan mempergunakan berbagai jenis senjata, dan terus mengembangkan sesuai dengan perkembangan persenjataan tersebut. Oleh karena itu, pendidikan ketrampilan dan kemiliteran merupakan salah satu perlengkapan pasukan. Pelatihan dengan ketrampilan-ketrampilan perang dengan berbagai jenis

---

<sup>75</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, *op.cit.*, hlm. 123

<sup>76</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 147

persenjataan merupakan masalah pasukan yang urgen.

Oleh karena pasukan tersebut adalah pasukan Islam, serta tentara negara khilafah yang mengemban dakwah Islam, pasukan tersebut harus dididik dengan pengetahuan Islam (*tsaqifah Islamiyah*) secara umum, serta pengetahuan-pengetahuan Islam yang berhubungan dengan perang, hukum-hukum perang, hukum perdamaian, perang, gencatan senjata, perjanjian-perjanjian, penyerahan-penyERAHAN, kesepakatan-kesepakatan, serta masalah-masalah tersebut secara detail. Karena itu, akademi-akademi militer dengan semua jenjangnya serta duta-duta militer merupakan wewenang departemen peperangan ini.<sup>77</sup>

Tugas pasukan tersebut ada yang dikhususkan untuk menjaga pertahanan dan keamanan (*hankam*) dalam negeri, semacam polisi, pasukan --demikian juga polisi yang merupakan bagian dari pasukan tersebut-- semua persenjataannya, perbekalan-perbekalan, bahan-bahan, perlengkapan, serta perbekalan yang lazim lainnya harus dipenuhi (dicukupi). Karena itulah, departemen peperangan mencakup persiapan semua perlengkapan yang dibutuhkan.

### C. Departemen Pertahanan Dan Keamanan Dalam Negeri

Departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri adalah departemen yang mengurus semua urusan yang berhubungan dengan pertahanan dan keamanan. Departemen ini juga bertugas menjaga pertahanan dan keamanan (*hankam*) di dalam negeri, dengan mempergunakan angkatan bersenjata. Polisi dijadikan sebagai alat utama untuk menjaga pertahanan dan keamanan tersebut. Departemen ini setiap saat boleh meminta bantuan kepada polisi, kapan pun dia inginkan. Perintah departemen tersebut

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 147

harus seketika itu dilaksanakan.<sup>78</sup>

Kalau masalah yang dihadapi itu membutuhkan bantuan tentara, departemen tersebut harus menyampaikan masalah itu kepada khalifah. Khalifah boleh memerintahkan tentara untuk membantu departemen ketahanan dan keamanan tersebut, atau membantu dengan melalui angkatan bersenjata agar membantu dalam menjaga pertahanan dan keamanan, atau urusan apapun yang diminta oleh khalifah. Khalifah juga boleh menolak permintaannya, dan memerintahkan departemen tersebut agar cukup dengan bantuan polisi saja.

Departemen inilah yang bertugas menjaga ketahanan dan keamanan negara. Sedangkan yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri ada beberapa hal. Diantaranya adalah murtad dari Islam, pembangkangan atau memisahkan diri dari negara Islam, yang boleh jadi berupa serangan serta pembakaran. Seperti pengrusakan, sabotase instansi-instansi strategis milik negara, maupun melakukan penghalang-halangan, dengan disertai perampasan milik individu, milik umum atau milik negara. Boleh jadi berupa pemisahan diri dari negara Islam dengan membawa persenjataan untuk memberontak negara. Termasuk hal-hal yang bisa mengancam pertahanan dan keamanan dalam negeri lainnya adalah pembegalan, menteror penduduk agar menyerahkan hartanya dan menakut-nakuti keselamatan jiwanya. Termasuk yang lain adalah tindakan yang mengancam harta benda seperti pencurian, perampasan, perampokan, penggelapan harta (korupsi), serta tindakan yang mengancam jiwa seperti memukul, melukai, membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti

---

<sup>78</sup>Arief B. Iskandar, *Materi Dasar Islam; Islam Mulai Akar Hingga Daun*, (Bogor: al-Azhar Press, 2009), hlm. 111.

menuduh berbuat zina, berzina, dan mempublikasikan kejelekan.<sup>79</sup>

Tindakan-tindakan inilah yang menyebabkan munculnya ancaman terhadap pertahanan dan keamanan dalam negeri. Adanya departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri itu bertugas untuk menjaga negara serta rakyatnya dari semua bentuk tindakan tersebut. Apabila ada orang yang menyatakan dirinya murtad, ia akan dibunuh kalau tidak kembali --dalam waktu tiga hari-- setelah diminta untuk bertaubat, tetap tidak kembali, dia harus dibunuh. Apabila yang murtad itu adalah jama'ah (sekelompok orang), mereka harus diperingatkan dan diminta untuk kembali kepada Islam. Apabila mereka kembali, maka mereka dibiarkan. Apabila mereka tetap murtad mereka akan diperangi. Kalau mereka hanya sedikit dan bisa diatasi hanya dengan polisi saja, polisi tersebut harus memerangi mereka. Kalau jumlah mereka besar, yang tidak bisa diatasi oleh polisi, departemen ketahanan dan keamanan harus meminta kepada khalifah untuk menambah kekuatan mereka, dengan angkatan bersenjata agar bisa membantunya. Kalau sudah dikirim angkatan bersenjata masih belum cukup, departemen ketahanan dan keamanan itu bisa meminta khalifah untuk memerintah tentara (*jaisy*) untuk membantunya.

Ini berkaitan dengan orang murtad.<sup>80</sup>

Sedangkan berkaitan dengan *bughat* (para pembangkang), kalau tindakan-tindakan mereka tanpa mempergunakan senjata, misalnya hanya melakukan serangan dan pembakaran dengan cara menteror, mengancam, bahkan merampas instansi-instansi strategis, serta memusuhi dan merampas harta benda milik individu, negara dan rakyat, departemen pertahanan dan keamanan cukup meminta bantuan kepada polisi, untuk menghentikan tindakan-tindakan makar ini. Apabila polisi tidak bisa mengatasi, maka dia

---

<sup>79</sup>Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 148

<sup>80</sup>*Ibid.*, hlm. 149



bisa meminta bantuan kepada khalifah untuk memperkuatnya dengan bantuan angkatan bersenjata. Sehingga benar-benar sanggup menghentikan tindakan-tindakan perusakan dan pembakar, yang dilakukan oleh bughat yang memisahkan diri dari negara tersebut.<sup>81</sup>

Kalau kemudian bughat tersebut memisahkan diri dari negara, dengan membawa senjata, serta menduduki suatu wilayah bahkan mereka merupakan suatu kekuatan yang tidak bisa diusir, upaya-upaya mereka untuk membangkang dan memisahkan diri tersebut juga tidak bisa dihancurkan oleh departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri hanya dengan kesatuan polisi, departemen ini bisa meminta kepada khalifah agar memperkuatnya dengan angkatan bersenjata atau kekuatan tentara sesuai dengan kebutuhan. Agar departemen tersebut bisa menghadapi tindakan-tindakan orang yang akan memisahkan diri dari negara tadi.<sup>82</sup>

Sebelum mereka diperangi, mereka dikirim surat, serta berusaha melihat --dari dekat-- sejauh mana kekuatan mereka, lalu meminta mereka agar kembali lagi untuk masuk bersama-sama jama'ah kaum muslimin dengan penuh keta'atan, juga untuk mencegah dipergunakannya senjata. Apabila mereka bersedia kembali, mereka akan dibiarkan. Sedangkan kalau mereka menolak untuk kembali, bahkan tetap memisahkan diri dan ingin memberontak, departemen ini harus memerangi mereka dengan peperangan yang mendidik, bukan dengan peperangan yang memberangus dan habis-habisan (untuk menghancurkan) mereka. Sehingga, mereka bisa kembali lagi untuk melaksanakan keta'atan serta membelot dari upaya untuk memisahkan diri dan senjata mereka bisa dilucuti. Dikatakan oleh Imam Ali ra. kepada kaum *Khawarij*. Pertama kali yang beliau lakukan adalah menyerukan kepada mereka. Kalau mereka meninggalkan upaya untuk

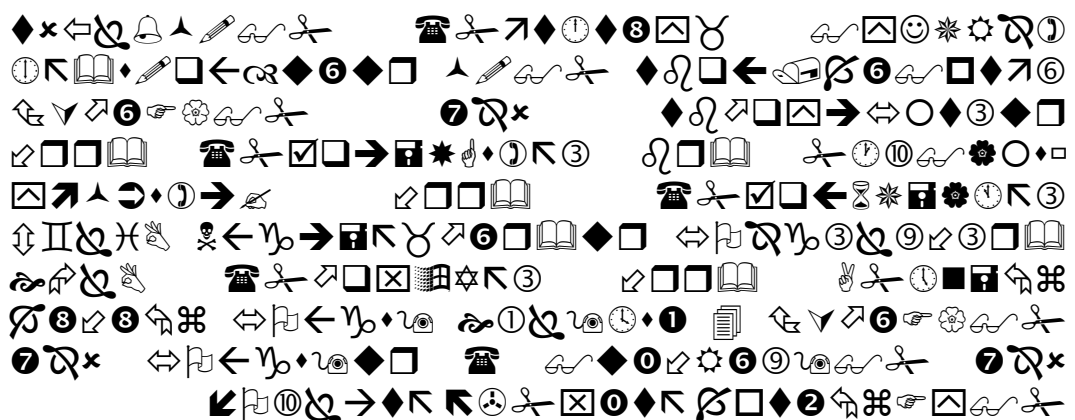
---

<sup>81</sup> *Ibid.*, hlm. 150

<sup>82</sup> *Ibid.*, hlm. 150

memisahkan diri dari negara, ia tetap akan membiarkan mereka, kalau tetap memisahkan diri, ia akan memerangi mereka dengan peperangan yang mendidik sehingga mereka melakukan keta'atan kembali serta meninggalkan upaya untuk memisahkan diri dan meletakkan senjata mereka.<sup>83</sup>

Sedangkan orang-orang yang membuat keonaran, semisal pembegal yang biasa menghadang orang, mengganggu perjalanan, merampas harta benda dan membunuh jiwa mereka, departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri ini bisa mengirim polisi untuk menangkap mereka serta menjatuhkan hukuman kepada mereka, dengan cara dibunuh dan disalib, atau dibunuh saja, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan cara menyilang ataupun dibuang –dari negeri asalnya– ke tempat lain, sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al Qur'an:



*"Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh dan disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediaman mereka)."*<sup>84</sup>

<sup>83</sup> Ibid., hlm. 150

<sup>84</sup> T. Q.S. Al Maidah: 33

Oleh karena itu, memerangi mereka tidak sama dengan memerangi bughat yang memisahkan diri dari negara. Karena memerangi bughat adalah dalam rangka mendidik, memerangi para perusuh dan pembegal ini adalah dalam rangka membunuh dan menyalib. Mereka biasanya membunuh, baik dengan cara menghadang maupun menikam dari belakang. Karena itu, mereka harus diperlakukan seperti yang tertera di dalam ayat tadi.

Siapa saja yang membunuh dan merampas harta benda, harus dibunuh dan disalib. Sedangkan orang yang hanya membunuh saja, dia akan dibunuh dan tidak disalib. Sementara orang yang hanya mengambil harta benda saja tanpa disertai pembunuhan, dia akan dipotong tangan dan kakinya dengan cara menyilang dan tidak dibunuh. Adapun orang yang hanya mengeluarkan senjata dan menakut-nakuti orang dengan senjata saja, tidak melakukan pembunuhan, juga tidak mengambil harta benda, dia tidak dibunuh, tidak disalib, tidak dipotong tangan dan kakinya, namun hanya dibuang dari tempat negeri asalnya.

Departemen pertahanan dan keamanan dalam negeri ini, cukup hanya meminta bantuan polisi untuk menjaga keamanan negara, dan tidak akan meminta bantuan kepada selain polisi, kecuali kalau polisi tidak sanggup menjaga keamanan tersebut. Dalam keadaan seperti itu, dia bisa meminta khalifah untuk memperkuat pengamanan polisi tersebut dengan bantuan angkatan bersenjata, ataupun dengan bantuan tentara sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang ada.<sup>85</sup>

Adapun tindakan yang mengancam harta benda, seperti pencurian, penggelapan harta (korupsi), perampokan dan perampasan maupun tindakan yang mengancam jiwa

---

<sup>85</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 151

seperti memukul, melukai dan membunuh serta tindakan yang bisa mengancam kehormatan seperti menuduh berbuat zina, berzina, maupun mengumumkan kejelekan, maka yang harus dilakukan oleh departemen ini adalah berusaha mencegahnya, dengan gerakan penyadaran, penataran-penataran serta dengan menerapkan hukum-hukum peradilan kepada siapa saja yang melakukan ancaman terhadap harta benda, jiwa dan kehormatan tersebut. Semuanya itu hanya membutuhkan bantuan polisi saja.<sup>86</sup>

#### D. Departemen Perindustrian

Departemen perindustrian adalah sebuah departemen yang mengurus masalah yang berhubungan dengan industri. Baik yang berhubungan dengan industri berat, seperti industri mesin, peralatan-peralatan, konstruksi kapal, pesawat dan mobil, industri amunisi dan bahan-bahan elektronik, maupun industri ringan. Baik industri tersebut termasuk pabrik-pabrik yang menjadi milik umum, maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi serta yang berhubungan secara langsung dengan industri peperangan. Semua pabrik, apapun bentuk dan produknya, harus dibangun dengan landasan politik perang.<sup>87</sup>

Jihad membutuhkan tentara, sedangkan tentara tersebut tidak bisa berperang kecuali dengan senjata. Sementara senjata tersebut bisa dipenuhi secara memadai hingga lebih, harus ada industri di dalam negeri yang memproduksi persenjataan tersebut. Oleh karena itu, industri perang berhubungan erat dengan perang dan jelas-jelas terkait dengan masalah tersebut.

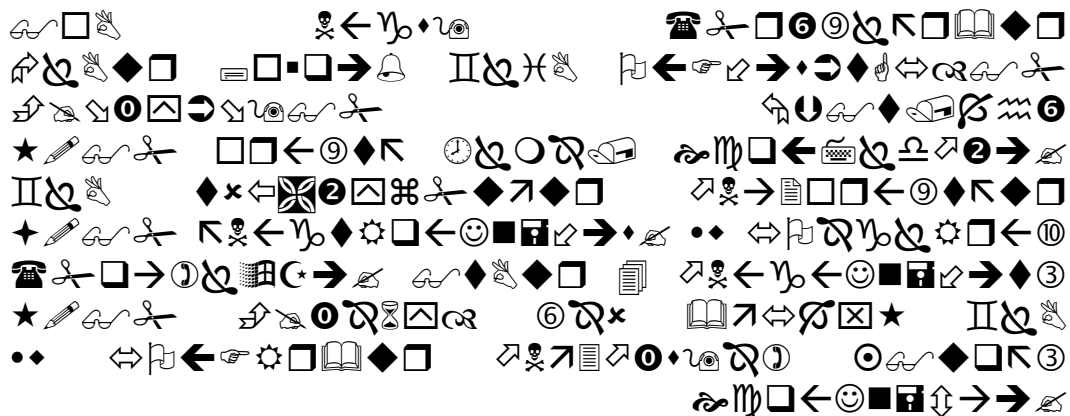
Agar negara Islam itu mampu menjadi negara maju yang jauh dari pengaruh negara lain, ia harus mampu membangun industri persenjataannya, serta meningkatkan kecanggihan persenjataannya terus-menerus, sehingga secara pasti akan sanggup

---

<sup>86</sup> *Ibid.*, hlm 151

<sup>87</sup> *Ibid.*, hlm 152

menguatkan kekuatannya sendiri. Dia juga harus sanggup memiliki dan menguasai persenjataan yang paling canggih dan paling kuat sekalipun, apapun bentuk kecanggihan dan kemajuan persenjataan tersebut. Sehingga semua persenjataan yang dibutuhkan bisa dikuasai, yang akhirnya bisa menggentarkan semua musuh, baik yang jelas-jelas kelihatan maupun musuh-musuh dalam selimut.<sup>88</sup>



*"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambatkan untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah, musuh-musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; sedangkan Allah mengetahuinya."*<sup>89</sup>

Dengan begitu, negara ini akan mampu memenuhi dan mengendalikan kehendaknya sendiri. Negara harus sanggup menghasilkan persenjataan yang dibutuhkannya, bahkan sanggup mengembangkannya dan terus berkembang mengikuti model dan bentuk yang paling canggih dan kuat. Sehingga secara pasti, negara ini akan mampu menggentarkan semua musuh, baik yang kelihatan maupun musuh-musuh dalam selimut. Oleh karena itu, negara Islam harus membangun industri persenjataannya sendiri, bahkan tidak boleh bergantung pada pembelian dari negara-negara lain. Karena hal itu

<sup>88</sup> *Ibid.*, hlm.152

<sup>89</sup> Q.S. Al Anfal: 60

akan menyebabkan negara pemasok senjata tersebut menjadi penentunya, termasuk penentu kehendak, persenjataan dan penentu perang negara tersebut.<sup>90</sup>

Negara yang menjual persenjataan kepada negara-negara lain, jelas tidak akan menjual semua jenis persenjataannya, terutama jenis senjata-senjata yang canggih. Ia juga tidak akan menjual, tanpa syarat apapun, termasuk cara mempergunakannya. Ia pun tidak akan menjual begitu saja, selain dengan kadar tertentu yang menurutnya tidak ada masalah. Jelas tidak akan memenuhi begitu saja, sesuai dengan permintaan negara yang ingin membelinya. Hal-hal itulah yang menjadikan negara pemasok sebagai pengendali dan pencengkram negara pembeli persenjataannya. Hal-hal itulah yang memungkinkan negara pemasok tersebut menjadi pengendali kehendak negara pembeli. Terutama, kalau negara pembeli sedang dalam keadaan perang, pasti saat itu dia membutuhkan tambahan pasokan senjata, spare parts, amunisi maupun yang lain. Semuanya itu menjadikan ketergantungan negara pembeli kepada negara pemasok persenjataan tersebut sangat besar, begitu pula ketundukan kepada permintaan-permintaan negara pemasok tersebut juga amat besar. Inilah yang memperkuat posisi negara pemasok, sehingga dia bisa menguasainya bahkan menjadi penentu kehendak-kehendak negara pembeli. Terutama pada saat perang serta dalam keadaan yang sangat membutuhkan persenjataan maupun spare parts tersebut. Negara pembeli senjata tadi telah menggadaikan dirinya, kehendak, perang dan kekuatannya kepada negara yang memasok persenjataan tersebut.

Oleh karena itulah, negara Islam wajib membangun sendiri industri persenjataannya, serta alat-alat perang dan *spare parts* yang dibutuhkannya. Dalam hal ini, tidak mungkin bagi negara Islam tersebut selain membangun industri-industri berat. Dan

---

<sup>90</sup> Taqiuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 153

yang pertama kali harus dimulai adalah membangun pabrik-pabrik yang menghasilkan industri-industri berat, peperangan dan non peperangan. Karena itu, negara tersebut harus mempunyai pabrik yang memproduksi bom, tank, roket, satelit, pesawat, mobil pelapis baja, perisai, kapal-kapal perang, kendaraan-kendaraan anti peluru dengan berbagai jenisnya serta senjata-senjata berat dan ringan dengan berbagai bentuknya.<sup>91</sup>

Negara Islam juga harus mempunyai pabrik yang bisa menghasilkan alat-alat, mesin-mesin dan amunisi-amunisi serta industri elektronik (semacam komputer, radar dan sebagainya). Begitu juga pabrik-pabrik yang berhubungan dengan kepemilikan umum serta industri-industri ringan yang berhubungan dengan industri-industri peperangan. Semuanya tadi termasuk persiapan yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin, berdasarkan firman Allah:


  
*"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi."*<sup>92</sup>

Karena negara Islam merupakan negara pengemban dakwah Islam, dengan cara berjihad, maka negara tersebut harus menjadi negara yang senantiasa siap setiap saat untuk melaksanakan jihad. Hal ini mengharuskan adanya industri berat atau industri ringan di dalam negeri yang dibangun dengan asas politik peperangan. Sehingga sewaktu-waktu ketika negara tersebut ingin merubah orientasi industri ke industri-industri peperangan dengan berbagai jenisnya, akan sangat mudah. Oleh karena itu, semua industri tersebut harus dibangun di dalam negara khilafah dengan asas politik peperangan. Semua industri tersebut harus dibangun, baik yang menghasilkan industri-industri berat maupun ringan,

<sup>91</sup> *Ibid.*, hlm. 153

<sup>92</sup> Q.S. Al Anfal: 60

semuanya dibangun dengan asas politik ini. Sehingga ketika ingin merubah orientasinya, menjadi industri yang menghasilkan perlengkapan perang, kapan saja negara tersebut membutuhkan, maka akan dengan mudah merubahnya.<sup>93</sup>

#### **E. WALI (Pimpinan Daerah)**

Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai pejabat (*hakim*) di salah satu wilayah kekhalifahan serta menjadi pimpinan di sana.<sup>94</sup>

Negeri yang diperintah oleh negara Islam dipilah menjadi beberapa *wihdat* (bagian) dan masing-masing bagian itu disebut *wilayah* (setingkat propinsi atau daerah tingkat I). Setiap wilayah dipilah lagi menjadi beberapa *wihdat* (bagian), masing-masing bagian itu disebut *'imalah* (setingkat daerah tingkat II). Sedangkan orang yang memimpin *wilayah* itu disebut *wali* dan orang yang memimpin *'imalah* disebut *'amil* atau *hakim*<sup>95</sup>

Karena itu para pejabat daerah itu merupakan *hakim* (pejabat), sebab wewenang ke-*wilayah*-annya itu merupakan wewenang pemerintahan. Di dalam kamus Al Muhith dinyatakan: "*Wa Waliya As Syai'*: Dia memiliki wilayah (pemerintahan) dan walayah (kekuasaan). Kata "*Wlayah*" tersebut merupakan bentuk masdar (gerund). Dengan dikasrah huruf Wau-nya (sehingga dibaca *Wlayah*), maka maknanya adalah urusan (*huttah*), kepemimpinan (*imarah*) serta kekuasaan (*as sulthan*).\" Dijelaskan pula dalam kamus fiqh oleh Sa'id Abu Jayyib "*Waliya asy-Syai'* : Dia memiliki wilayah (pemerintahan) dan walayah (kekuasaan).<sup>96</sup>

Jabatan kewalihan itu harus diserahkan oleh khalifah atau orang yang bisa

<sup>93</sup>Taqiuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 154

<sup>94</sup>*Ibid.*, 172

<sup>95</sup>*Op.cit.*, hlm. 172

<sup>96</sup>Sa'id Abu Jayyib, *al-Qamus al-Fiqhiy*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 388



mewakilinya dalam melakukan penyerahan jabatan. Sehingga wali hanya bisa diangkat secara sah kalau yang melakukannya adalah khalifah. Asal adanya jabatan kewalian atau *imarah* (kepemimpinan) itu adalah karena adanya *a'la* Rasulullah saw. Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali untuk memimpin beberapa wilayah (daerah). Mereka diberi hak untuk memimpin daerah-daerah tersebut. Ia pernah mengangkat Mu'ad Bin Jabal menjadi wali di Janad, sedangkan Ziyad Bin Labid menjadi wali di Hadramaut, sementara Abu Musa Al Asy'ari di Zabid dan 'Adn.<sup>97</sup>

Seorang wali adalah wakil khalifah, sehingga dia senantiasa melakukan tugas-tugas yang diwakilkan oleh khalifah berdasarkan akad *inabah*, untuk mewakilinya. Dalam pandangan syara', jabatan wali tidak memiliki batasan yang tegas. Oleh karena itu, siapa saja yang menjadi wakil khalifah dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, bisa saja disebut *wali* dalam tugas itu; sesuai dengan lafadz yang telah ditentukan oleh khalifah dalam pengangkatannya. Hanya saja, daerah teritorialnya ditentukan sebab Rasulullah saw. telah melakukan pembatasan daerah teritorial yang akan dipimpin oleh seorang wali, atau daerah yang akan diserahkan kepemimpinannya kepada *amir* daerah tersebut.<sup>98</sup>

Jabatan wali tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu wali dengan wewenang secara umum, dan khusus. Jabatan wali dengan wewenang secara umum meliputi semua urusan pemerintahan, penyerahannya bisa dilakukan oleh khalifah dengan cara menyerahkan kepemimpinan satu negeri, atau satu propinsi agar dia memimpin semua penduduknya serta mengontrol tugas-tugas yang telah disepakatinya, sehingga wewenangnya umum, meliputi semua urusan. Sedangkan jabatan wali dengan wewenang secara khusus tersebut adalah menjadikan urusan seorang wali terbatas dalam masalah

---

<sup>97</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 172, Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, *op.cit.*, hlm. 124, Anonim, *Muqaddimah dustur*, *op.cit.*, hlm. 189

<sup>98</sup> *Loc.cit.*, hlm. 172

mengurusi pasukan, atau mengurus rakyat, atau melindungi benteng, atau menjaga daerah dan negeri tersebut dari hal-hal yang dilarang. Ia tidak diberi hak untuk memberikan keputusan hukum, maupun hak untuk menarik *kharaj* dan zakat.<sup>99</sup>

Nabi pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum, ia pernah mengangkat 'Amru Bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman dengan wewenang secara umum. Ia juga pernah mengangkat Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman.<sup>100</sup> Para khalifah sepeninggal beliau, banyak melakukan hal tersebut. Mereka pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum. Umar Bin Khattab, misalnya, pernah mengangkat Mu'awiyah Bin Abi Sufyan untuk menjadi wali dengan wewenang secara umum. Mereka juga pernah mengangkat seorang wali dengan wewenang secara khusus. Ali Bin Abi Thalib, misalnya, pernah mengangkat Abdullah Bin Abbas untuk menjadi wali di Basrah selain masalah harta benda (*mal*), sedangkan beliau mengangkat Ziyad untuk menjadi wali yang mengurus masalah harta benda.<sup>101</sup>

Jabatan wali pada masa-masa awal (pemerintahan Islam) dahulu dibedakan menjadi dua, yaitu *waliyus shalat* dan *waliyul kharaj*. Akan banyak ditemukan buku-buku sejarah menyebut wewenang para pimpinan daerah itu dengan mempergunakan dua bentuk kata tersebut. Pertama, *imarah 'alas shalat* (kepemimpinan masalah pemerintahan) dan kedua *imarah 'alas shalat wal kharaj* (kepemimpinan masalah pemerintahan dan harta). Artinya, bisa jadi pimpinan tersebut memimpin "shalat" dan "kharaj" sekaligus atau hanya memimpin "shalat" saja. Yang dimaksud dengan kata "shalat" di sini bukan berarti menjadi imam shalat saja, melainkan memimpin dalam semua urusan selain urusan harta. Yang dimaksud dengan kata "shalat" di sini adalah masalah pemerintahan, selain masalah

---

<sup>99</sup> *Ibid.*, hlm. 173

<sup>100</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah, op.cit.*, hlm. 125

<sup>101</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam, op.cit.*, hlm. 173

penarikan harta (*amwal*). Apabila seorang wali memiliki wewenang untuk mengurus masalah "shalat" dan "kharaj" sekaligus, berarti wewenang wali itu adalah umum. Apabila wewenang wali itu sebatas mengurus masalah "shalat" atau "kharaj" saja, berarti wewenang wali itu adalah khusus.<sup>102</sup>

Hanya saja, semuanya harus dikembalikan kepada rancangan khalifah tentang wewenang wali khusus tersebut. Karena khalifah bisa saja menentukan wewenangnya hanya mengurus kharaj atau peradilan atau selain harta ataupun peradilan dan pasukan. Dia juga berhak melakukan apa saja dengan menggunakan pendapatnya, yang dia anggap layak untuk mengatur negeri dan daerah tersebut. Sebab, syara' tidak pernah menentukan batasan tugas-tugas khusus bagi seorang wali. Syara' juga tidak pernah mewajibkan agar wali mengurus semua urusan pemerintahan. Syara' hanya membatasi tugas wali atau pimpinan daerah itu adalah tugas pemerintahan. Syara' telah menentukan bahwa wali merupakan wakil khalifah. Syara' telah menentukan tugas wali sebagai pimpinan di daerah tertentu. Semuanya itu mengikuti apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw.. Namun, khalifah telah diberi wewenang untuk mengangkat seorang wali dengan wewenang secara umum dan wewenang khusus, sesuai dengan tugas-tugas yang dia berikan. Semuanya itu nampak dari *af'al* Rasulullah saw.

Seorang wali memiliki wewenang memerintah dan mengarahkan tugas-tugas instansi yang ada di daerahnya, untuk menggantikan khalifah. Di daerahnya, dia memiliki wewenang-wewenang dalam semua hal seperti yang dimiliki oleh mu'awin di dalam negara. Ia mempunyai hak untuk memimpin semua warga masyarakat yang tinggal di daerahnya, serta berhak membuat kebijakan dalam masalah yang berhubungan dengan

---

<sup>102</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, loc.cit., hlm. 173-174

harta kekayaan (*maliyah*), peradilan serta pasukan. Hanya saja, kesatuan polisi yang ditempatkan di daerahnya secara struktural tetap tidak menjadi bawahannya, namun dia bisa memerintahkannya dari segi melaksanakan tugas-tugas operasional.<sup>103</sup>

Kenyataannya, adalah karena wali merupakan wakil khalifah yang ditempatkan di tempat yang telah dia tentukan. Karena itu, dia memiliki wewenang seperti khalifah. Wewenangnya seperti mu'awin, yaitu memiliki *umumun nadhri* (wewenang umum), kalau dia diangkat dengan wewenang secara umum. Maksudnya, kalau dia diberi wewenang secara umum di tempat tersebut. Ia hanya memiliki wewenang tertentu dalam hal-hal yang diserahkan kepadanya saja, kalau wewenangnya khusus, ia tidak mempunyai wewenang di luar hal-hal tadi.<sup>104</sup>

Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali untuk menduduki jabatan sebagai wali dengan wewenang secara mutlak dalam pemerintahan. Sementara di antara mereka ada yang diangkat dengan wilayah (wewenang) secara umum, serta sebagian yang lain dengan wilayah (wewenang) tertentu atau khusus.

Nabi pernah mengangkat Mu'adz menjadi wali di Yaman<sup>105</sup>, lalu ia mengajarkan yang seharusnya ia lakukan. Nabi bertanya kepadanya:

وابن أخي المغيرة بن شعبة عن أناس أهل حمص من أصحاب معاذ  
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبع  
اليمن قال كيف تقضي اذا  
قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فا  
عليه وسلم ولا في كتاب الله قال  
أجتهد رأي ولا فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال

<sup>103</sup> Anonim, *Muqaddimah dustur*, op.cit., hlm. 193

<sup>104</sup> Loc.cit., hlm. 173-174

<sup>105</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 14

## الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله<sup>106</sup>

*"Dengan apa engkau akan menghukumi?" Dia menjawab: "Dengan kitabullah." Beliau bertanya: "Kalau kamu tidak menemukan (di sana)?" Dia menjawab: "Dengan sunah Rasulullah." Beliau bertanya kembali: "Kalau kamu tidak menemukan (di sana)?" Dia menjawab: "Saya akad berijtihad dengan pendapatku." Lalu beliau bersabda: "Alhamdulillah, Dialah yang telah memberikan bimbingan kepada utusan Rasul-Nya, dengan sesuatu yang dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya."<sup>107</sup>*

Nabi pernah mengutus Ali Bin Abi Thalib ke Yaman, dan ia tidak mengajarkan sesuatu pun kepadanya, karena Nabi tahu persis ilmu, pengetahuan dan kapasitasnya. Ketika Nabi mengangkat Mu'adz ke Yaman, ia memberikan wewenang kepadanya untuk mengurus "shalat" dan "shadaqat".<sup>108</sup> Dan ketika Nabi mengangkat Farwah Bin Sahal menjadi wali --dengan wewenang khusus, untuk mengurus pemerintahan-- di Murad, Mudzhij dan Zabid, disamping itu ia juga mengangkat Khalid Bin Sa'id di daerah yang sama untuk mengurus "shadaqat".<sup>109</sup>

Semuanya ini membuktikan, bahwa wali tersebut memiliki semua wewenang dalam pemerintahan, yang nampak dalam kasus pengajaran Rasulullah saw. terhadap Mu'adz dan kasus tidak diajarinya Ali di atas. Hal ini juga menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah mengangkat para wali dengan wewenang secara umum, yang meliputi "shalat" dan "shadaqat", serta wewenang secara khusus yang hanya "shalat" atau "shadaqat".

Sekalipun seorang khalifah boleh mengangkat wali dengan wewenang secara umum, maupun khusus, seperti Mu'awiyah dengan wewenangnya secara umum, telah menjadikannya memiliki kekuasaan, yaitu pada masa Utsman. Sehingga Utsman tidak

<sup>106</sup> At-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih Juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 616, Hadis no. 1327, Kitab al-Ahkam, Bab Ma Ja a fi Al-Qadla...

<sup>107</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 177, Lihat, Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Penerjemah: Fadhil Bahri, (Jakarta Darul Falah, 2000), hlm. 125-126

<sup>108</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, op.cit., hlm. 125

<sup>109</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., 177

punya wilayah kekuasaan. Setelah Utsman meninggal, dalam pemerintahan mulai mengalami krisis. Begitu pula, melemahnya kekhilafahan Abbasiyah karena terlepasnya wilayah-wilayah kekhilafahannya, sehingga khalifah tidak memiliki kekuasaan selain tinggal sebutan khalifah, serta pemakaian uang dengan namanya. Oleh karena itu, memberikan wewenang secara umum bisa menyebabkan bahaya, bahkan ancaman bagi negara Islam. Kekuasaan dan wewenang seorang wali menjadi terbatas dalam hal-hal yang tidak akan menyebabkan pemisahan diri dari khalifah.<sup>110</sup>

Faktor utama yang menyebabkan pemisahan daerah dari kekuasaan kekhilafahan adalah militer yang mempunyai wewenang otoritas yang sangat luas menguasai pemerintahan serta peradilan. Peradilan adalah yang berfungsi menjaga hak dan penegak hukum—wewenang wali tersebut harus wilayah (wewenang) secara khusus, selain peradilan, pasukan dan harta kekayaan. Karena semuanya itu dipegang oleh wali, bisa menyebabkan terjadinya pemisahan, bahkan ancaman terhadap negara karena adanya wewenang tersebut.<sup>111</sup>

Hanya saja, karena wali tersebut adalah *hakim* (pejabat) yang harus mempunyai kekuatan agar bisa melaksanakan keputusan-keputusannya, polisi bisa dia perintahkan, wewenang memerintahkannya meliputi semua hal ia boleh mengurus semua masalah daerahnya. Hanya karena kesatuan polisi adalah bagian dari kesatuan pasukan (tentara), secara struktural dia berada di bawah *jaisy* (tentara), secara operasional dia di bawah kendali seorang wali.

Seorang wali tidak harus melaporkan kegiatan-kegiatan yang telah ia lakukan sesuai dengan kebijakannya kepada khalifah, kecuali masalah *ikhtiyar*. Apabila ada

---

<sup>110</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 178

<sup>111</sup> *Ibid.*, hlm. 178

masalah-masalah baru yang sebelumnya tidak diserahkan, ia pun harus melaporkan kepada khalifah, kemudian ia melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh khalifah tersebut. Kalau ia khawatir terjadi masalah dengan menunggu hasil laporan tersebut, ia bisa langsung melaksanakannya, dan ia wajib melaporkan kepada khalifah terhadap apa yang ia lakukan termasuk masalah-masalah sebelumnya.<sup>112</sup>

Kenyataannya, bahwa Nabi saw. telah menyerahkan jabatan wali kepada para sahabatnya, ia tidak meminta laporan mereka dalam hal-hal yang mereka lakukan. Mereka juga, tidak pernah melaporkan sesuatu kepada Nabi. Tetapi, mereka justru melakukan tugas-tugasnya dengan mandiri dan melaksanakan tugas mengikuti kebijakannya sendiri-sendiri. Begitulah yang telah dilakukan Mu'ad, Utub Bin Usaid, Illa' Al Hadhrami dan semua wali beliau. Semuanya tadi menunjukkan bahwa seorang wali tidak harus melaporkan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan keatasnya. Dalam keadaan seperti ini, ia amat berbeda dengan mu'awin. Karena mu'awin wajib melaporkan semua kegiatan yang ia laksanakan kepada khalifah, sedangkan wali tidak.<sup>113</sup>

Khalifah wajib untuk senantiasa mengontrol semua kegiatan yang dilakukan mu'awin, sedangkan kegiatan yang dilakukan wali tidak. Sekalipun demikian khalifah tetap harus mencari informasi tentang kondisi daerah yang diperintah para walinya. Karena itu, wali dapat melakukan berbagai kebijakan dan program. Karena itulah, Mu'adz berkata kepada Rasulullah saw. ketika ia mengutusnyanya ke Yaman:

*"Saya akan berjihad dengan pendapatku."*

---

<sup>112</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 108

<sup>113</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 179

## F. AL QADLA' (Lembaga Peradilan)

Al- Qadla secara bahasa berarti putus, menunaikan, mencegah, memutuskan hukum.<sup>114</sup> Secara istilah al-Qadla memiliki beberapa makna, yang pertama; “kekuasaan yang dikenal (kekuasaan yang mengadili dan memutuskan perkara)” ; kedua, “menyelesaikan perkara pertengkaran untuk melenyapkan gugat menggugat dan untuk memotong pertengkaran dengan hukum-hukum syara’ yang dipetik dari al-Qur’an dan Sunnah”.<sup>115</sup> Menurut ‘Ukbary dalam *kulliatnya* yang dimaksud dengan al-qadla adalah “Peraturan yang diikuti, yang terbit dari penguasa, yang mempunyai kekuasaan umum”.<sup>116</sup>

Menurut Taqiyuddin al-Nabhani, *Qadla'* (lembaga peradilan) adalah lembaga yang bertugas untuk menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat. Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara sesama anggota masyarakat atau mencegah hal-hal yang dapat merugikan hak jama'ah atau mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat atau pegawai negeri yang lain.<sup>117</sup>

Dalil asal hukum disyari'atkannya lembaga peradilan itu adalah Al Kitab dan As Sunnah. Tentang dalil Al Kitab adalah firman Allah SWT.:



*"Dan hendaknya engkau hukum (perkara yang terjadi) di antara mereka dengan dasar apa yang telah diturunkan oleh Allah."*<sup>118</sup>

<sup>114</sup> Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 9-10, lihat, Sa'id Abu Jayyib, *al-Qamus al-Fiqhiy*, (Suriah: Dar al-Fikr, 1998), hlm.304

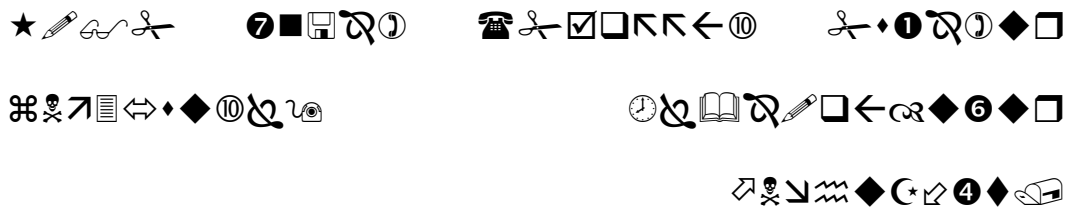
<sup>115</sup> Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, *Ibid.*, hlm. 10-11

<sup>116</sup> T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *op.cit.*, hlm. 7

<sup>117</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 184

<sup>118</sup> T.Q.S. Al Maidah: 49





"Dan apabila mereka diseru kepada Allah dan Rasul-Nya, agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka..."<sup>119</sup>

Sedangkan dalil As-Sunnah adalah, bahwa Rasulullah saw. sendiri pernah memimpin lembaga peradilan (*qadla*) dan memutuskan masalah yang terjadi di tengah masyarakat. Salah satunya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت: وقاص عهد ألي أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقبض اليه ابن زمعة قال عتبة: انه ابني . صلي الله عليه وسلم الفتح أخذ سعد ابن وليدة زمعة فأقبل به الي صلي الله عليه وسلم, و أقبل معه بعبد بن . : يا رسول الله هذا ابن أخي, عهد الي أنه أبنه. : يا رسول الله هذا أخي, ابن وليدة زمعة, راشه, لي الله عليه وسلم ابن وليدة زمعة فاذا هو أشبه الناس به, صلي الله عليه وسلم : هو لك يا عبد زمعة, من أجل أنه وُلدَ علي فراش أبيه. صلي الله عليه وسلم : احتجبي منه يا سودة بنت زمعة . مما رأي من شبهه بعُتبة .<sup>120</sup> صلي الله عليه وسلم

Dari A'isyah istri Nabi saw. yang mengatakan bahwa Utbah Bin Abi Waqqas telah menitipkan bayi laki-laki Zam'ah kepada saudara laki-lakinya, yaitu Sa'ad Bin Abi Waqqas (dengan pesan): *"Ini anakku, maka terima dan peliharalah menjadi anakmu."* Pada saat penaklukan kota Makkah, anak itu diminta oleh Sa'ad, sambil berkata: *"Ini anak saudaraku,*

<sup>119</sup>T.Q.S. An Nuur: 48

<sup>120</sup> Bukhari, *op.cit.*, hlm. 99-100, Hadis no. 2533, Kitab al-'Atiq, Bab Ummu al-Walad

yang dulu telah ditiptkan kepadaku." Lalu Abdu Bin Zam'ah berdiri menghampirinya dengan berkata: "Ini saudaraku dan anak laki-laki bapakku, yang telah dilahirkan 'melalui tempat tidurnya' (keturunannya)." Kemudian mereka berdua sama-sama mengadu kepada Rasulullah saw.. Dimana Sa'ad berkata: "Ya Rasulullah, ini adalah anak saudaraku yang telah ditiptkan kepadaku." Sementara Abdu Bin Zam'ah berkata: "Dia sudaraku, dan anak laki-laki bapakku yang dilahirkan 'melalui tempat tidurnya' (keturunannya)." Rasulullah saw. kemudian bersabda: "Dia saudaramu, ya Abdu Bin Zam'ah." Kemudian beliau bersabda: "Anak itu adalah milik keturunannya (lil firasy), sedangkan "lil 'ahir" (orang yang tidak memiliki garis keturunan dengannya) haram memilikinya."<sup>121</sup>

Beliau juga pernah mengangkat para qadli. Beliau pernah mengangkat 'Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman<sup>122</sup>, dimana beliau pernah menasihatinya, berupa penjelasan terhadap cara memutuskan suatu perkara dengan bersabda:

حدثنا هنادٌ . حدثنا حسينُ الجعفيُّ عن زائدةٍ ،  
الله صلي الله عليه و سلم :  
تقاضيُ اليك رجلان ،  
تدري كيف تقضي<sup>123</sup>

"Apabila dua orang yang berselisih datang menghadap kepadamu, jangan segera kau putusi salah satu di antara mereka sebelum engkau mendengarkan pengakuan dari pihak yang lain."

Beliau juga pernah mengangkat Abdullah Bin Nufail sebagai qadli di Madinah.

Semuanya ini adalah dalil disyari'atkannya adanya lembaga peradilan (qadla').

<sup>121</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 185

<sup>122</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, op.cit., hlm. 125

<sup>123</sup> At-Tirmidzi, op.cit., hlm. 618, Hadis no. 1331, Kitab al-Ahkam, Bab Ma Ja a fi Al-Qadli la Yaqli...

Dari hadits A'isyah di atas, nampak jelas tata cara yang telah ditempuh Rasulullah saw. dalam memutuskan perkara sengketa antara Sa'ad dengan Abda Bin Zam'ah terhadap status anak laki-laki Zam'ah itu. Masing-masing mengklaim anak tersebut adalah menjadi haknya. Rasulullah saw. kemudian memberitahukan kepada mereka berdua tentang status hukum syara' yang berkaitan dengan anak laki-laki Zam'ah itu, sebagai hak Abda Bin Zam'ah, anak adalah hak yang memiliki garis keturunan (*lil firsasy*). Keputusan Nabi itu merupakan pemberitahuan terhadap hukum syara', ia mengikat mereka berdua untuk menerima keputusan hukum tersebut. Dan Abdu Bin Zam'ahlah yang akhirnya bisa mengambil anak tersebut.<sup>124</sup>

Ini adalah dalil tentang definisi lembaga peradilan. Definisi itu merupakan sifat suatu fakta. Hanya saja karena fakta tersebut merupakan fakta syara', definisi syari' adalah hukum syara', definisi tersebut tentu membutuhkan dalil yang bisa digali untuk melahirkan definisi tersebut. Hadits-hadits di atas merupakan dalil bagi lahirnya definisi lembaga peradilan tersebut.

Sebagian orang ada yang mendefinisikan peradilan (*qadla'*) sebagai lembaga yang menyelesaikan perkara-perkara sengketa di antara sesama manusia. Definisi ini tidak menjelaskan realitas peradilan yang dilakukan oleh Rasulullah dan apa yang disabdakan oleh ia di sisi lain. Definisi ini hanya menjelaskan hal-hal yang bisa dihasilkan oleh lembaga peradilan (yang berupa keputusan), padahal keputusan itu kadang-kadang tidak dihasilkan dari lembaga peradilan tersebut. Seorang qadli, dapat memutuskan suatu perkara dan kadang tidak memutuskan sengketa antara dua orang yang berperkara. Karena itu, definisi yang menyeluruh (*al jaami'*) dan bisa mengeliminasi kemungkinan di

---

<sup>124</sup> *Ibid.*, hlm. 125

luar masalah yang didefinisikan (*al mani*) itu adalah definisi yang dikemukakan di awal pembahasan lembaga peradilan ini.

Bahwa definisi tersebut juga mencakup vonis terhadap perkara di tengah-tengah masyarakat itu esensinya seperti realitas yang ada di dalam hadits A'isyah di atas. Disamping meliputi masalah *hisbah* (pemutusan perkara-perkara penyelewengan yang bisa merugikan hak jama'ah) yaitu pernyataan yang mengatakan: *"Menyampaikan keputusan hukum yang bersifat mengikat dalam masalah yang merugikan hak jama'ah."* Dimana realitas inilah yang ditunjukkan oleh hadits "Seonggok makanan" (*shubratut tha'am*). Dalam Shahih Muslim dari Abu Hurairah:

ني يحيى بن أيوب و قتيبة و ابن . جميعا عن اسماعيل ابن  
 . قال ابن أيوب: حدثنا اسماعيل : أخبرني العلاء عن أبيه,  
 بي هريرة, الله صلي الله عليه و سلم:  
 فأدخل يده فيها . أصابعه بلأ. فقال ما هذا أيا صاحب الطعام?  
 : سابتة السماء يا رسول الله! قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه  
 الناس؟ من غش فليس مني.<sup>125</sup>

Bahwa Nabi saw. berjalan (melihat-lihat) seonggok makanan, lalu beliau memasukkan tangan beliau ke dalam makanan tersebut. Dimana jari beliau menemukan, bahwa bagian bawah onggokan makanan itu basah (dicampuri air). Lalu beliau bertanya: *"Ini apa, wahai pemilik makanan?"* Dia menjawab: *"Terkena hujan, ya Rasulullah."* Beliau bersabda: *"Tidakkah seharusnya yang terkena hujan diletakkan di bagian atasnya makanan ini, sehingga orang-orang bisa mengetahuinya. (Ingatlah), siapa saja yang menipu, bukan termasuk umatku."*<sup>126</sup>

Definisi tersebut juga mencakup masalah memberi pertimbangan dalam perkara-

<sup>125</sup> Muslim, *Shahih Muslim* jilid 1, (Qahirah: Dar al-Hadits, 1991), hlm. 99, Hadits no. 102, Kitab Iman, Bab Qaulu Al-Nabi: Man Ghatsa Falaisa Minna

<sup>126</sup> *Loc.cit.*, Lihat. Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, *op.cit.*, hlm. 82

perkara *madlalim* (kedzaliman pejabat dan penguasa), sebab perkara-perkara tersebut merupakan perkara peradilan, bukan perkara hukum. Karena perkara itu berupa pengaduan terhadap tindakan penguasa dan pejabat, yaitu perkara tindak kedzaliman, sebagaimana yang dinyatakan di dalam definisi tersebut: *"Menyampaikan hukum dengan cara mengikat untuk mengatasi perselisihan yang terjadi antara warga masyarakat dengan aparat pemerintahan, baik khalifah, pejabat atau pegawai lainnya. Termasuk masalah yang terjadi di kalangan kaum muslimin, karena perbedaan dalam memahami makna salah satu nas syara' yang ingin diputuskan serta hukum yang ingin ditetapkan."*

Kenyataan ini membuktikan, bahwa perkara yang dilakukan penguasa, wali atau pegawai pemerintah akan diangkat ke mahkamah *madlalim* sesuai dengan apa yang diadukan oleh orang yang didzalimi, qadli *madlalim* lah yang bertugas menyampaikan hukum itu dengan cara mengikat.

Pembahasan di atas meliputi tiga bentuk pengadilan yang dinyatakan dalam hadits-hadits Rasulullah saw. Yaitu, penyelesaian perkara sengketa yang terjadi di antara warga masyarakat, dan mencegah terjadinya hal-hal yang membahayakan hak jama'ah, serta menyelesaikan perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan penguasa atau antara rakyat dengan pejabat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas mereka.

#### A. Bentuk-bentuk Pengadilan

Qadli bisa dibagi menjadi tiga, *pertama* adalah qadli biasa, yaitu qadli yang mengurus penyelesaian perkara sengketa di tengah masyarakat dalam hal *mu'amalah* (transaksi yang dilakukan seseorang dengan orang yang lainnya) dan *uqubat* (sanksi hukum). *Kedua*, qadli *muhtasib* yaitu qadli yang mengurus penyelesaian perkara penyimpangan etika dan moral yang bisa membahayakan hak jama'ah. *Ketiga*, qadli

*madlali* yaitu qadli yang mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dengan pejabat negara.<sup>127</sup>

Dasar hukum tentang pengadilan biasa adalah lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa di antara manusia adalah *af'al* Rasulullah, termasuk pengangkatan Mu'adz Bin Jabal di Yaman. Adapun dalil bahwa pengadilan itu adalah lembaga yang menyelesaikan penyimpangan-penyimpangan yang bisa membahayakan hak jama'ah, yang sering disebut *muhtasib* adalah perbuatan dan sabda Rasulullah saw. Di antaranya Rasulullah saw. pernah bersabda:

*"Siapa saja yang menipu, bukan termasuk umatku."*

Semuanya itu merupakan pengadilan *hisbah*. Sebutan pengadilan yang menyelesaikan perkara sengketa dan bisa membahayakan hak jama'ah. Yaitu mengawasi para pelaku bisnis, tukang dan pekerja, untuk mencegah mereka dari tindak penipuan dalam perdagangan mereka, pekerjaan dan hasil-hasil karya mereka.<sup>128</sup> Nabi juga mengirim petugas muhtasib untuk mengadili orang yang salah mempergunakan takaran dan timbangan, yang bisa membahayakan kepentingan kelompok masyarakat. Kegiatan itulah yang telah dijelaskan oleh Nabi saw. dimana ia memerintahkannya serta menyelesaikan sengketa yang terjadi, yang nampak di dalam hadits Al Barra' Bin Azib, ketika ia melarang dua pihak yang bekerjasama dengan cara yang satu kredit sedangkan yang lain dengan tunai. Karena itu, dalil tentang *hisbah* tersebut adalah dalil As Sunnah.<sup>129</sup>

Rasulullah saw. pernah mengangkat muhtasib dalam masalah *hisbah* tersebut. Begitu pula, para khulafaur rasyidin pernah mengangkat qadli tertentu dalam masalah

---

<sup>127</sup> Jalal al-Anshari, *Mengenal Islam; dari A sampai Z*, Penerjemah. Abu Faiz, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), cet. 1, hlm. 249-250. Lihat Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 186. Lihat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *op.cit.*, hlm. 18

<sup>128</sup> Philip Kahitti, *History of Arabs*, (Jakarta: Serambi, 2006), cet. 2, hlm. 670

<sup>129</sup> Jalal al-Anshari, *op.cit.*, hlm. 274-275



Karena perselisihan antara rakyat dengan *ulil amri* (penguasa) itu harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu hukum Allah. Sedangkan untuk mengembalikan kepada hukum Allah itu mengharuskan adanya qadli yang memutuskan perkara persengketaan, dialah *madlalin*. Hal ini berpedoman kepada perbuatan Rasulullah saw. ketika ia mengangkat Rasyid Bin Abdillah sebagai *madlalin*.

Pengadilan *madlalin* adalah memberikan vonis terhadap perkara sengketa yang terjadi antara rakyat dengan khalifah.<sup>132</sup> Pelaksanaan peradilan *madlalin* itu berpedoman kepada perbuatan dan perkataan Rasulullah. Rasulullah mengangkat qadli secara khusus untuk mengurus perkara *madlalin* tersebut di seluruh negeri. Begitu pula para khalifah setelah beliau. Mereka biasanya menyelesaikan sendiri perkara *madlalin* itu, seperti yang biasa dilakukan pada masa Nabi, Abu Bakar, Umar, Usman dan Ali Bin Abi Thalib ra. Ia tidak menyediakan waktu-waktu khusus serta cara-cara tertentu. Tetapi, ketika terjadi kedzaliman maka fungsinya sebagai qadli *madlalin* member sanksi hukum. Sehingga dalam prakteknya terjadi secara menyeluruh dalam tindakan-tindakan *madlalin* yang tidak dapat dipisahkan secara mandiri.<sup>133</sup>

Keadaan seperti itu terus berlanjut hingga masa kekhalifahan Bani Umayyah yaitu khalifah Malik Bin Marwan. Pada masa itu khalifah yang pertama kali menata manajemen serta tata cara menyelesaikan perkara *madlalin* tersebut. Ia biasanya menyediakan fasilitas infrastruktur untuk menyelesaikan perkara tersebut, ia selalu mengontrol terjadinya perkara *madlalin*. Apabila terjadi kasus *madlalin*, ia segera menyelesaikannya dengan *madlalin*. Khalifah Malik kemudian menyusun wakil-wakil yang bertugas mengawasi perkara *madlalin* di tengah masyarakat. Lalu disusunlah struktur pengadilan *madlalin* itu,

---

<sup>132</sup> Jalal al-Anshari, *op.cit.*, hlm. 115. Lihat, Alaidin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, *loc.cit.*,

<sup>133</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 188



dengan struktur tertentu, yang disebut dengan *Darul Adli*.

Praktek seperti ini diperbolehkan, dilihat dari segi pengangkatan qadli itu bertugas untuk menyelesaikan perkara *madlalim*. Sebab, dalam melaksanakan seluruh wewenang yang dimiliki khalifah dia boleh mengangkat orang tertentu untuk menggantikannya serta dari segi penyediaan waktu dan cara-cara khusus itu merupakan sesuatu yang diperbolehkan, karena semuanya itu merupakan kemubahan.<sup>134</sup>

#### B. Syarat-syarat Qadli

Orang yang menjadi qadli disyaratkan harus 1) muslim, 2) merdeka, 3) baligh, 4) berakal, 5) adil, 6) ahli fikih, yang bisa mengetahui hukum beserta aplikasinya terhadap fakta hukum tersebut. Khusus, bagi qadli *madlalim* ada syarat tambahan, disamping syarat tersebut yaitu harus 7) laki-laki dan 8) mujtahid, sebagaimana qadli. Karena tugasnya adalah sanksi hukum. *Madlalim* bertugas menghukumi penguasa serta memberlakukan hukum syara' kepada mereka. Karena itu, disyaratkan mereka harus laki-laki, ahli fikih, disamping syarat-syarat qadli yang lain. Hanya bedanya, *madlalim* melebihi semuanya, yaitu harus mujtahid. Karena di antara perkara *madlalim* yang harus diputuskan adalah penguasa yang menerapkan hukum selain yang diturunkan oleh Allah SWT, misalnya ia menerapkan suatu hukum yang tidak ada dalil syara'nya atau menggunakan dalil yang menjadi dasar dalam member sanksi hukum. Seorang mujtahid dapat memvonis berdasarkan ilmu fiqih.<sup>135</sup>

'Umar ra. Senantiasa berpesan kepada amir-amirnya supaya berlaku jujur dalam mengangkat para qadli. Sedangkan 'Umar bin Abd al-'Aziz mengangkat qadli dengan mengutamakan sifat-sifat: sempurna ilmunya tentang masalah-masalah yang telah terjadi;

---

<sup>134</sup> *Loc.cit.*, hlm. 188

<sup>135</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 189.

bersih hati dari tamak; mempunyai sifat tenang; meniru dan meneladani pemimpin-pemimpin agama yang terkenal; suka berunding dan bermusyawarah.<sup>136</sup>

### G. JIHAZUL IDARY (Aparat Administrasi)

Penanganan urusan negara serta kepentingan rakyat itu diatur oleh departemen, jawatan dan unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan negara serta memenuhi kepentingan rakyat tersebut. Di setiap departemen akan diangkat direktur jendral, juga di setiap jawatan akan diangkat kepala jawatan yang mengurus jawatannya, termasuk yang bertanggungjawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Seluruh pimpinan itu bertanggungjawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan dan unit-unit mereka yang lebih tinggi, dari segi --pertanggungjawaban terhadap-- kegiatan mereka serta bertanggungjawab kepada wali, dari segi --pertanggungjawaban terhadap-- keterikatan pada hukum dan sistem secara umum.<sup>137</sup>

#### A. Aparat Administrasi Merupakan Masalah Teknis

Aparat administrasi (*jihazul idari*) itu merupakan salah satu cara (*uslub*) dan sarana (media) dalam melaksanakan tugas. Sehingga tidak memerlukan adanya dalil secara khusus, selain cukup hanya dengan adanya dalil secara umum yang menunjukkan hukum asalnya. Dan tidak bisa dikatakan, bahwa *uslub* itu merupakan perbuatan manusia sehingga tidak bisa begitu saja berjalan kecuali harus sesuai dengan hukum-hukum syara'. Tidak bisa dikatakan demikian, karena aktivitas-aktivitas tersebut telah dijelaskan hukum asalnya oleh dalil syara' secara umum. Sehingga dalil itu mencakup setiap masalah yang merupakan cabang (*substansi*) dari perbuatan tersebut. Kecuali apabila ada dalil syara'

<sup>136</sup> Lihat T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, *op.cit.*, hlm. 17-18

<sup>137</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 207

yang menjelaskan perbuatan cabang (*substansi*) tersebut, sehingga perbuatan itu harus mengikuti dalil tersebut.<sup>138</sup>

Allah berfirman:



"Dan bayarkanlah zakat..<sup>139</sup> Ayat ini merupakan dalil umum (tentang perintah mengeluarkan zakat). Kemudian ada dalil-dalil tentang aktivitas-aktivitas cabang (*substansial*) dari perintah zakat tersebut. Umpamanya dalil tentang ketentuan *nishab*, para *amil* serta kelompok orang yang wajib dipungut zakat. Semuanya itu merupakan aktivitas cabang dari perintah: "Dan bayarkanlah zakat..". Dan tidak pernah ada dalil yang menjelaskan bagaimana cara para amil tersebut melakukan penarikan zakat itu.<sup>140</sup> Semuanya maupun yang lain adalah aktivitas cabang (*substansial*) dari perintah: "Dan bayarkanlah zakat..". Mengenai alat penyimpan tersebut mereka buat semacam bangker di dalam tanah atau berbentuk rumah seperti lumbung padi. Serta zakat uang tersebut akan dikumpulkan dengan kotak. Semuanya itu tercakup di dalam dalil umum tersebut, karena tidak ada satu dalil khusus pun yang menjelaskan tentang masalah itu. Dan demikianlah ketentuan tentang cara (*uslub*) itu. Karena itu, *uslub* itu adalah perbuatan yang merupakan aktivitas *substansial* yang --hukum asalnya-- telah dijelaskan oleh dalil umum. Oleh karena itu, perbuatan cabang (*substansi*) itu tidak memerlukan dalil lagi. Sebab dalil hukum asalnya yang umum itu sudah merupakan dalil bagi aktivitas cabang tersebut.<sup>141</sup>

Sedangkan membentuk departemen atau mengangkat orang yang mengurus

<sup>138</sup> *Ibid.*, hlm. 207

<sup>139</sup> T.Q.S. Al Baqarah: 277

<sup>140</sup> Apakah mereka pergi dengan mengendarai kendaraan atau jalan kaki. Apakah mereka akan menyewa pekerja untuk membantu mereka atau tidak. Apakah mereka akan mencatatnya dengan buku. Apakah mereka akan membuat satu tempat untuk dijadikan tempat berkumpul. Apakah mereka akan mempergunakan alat penyimpan untuk menyimpan zakat yang berhasil mereka kumpulkan.

<sup>141</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 208

kepentingan-kepentingan rakyat dalam setiap jawatan (unit) yang harus diurus itu adalah perbuatan asal dan bukan perbuatan cabang. Aktivitas itu membutuhkan dalil. Sedangkan dalilnya adalah *af'al* Rasul. Rasulullah saw. telah melakukan tugas pemerintahan, ia juga melakukan tugas yang bersifat teknis. Ia pernah melakukan tabligh dan kegiatan teknis serta mengurus kepentingan kaum muslimin sekaligus.<sup>142</sup> Tentang ia telah melakukan tabligh sudah jelas. Sedangkan tentang ia melaksanakan kegiatan teknis itu dalilnya adalah adanya wahyu yang memerintahkan ia untuk memungut zakat (*shadakah*). Memungut *shadakah* itu merupakan kegiatan teknis. Ia diperintah memotong tangan pencuri dan kegiatan memotong tangan itu merupakan kegiatan yang bersifat teknis. Nabi diperintah untuk merajam orang yang melakukan zina, mencambuk orang yang menuduh orang lain berbuat zina serta memerangi para pembangkang, semuanya itu merupakan kegiatan yang bersifat teknis. Nabi juga pernah menghancurkan berhala dengan tangan ia sendiri dimana itu pun merupakan kegiatan teknis. Nabi juga pernah mengutus orang untuk menghancurkan berhala itu, dimana mengutus orang itu juga merupakan kegiatan teknis. Nabi juga pernah membunuh, menawan, itu pun merupakan kegiatan teknis. Nabi juga memerintahkan orang untuk berbuat adil dan beliau menegakkannya. Nabi menjatuhkan hukuman *hudud* (perdata) bagi para pelanggar, apapun bentuk pelanggaran mereka. Nabi juga akan membalas kepada siapa pun sesuai dengan apa yang mereka lakukan, itu pun merupakan kegiatan teknis.

Sedangkan dalil tentang mengupayakan kepentingan rakyat, disamping mengurus kepentingan mereka, serta mengangkat para penulis untuk mencatat kepentingan itu, sesungguhnya Nabi saw. telah mengurus kepentingan penduduk Madinah. Nabi pernah

---

<sup>142</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah, op.cit.*, hlm. 126

juga mengangkat orang lain, untuk mengurus urusan-urusan tersebut. Ali Bin Abi Thalib adalah penulis perjanjian, apabila beliau mengadakan perjanjian serta penulis perdamaian.<sup>143</sup> Ini juga merupakan kegiatan teknis, dan kegiatan pemerintahan. Haris Bin Auf Al Mari bertugas membawa cincin --yang menjadi stempel-- Nabi, ini pun merupakan kegiatan teknis, dan kegiatan pemerintahan. Mu'iqib Bin Fatimah sebagai penulis rampasan perang (*ghanimah*), ini pun merupakan kegiatan teknis dan kegiatan pemerintahan. Hudzaifah Bin Al Yaman bertugas mencatat penghasilan tanah Hijaz.<sup>144</sup> Abdullah Bin Arqam menjadi pencatat (sensus penduduk) orang-orang yang tinggal dan kabilah mereka beserta jumlah air yang mereka butuhkan. Begitulah, semuanya merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Rasulullah saw. telah melakukan kegiatan teknis dalam melakukan kegiatan pemerintahan.

Akan tetapi, Nabi saw. telah menentukan tugas para sahabat yang telah ia angkat untuk melakukan tugas tertentu, semisal mencatat *ghanimah* (hasil rampasan perang), menaksir pendapatan penduduk ataupun yang lain. Sementara itu, ia tidak pernah menentukan kegiatan-kegiatan substansial, yang mereka upayakan dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, bagi para petugas yang bersangkutan. Oleh karena itu, apabila ia tidak menentukan berarti kegiatan-kegiatan itu merupakan substansi dari hukum kegiatan asal. Sehingga orang yang diperintahkan untuk melaksanakan kegiatan itu boleh saja memilih cara apapun yang bisa dilakukan untuk melaksanakan tugas yang telah dibebankan kepadanya, agar bisa melaksanakan urusan-urusan itu dengan cara yang paling mudah.

#### B. Memenuhi Kepentingan Rakyat Termasuk Ri'ayatus Syu'un

---

<sup>143</sup> *Loc.cit.*, hlm.126

<sup>144</sup> *Ibid.*, Lihat, Jalal al-Anshari, *op.cit.*, hlm. 117

Karena memenuhi urusan rakyat termasuk kegiatan *ri'ayatus syu'un*, sedangkan kegiatan *ri'ayatus syu'un* itu adalah semata-mata wewenang khalifah, khalifah itu boleh mengadopsi teknis administrasi (*uslub idari*) yang dia kehendaki lalu dia perintahkan agar hal itu dilaksanakan. Karena, khalifah juga diperbolehkan membuat semua bentuk perundang-undangan dan sistem administrasi (*nidlam idari*), lalu mengharuskan seluruh rakyat untuk melaksanakannya. Karena, semuanya itu merupakan kegiatan-kegiatan substansial. Khalifah juga diperbolehkan untuk memerintahkan salah satu di antaranya, kemudian mengikat semua orang agar melaksanakan aturan itu, dan bukan dengan aturan yang lain. Pada saat itu hukum mentaatinya menjadi wajib. Sebab hal itu berarti mengharuskan untuk mengikuti salah satu hukum yang telah diadopsi oleh khalifah. Terikat dengan perintah itu mengharuskan meninggalkan yang lain. Karena statusnya sama persis seperti ketika khalifah mengadopsi hukum-hukum yang lain. Dalam masalah ini, ia tidak menyimpang dari hukum-hukum syara'.<sup>145</sup>

Tidak boleh dikatakan bahwa cara-cara (*uslub*) itu merupakan sesuatu yang mubah, sehingga setiap orang berhak untuk melakukan cara apapun yang dia kehendaki. Dan kalau khalifah mengharuskan salah satu perkara yang mubah serta mencegah perkara mubah yang lain, itu berarti dia telah mengharamkan perkara yang mubah. Tidak bisa dikatakan demikian, karena ketika khalifah mengadopsi cara (*uslub*) tertentu itu tidak berarti dia telah mewajibkan perkara mubah yang satu, serta mengharamkan perkara mubah yang lain. Melainkan dia telah melakukan *tabanni* (adopsi) terhadap hukum syara' yang telah dijadikan oleh syara' sebagai haknya. Dia telah melakukan hal-hal yang bisa memudahkannya untuk melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu, dia boleh

---

<sup>145</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, op.cit., hlm. 268

mengadopsinya, sedangkan bagi rakyat wajib terikat dengan apa yang telah diadopsinya, dan tidak boleh melaksanakan yang lain, kalau dia mencegahnya.<sup>146</sup>

Hanya saja, perkara mubah itu merupakan perkara mubah yang boleh dipergunakan untuk mengurus urusan rakyat, sehingga mubah bagi khalifah untuk mengurus urusan rakyat dengan perkara tersebut. Karena hak untuk mengurus urusan rakyat itu adalah wewenangnya, dan bukannya mubah bagi semua orang. Sebab, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengurus urusan tersebut. Oleh karena itu, terikat dengan apa yang telah diadopsi oleh khalifah itu adalah bagian dari kewajiban taat (kepada khalifah), bukan bagian dari menjadikan perkara yang asalnya mubah menjadi fardlu.

#### C. Rincian Kegiatan Administrasi

Hal ini berhubungan dengan kegiatan administrasi, dari segi penanganannya itu sendiri. Sedangkan berhubungan dengan rincian-rincian kegiatan administrasi itu, bisa diambil dari fakta kegiatan administrasi tersebut. Karena dengan meneliti faktanya, akan nampak bahwa di sana ada beberapa kegiatan yang dilakukan oleh khalifah sendiri atau oleh para pembantunya (*mu'awin*). Baik kegiatan pemerintahan, yaitu kegiatan penerapan hukum syara' ataupun kegiatan administrasi, yaitu melaksanakan semua urusan yang bersifat substansial bagi semua orang. Hal itu memerlukan cara dan sarana-sarana tertentu. Oleh karena itu, harus ada aparat khusus yang dimiliki khalifah dalam rangka mengurus urusan-urusan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tanggungjawab-tanggungjawab kekhalifahan tersebut. Disamping itu, ada urusan-urusan yang menyangkut kepentingan rakyat yang harus dipenuhi. Hal-hal itu membutuhkan cara dan sarana-sarana tertentu untuk melaksanakannya. Karena itu, adanya aparat khusus untuk memenuhi

---

<sup>146</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 209

kepentingan rakyat itu merupakan suatu keharusan.

Perangkat itu terdiri dari jawatan, dan unit-unit. Jawatan tertinggi bagi jawatan negara yang lain, semisal Departemen Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, Industri dan sebagainya. Semua departemen itu mengurus unitnya sendiri, beserta jawatan-jawatan dan unit-unit di bawahnya. Sedangkan jawatan itu mengurus urusan jawatannya sendiri, beserta unit-unit di bawahnya. Adapun unit-unit itu mengurus urusan unit itu sendiri, beserta bagian-bagian dan sub bagian-sub bagian di bawahnya.<sup>147</sup>

Departemen-departemen, jawatan-jawatan, serta unit-unit itu dibentuk dan didirikan semata-mata untuk menjalankan urusan-urusan negara, serta memenuhi kepentingan-kepentingan rakyat.

Agar bisa menjaga jalannya departemen-departemen, jawatan-jawatan, serta unit-unit itu harus diangkat para penanggungjawabnya. Sehingga di setiap departemen akan diangkat seorang dirjen, yang secara langsung mengurus urusan departemen tersebut. Serta bertugas untuk mengarahkan semua jawatan dan unit di bawahnya. Di setiap jawatan, dan unit itu harus ditunjuk seorang kepala yang bertanggungjawab secara langsung terhadap urusan jawatan dan unit tersebut, beserta bagian dan sub bagian di bawahnya.<sup>148</sup>

Inilah penjelasan tentang fakta tata administrasi departemen-departemen tersebut, atau apa yang disebut dengan instansi negara. Instansi itu merupakan perangkat umum bagi semua rakyat, termasuk bagi siapa saja yang hidup dalam lindungan negara Islam. Instansi-instansi itu biasanya disebut "Diwan", sehingga ada yang menyebut dengan "*Dawawinu al-Daulah*" (instansi-instansi negara). Sebagian ahli fikih menyebutnya dengan

---

<sup>147</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 210-211

<sup>148</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, *op.cit.*, hlm. 269



sebutan "Diwan". Sedangkan tata administrasi bagi departemen-departemen atau diwan itu, belum pernah ada pada masa Rasulullah saw. dengan ketentuan (aturan) khusus. Tetapi beliau hanya mengangkat pencatat untuk setiap departemen. Mereka masing-masing itu layaknya kepala instansi yang sekaligus menjadi pencatatnya.

## H. MAJELIS UMMAT (Lembaga Wakil Rakyat)

*Majelis ummat* adalah majelis yang terdiri dari orang-orang yang mewakili suara (aspirasi) kaum muslimin, agar menjadi pertimbangan khalifah dan tempat khalifah meminta masukan dalam urusan-urusan kaum muslimin.<sup>149</sup> Mereka mewakili umat dalam melakukan *muhasabah* (kontrol dan koreksi) terhadap para pejabat (*hukkam*). Hal ini diambil dari pengkhususan Rasulullah saw. terhadap 14 orang pemimpin, yang terdiri dari kaum Anshar dan Muhajirin untuk menjadi tempat rujukan dan meminta masukan dalam berbagai persoalan. Semuanya menunjukkan kebolehan membentuk majelis khusus yang mewakili umat dalam melakukan kontrol dan koreksi terhadap para pejabat, serta dalam *syura* (mengambil pendapat) yang telah ditetapkan dalam Al Qur'an dan As Sunnah. Majelis ini disebut dengan sebutan majelis umat, karena merupakan wakil umat dalam melakukan *muhasabah* dan *syura*.<sup>150</sup>

Orang non muslim --yang menjadi rakyat negara Islam-- diperbolehkan menjadi anggota majelis ini, untuk menyampaikan pengaduan tentang kezaliman para penguasa terhadap mereka, atau terhadap kesalahan dalam penerapan Islam terhadap mereka.

### A. Hak Syura (Mengambil Pendapat)

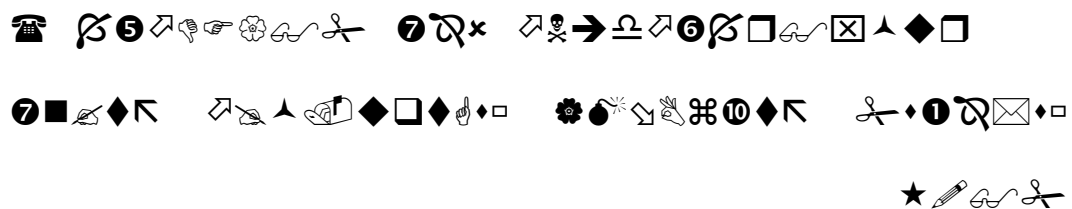
---

<sup>149</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 216, Lihat, Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, *op.cit.*, hlm. 269, Lihat, Anonim, *Piagam Umat Islam*, (tt: Pustaka Thariqul 'Izzah, 1997), hlm. 110

<sup>150</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Daulah al-Islamiyyah*, *ibid.*, hlm. 126

Kata *syura* merupakan bentuk mashdar dari *Saawara*. Maknanya adalah meminta pendapat dari orang yang bisa dimintai pendapat (*mustasyar*). Hukum asal disyari'atkan *syura* adalah perintah Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW. agar meminta pendapat orang Mukmin.

*Syura* adalah hak seluruh kaum muslimin terhadap khalifah. Karena itu, mereka memiliki hak terhadap khalifah agar dalam banyak persoalan khalifah merujuk kepada mereka untuk meminta pendapat, kontrol dan koreksinya. Allah berfirman:



*"Dan bermusyawarahlah engkau (Muhammad) dengan mereka dalam suatu urusan. Apabila engkau mempunyai 'azam, maka bertawakallah kepada Allah."*<sup>151</sup>

Perintah musyawarah ini sama sekali tidak disertai dengan adanya indikasi yang bermakna *jazm* atau tegas dan wajib, melainkan disertai dengan berbagai indikasi yang mengalihkannya dari ketegasan dan kewajibannya.<sup>152</sup>

Kata *Fi Al-Amri* bermakna meminta pendapat dalam segala urusan, apapun bentuknya. Akan tetapi karena wajib, haram serta hukum-hukum syara' yang telah dijelaskan dan dinyatakan oleh syara' dalam bentuk yang baku, sehingga tidak ada ruang bagi pendapat manusia. Pada tataran ini, jelas bahwa *syura* berbeda dengan Demokrasi. Karena Demokrasi adalah system pemerintahan berdasarkan suara mayoritas. Pemilihan penguasa dan anggota dewan perwakilan yang membuat undang-undang atau hukum, diselenggarakan berdasarkan suara mayoritas. Semua keputusan dalam lembaga-

<sup>151</sup> T.Q.S. Ali Imran: 159

<sup>152</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 219-221

lembaga tersebut juga diambil berdasarkan pendapat mayoritas.<sup>153</sup>

Demokrasi adalah bagian dari produk akal manusia, bukan berasal dari Allah. Demokrasi tidak disandarkan pada wahyu Allah, karena lahir dari akidah pemisahan agama dari kehidupan yang akan menghasilkan pemisahan agama dari negara. Demokrasi menyatakan ada empat kebebasan yang bersifat umum yaitu kebebasan beragama, kebebasan berpendapat, kebebasan kepemilikan, kebebasan berperilaku.<sup>154</sup>

Rasulullah saw. senantiasa merujuk kepada banyak orang untuk meminta pendapat mereka. Ia pernah meminta pendapat sahabat pada saat perang Badar, tentang penentuan tempat perang. Nabi juga pernah meminta pendapat sahabat pada saat perang Uhud, tentang peperangan di luar Madinah atau di dalam Madinah. Pada kesempatan yang pertama, beliau mengambil pendapat Hubab Bin Mundir, padahal ada pendapat lain dari Khubair, namun ia tetap mengambil pendapat Hubab. Sedangkan pada saat perang Uhud, ia mengambil suara mayoritas, sekalipun pendapat beliau sendiri berbeda dengan pendapat mereka.<sup>155</sup>

Dalam persoalan tanah Irak; apakah tanah tersebut dibagikan kepada kaum muslimin atau tidak, karena tanah tersebut merupakan ghanimah. Ataukah tetap dimiliki oleh penduduk Irak, dengan catatan mereka harus membayar kharaj. Sehingga penanganannya tetap menjadi milik *baitul mal*? Umar merujuk kepada kaum muslimin, lalu ia memutuskan dengan hasil ijtihadnya. Kemudian, pendapatnya disepakati oleh seluruh sahabat. Sehingga tanah tersebut dibiarkan agar dikelola mereka, dengan catatan mereka akan membayar kharajnya. Nabi juga pernah memberhentikan Sa'ad Bin Abi Waqqash

---

<sup>153</sup> Abdul Qadim Zallum, *Demokrasi Sistem Kufur; Haram Mengambil, Menerapkan dan Menyebarkannya*, Terj. M. Shiddiq al-Jawi, (Bogor: PTI, 2001), cet.2, hlm. 9. Lihat Ali Belhaj, *Menghancurkan Demokrasi*, Terj. M. Shiddiq al-Jawi, (Bogor: PTI, 2002), cet. 1, hlm. 10-14

<sup>154</sup> Abdul Qadim Zallum, *Ibid.*, hlm. 10

<sup>155</sup> Taqiyyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 217

dari suatu daerah, hanya karena ada pengaduan dari warganya. Ia berkata: *"Aku tidak memberhentikannya karena pengkhianatan atau kelemahannya."*<sup>156</sup>

Kaum muslimin memiliki hak *syura* terhadap khalifah, mereka juga memiliki kewajiban untuk mengoreksi kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan para pejabat itu. Karena Allah SWT. telah mewajibkan kaum muslimin untuk mengoreksi para pejabat (penguasa), serta memerintahkan kepada mereka dengan perintah yang tegas agar mengoreksi dan mengubah tindakan mereka, apabila mereka merampas hak-hak rakyat, atau menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau menerapkan hukum selain hukum yang telah diturunkan oleh Allah SWT.<sup>157</sup>

Para sahabat pernah menolak tindakan Rasulullah dan mengoreksinya, bahkan Umar dengan keras menolak isi perjanjian Hudaibiyah yang menyatakan: *"Bahwa siapa saja yang menemui Muhammad dari pihak kafir Quraisy, tanpa ada izin dari pimpinannya, maka dia akan dikembalikan kepada mereka. Sedangkan siapa saja yang mendatangi orang-orang Quraisy dari pihak Muhammad, maka mereka tidak akan mengembalikannya kepada Muhammad."* Sebagaimana kaum muslimin yang lain, yang dipimpin oleh Umar, pada awalnya mereka menolak keinginan Abu Bakar untuk memerangi kaum murtad. Sebagaimana Thalhah dan Zubeir pernah menolak Abu Bakar, ketika keduanya mengetahui bahwa Abu Bakar ingin menyerahkan jabatan khilafah setelahnya, kepada Umar.<sup>158</sup>

Begitu pula Bilal Bin Rabah, Zubeir serta yang lain pernah menolak tindakan Umar karena tidak membagi tanah Irak kepada orang-orang yang ikut berperang. Ada seorang

---

<sup>156</sup> *Ibid.*, hlm. 217

<sup>157</sup> Lihat, Setyabudi Daryono, *Mengoreksi Penguasa*, Harian Umum Riau Pos Kolom Opini edisi Jum'at, 4 Maret, (Riau: Riau Pos, 2011), hlm. 4

<sup>158</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 218

wanita menolak pelarangan yang ditetapkan Umar terhadap orang-orang agar tidak memberikan mahar lebih dari 400 dirham. Lalu dia berkata kepada Umar: \_"Ini bukan hakmu Umar, karena aku mendengar Allah berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمَنْ يَكْفُرُ بِاللَّهِ أَنْ يَتَذَكَّرَ أَلَّا يَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾<sup>159</sup>

"...sedangkan kalian telah memberikan kepada seseorang di antara mereka (wanita yang menjadi istri) harta yang banyak, maka janganlah kalian mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun."<sup>159</sup>

Kemudian Umar berkata: "Wanita ini benar, dan Umar salah."

Karena itu, majelis umat memiliki hak *syura* (memberikan pendapat). Oleh karena itulah, majelis itu wajib melakukan *muhasabah*.

## B. Pemilihan Anggota Majelis Ummat

Anggota majelis umat itu dipilih dengan pemilihan umum, bukan dengan penunjukan atau pengangkatan. Karena mereka mewakili semua rakyat dalam menyampaikan pendapat (aspirasi) mereka. Sedangkan seorang wakil itu esensinya hanya akan dipilih oleh orang yang mewakilkan. Orang yang menjadi wakil itu, sama sekali tidak bisa memaksa orang yang mewakilkan. Karena anggota majelis umat merupakan wakil semua orang dalam menyampaikan pendapat, baik secara pribadi maupun kelompok (kolektif).<sup>160</sup>

Sedangkan untuk mengetahui wakil dalam suatu wilayah yang luas, orang-orang tersebut tidak dikenal, jelas tidak akan mungkin dilakukan kecuali oleh orang yang memilihnya menjadi wakil. Disamping karena Rasulullah saw. tidak memilih orang yang

<sup>159</sup> T.Q.S. An Nisa': 20

<sup>160</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 223

menjadi wakil dalam menyampaikan suara dengan pertimbangan kapasitas, kemampuan dan kepribadiannya, melainkan semata-mata karena dua alasan. Pertama, mereka adalah pemimpin-pemimpin kelompok, tanpa melihat bagaimana kapasitas dan kemampuannya. Kedua, karena mereka merupakan wakil dari kaum Muhajirin dan Anshar. Yang terpilih adalah sebagian dari Anshar dan sebagian yang lain dari Muhajirin. Karena tujuan adanya *ahli syura* itu adalah mewakili semua orang secara representatif, maka dasar yang dijadikan pijakan dalam memilih anggota majelis umat itu adalah harus mewakili semua orang secara representatif (*tamtsil lin nas*), yang menjadi pijakan Rasulullah saat memilih para pemimpin. Serta harus mewakili jama'ah, yang menjadi pijakan beliau saat memilih sebagian kaum Muhajirin dan sebagian yang lain dari Anshar. Sedangkan agar orang-orang yang tidak dikenal itu bisa mewakili individu dan kelompok-kelompok, hanya bisa dilakukan dengan cara pemilihan. Karena itu, pemilihan umum untuk memilih anggota majelis umat itu merupakan suatu keharusan.<sup>161</sup>

Adapun tentang Rasulullah saw. yang memimpin langsung pemilihan orang yang akan dimintai pendapatnya itu, adalah karena faktor wilayah beliau yang masih sempit dan terbatas, yaitu hanya Madinah saja. Disamping, karena seluruh kaum muslimin telah ia kenal. Sebagai bukti, bahwa kaum muslimin yang membai'atnya pada bai'at aqabah pertama belum beliau kenal, sehingga beliau menyerahkan pemilihan (untuk memilih wakil) dari para pemimpin itu kepada mereka. Nabi bersabda:

*"Pilihkanlah untukku, dua belas pemimpin di antara kalian."*

Dengan dalil-dalil itu, bisa disimpulkan bahwa anggota majelis umat itu adalah para wakil dalam menyampaikan pendapat. *///at* yang menjadi dasar pembentukan majelis

---

<sup>161</sup> *Ibid.*, hlm. 223

umat itu adalah mewakili individu dan kelompok dalam menyampaikan pendapat serta melakukan koreksi (*muhasabah*). Karena illat itu tidak ada pada orang-orang yang tidak dikenal, kecuali dengan melalui pemilihan umum, semua anggota majelis umat itu harus dipilih, melalui pemilihan umum. Bukan dengan cara penunjukan.

### C. Keanggotaan Majelis Umat

Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan, apabila telah baligh, memiliki hak untuk menjadi anggota majelis umat. Ia juga mempunyai hak untuk memilih anggota majelis umat. Baik, pria maupun wanita, muslim maupun non muslim. Karena majelis umat itu semata-mata merupakan wakil umat dalam menyampaikan pendapat saja. Tidak memiliki wewenang untuk memerintah serta membuat aturan. Selama majelis itu hanya merupakan wakil umat dalam menyampaikan pendapat, tentu semua orang yang hidup dalam naungan negara Islam berhak mewakilkan kepada siapa saja yang mereka kehendaki, yaitu orang-orang yang secara syar'i memang layak untuk menerima hak-hak *wakalah* tersebut.<sup>162</sup>

Seperti halnya setiap muslim memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, demikian pula bagi orang non muslim. Ia juga memiliki hak untuk menyampaikan pendapat dalam rangka menerapkan hukum-hukum Islam atas dirinya, termasuk masalah yang serupa yaitu kedzaliman penguasa (terhadap mereka).<sup>163</sup> Oleh karena itu, dia juga berhak mewakilkan kepada siapa saja yang dikehendakinya, termasuk dia juga boleh untuk menjadi wakil siapa saja yang menghendakinya. Untuk menjadi wakil maupun yang mewakilkan, tidak harus muslim, melainkan boleh muslim maupun non muslim. Karena itu, diperbolehkan bagi orang non muslim untuk memilih orang yang mewakili mereka di dalam

---

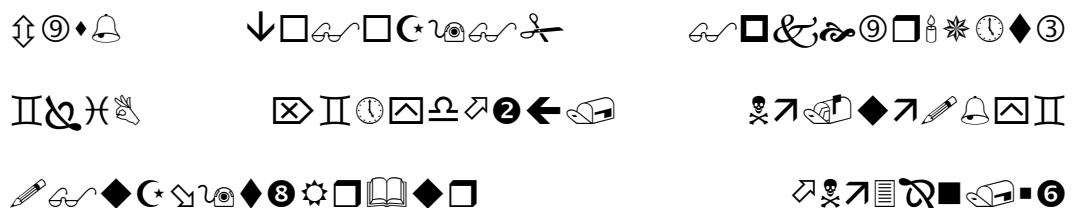
<sup>162</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 110

<sup>163</sup> *Loc.cit.*, hlm. 233

majelis umat itu, baik muslim maupun non muslim. Selama mereka memiliki kewarganegaraan negara Islam.

Islam memandang rakyat yang diperintah oleh negara Islam itu semata-mata sebagai manusia, terlepas dari agama, suku, ras, kekelakian maupun kewanitaannya. Maka, strategi pemerintahan yang digariskan untuk memerintah mereka itu menganggap mereka semata-mata sebagai manusia, sehingga (negara Islam) akan memerintah demi kemaslahatan manusia, yang mengeluarkan mereka dari kesesatan (*dlulumat*) menuju jalan yang terang-benerang (*nur*). Oleh karena itu, semua rakyat memiliki hak dan kewajiban yang berhubungan dengan manusia, sebagai seorang manusia itu adalah sama dilihat dari segi, bahwa semuanya wajib dikenai pemberlakuan hukum-hukum syara'. Sehingga, ketika seorang qadli menyelesaikan perkara sengketa; begitu pula penguasa ketika memerintah, tidak akan melakukan diskriminasi antara manusia yang satu dengan yang lain, melainkan akan memperlakukan mereka dengan perlakuan yang sama. Mereka dilihat sebagai warga negara Islam, dan bukan yang lain.<sup>164</sup>

Oleh karena itu, masing-masing warga negara Islam memiliki hak untuk menyampaikan pendapatnya secara langsung, maupun memilih wakil untuk menyampaikan pendapatnya serta pendapat orang yang dipilihnya. Karena Allah dengan Islam ini telah menyerukan kepada seluruh manusia, sebagai manusia semata. Allah SWT. berfirman:

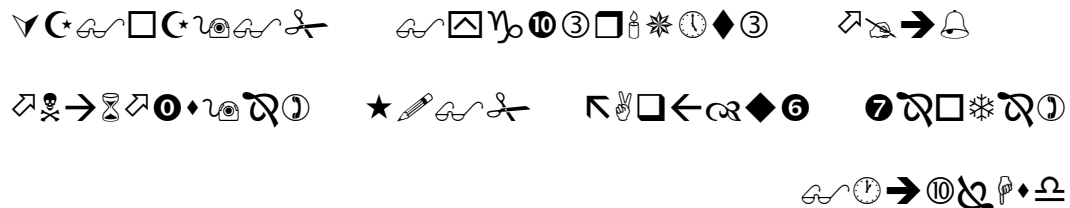


<sup>164</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, op.cit., hlm. 225





*"Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu (Muhammad dengan mu'jizatnya), dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Qur'an)."*<sup>165</sup>



*"Katakanlah: "Hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua."*<sup>166</sup>

Para ulama', terutama ulama' ushul, telah sepakat bahwa orang yang dibebankan hukum syara' adalah setiap orang yang berakal, yang memahami *khitab* (seruan tersebut). Baik muslim maupun non muslim, pria maupun wanita.

Inilah ketentuan tentang orang non Islam. Sedangkan tentang seorang wanita, dasarnya adalah karena majelis umat itu bukan merupakan pemerintahan. Sehingga tidak termasuk dalam hadits yang berhubungan dengan (keharaman) kepemimpinan seorang wanita (*wilayatul mar'ah*). Disamping hal itu telah terjadi pada masa Umar, yaitu ketika ia mensosialisasikan suatu keputusan, beliau selalu mengambil pendapat kaum muslimin terhadap keputusan tersebut. Baik keputusan yang berhubungan dengan hukum-hukum syara', atau yang berhubungan dengan pemerintahan ataupun salah satu tugas-tugas negara. Apabila Nabi mensosialisasikan suatu keputusan, ia selalu mengundang kaum muslimin ke masjid. Nabi mengundang baik pria maupun wanita serta mengambil pendapat mereka secara keseluruhan. Ia juga tidak segan-segan untuk menarik pendapatnya, ketika pendapat itu ditolak oleh wanita, seperti dalam kasus pembatasan

<sup>165</sup> T.Q.S. An Nisa': 174

<sup>166</sup> T.Q.S. Al A'raf: 158

mahar.<sup>167</sup>

Disamping karena Nabi saw. pada tahun ke-13 *bi'tsah* beliau, yaitu tahun ketika beliau hijrah, ia pernah didatangi oleh 75 orang muslim. 73 di antara mereka adalah laki-laki dan dua di antaranya perempuan. Mereka semuanya membai'at ia pada bai'at aqabah kedua, yaitu bai'at untuk berperang dan bai'at politik.

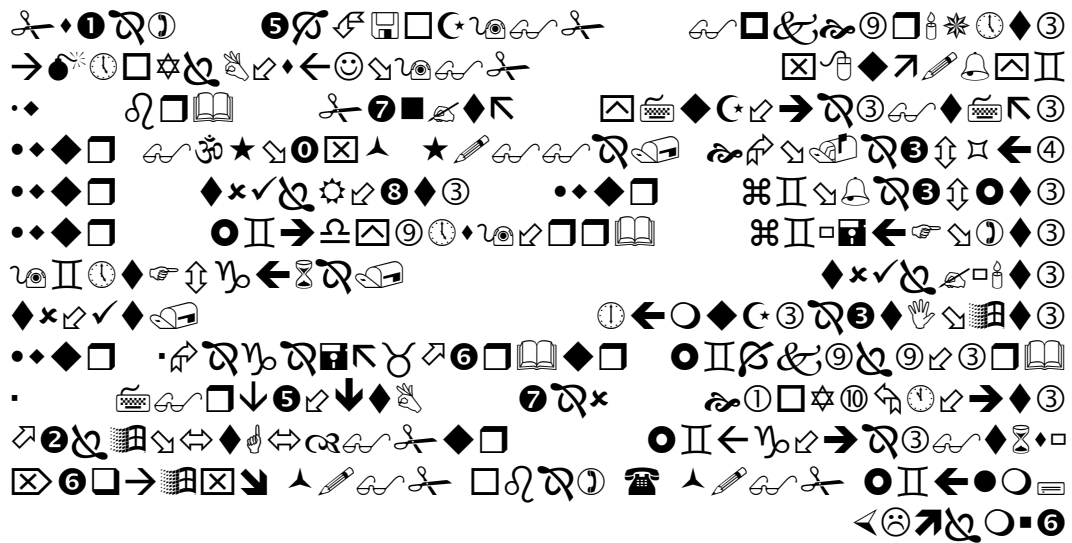
Pernyataan ini merupakan perintah kepada mereka semua, yaitu agar mereka memilih pemimpin dari kalangan mereka, beliau tidak mengkhususkannya untuk kaum pria serta mengecualikan para wanitanya. Juga tidak mengkhususkan hanya untuk orang yang memilih, maupun yang dipilih. Sehingga kemutlakan hadits itu tetap berlaku berdasarkan kemutlakannya, selama tidak ada dalil yang mengikatnya (*taqyiid*). Adanya dalil umum, tetap akan berlaku sesuai dengan keumumannya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya (*takhshis*). Dalam hal ini pernyataan beliau berbentuk umum dan mutlak, tidak ada satu dalil pun yang men-*takhshis* maupun yang men-*taqyiid*-nya. Pernyataan itu menunjukkan, bahwa Rasulullah saw. telah memerintahkan dua wanita tersebut untuk memilih para pemimpin. Pernyataan itu telah memberikan hak kepada kedua wanita tersebut untuk dipilih sebagai dua "pemimpin" wanita dari kalangan kaum muslimin.<sup>168</sup>

Pada suatu hari Nabi pernah duduk untuk diba'at orang, dan saat itu di samping beliau ada Abu Bakar dan Umar. Kemudian ia diba'at oleh kaum pria dan wanita. Bai'at ini semata-mata merupakan bai'at terhadap suatu pemerintahan, bukan bai'at untuk memeluk Islam. Karena wanita-wanita tersebut sebelumnya telah memeluk Islam. Begitu pula setelah bai'at Hudaibiyah, ia juga diba'at oleh para wanita. Allah SWT. berfirman:

---

<sup>167</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 226

<sup>168</sup> *Loc.cit.*, hlm. 226



"Hai Nabi, apabila datang kepadamu perempuan-perempuan yang beriman untuk mengadakan bai'at, bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tidak akan membunuh anak-anaknya, tidak akan berbuat dusta yang mereka ada-adakan antara tangan dan kaki mereka, dan tidak akan mendurhakaimu dalam urusan yang baik, maka terimalah bai'at mereka dan mohonkanlah ampunan kepada Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."<sup>169</sup>

Bai'at di dalam ayat tersebut juga merupakan bai'at terhadap pemerintahan.

Karena Al Qur'an telah menyatakan bahwa mereka adalah wanita-wanita yang telah beriman. Bai'at mereka adalah bai'at agar tidak melakukan kemaksiatan kepada Nabi dalam hal kema'rufan.

Disamping itu, setiap wanita memiliki hak untuk mewakili pendapatnya sendiri serta mewakilkan pendapatnya kepada orang lain. Sebab, dia memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, dia juga memiliki hak untuk mewakilkannya. Karena akad *wakalah* tidak harus laki-laki, sehingga wanita boleh mewakili pendapat orang lain.

Hanya saja, bedanya --sekalipun sama-sama boleh menjadi wakil-- orang non muslim tidak boleh menyampaikan pendapat dalam masalah perundang-undangan, karena undang-undang yang Islami hanya bisa digali dari akidah Islam. Sebab ia merupakan

<sup>169</sup> T.Q.S. Al Mumtahanah: 12

hukum-hukum syara' yang bersifat operasional, yang digali dari dalil-dalilnya yang rinci. Disamping karena ia merupakan hukum yang berfungsi untuk memecahkan setiap masalah manusia, sesuai dengan pandangan hidup tertentu, yang telah ditentukan oleh akidah Islam. Padahal, orang non Islam itu jelas memeluk akidah yang bertentangan dengan akidah Islam serta pandangan hidup yang bertentangan dengan pandangan hidup Islam, sehingga pendapatnya dalam masalah perundang-undangan tidak bisa diambil.<sup>170</sup>

Orang non muslim, juga tidak berhak memilih dan membatasi calon khalifah, di antara calon-calon itu kemudian dipilih menjadi khalifah. Sebab dia tidak memiliki hak dalam urusan pemerintahan. Sedangkan wewenang-wewenang majelis umat yang lain, status mereka sama dengan orang muslim termasuk dalam hal menyampaikan pendapat.<sup>171</sup>

## I. Analisis

Para pemikir politik Islam secara beragam berupaya dengan kemampuan ijtihadnya telah meletakkan struktur (perangkat) kelembagaan sistem pemerintahan Islam. Struktur kelembagaan sistem pemerintahan Islam dalam konsep Taqiyuddin Al-Nabhani memiliki beberapa hal yang sama, meski dalam beberapa hal lain terlihat perbedaannya.

Teori politik Islam terkemuka pada masa klasik Imam Al-Mawardi, memformat struktur pemerintahan Islam adalah sebagai berikut : 1). Khalifah (Kepala Negara), 2). Wazir Tafwidh (Perdana Menteri dan Wazir Tanfidz (Menteri Eksekutif), 3). Wali (Gubernur Propinsi), 4). Pimpinan Jihad, 5). Pemimpin Polisi Dalam Negeri, 6). Qadhi (Hakim), 7.

---

<sup>170</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, *op.cit.*, hlm. 227

<sup>171</sup> *Ibid.*, hlm. 227

Perwakilan Keluarga Terhormat, 8). Imam-imam Sholat, 9). Pimpinan Ibadah Haji, 10). Petugas Pemungut Zakat dan Diwan (Administrasi Negara).<sup>172</sup>

Menurut Abi Ya'la Muhammad bin al-Husain al-Faraki al-Hambali, ia menyusun struktur Negara Islam sebagai berikut: *pertama*, wilayatul imam yang terbagi menjadi: kepala Negara (kholifah), wazir tafwidh, wazir tanfidz, amirul jihad. *Kedua*, wilayatul qadla' yang dibagi menjadi wilayatul madholim, imam shalat, pemimpin haji. *Ketiga*, wilayatul shadaqah.<sup>173</sup>

Sedangkan Tokoh pemikir politik kontemporer Taqiyuddin Al-Nabhani memformat struktur pemerintahan Islam adalah sebagai berikut : 1). Khalifah Negara, 2). Mu'awin Tafwidh (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan). 3). Mu'awin Tanfidz (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi, 4). Amir al-Jihad (Panglima Perang, 5). Wali (Pimpinan Daerah), 6). Qadli (Hakim), 7). Mashalih Daulah (Departemen Negara), 8). Majelis Umat (Lembaga Wakil Rakyat).<sup>174</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa dalil struktur tersebut adalah *af'al* (perbuatan) Rasulullah SAW, karena Rasulullah telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. *Af'al* Rasulullah SAW. adalah bagian dari hadits Rasul hal ini nampak dari definisi hadits itu sendiri. Secara terminologi, kata hadits menurut istilah ahli hadits adalah segala yang disandarkan kepada Nabi SAW. baik berupa ucapan, perbuatan, penetapan, sifatnya atau hammi. Sebagian ulama hadits mendefinisikan hadits yaitu segala perkataan Nabi SAW, perbuatan dan hal ihwalnya.

Rasulullah adalah pemimpin politik dan agama, ia memerintahkan kepada umat Islam agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika ia memerintahkan mereka untuk

<sup>172</sup>Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam* . . . . . *op. cit.*, hal. 23

<sup>173</sup>Abi Ya'la Muhammad, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), hlm. 23

<sup>174</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani, *op. cit.*, hlm. 57.

mengangkat seorang Khalifah dan Imam.<sup>175</sup> Ia bahkan menjelaskan bahwa fitnah akan terjadi jika imam yang mengurus urusan manusia tidak ada.<sup>176</sup>

Taqiuddin menempatkan para mu'awin (mu'awin tafwidz dan mu'awin tanfidz). Taqiuddin Al-Nabhani beralasan, dalil tentang keberadaan para mu'awin (pembantu Khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi) adalah karena Rasulullah telah memilih Abu Bakar dan Umar bin Khattab sebagai mu'awin. Dalam hal ini, Rasulullah bersabda :

177

وأما وزيري فـ

*Dua wazir (pembantu) ku (yang aku pilih) dari penduduk bumi ini adalah Abu Bakar dan Umar.*

Menurut Taqiuddin Al-Nabhani bahwa pengertian kata “waziraya” di dalam hadis tersebut adalah “mu'awinani li” (dua pembantuku), ini adalah makna bahasa. Sedangkan kata wazir dalam pengertian yang dipahami oleh kebanyakan orang saat ini adalah istilah Barat. Konsep yang dimaksud dengan kata tersebut saat ini adalah aktivitas pemerintahan tertentu, hal itu sama sekali tidak pernah dikenal oleh umat Islam, malah bertentangan dengan sistem pemerintahan Islam. Sebab mu'awin yang disebut Rasulullah dengan istilah wazir tersebut tidak dikhususkan untuk menangani aktivitas tertentu, tetapi mu'awin adalah orang yang diberi wewenang untuk membantu Khalifah dalam melaksanakan semua aktivitas secara umum, bahkan tidak dibenarkan untuk mengkhususkannya dalam bidang tertentu saja.<sup>178</sup>

---

<sup>175</sup> *Ibid.*, hlm. 57.

<sup>176</sup> Abi Ya'la Muhammad, *op.cit.*, hlm.23

<sup>177</sup> At-Tirmidzi, *Al-Jami' al- Shahih*, (Beirut: Dar al-Fikr, th), hlm. 576, Hadis no. 3680, Kitab al-Munaqib, Bab 17

<sup>178</sup> Taqiuddin Al-Nabhani, *op. cit.*, hlm.58.

Keberadaan qadli dalam perspektif Taqiyuddin Al-Nabhani sangat penting guna membantu tugas-tugas khalifah. Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, Rasulullah pernah mengangkat para wali. Beliau pernah mengangkat Amru bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman. Kemudian, pada masa Umar menjadi khalifah, ia pernah mengangkat Mu'awiyah menjadi wali (gubernur). Taqiyuddin Al-Nabhani mengemukakan bahwa Rasulullah pernah mengangkat para qadli untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat. Rasul pernah mengangkat Ali bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman. Rasul pernah mengangkat Muadz bin Jabal dan Abu Musa al-Asy'ari sebagai qadli dan wali sekaligus di Yaman.

Masalih daulah dalam pandangan Taqiyuddin Al-Nabhani, didasari perbuatan Rasulullah yang pernah mengangkat para wali di daerah tertentu. Ia mengatakan bahwa Rasul pernah mengangkat Utub bin Usaid menjadi wali di Makkah setelah penaklukan Makkah, Badzan bin Sasan menjadi wali di Yaman dan lain-lain.<sup>179</sup>

Menurut Taiyuddin An-Nabhani bahwa dalam masalah pasukan dan hal-hal yang secara manajerial termasuk dalam wewenang amir al-jihad (panglima perang), Rasulullah sendiri secara langsung pernah menjadi panglima, yang memimpin dalam mengurus urusan-urusan pasukan. Rasul pernah mengangkat panglima perang dalam beberapa peperangan untuk melaksanakan tugas kepanglimaannya. Rasul pernah mengirim Abdullah bin Jahsy untuk pergi bersama sekelompok kaum muslimin mencari informasi tentang orang-orang Quraisy lalu disampaikan kepada Rasul. Rasulullah pernah mengutus Aba Salamah bin Al-Asad sebagai komandan detasemen yang berjumlah 150 orang dan Rasul

---

<sup>179</sup>Taqiyuddin Al-Nabhani memandang bahwa dalil tentang masalah departemen untuk mengurus *mashalih daulah* (kepentingan-kepentingan negara) adalah Rasulullah yang mengangkat para penulis untuk mengurus kepentingan tersebut. Mereka ini layaknya dirjen-dirjen suatu departemen. Rasulullah pernah mengangkat Mu'aiqib bin Abi Fatimah sebagai penulis ghanimah (harta hasil rampasan perang), Hudzaifah bin Yaman menjadi penulis hasil panen penduduk Hijaz, dan lain-lain. Lihat *Ibid.*, 58

juga menyerahkan panji detasemen tersebut kepadanya. Detasemen ini terdiri dari orang-orang yang menjadi pahlawan kaum muslimin yang terbaik. Mereka antara lain adalah Abu Ubadah Al-Jarrah, Saad bin Abi Waqqash, dan Usaid bin Hudhair.<sup>180</sup>

Majelis umat (lembaga wakil rakyat) aktivitasnya adalah syura (bermusyawarah) dan *muhasabah lil hakim* (mengoreksi tindakan penguasa). Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, sebenarnya dalam hal ini Rasulullah tidak memiliki lembaga khusus secara permanen, tetapi Rasul meminta pendapat kaum muslimin manakala Rasul membutuhkannya. Rasul pernah mengumpulkan para sahabat pada saat perang Uhud lalu meminta pendapat mereka.<sup>181</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, Rasul telah menunjuk orang tertentu dalam mengurus masalah kekayaan, bahkan Rasul menjadikan masalah kekayaan tersebut sebagai masalah yang berdiri sendiri, sama sekali Rasul tidak pernah menjadikan masalah kekayaan tersebut sebagai sebuah struktur, melainkan Rasul menjadikannya sebagai bagian dari struktur yang ada.

Hal ini menunjukkan bahwa para wali yang ditunjuk oleh Rasul ada yang wewenangnya umum meliputi masalah pemerintahan dan kekayaan, juga ada yang

---

<sup>180</sup> Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani bahwa masalah manajemen amir al-jihad yang juga memimpin bidang peperangan, dalam dan luar negeri, dan industri itu karena Rasul dan para khalifah sesudahnya secara langsung memimpin semua bidang itu. Rasul menyiapkan pasukan, mengatur, dan memimpin sendiri urusan pasukan tersebut. Rasul juga mengurus masalah dalam dan luar negeri, bahkan Rasul pernah mengirim seseorang kepada pandai besi di Yaman untuk mempelajari industri persenjataan. Para khalifah sesudah Rasul juga melakukan hal yang sama. Umar bin Khattab telah membuat diwan al-jundi (departemen yang mengurus pasukan) dan mengangkat seorang penanggung jawab untuk mengurus masalah tersebut, yang juga merupakan wewenang panglima perang. Jadi dalam hal ini jelaslah bahwa daulah Islam yang didirikan Rasulullah berdiri atas struktur tersebut. Lihat *Ibid.*, 59.

<sup>181</sup> Rasul juga mengumpulkan mereka ketika ada kasus haditsu ifki (berita bohong tentang tindakan "seorang" Aisyah) lalu Rasul meminta pendapat mereka, bahkan Rasul juga mengumpulkan mereka di luar keperluan tersebut. Hanya saja, sekalipun Rasul mengumpulkan kaum muslimin dan meminta pendapat mereka, namun Rasul dalam musyawarahnya selalu mengajak orang-orang tertentu untuk bermusyawarah. Mereka adalah para pimpinan dan tokoh-tokoh masyarakat, seperti Hamzah, Abu Bakar, Ja'far Umar, Ali Ibn Mas'ud, Salman, Amar, Hudzaifah, Abu Dzar, Miqdad, dan Bilal. Fungsi mereka saat itu adalah layaknya sebagai lembaga syura Rasulullah karena pengkhususan Rasul yang selalu meminta pendapat mereka. Lihat *Ibid.*, hlm.59



wewenangannya khusus yang hanya mengurus masalah pemerintahan atau khusus masalah kekayaan.<sup>182</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, masalah kekayaan bukan merupakan satu struktur yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari tugas kepemimpinan atau kewallian, yang kadang seorang wali dikhususkan untuk mengurus masalah kekayaan selain wali dalam masalah pemerintahan. Kadangkala masalah kekayaan dimasukkan dalam wewenang *wali al-hukmi* (wali yang mengurus masalah pemerintahan). Dalam keadaan apapun, masalah kekayaan itu harus berada di pusat negara dan tidak menjadi bidang khusus. Masalah ini dikembalikan kepada kebijakan Khalifah. Sebab itu, kekayaan adalah bagian dari struktur yang sudah ada, bukan struktur yang berdiri sendiri.<sup>183</sup>

Menurut Taqiyuddin Al-Nabhani, jika negara berhasil menyempurnakan tujuh unsur ini, berarti struktur sudah sempurna. Jika salah satunya tidak terpenuhi, struktur negara kurang sempurna. Meskipun demikian, jika negara Islam kekurangan salah satu unsur-unsur tersebut, tetap dikatakan eksis, dan tidak membahayakan negara, selama unsur khilafah masih ada, sebab khilafah adalah asas dalam negara Islam.<sup>184</sup>

Dari pemaparan tersebut, Taqiyuddin Al-Nabhani berkesimpulan bahwa Rasulullah telah membangun struktur yang khas bagi sebuah negara, dengan bentuk dan

---

<sup>182</sup> Menurut An-Nabhani bahwa Rasul pernah mengutus Amr bin Hazm untuk menjadi wali di Yaman dan memberikan wewenang kepadanya secara umum yang mencakup masalah pemerintahan dan kekayaan, sebagaimana yang tertuang dalam surat yang Rasul sampaikan kepadanya. Rasul juga pernah menganagkat Farwah bin Sail untuk menjadi wali di antara suku Murad, Zubai dan Mudzhij. Rasul mengutus Khalid bin Said bin Ash untuk mengurus masalah zakat (kekayaan). Seorang wali yang wewenangannya khusus mengurus pemerintahan disebut wali as-shalat dan ini merupakan kata yang berkonotasi tertentu (*lafdzun kharaj*), yaitu mengurus semua urusan orang, yang meliputi masalah administrasi, peradilan, politik, perang, ibadah, serta masalah lainnya, kecuali masalah pendapatsn harta kekayaan. Sedangkan wali yang wewenangannya khusus mengurus masalah keuangan disebut wali al-kharaj. Ini berarti meliputi masalah pengumpulan zakat, kharaj tanah, dan sebagainya. Adapun walli yang wewenangannya umum, biasanya disebut wali as-shalat wa al-kharaj. Lihad *Ibid.* hlm. 60.

<sup>183</sup> *Ibid.* hlm. 60

<sup>184</sup> Taqiyuddin Al-Nabhani, *Ad-Daulah Isl .... op. cit.*, hlm. 326.

model tertentu pula. Rasul selalu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan bentuk dan model tersebut hingga Rasul wafat.

Setelah itu, para khalifah mengikuti apa yang telah Rasul tempuh. Mereka memimpin sebuah negara dan pemerintahan sama persis dengan struktur yang telah dibangun oleh Rasul, semuanya itu dilihat dan dengarkan oleh para sahabat. Sebab itu, jelaslah bahwa struktur daulah Islam mengikuti bentuk tersebut.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dalam kitab *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam*, Taqiyuddin Al-Nabhani menetapkan Negara Islam berdiri di atas delapan struktur, yaitu: Khalifah (kepala negara), *Mu'awin Tafwidh* (Pembantu Khalifah Bidang Pemerintahan), *Mu'awin Tanfidz* (Pembantu Khalifah Bidang Administrasi), *Amirul Jihad* (Panglima Perang), *Wali* (Pimpinan Daerah), *Qadli* (Hakim), *Mashalih Daulah* (Departemen), *Majelis Umat* (Lembaga Wakil Rakyat).

Dalil struktur yang ia gunakan di atas adalah *af'al* (perbuatan) Rasulullah saw. Karena ia telah membangun struktur negara dengan bentuk dan model seperti ini. Nabi saw. adalah kepala negara dan ia memerintahkan kepada kaum muslimin agar mengangkat kepala negara, yaitu ketika ia memerintah mereka untuk mengangkat seorang khalifah dan imam.

Untuk keberadaan para *mu'awin* (pembantu khalifah, baik di bidang pemerintahan maupun administrasi) adalah karena Rasulullah saw. telah memilih Abu Bakar dan Umar Bin Khattab sebagai *mu'awin*. Sedangkan dalil tentang wali (pimpinan daerah); dalam hal ini Rasulullah saw. pernah mengangkat para wali di daerah tertentu. Rasul pernah mengangkat Utub Bin Usaid untuk menjadi wali di Makkah setelah penaklukan kota Makkah dan setelah Badzan Bin Sasan memeluk Islam, mengangkatnya untuk menjadi wali di Yaman.

Dalam melaksanakan peradilan, Rasulullah mengangkat para qadli untuk

memberikan keputusan (terhadap sengketa yang terjadi) di tengah-tengah masyarakat. Rasulullah pernah mengangkat Ali Bin Abi Thalib untuk menjadi qadli di Yaman serta Rasyid Bin Abdullah sebagai kepala qadli dan *mahkamah madhalim*. Nabi juga menjadikannya sebagai qadli biasa, ia juga memberikan wewenang kepadanya untuk memutuskan perkara-perkara kedzaliman.

Dalam tata pelaksana pemerintahan untuk mengurus *mashalih daulah* (kepentingan negara), Rasulullah mengangkat para penulis untuk mengurus kepentingan tersebut. Mereka ini layak dirjen-dirjen suatu departemen. Rasulullah saw. pernah mengangkat Mu'aiqib Bin Abi Fatimah sebagai penulis *ghanimah* (rampasan perang) dan Hudzaifah Bin Al Yaman menjadi penulis hasil panen penduduk Hijaz.

Untuk menjaga stabilitas negara dan hal-hal yang secara menejerial termasuk dalam wewenang *amirul jihad* (panglima perang); Rasulullah saw. sendiri secara langsung menjadi panglima, yang memimpin dan mengurus urusan-urusan pasukan. Nabi juga pernah mengangkat panglima perang dalam beberapa peperangan untuk melaksanakan tugas-tugas kepanglimaan.

Adapun dalil tentang *majelis umat* yang kegiatannya adalah *syura* (bermusyawarah) dan *muhasabah lil hakim* (mengoreksi tindakan penguasa) sebenarnya dalam hal ini Rasulullah saw. tidak memiliki lembaga khusus secara permanen, tetapi Rasul meminta pendapat kaum muslimin manakala beliau membutuhkan. Nabi pernah mengumpulkan mereka pada saat perang Uhud lalu meminta pendapat mereka.

Berpedoman atas af'al Rasulullah yang menjadi dasar pembentukan struktur pemerintahan Islam. Rasulullah saw. telah membangun struktur yang khas bagi sebuah

negara, dengan bentuk dan model tertentu pula. Nabi selalu menjalankan pemerintahannya sesuai dengan bentuk dan model tersebut hingga beliau dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Setelah itu, para khalifah beliau mengikuti apa yang telah beliau tempuh. Mereka memimpin sebuah negara dan pemerintahan sama persis dengan struktur yang telah dibangun oleh Rasul, dimana semuanya itu dilihat dan didengarkan oleh para sahabat. Karena itu jelaslah bahwa struktur negara Islam mengikuti bentuk tersebut.

## **B. Saran**

Setelah meneliti lebih lanjut tentang struktur Negara Khilafah dalam kitab *Nidhom al-Hukmi fi al-Islam* karya Taqiyuddin al-Nabhani, penulis ingin memberikan beberapa saran yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua.

- a. Kepada seluruh umat Islam seyogyanya terus menerus menggali hukum-hukum syariah Islam secara mendalam dan berusaha semaksimal mungkin baik tenaga, waktu dan bahkan jiwa sekalipun untuk mengusung penerapan syariah Islam mulai dari individu, keluarga, masyarakat pemerintah bahkan di dunia. Tidak ada pilihan lain bagi seorang Muslim kecuali menerapkan hukum syari'ah Allah SWT. dalam bingkai khilafah serta menerapkan strukturnya yang telah digagas oleh Taqiyuddin al-Nabhani.
- b. Untuk penelitian selanjutnya, penulis menyarankan untuk mengkomparasikan atau membandingkan struktur negara Islam yang digagas oleh Taqiyuddin al-Nabhani dengan konsep struktur negara demokrasi yang banyak diterapkan saat ini.

- c. Menarik untuk penelitian selanjutnya yaitu aspek penerapan struktur negara Islam yaitu Khilafah pada saat ini, kendala-kendala dan hambatan-hambatannya.

## DAFTAR PUSTAKA

A.P. Cowie, *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, New York: Oxford University Press, 1990), edisi ke-4

Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 1*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996

Abdul Majid Abdussalam al-Muhtasib, *Visi dan Paradigma Tafsir Al-Qur'an Kontemporer*, terj. Mohammad Maghfur Wachid, Bangil: al-Izzah, 1997

Abdul Qadim Zallum, *Konspirasi Barat Meruntuhkan Khilafah Islamiyah: Telaah Politik Menjelang Runtuhnya Negara Islam*, terj. Abu Faiz, Bangil: Al-Izzah, 2001

Abdul Qadim Zallum, *Kaifa Hudimat al-Khilafah*, terj. Abu Faiz, Bangil: Al-Izzah, 2001

Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, Beirut: Darul Fikr, 1999, Cetakan I Juz V

Abi Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Hubaib al-Bashari Al-Baghdadi Al-Mawardi, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar Al-Fikr, tt

Abi Ya'la Muhammad, *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994

Abu al-A'la Maududi, *Hukum dan Konstitusi; Sistem Politik Islam*, Penerjemah.Drs. Asep Hikmat, Bandung: Mizan, 1995

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, t.t.

Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Krapyak, 1984, Cet. Ke-1

Alaiddin Koto (et.al), *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2011

Al-Baghdadi, Abdurrahman, "*Mafhûm al-Khâlîfah wa al-Khilâfah fî al-Hadhârah al-Islâmiyah*". Majalah Al-Khilâfah al-Islâmiyah. No 1 Th I. Sya'ban 1415 H/Januari 1995 M, Jakarta: Al-Markaz Al-Istitirati li al-Buhuts al-Islamiyah, 1995

Al-Hafizh Jalaluddin As-Suyuthi, *Tarikh al-Khulafâ*, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Ali Belhaj, *Tanbîh al-Ghâfilîn wa I'lâm al-Hâ'irin bi Anna l'âdah al-Khilâfah min A'zham Wâjibât Hâdzâ ad-Dîn*, Beirut: Darul 'Uqab, 1991

Al-Imam Abu Al-Fida Isma'il Ibnu Katsir Al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu Katsir Juz 1*, Penerjemah. Bahrûn Abu Bakar, L.C, Bandung: Sinar Baru Al-Gensindo, 2000

*al-Munjid fi al-Lughah wa al-'A'lam*, Beirut: Dar al-Masyruq, 2000

Amien Rais, *Cakrawala Islam Antara Cita dan Fakta*, Bandung: Mizan, 1987

- Arief B. Iskandar, *Materi Dasar Islam; Islam Mulai Akar Hingga Daun*, Bogor: al-Azhar Press, 2009
- Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1992, Juz I
- Azyumardi Azra, *Pergulatan Politik Islam*, Jakarta: Paramadina, 1996
- B. Lewis, *The Encyclopedia of Islam*, vol. II, Leiden: E.J. Brill, 1965
- Bernard Lewis, *Muslim Menemukan Eropa*, terj. Ahmad Niamullah Muis, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1988
- Bukhari, *Shahih Bukhari, jilid 3*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995
- Daud Rasyid, *Pembaharuan: Islam dan Orientalisme Dalam Sorotan*, Jakarta: Usamah Press, 1993
- DEPAG RI, *Al-Hikmah, Al-Qur'an dan Terjemah*, Bandung: Diponegoro, 2007
- Dhiya'uddin ar-Rais, *Islam dan Khilafah : Kritik Terhadap Buku Khilafah dan Pemerintahan Dalam Islam*, Ali Abdurraziq, terj. Bandung: Pustaka, 1985
- Dr.Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985, cet. 2, hlm. 625.
- Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik dan Spiritual*, Bogor: Al-Azhar Press, 2004
- Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975
- Hepi Andi Bastoni, *Sejarah Para Khalifah*, Jakarta: Al-Kautsar, 2008
- Hizb at-Tahrir, *Mengenal Hizbut at-Tahrir : Partai Politik Islam Ideologis*, Bogor: Hizb at-Tahrir, 2002
- Hizb at-Tahrir, *Nuqthatul Inthilaq*, terj. Muhammad Maghfur, Depok: Pustaka Thariqul Izzah, 2000
- Ibrahim Anis, *Al-Mu'jam Al-Wasith*, Kairo: Darul Ma'arif, 1972, Juz I
- Ihsan Samarah, *Ma'fhum al-Adalah al-Ijtima'iyah fi al-Fikri al-Islami al-Mu'ashir*, terj. Muhammad Shiddiq al-Jawi, Bogor: Al-Azhar Press, 2003
- Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathu Al-Baari, Syarah Shahih Al-Bukhari*, Riyadh: Maktabah Darussalam, 1997, jilid VIII
- J. Shklar, *Men and Citizens: Rosseau's Social Theory*, London: Cambridge University Press, 1969
- J.J.G. Jansen, *Diskursus Tafsir al-Qur'an Modern*, terj. Hairussalim dan Syarif Hidayatullah, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997



Jalal al-Anshari, *Mengenal Islam; dari A sampai Z*, Penerjemah. Abu Faiz, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004, cet. 1

John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2005, cet. ke-26

M. Masyhur Amin, *NU dan Ijtihad Politik Kenegaraannya*, Yogyakarta: Al-Amin, 1996

Mahmud Al-Khalidi, *Qawaid Nizham Al-Hukmi*, Amman: Al-Maktabah Al-Muhtasib, 1983

*Majalah Al-Waie : Media Politik dan Dakwah*, Edisi No. 30, Bogor: Hizbut Tahrir Indoensia, 2003

Mas'ud An-Nadwi, *Islam dan Sosialisme*, terj. Bahrin Abu Bakar, Bandung: Risalah, 1983

Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998

MR Kurnia, *Menjadi Pembela Islam*, Bogor: Al-Azhar Press, 2005, cet. 5

Muhammad al-Naquib al-Attas, *Islam dan Sekularisme*, terj. Karsidjo Djojosuwarno, Bandung: Pustaka, 1981

Muhammad ibn Abdurrahman ad-Dimasyqi, *Rahmah al-Ummah fi Ikhtilâf al-A'immah*, Beirut: Darul Fikr, 1996, Cetakan I

Muhammad Tahir Azhary, *Negara Hukum; Suatu Studi tentang Prinsip-prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2007

Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, Jakarta: Paramadina, 1997

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993

Muslim, *Shahih Muslim Jilid III*, Qahirah: Dar al-Ummah, 1991

Nashir Farid Muhammad Washil, *Al-Madkhal Al-Wasith, Lidarasati al-Syari'ah al-Islamiyah wa al-Fiqh wa al-Tasyri'*, Mesir: Al-Maktabah Al-Taufiqah, t.t.

Philip Kahitti, *History of Arabs*, Jakarta: Serambi, 2006, cet. 2

Sa'id Abu Jayyib, *al-Qamus al-Fiqhiy*, Suriah: Dar al-Fikr, 1998

Saad Eddin Ibrahim, *Krisis Elit dan Demokratisasi Dunia Arab, Islamika*, Bandung: Mizan, 1997

Setyabudi Daryono, *Mengoreksi Penguasa*, Harian Umum Riau Pos Kolom Opini edisi Jum'at 4 Maret, Riau: Riau Pos, 2011

Shabir Ahmed dan Abid Karim, *The Roots of Nationalism in the Muslim World*, terj. Zettira Nadia Rahma, Bangil : Al-Izzah, 1997

Sheikh Taleb Awadallah, *Kekasih-Kekasih Allah*, t.t: t.p, 2006  
Soehino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2000, edisi ketiga, cet. ke-3

Suha Taji Farouki, "Hizb at-Tahrir al-Islami," *The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995

Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994

Syafiq A. Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Turki*, Jakarta: Logos, 1997

Syeikh Al-Islam Taqiuddin Abu Abbas Ahmad bin Abdu Al-Halim bin Abdussalam bin Taimiyah, *al-Siyasah al-Syari'ah*, Beirut: Dar Al-Fikr Al-Lubnani, 1992

T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970

Taqiuddin al-Nabhani, *al-Daulah al-Islamiyah*, Beirut: Dar al-Ummah, 2002

-----, *Al-Syakhsyah Al-Islamiyah*, Juz II, Beirut: Dar al-Ummah, 2003

-----, *Al-Syakhsyah Al-Islamiyah*, jilid III, Beirut: Dar al-Ummah, 1994

-----, *Al-Tafkir*, Beirut: Maktabah Al-Wai'e, 1973

-----, *Asy-Syakhsyah Al-Islamiyyah*, jilid I, Beirut: Dar al-Ummah, 1994

-----, *at-Takattul al-Hizbiy*, terj. Zakaria dkk, Jakarta: Pustaka Thariqul Izzah, 2000

-----, *Dukhul al-Mujtama'*, Al-Quds: Hizb at-Tahrir, 1958

-----, *Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam*, terj. Muhammad Maghfur Wachid, Surabaya: Risalah Gusti, 1996, Cet. II

-----, *Muqaddimah al-Dustur*, Beirut: Maktabah Al-Wai'e, 1963

-----, *Nizham Al-Hukmi fi Al-Islam*, Beirut: Dar-Al-Ummah, 1990

-----, *Nizham al-Islam*, Beirut: Dar al-Ummah, 2001

-----, *Sistem Khilafah: Konsep Kenegaraan Dan Kepemimpinan Umat Islam Seluruh Dunia*, terj. M. Al-Khaththath dkk, Jakarta: Khazanah Islam, 1995

Tim ICCE UIN Jakarta, *Pendidikan Kewargaan (Civic Education); Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Kencana, 2005

Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shahih Juz 4*, Beirut: Dar al-Fikr, 1988

Wahbah Al-Zuhaili, *Fiqhu Al-Islam wa Adillatuhu*, Damsyiq: Dar al-Fikr, 1985, cet.  
2

Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, *'Alamat Qiyamat as-Sa'ah as-Sugra wa al-Kubra*, Beirut: Dar Ibn Hazm, 1992

Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, *Ar-Rahmah al-Muhdat fi Hadl as-Salat wa 'Uqubat Tariqiha*, Beirut: Dar bin Hazm, 1992

Yusuf bin Ismail Al-Nabhani, *Syawahid al-Haqq fi al-Istighasah bi Sayyid al-Khalq*, Beirut: Dar al-Fikr, 1983

Yusuf Qardhawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, terj. Kathur Suhardi, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998